



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2016 – 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
9. Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD berisi penjabaran visi, misi dan program Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 9 Desember 2015 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2016 sampai tahun 2021.

Pasal 3

Sistematika Perubahan RPJMD disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. BAB IX : Penutup.

Pasal 4

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

Perubahan RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. Hasil RPJMD
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian tahunan tetapi tidak merubah target akhir RPJMD maka perubahan target dimaksud ditetapkan dalam RKPD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal RPJMD Tahun 2016 – 2021 telah berakhir masa berlakunya, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, Program Prioritas Nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bahwa RPJMD Kabupaten/Kota yang tidak selaras dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

T.S. ARIF FADILLAH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli 2004.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah berupa peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan dengan menuangkannya dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Kepulauan Riau membutuhkan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

RPJMD dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 untuk memperbaiki rumusan tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikator kinerja sesuai dengan dengan struktur organisasi yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021 Pada Tanggal 12 Februari 2016. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 264 ayat 5 dinyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB), beberapa rumusan tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan dan program RPJMD sebagaimana tercantum dalam Bab V RPJMD kurang sesuai. Selain itu, dalam RPJMD juga terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu diperbaiki agar memenuhi kriteria indikator yang baik. Terdapat pula prioritas Gubernur yang perlu diakomodir dalam RPJMD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan anggaran masing-masing perangkat daerah. Selain itu, keluar pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang salah satunya mengatur tentang Penyusunan RPJMD. Mendasarkan pada hasil evaluasi dan ketentuan diatas, maka dilakukan perubahan RPJMD guna melakukan penyesuaian dengan struktur organisasi yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sangat penting keberadaannya karena merupakan rencana pembangunan berwawasan kedepan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 yang sesuai dengan kondisi potensi, permasalahan dan isu strategis, serta tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. RPJMD ini mengakomodir

kepentingan semua stakeholder pembangunan yang dijabarkan secara operasional dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, selaras dengan pembangunan jangka panjang daerah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. RPJMD perlu disusun secara komprehensif agar memudahkan penjabarannya kedalam dokumen perencanaan tahunan, dan memudahkan dalam proses evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau bisa efektif, efisien, tepat sasaran sehingga mampu mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, mengarah pada percepatan pembangunan Daerah tertinggal dan wilayah perbatasan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi : tahap perumusan rancangan awal RPJMD, konsultasi publik untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan terhadap substansi RPJMD, penyepakatan kebijakan umum dan program pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD, penyusunan rancangan RPJMD; pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD; perumusan rancangan akhir RPJMD; dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019, dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi sekitar (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi

Kalimantan Barat). Hal ini dilakukan guna mewujudkan keselarasan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu lima tahun memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ini memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pembangunan pada tahap RPJPD ke-3 (2016-2020).

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 mempedomani RPJMN Tahun 2015-2019 terutama visi, misi, tujuan dan sasaran pokok RPJMN, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan arah pengembangan wilayah Pulau Sumatera.

3. RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 mempedomani RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, terutama terkait dengan rencana pola ruang dan program pengembangan wilayah.

4. Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat).

5. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor, seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan hasil kajian seperti Perencanaan Bidang Pendidikan dan Perencanaan Bidang Kesehatan.

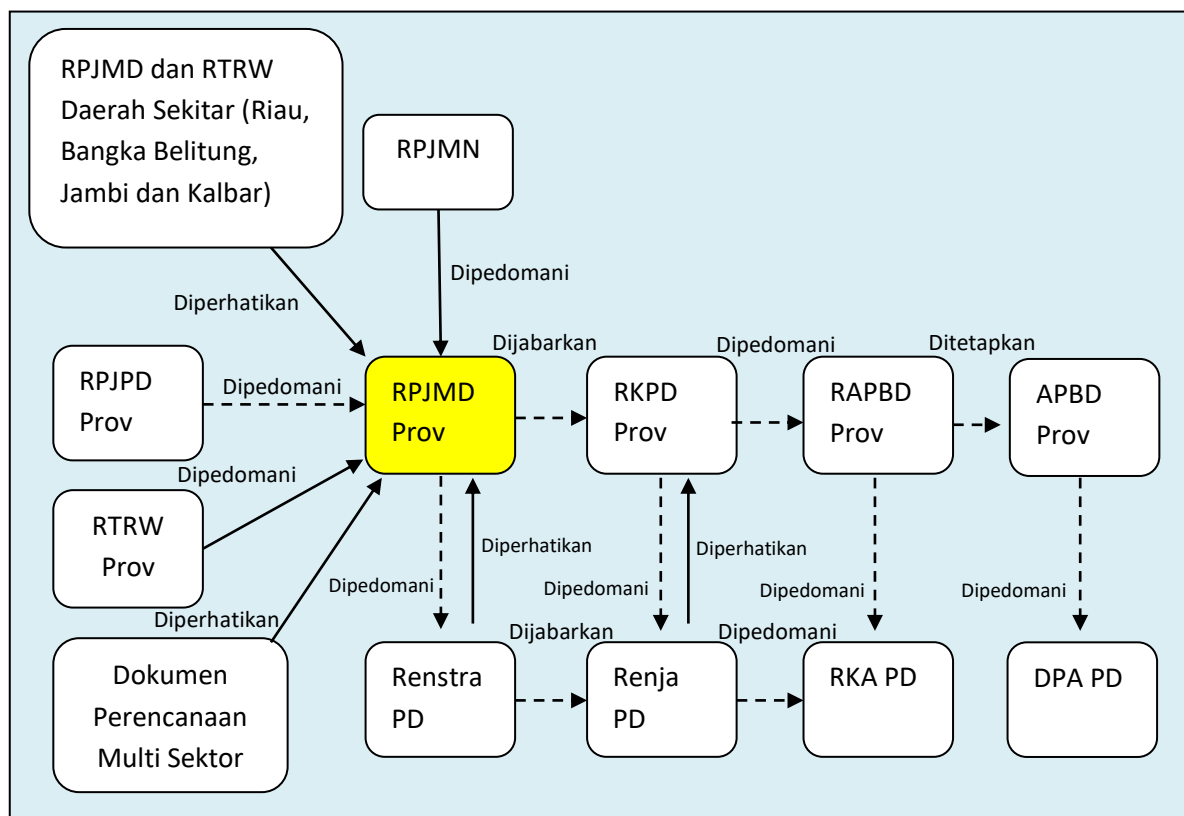
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 akan dijabarkan dalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Secara ringkas keterkaitan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai/melaksanakan visi, misi dan program Kepala Daerah dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memperbaiki substansi RPJMD agar selaras dengan prioritas Gubernur Kepri, hasil evaluasi Kemen-PAN-RB, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan struktur organisasi perangkat daerah yang baru.

Adapun tujuan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagai acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen

- perencanaan lima tahunan perangkat daerah, dan RKPd sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan;
- c. Memberikan arah pengembangan wilayah bagi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang gambaran kondisi daerah dilihat dari Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, berisi tentang analisis lingkungan strategis, permasalahan pembangunan, dan isu strategis daerah.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta target kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan, berisi tentang kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, serta arah pengembangan wilayah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, berisi tentang program prioritas RPJMD dan seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif per program.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Bab IX Penutup, berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

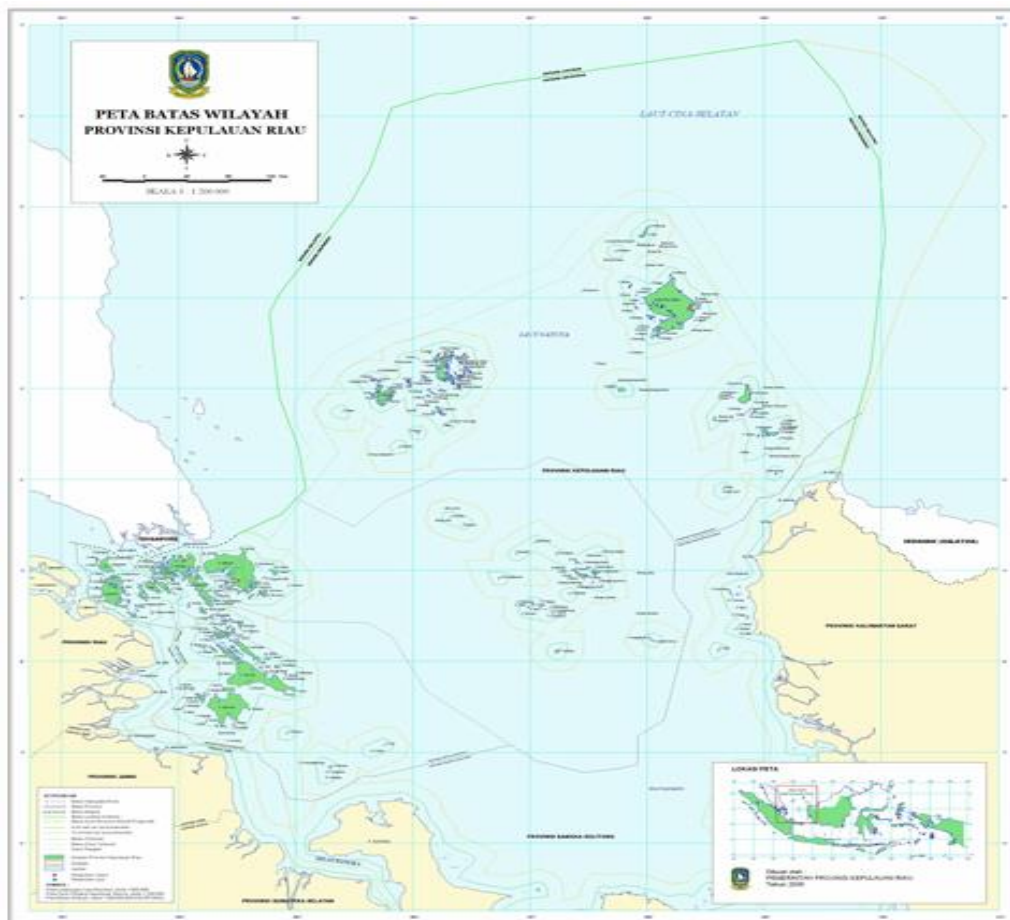
2.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

NO	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km²)
1.	Kabupaten Bintan	1.318,21
2.	Kabupaten Karimun	912,75
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	Total	8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan
Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km²)
1	Kabupaten Bintan	102.964,08
2	Kabupaten Karimun	4.698,09
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kota Batam	3.675,25
5	Kota Tanjungpinang	149,13
6	Kabupaten Lingga	43.339,00
7	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian "Pulau" menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016
berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Namun demikian belum ada rincian penambahan pulau tersebut.

2.1.3 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	6 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika
Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan (Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)

2.1.4 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur,

batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari *organosol*, *glei* humus,

podsolik merah kuning, *latosol* dan *aluvial*. Jenis tanah *Organosol* dan *glei* humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulkdensity* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah *Organosol* tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah *Latosol*, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah *Aluvial* yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung *glei* dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Kabupaten / Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
1	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar	-	Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	-
2	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.	Nuraja, dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.	-
3	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak	-
4	Bintan	Logo, Ekang, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar.	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal, Anculai, Kangboi, dan Sekuning	Danau Kolong Gunung Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang
5	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapi, Papan, Buru, Lebu, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong	-	Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro	Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan

No	Kabupaten / Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
				(Pulau Moro)	
6	Tanjungpinang	Dompak, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulai, Sei Timun, Dompak	-
7	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016

2.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,8 °C dan rata-rata terendah di Dabo 26,8°C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Dabo (Lingga) sebesar 87,5%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 81,73%. Curah hujan tertinggi di Tanjungpinang sebanyak 287,23 mm³ sedangkan curah hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 147,03 mm³. Tekanan Udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,69mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.010,0 mb. Kecepatan Angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot, terendah di Dabo (Lingga) sebesar 3,25 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 65,16%, terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 22,50%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2016

No	Uraian	Karimun	Ranai (Natuna)	Dabo (Lingga)	Tarempa (Kepulauan Anambas)	Hang Nadim (Batam)	Tanjungpinang
1	Suhu (°C)						
	Maksimum	33,4	34,6	32,5	36,40	34,60	34,4
	Minimum	24,2	21,4	21,0	21,40	22,2	22,2
	Rata-Rata	28,8	27,9	26,8	28,28	28,08	27,38

No	Uraian	Karimun	Ranai (Natuna)	Dabo (Lingga)	Terempa (Kepulauan Anambas)	Hang Nadim (Batam)	Tanjungpinang
2	Kelembaban Udara (persen)						
	Maksimum	99	100	98	100	100	100
	Minimum	49	51	75	53	47	45
	Rata-Rata	81,8	86,4	87,5	81,8	81,73	83
3	Tekanan Udara (mb)	1.010,0	1.010,57	1.010,58	1.009,79	1.011,69	1.010,74
4	Kecepatan Angin (knot)	8,92	3,66	3,25	4,33	5,14	5,42
5	Curah Hujan (mm ³)	183,9	222,35	264,98	147,03	192,15	287,23
6	Penyinaran Matahari (persen)	55,3	65,16	48,08	53,92	22,50	38,25

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas 207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan

Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah *hinterland*. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun terjadi sehingga nelayan berhenti melaut.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan dan Lingga; Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas; Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arahan Pengembangan

Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasiskan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisataaan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- 1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- 2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- 3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- 4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- 5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- 6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- 7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di

Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Indonesia belum memiliki kedaulatan negara ditandai dengan kapal-kapal yang melewati ruang laut Indonesia, tetapi melapor dan membayar retribusi ke Malaysia dan Singapura. Juga potensi 37 kapal tenggelam (harta karun) di sekitar Pulau Bintan, ditengah Laut Natuna, serta adanya kawasan laut tertutup sebagai tempat pembuangan amunisi militer. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral.

2.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor/Gerakan Tanah

Kawasan rawan tanah longsor / gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki kriteria berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Kawasan tanah longsor ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang penurunan muka tanahnya sedang sampai tinggi. Kawasan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat bahaya sedang. Kawasan ini terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan kawasan terkena pemotongan lereng di Pulau Karimun dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, Pulau Singkep di Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara total luas bahaya tanah longsor sebesar 149.798 hektar. Berikut ini disajikan potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	13.397	Tinggi
2	Bintan	3.061	Sedang
3	Natuna	26.919	Tinggi
4	Lingga	49.963	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	48.922	Tinggi
6	Batam	7.468	Tinggi
7	Tanjungpinang	68	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		149.798	TINGGI

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Berdasarkan Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020 diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat bahaya gempa bumi dengan luas bahaya mencapai 799,838 hektar. Tabel 2.10 berikut ini disajikan perincian potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.10.
Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	88,931	Rendah
2	Bintan	130,314	Rendah
3	Natuna	196,386	Rendah
4	Lingga	214,712	Rendah
5	Kepulauan Anambas	59,014	Rendah
6	Batam	96,025	Rendah
7	Tanjungpinang	14,456	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		799,838	Rendah

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang akibat angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari. Kriteria kawasan ini adalah kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan matahari. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Arah kebijakan kawasan rawan gelombang pasang adalah melalui pengamanan pantai dan penanaman *mangrove* untuk meredam dan agar terlindung dari gelombang pasang (rob). Gelombang pasang ini juga mengakibatkan terjadinya abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

- a. Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang \pm 4 km, Pantai Pelawan sepanjang \pm 3 km, Pantai Pongkar sepanjang \pm 6 km, Pantai Tanjung Sebatak sepanjang \pm 4 km dan Pantai Sepedas sepanjang \pm 4 km.
- b. Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang \pm 5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang \pm 7 km, Pantai Urung sepanjang \pm 3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang \pm 3 km.
- c. Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang \pm 10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang \pm 5 km, Pantai Sei Kecil - Sakera sepanjang \pm 10 km, Pantai Lobam sepanjang \pm 4 km, Pantai Senggarang sepanjang \pm 4 km, Pantai Penyengat sepanjang \pm 8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang \pm 8 km, Pantai Pulau Dompak, Pantai Dompok Seberang sampai Tanjung Mochok serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.

- d. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang \pm 4 km, Pantai Kote sepanjang \pm 3 km, Pantai Jagoh sepanjang \pm 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang \pm 4 km
 Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang \pm 3 Km, Pantai Punggur sepanjang \pm 500 m, Pantai Nongsah sepanjang \pm 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang \pm 10 km.
- e. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang \pm 8 km, Pantai Tanjung sepanjang \pm 4 km.

Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 125.040 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan bahaya kategori Sedang, dengan perincian pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	16.310	Sedang
2	Bintan	16.016	Sedang
3	Natuna	16.024	Sedang
4	Lingga	32.359	Sedang
5	Kepulauan Anambas	19.817	Sedang
6	Batam	22.745	Sedang
7	Tanjungpinang	1.769	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		125.040	Sedang

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Prov. Kepri 2016-2020

c. Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 478.906 hektar. Untuk Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Kabupaten Anambas dan Natuna termasuk kategori ringan. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12.
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	60.696	Sedang
2	Bintan	95.717	Tinggi
3	Natuna	151.087	Sedang
4	Lingga	103.560	Sedang

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
5	Kepulauan Anambas	1.162	Sedang
6	Batam	54.975	Tinggi
7	Tanjungpinang	11.709	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		478.906	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Potensi bencana banjir bandang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, dengan luasan mencapai 6.886 hektar, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13.
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Natuna	6.327	Tinggi
2	Kepulauan Anambas	559	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		6.886	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

d. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan angin puting beliung ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Semua kabupaten/kota menjadi kawasan rawan bencana angin puting beliung.

e. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan kategori tinggi dengan luasan mencapai 409.760 hektar, dengan perincian pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	20.051	Tinggi
2	Bintan	51.372	Tinggi
3	Natuna	120.376	Tinggi
4	Lingga	155.443	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	39.773	Tinggi
6	Batam	20.789	Tinggi
7	Tanjungpinang	1.956	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		409.760	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

2.1.8 Kondisi Demografis

Berdasarkan database kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 1.827.234 jiwa, dengan perincian seperti terlihat pada Tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 (Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Kabupaten Bintan	141.415
2.	Kabupaten Karimun	237.720
3.	Kabupaten Natuna	73.360
4.	Kabupaten Lingga	91.205
5.	Kab. Kep. Anambas	42.153
6.	Kota Tanjungpinang	204.194
7.	Kota Batam	1.037.187
Provinsi Kepulauan Riau		1.827.234

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sebanyak 2.028.169 jiwa, Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 1.236.399 jiwa sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 40.921 jiwa Secara rinci jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016 (Data BPS)

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Karimun	218.475	220.882	223.117	225.298	227.277
2	Bintan	147.212	149.120	151.123	153.020	154.584
3	Natuna	71.454	72.527	73.470	74.520	75.282
4	Lingga	87.482	87.867	88.274	88.591	88.971
5	Kepulauan Anambas	38.833	39.374	39.892	40.414	40.921
6	Kota Batam	1.047.534	1.094.623	1.141.816	1.188.985	1.236.399
7	Kota Tanjungpinang	194.099	196.980	199.723	202.215	204.735
	Provinsi Kepulauan Riau	1.805.089	1.861.373	1.917.415	1.973.043	2.028.169

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2017

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data BPS tergolong cukup tinggi, dengan rata-rata dari 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar 3,01%, terutama dikonstruisikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai rata-rata sebesar 4,32%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota

Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan rata-rata sebesar 0,44%. Secara rinci pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota tercantum pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Karimun	1,08	1,10	1,01	0,98	0,88	1,01
2	Bintan	1,49	1,30	1,34	1,26	1,02	1,28
3	Natuna	1,46	1,50	1,30	1,43	1,02	1,34
4	Lingga	0,52	0,44	0,46	0,36	0,43	0,44
5	Kepulauan Anambas	1,63	1,39	1,32	1,31	1,25	1,38
6	Kota Batam	4,68	4,50	4,31	4,13	3,99	4,32
7	Kota Tanjungpinang	1,47	1,48	1,39	1,25	1,25	1,37
	Provinsi Kepulauan Riau	3,22	3,12	3,01	2,90	2,79	3,01

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2017

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar 191 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 855 jiwa/km² selanjutnya Kota Batam sebesar 787 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Natuna dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 27 jiwa/Km². Terlihat peningkatan kepadatan penduduk Kota Batam dan Tanjungpinang sangat cepat dalam kurun waktu tahun 2012-2016. Secara rinci kepadatan penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016 (Jiwa/km²)

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Karimun	143	145	146	147	149
2	Bintan	85	86	87	88	89
3	Natuna	25	26	26	26	27
4	Lingga	41	41	42	42	42
5	Kepulauan Anambas	61	62	63	68	69
6	Batam	667	697	727	757	787
7	Tanjungpinang	810	822	834	844	855
	Provinsi Kepulauan Riau	170	175	180	186	191

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Riau Tahun 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010. Pada tahun 2016 tercatat PDRB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 216.579.898,65 juta rupiah.

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 PDRB ADHB menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19.

**PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.267.719,69	5.816.517,51	6.449.933,61	7.076.954,61	7.678.381,65
2.	Pertambangan dan Penggalian	23.949.858,03	26.035.580,15	28.435.900,16	31.400.494,41	33.098.369,19
3.	Industri Pengolahan	55.871.325,78	63.641.751,59	69.122.837,62	74.966.239,65	80.842.352,97
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1.723.596,59	1.918.467,49	2.052.645,91	2.218.908,69	2.468.475,52
5.	Pengadaan Air	185.294,83	198.348,43	211.310,97	233.263,72	252.516,79
6.	Konstruksi	25.458.005,74	29.380.038,33	33.227.469,25	36.456.418,99	38.848.425,33
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.942.789,76	11.048.141,03	13.197.856,42	15.424.150,62	18.066.678,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.915.029,38	4.609.383,24	5.374.602,16	6.260.554,83	7.070.853,50
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2.689.943,71	3.086.309,54	3.481.014,94	3.951.428,19	4.358.139,36
10.	Informasi dan Komunikasi	2.664.806,21	2.870.445,47	3.255.463,72	3.603.548,78	3.969.123,83
11.	Jasa Keuangan	3.928.677,74	4.366.636,95	4.839.369,57	5.280.736,85	5.792.538,38
12.	Real Estate	2.158.659,94	2.367.493,97	2.639.896,65	2.863.610,50	3.171.440,89
13.	Jasa Perusahaan	6.974,64	7.843,47	8.324,78	9.149,72	10.095,46
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.182.042,33	3.722.466,75	4.038.035,70	4.627.746,89	5.158.221,21
15.	Jasa Pendidikan	1.955.542,67	2.117.871,33	2.286.143,62	2.569.031,05	2.931.368,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.298.448,05	1.390.847,23	1.518.619,01	1.737.396,42	1.882.147,27

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
17.	Jasa Lainnya	642.077,03	683.428,86	740.558,46	858.956,72	980.770,38
	Produk Domestik Regional Bruto	144.840.792,12	163.261.571,34	180.879.982,55	199.538.590,65	216.579.898,65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

PDRB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2016 sebesar 162.922.503,76 Juta rupiah. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 PDRB ADHK menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010
Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.794.169,87	5.000.008,60	5.378.146,89	5.689.215,64	5.977.994,85
2.	Pertambangan dan Penggalian	21.413.423,15	22.111.055,66	23.270.776,91	25.417.326,60	26.933.154,98
3.	Industri Pengolahan	49.155.550,98	53.173.702,65	56.338.040,86	59.498.187,44	61.497.861,06
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1.127.554,32	1.209.173,76	1.326.220,54	1.400.515,50	1.523.109,16
5.	Pengadaan Air	176.915,78	184.030,56	187.764,95	193.107,88	203.257,26
6.	Konstruksi	21.642.830,81	23.802.363,82	25.954.827,37	26.871.948,06	28.073.932,69
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.067.591,19	9.955.713,98	10.803.002,51	11.738.601,21	12.858.549,08
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.456.038,74	3.717.755,53	3.939.817,08	4.161.122,80	4.448.870,33
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2.474.831,23	2.665.832,22	2.842.911,70	3.002.926,03	3.159.140,69
10.	Informasi dan Komunikasi	2.700.316,60	2.874.475,31	3.076.753,95	3.230.700,81	3.469.615,17
11.	Jasa Keuangan	3.536.126,00	3.750.613,07	3.967.868,85	4.087.054,71	4.323.698,02
12.	Real Estate	1.997.111,08	2.110.288,55	2.245.189,36	2.340.429,48	2.443.353,94
13.	Jasa Perusahaan	6.927,12	7.436,81	7.587,15	7.797,54	8.279,22
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.892.262,74	3.028.831,00	3.150.357,93	3.386.486,65	3.619.466,63
15.	Jasa Pendidikan	1.772.834,20	1.827.200,96	1.905.304,82	2.022.476,68	2.201.366,09
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.230.373,16	1.250.994,39	1.311.567,52	1.405.320,33	1.467.870,22
17.	Jasa Lainnya	590.111,04	594.374,36	619.096,20	659.666,81	712.984,39
	Produk Domestik Regional Bruto	128.034.968,02	137.263.851,23	146.325.234,58	155.112.884,16	162.922.503,76

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2012–2016 didominasi oleh tiga sektor utama yaitu : sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor industri pengolahan fluktuatif pada kisaran antara 37,33%-39,02%. Kontribusi sektor konstruksi juga fluktuatif pada kisaran antara 17,03%-18,21%. Sementara itu kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menurun dari sebesar 16,54% pada tahun 2012 menjadi 15,28% pada tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 2.21.

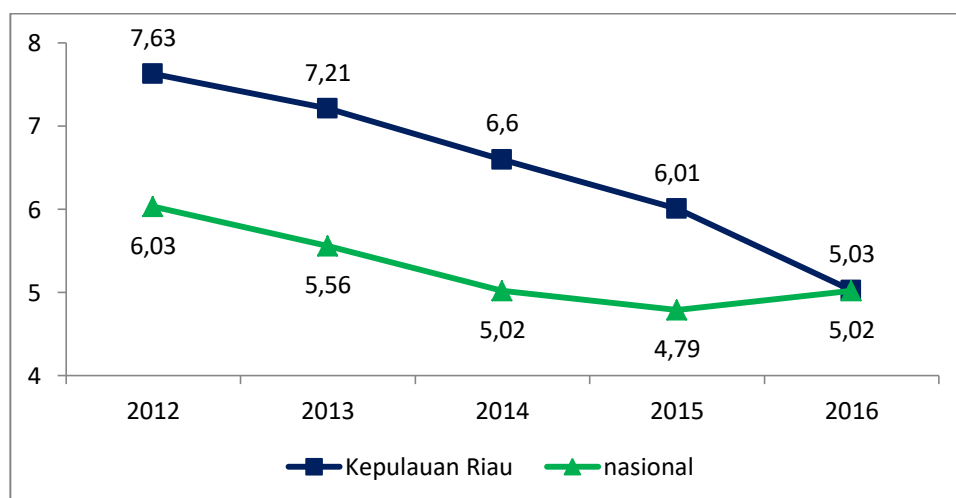
Tabel 2.21.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2012-2016 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	3,57	3,40	3,57	3,55
2.	Pertambangan dan Penggalian	16,54	15,96	15,26	14,27	15,28
3.	Industri Pengolahan	38,57	39,02	38,70	38,63	37,33
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara DingindanProduksi Es	1,19	1,17	1,05	1,09	1,14
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
6.	Konstruksi	17,58	18,11	18,21	17,03	17,94
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,86	6,64	7,02	8,03	8,34
8.	Transportasi dan Perhubungan	2,70	2,80	3,37	3,22	3,26
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,86	1,89	2,32	2,16	2,01
10.	Informasi dan Komunikasi	1,84	1,76	1,71	1,87	1,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,67	2,65	2,60	2,67
12.	Real Estate	1,49	1,45	1,44	1,48	1,46
13.	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	2,20	2,28	2,27	2,45	2,38
15.	Jasa Pendidikan	1,35	1,30	1,25	1,26	1,35
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0,90	0,85	0,83	0,85	0,87
17.	Jasa Lainnya	0,44	0,42	0,41	0,45	0,45
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,63% terus menurun menjadi 5,03% pada tahun 2016. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan

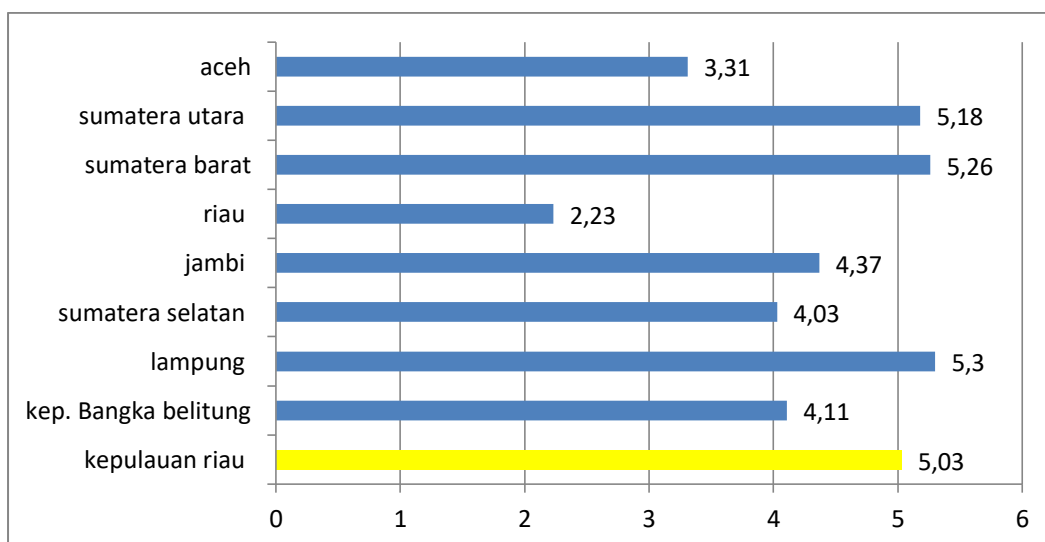
Riau masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Secara lengkap perbandingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Pusat Tahun 2017

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

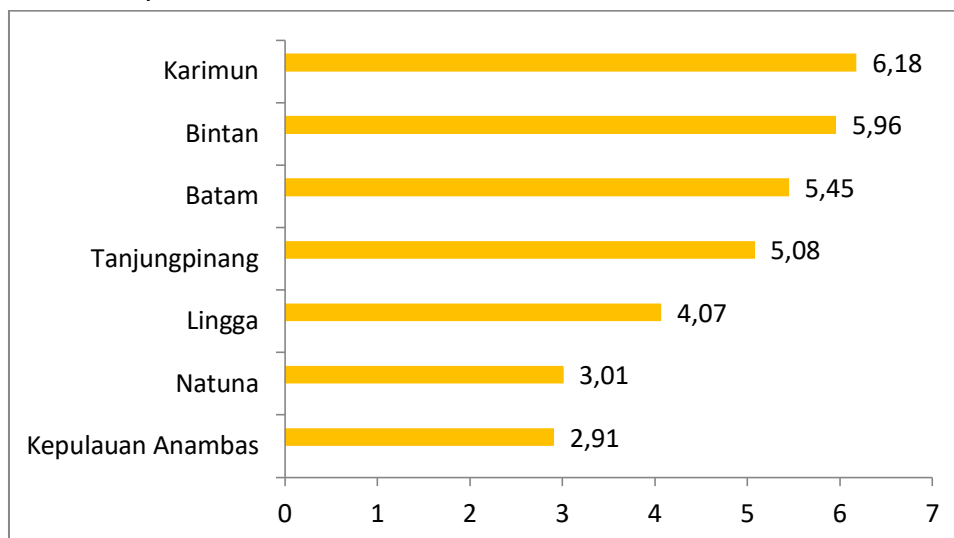
Dibandingkan dengan provinsi lain di Wilayah Sumatera, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi keempat setelah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung. Perbandingan pertumbuhan ekonomi diantara provinsi di wilayah Sumatera, terlihat pada Gambar 2.3.



Sumber: BPS Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2017

Gambar 2.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (%)

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 6,18%, selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 5,96% dan Kota Batam sebesar 5,45%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,91%, seperti terlihat pada Gambar 2.4.

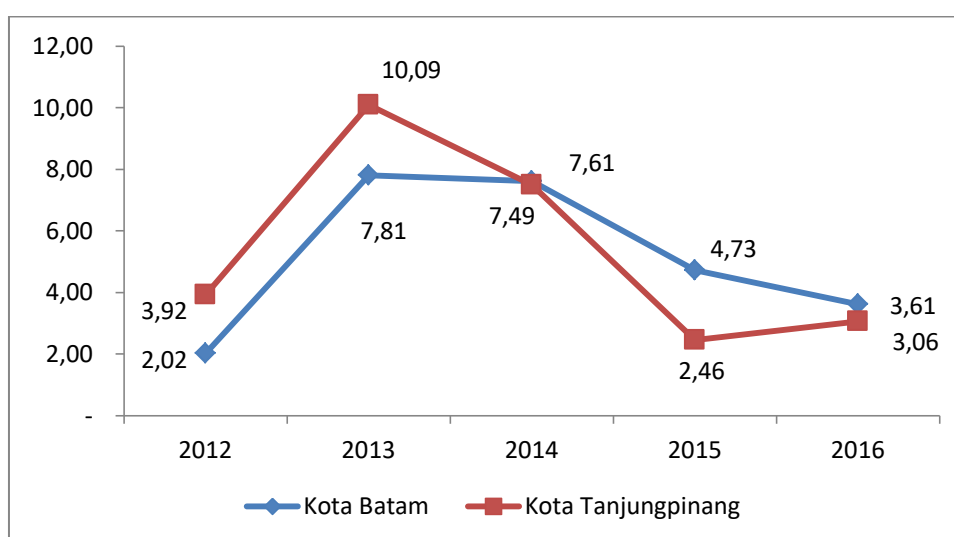


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (%)

B. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Laju inflasi year to year tahun 2016 di Kota Batam sebesar 3,61%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kota Tanjungpinang sebesar 3,06%. Perkembangan laju inflasi di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.5 Laju Inflasi di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016 (%)

Berdasarkan Gambar 2.5 diatas, terlihat bahwa inflasi di Provinsi Kepulauan Riau selama 2012-2016 sangat fluktuatif (antara 2,02% – 10,09%) dan sangat dominan dipengaruhi oleh inflasi di Kota Batam karena jumlah penduduk terbesar di Batam dan menjadi penyumbang aktivitas perekonomian terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Inflasi Kepri pada 2016 sebesar 3,53% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi tahun sebelumnya sebesar 4,40% (yoy), juga dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $4 \pm 1\%$ (yoy). Capaian inflasi yang relatif rendah tersebut ditopang oleh tingkat inflasi komoditas volatile food dan komoditas inti yang relatif terkendali, juga tidak terlepas dari dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sepanjang 2016. Secara spasial, laju inflasi Batam 3,79% (yoy) lebih tinggi dibanding Tanjungpinang sebesar 3,10% (yoy). Pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau perlu terus difokuskan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus dioptimalkan dengan fokus utama menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur logistik pangan serta terus mendorong ketahanan pangan daerah dengan mengacu pada roadmap pengendalian inflasi Provinsi Kepulauan Riau.

C. PDRB per Kapita

PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 106.785 ribu atau. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 49.644 ribu. Perkembangan PDRB per kapita terlihat pada Tabel 2.22.

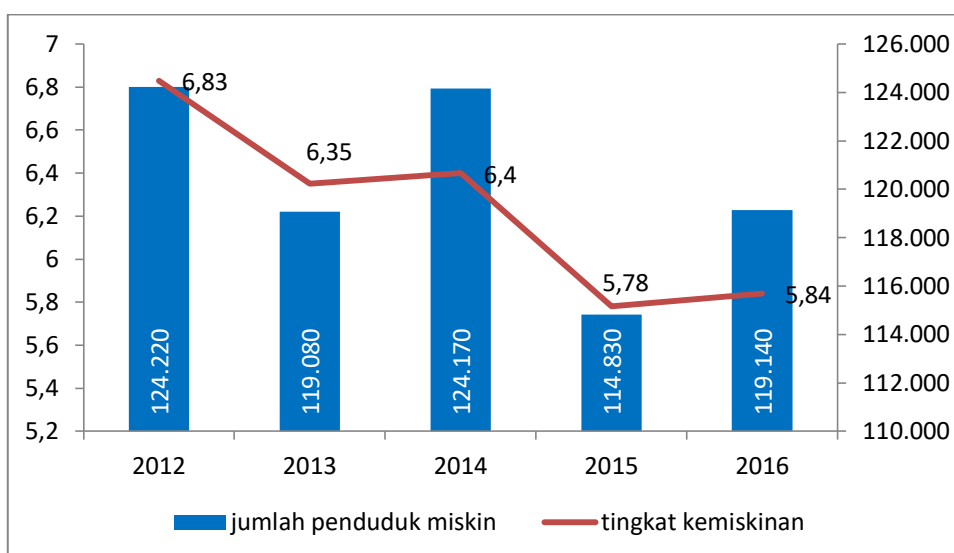
Tabel 2.22.
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp ribu)	49.644	87.630	95.400	103.030	106.785

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

D. Persentase Penduduk Miskin

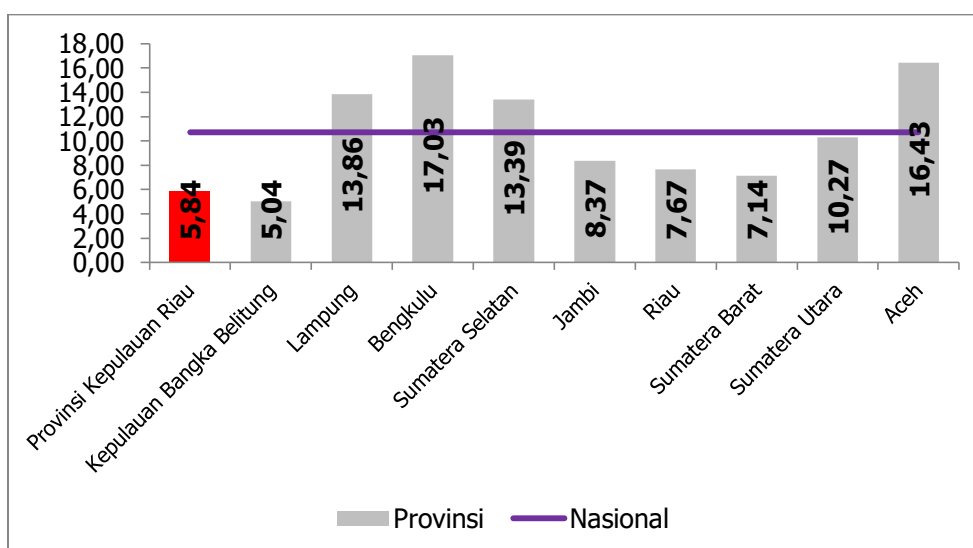
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir (2012-2016), yaitu dari sebesar 6,83% pada tahun 2012 menjadi 5,84% pada tahun 2016. Dalam kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 0,99%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya. Gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016 (September)

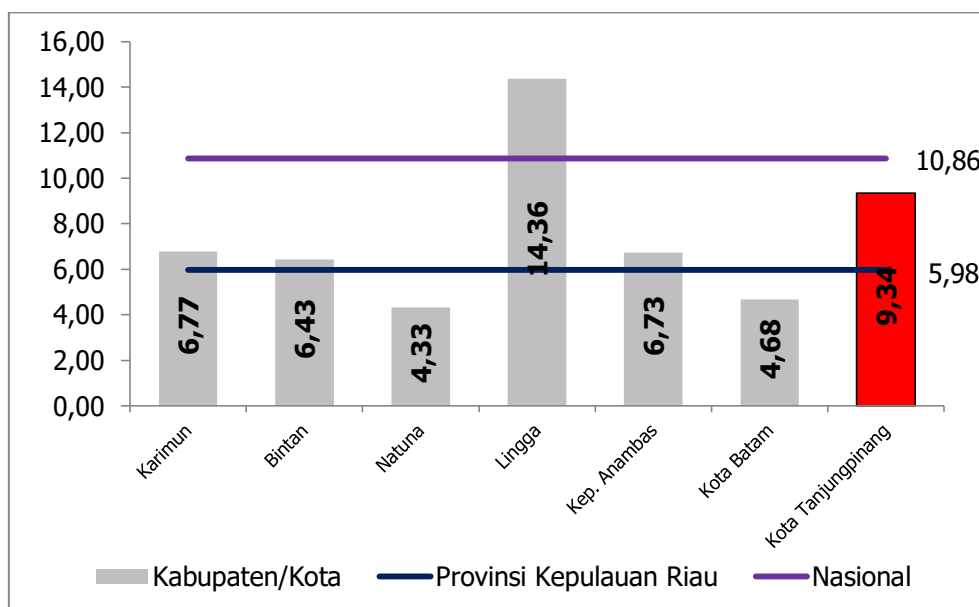
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 5,84%, lebih baik dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 10,70%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan pada Gambar 2.7.



Sumber : BPS Pusat Jakarta Tahun 2017

Gambar 2.7 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2016 (September)

Penyebaran kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 bulan maret, diketahui tertinggi di Kabupaten Lingga sebesar 14,95%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,24% dan Nasional sebesar 11,22%. Sementara itu tingkat kemiskinan tertinggi kedua berada di Kota Tanjungpinang sebesar 9,56%, berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan dibawah rata-rata nasional sebesar 11,22%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.8 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 (maret) (%)

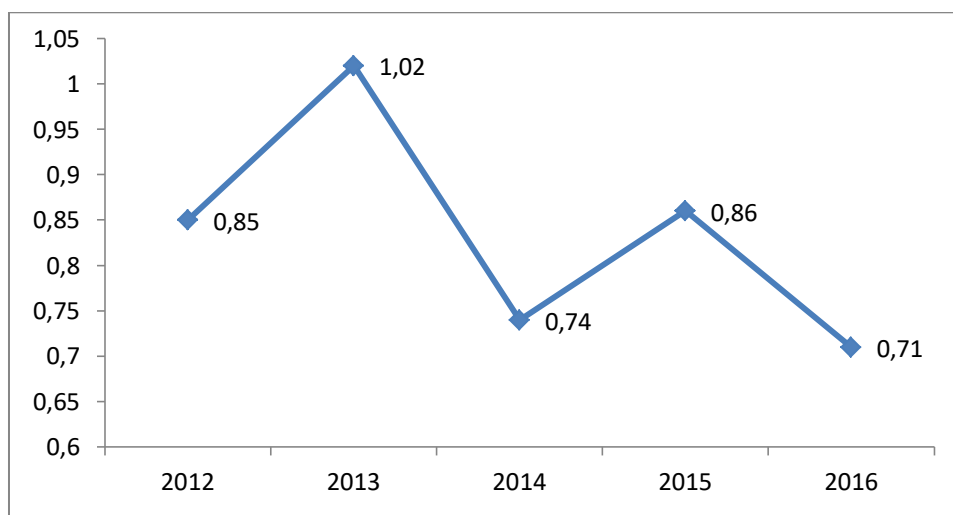
Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat sebanyak 396.889 jiwa (20,12%) penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah. Jumlah terbanyak di Kota Batam, dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23.
Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah
1	Kabupaten Bintan	36.288
2	Kabupaten Karimun	55.123
3	Kabupaten Natuna	15.872
4	Kota Batam	211.670
5	Kota Tanjungpinang	40.710
6	Kabupaten Lingga	28.570
7	Kabupaten Kep. Anambas	8.656
	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah	396.889
	Jumlah Penduduk Kepri	1.973.043
	Persentase Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah	20,12

Perlunya di tahun-tahun berikutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi program-program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota yang lebih diarahkan pada pembangunan perdesaan di wilayah tertinggal, mengembangkan sarana dan prasarana dasar (jalan, jembatan, pelabuhan desa) untuk mempermudah angkutan dan distribusi barang dan jasa dari kabupaten/kota ke pusat-pusat aktivitas perekonomian daerah. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perdesaan, maka perlu tindak lanjut pemberdayaan perempuan di perdesaan, pengembangan usaha mikro dan kecil termasuk usaha non formal dan mengembangkan akses permodalan masyarakat berbasis pada potensi lokal.

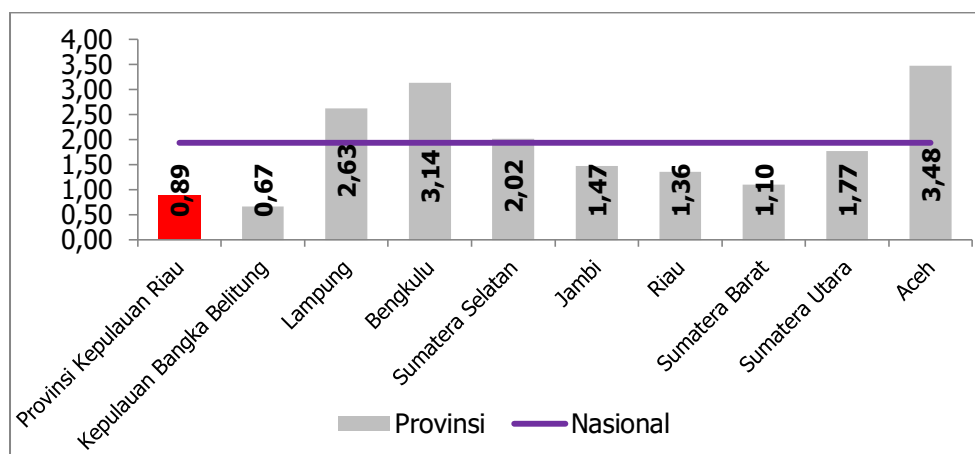
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*). Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang sangat rendah, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dekat dengan garis kemiskinan. P1 Provinsi Kepulauan Riau menurun dari 0,85 pada tahun 2012 menjadi 0,71 pada tahun 2016. Dengan menurunnya P1 di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan setiap tahunnya semakin menurun. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016 (September)

Dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau terendah kedua setelah Bangka Belitung. Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.10.

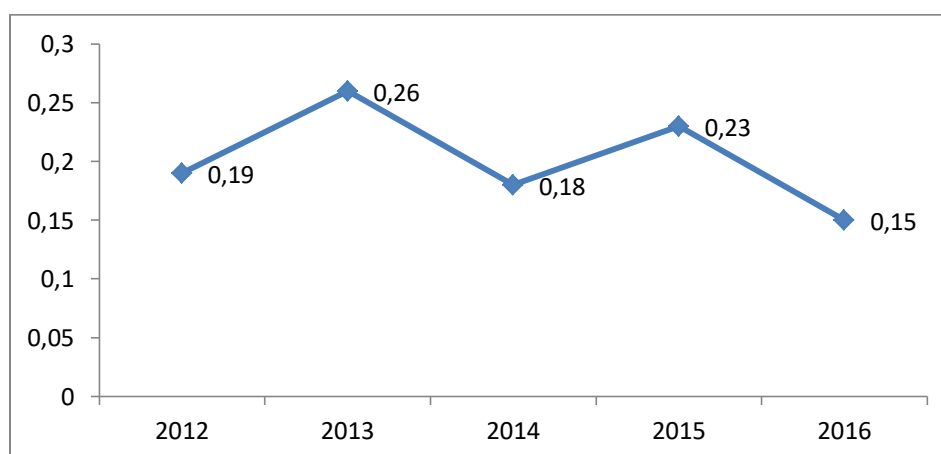


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.10 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (Maret)

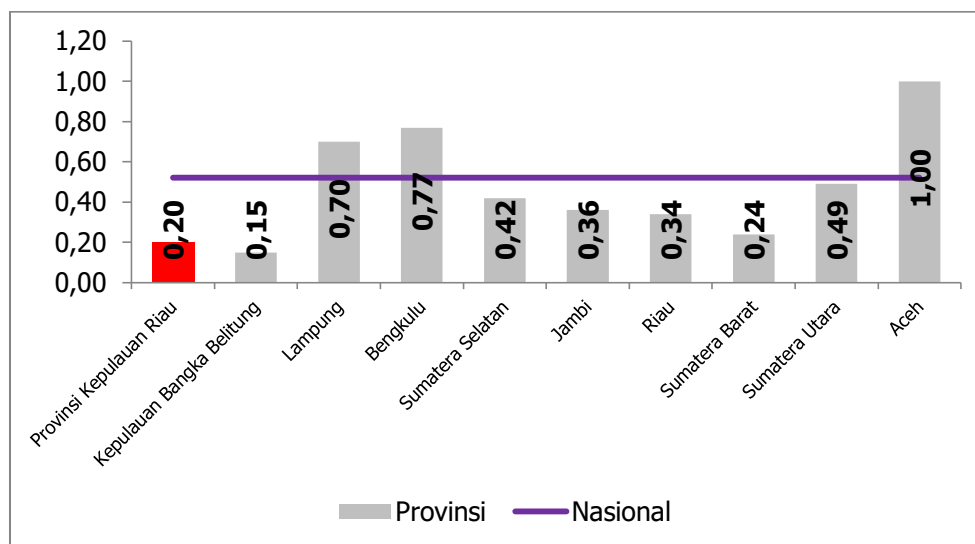
Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2012-2016 indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun dari sebesar 0,19 pada tahun 2012 menjadi 0,15 pada tahun 2016, yang menunjukkan ada pergeseran penurunan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif rendah.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2012 – 2016 (September)

Perkembangan Indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera berada pada posisi ke-3 terendah setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat. Perbandingan indeks keparahan kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

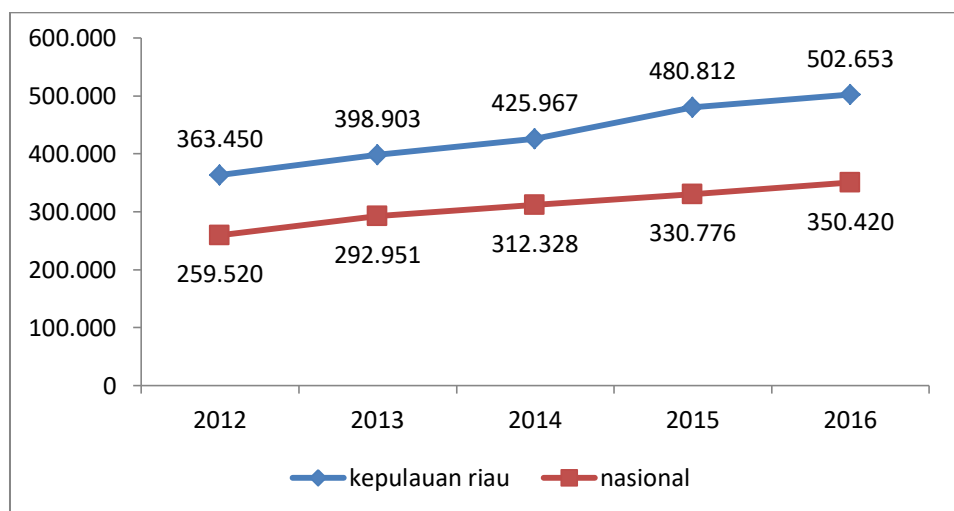
Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (Maret)

Dengan melihat tren penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu perhatian serius karena tren P1 dan P2 walaupun menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir (2012-2016) akan tetapi kinerja tahunannya tidak konsisten. Kondisi P1 dan P2 menunjukkan kinerja yang fluktuatif sehingga akan berpengaruh besar terhadap kenaikan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2016, kedua indeks P1 dan P2 angka di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin daerah perkotaan relatif mendekati garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahkan Kemiskinan daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin daerah perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding daerah perkotaan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin perdesaan lebih besar dibanding daerah perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan yaitu nilai rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan esensial. Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

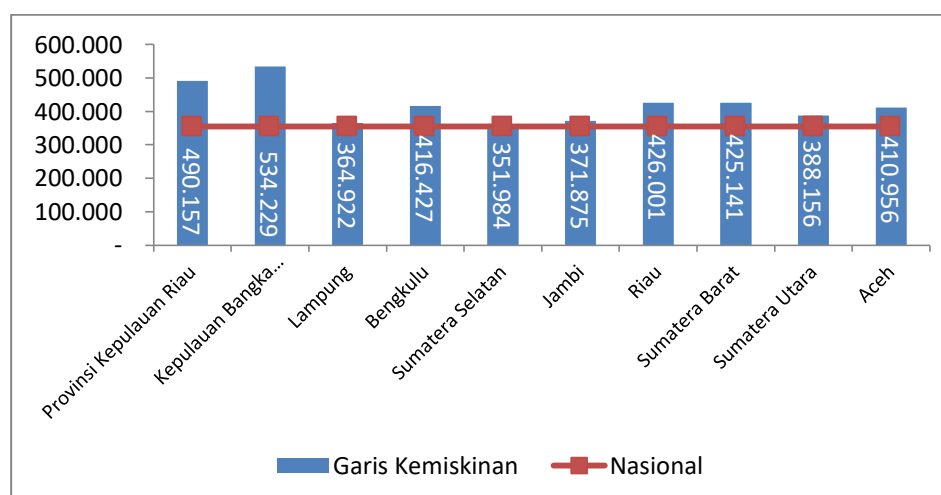
Tren garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan. Tahun 2012 garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 363.450,00 meningkat menjadi Rp 502.653,00 pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan nasional, garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih tinggi dari nasional sebesar Rp 259.420,00 pada tahun 2016. Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.13 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012–2016 (September) (Rupiah)

Garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 (Maret) sebesar 490.157 rupiah. Dibandingkan provinsi lain di Sumatera, garis kemiskinan Provinsi Kepri tertinggi kedua setelah Provinsi Bangka Belitung. Perbandingan garis kemiskinan Provinsi Kepri dengan Provinsi Lain di Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.14.



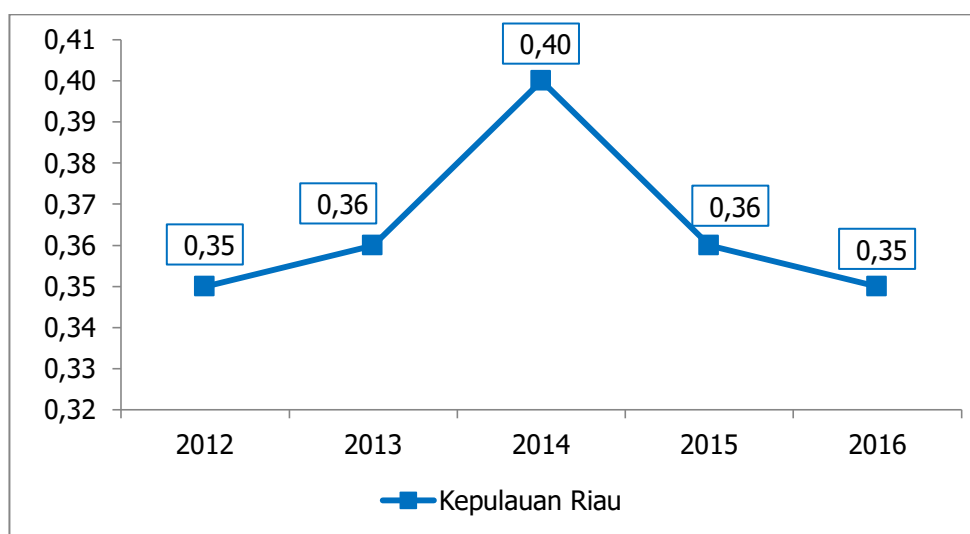
Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat Jakarta Tahun 2017

Gambar 2.14 Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (Maret)

E. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan "rendah" bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan "sedang" bila indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan "tinggi" bila indeks Gini di atas 0,4. Nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2012–2015 stabil dari sebesar 0,35 pada tahun 2011 menjadi 0,35 pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya).

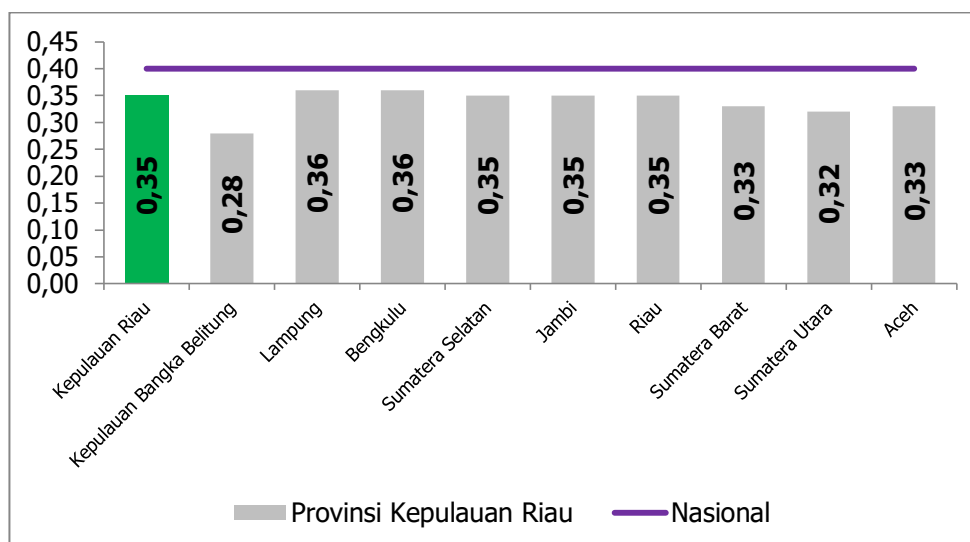
Perkembangan indeks gini Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.15 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera, indeks gini di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung, Bengkulu, namun. Secara rinci perbandingan indeks gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Sumber : BPS Pusat Jakarta Tahun 2017

Gambar 2.16 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan metode baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 sebesar 73,99 meningkat menjadi 73,99 pada tahun 2016. Jika diakumulasikan Peringkat IPM Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke-4 seluruh Indonesia. Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera Tahun 2012-2016

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Aceh	67,81	68,30	68,81	69,95	70,00
2.	Sumatera Utara	67,74	68,36	68,87	69,51	70,00
3.	Sumatera Barat	68,36	68,91	69,36	69,98	70,73
4.	Riau	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20
5.	Jambi	66,94	67,76	68,24	68,89	69,62
6.	Sumatera Selatan	65,79	66,16	66,75	67,46	68,24
7.	Bengkulu	66,61	67,50	68,06	68,59	69,33

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
8.	Lampung	64,87	65,73	66,42	66,95	67,65
9.	Kep. Bangka Belitung	67,21	67,92	68,27	69,05	69,55
10.	Kepulauan Riau	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99
	Indonesia	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

Sumber : BPS Pusat Jakarta Tahun 2017

Kemajuan pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan diawasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata. Kota Batam menempati peringkat pertama se-Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kabupaten Lingga menempati peringkat terbawah. Peringkat kedua sampai peringkat keenam berturut-turut diduduki oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas. Perbandingan capaian IPM ketujuh kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Perkembangan Unsur Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM
1	Karimun	70,02	12,14	7,75	11.468,00	69,84
2	Bintan	70,02	12,27	8,33	13.667,00	72,38
3	Natuna	63,99	13,86	8,46	13.834,00	71,23
4	Lingga	60,44	12,06	5,85	11.280,00	62,44
5	Kepulauan Anambas	66,54	11,87	6,63	11.320,00	66,3
6	Kota Batam	73,09	12,67	11,1	16.889,00	79,79
7	Kota Tanjungpinang	71,74	14,06	9,96	14.645,00	77,77
	Kepulauan Riau	69,41	12,66	9,69	13.359,00	73,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar 9,69 tahun. Dengan kondisi tersebut, rata-rata lama sekolah telah mampu memenuhi wajib belajar 9 tahun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Angka tertinggi

dicapai Kota Batam sebesar 11,10 tahun dan terendah di Kabupaten Kepulauan anambas sebesar 6,63 tahun.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016 sebesar 12,66 tahun, dengan angka tertinggi dicapai Kota Tanjungpinang sebesar 14,06 tahun, dan terendah di Kabupaten Kepulauan anambas sebesar 11,87 tahun.

4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. AHH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 69,45 tahun, dengan angka tertinggi dicapai Kota Batam sebesar 73,09 tahun dan terendah di Kabupaten Lingga 60,44 tahun. Capaian AHH Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi.

5. Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli)

Pengeluaran riil perkapita menunjukkan daya beli, yaitu kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran riil perkapita Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 13.359,00ribu rupiah, dengan angka tertinggi dicapai Kota Batam sebesar 16.889,00 ribu rupiah, dan terendah di Kabupaten Lingga 11.280,00 ribu rupiah.

6. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar di Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang TK/RA, dan SMA/MA/SMK Paket C menunjukkan kondisi yang belum mencapai angka 100%. APK jenjang TK/RA baru mencapai 78,00%, sedangkan APK SMA/MA/SMK Paket C sebesar 85,17%. Sementara itu APK jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sampai dengan tahun 2016 telah mencapai angka diatas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa APK jenjang TK/RA, dan SMA/MA/SMK Paket C perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai angka 100%. Secara rinci Angka partisipasi kasar di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26.
Perkembangan Kinerja Angka Partisipasi Kasar
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	APK TK/RA (3-6 Tahun)	%	42,00	46,40	29,10	76,02	76,12	78,00
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,78	105,12	107,10	108,36	112,74	107,67
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	96,75	99,11	100,03	100,62	97,07	101,30
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C	%	63,50	64,00	75,10	81,79	82,23	85,17

7. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Dilihat dari tingkat pendidikan atau angka pendidikan yang ditamatkan, penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berpendidikan SMA/MA sebesar 36,63%, selanjutnya SD sebesar 21,70%, dan SMP/MTs sebesar 36,63%. Secara rinci tingkat pendidikan penduduk atau angka pendidikan yang ditamatkan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut ini.

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas menurut Ijazah/STTB
Tertinggi yang dimiliki Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Persentase
1.	Tidak Mempunyai Ijazah	%	9,73
2.	SD/MI	%	21,70
3.	SMP/MTs	%	13,86
4.	SMA/MA	%	36,63
5.	SMK/MAK	%	8,30
6.	Diploma I dan Diploma II	%	0,46
7.	Akademi/ Diploma III	%	2,59
8.	Diploma IV/S1/S2/S3	%	6,74
	Jumlah	%	100,00

8. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni di Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/MA/SMK sampai dengan tahun 2016 masih dibawah 100% yaitu berturut-turut sebesar 97,38%, 95,16%, dan 74,59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa APM jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/MA/SMK perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai angka 100%. Secara rinci Angka partisipasi murni di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28.
Perkembangan Kinerja Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	85,14	90,16	93,57	99,08	98,60	97,38
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	79,07	81,79	93,00	96,72	94,35	95,16
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	61,49	61,78	62,00	67,61	71,58	74,59

9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebesar 957 per 1000 KH menjadi 965 per 1000 KH, seperti terlihat dari Tabel 2.29 berikut ini.

Tabel 2.29.
Perkembangan Kinerja Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kelangsungan Hidup Bayi	per 1000	957	965	965	965	965	965

10. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah persentase penduduk angkatan kerja yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 92,31%, menurun dari tahun 2015 sebesar 93,80%, seperti terlihat pada Tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30.
Perkembangan Kinerja Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015		2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	836.670	93,80	859.813	92,31
2	Pengangguran Terbuka	55.318	6,20	71.622	7,69
	Jumlah Angkatan Kerja	891.988		931.435	

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Keberhasilan pelayanan PAUD terlihat dari capaian indikator APK PAUD baik formal maupun non formal. Kategori PAUD Formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Alfal (RA), sedangkan PAUD non formal adalah Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), POS PAUD dan Kelompok PAUD sejenis. Capaian APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik PUAD formal maupun non formal mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 42% pada tahun 2011 menjadi sebesar 78% pada tahun 2016.

Pada jenjang pendidikan dasar, APK dan APM menjadi salah satu indikator aspek pemerataan dan keterjangkauan pendidikan. Perkembangan APK SD/MI dalam kurun waktu tahun 2011-2016 cenderung meningkat dari sebesar 102,78% menjadi 107,67%, sedangkan APK SMP/MTs mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 96,75% pada tahun 2011 menjadi sebesar 101,30% pada tahun 2016. Indikator APM lebih mendekati pada partisipasi yang sebenarnya karena formula yang digunakan adalah jumlah murid pada jenjang tertentu dengan usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dibagi jumlah penduduk dengan kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut dikalikan seratus persen. APM SD/MI di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi, yaitu sebesar 97,38% pada tahun 2016, sedangkan APM SMP/MTs sebesar 95,16%. Sesuai dengan target MDGs dan Pendidikan Untuk Semua, pada tahun 2016 APM SD/MI ditargetkan 100%, demikian juga APM SMP/MTs juga ditargetkan 100%, capaian APM SD/MI dan SMP/MTs tersebut masih di bawah target MDG's dan PUS. Masih perlu usaha dan komitmen dari semua pihak untuk dapat mencapai target MDG's dan PUS tersebut, khususnya untuk APM SMP/MTs.

Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2016 sebesar 0,10% dan SMP/MTs sebesar 0,23%, angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan angka putus sekolah pada tahun 2015 sebesar SD/MI 0,35% dan SMP/MTs 0,82%. Sementara itu angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan telah menunjukkan capaian yang optimal, dengan capaian angka lulus hampir selalu 100% untuk SD/MI dan untuk SMP/MTs. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, ruang kelas SD/MI dalam konsisi baik pada tahun 2016 sebesar 57% dan untuk SMP/MTs sebesar 58,10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi pelayanan pendidikan dasar yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kurang optimal.

Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK Paket C baru menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,50% pada tahun 2011 menjadi sebesar 85,17% pada tahun 2016, untuk APM dalam kurun waktu yang sama meningkat dari sebesar 61,49% pada tahun 2011 menjadi 74,59% pada tahun 2016. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK pada tahun 2016 sebesar 0,50%, angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan angka putus sekolah tahun 2015 yaitu sebesar 0,95%. Untuk angka kelulusan pada jenjang pendidikan SMA/SMK sudah menunjukkan capaian yang optimal, angka lulus hampir selalu mendekati angka 100%. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan secara keseluruhan terlihat bahwa

perkembangan ruang kelas dalam kondisi baik selama kurun waktu 2011-2016 cenderung meningkat.

Mutu pendidik dan tenaga kependidikan terlihat dari indikator jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan DIV atauyang telah memperoleh sertifikasi. Rasio guru terhadap kelas dan rasio guru terhadap murid sudah cukup baik. Bahkan ada kecenderungan sudah kelebihan guru. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan kelembagaan adalah persentase sekolah semua jenjang terakreditasi minimal B. Kualitas kelembagaan dan tata kelola satuan pendidikan belum optimal. Banyak manajemen di tingkat satuan pendidikan belum sesuai dengan harapan yaitu terakreditasi minimal B.

Perkembangan capaian indikator pendidikan secara rinci terlihat pada Tabel 2.31 berikut ini.

Tabel 2.31.
Perkembangan Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	APK TK/RA (3-6 Tahun)	%	42,00	46,40	29,10	76,02	76,12	78,00
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,78	105,12	107,10	108,36	112,74	107,67
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	85,14	90,16	93,57	99,08	98,60	97,38
4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	1,50	1,2	0,12	0,10	0,35	0,10
5.	Persentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik	%	35	38	40	45	48	57,00
6.	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah	Perbandingan	1:47	1:49	1:50	1:50	1:50	1:45
7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	96,75	99,11	100,03	100,62	97,07	101,30
8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	79,07	81,79	93,00	96,72	94,35	95,16
9.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	2,3	1	0,30	0,20	0,82	0,23
10.	Persentase Ruang kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik	%	37	40	44	48	52	58,10
11.	Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah	Perbandingan	1:49	1:52	1:54	1:50	1:43	1:43
12.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C	%	63,50	64,00	75,10	81,79	82,23	85,17
13.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	61,49	61,78	62,00	67,61	71,58	74,59
14.	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	2,5	2,0	0,3	0,2	0,95	0,50
15.	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK Dalam Kondisi Baik	%	94,30	94,70	95,00	95,30	86,49	86,68

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
16.	Rasio ketersediaan sekolah SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia sekolah	Perbandingan	1:24	1:24	1:25	1:27	1:25	1:22
17.	Angka Melek Huruf penduduk usia diatas 15 tahun	%	97,5	98,4	98,0	98,5	99,01	-
18.	Jumlah warga belajar peserta pendidikan kecakapan hidup (Lifeskill)	warga belajar	NA	NA	NA	NA	200	210
19.	Jumlah lembaga kursus	lembaga	NA	NA	NA	NA	7	10
20.	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B	%	20	30	60	63	64	69,42
21.	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B	%	30	45	55	68	65	73,67
22.	Persentase SMA/MA terakreditasi minimal B	%	55	60	65	75	75	78,17
23.	Persentase kompetensi Keahlian SMK terakreditasi minimal B	%	-	-	-	-	45	47,00
24.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV semua jenjang Pendidikan	%	55	67	67	86	80	76,00
25.	Rasio guru/murid SD/MI	Perbandingan	1:16	1:18	1:18	1:17	1:18	1:16
26.	Rasio guru/murid SMP/MTs	Perbandingan	1:15	1:20	1:18	1:20	1:15	1:15
27.	Rasio guru/murid SMA/MA/SMK	Perbandingan	1:10	1:11	1:11	1:14	1:12	1:20
28.	Persentase Guru SD/SMP/SMA/SMK yang memanfaatkan TIK Pendidikan	%	14	14	15	15	16	40
29.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100
30.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	96,69	97,96	98,68	99,85	100	100
31.	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK/Paket C	%	95,83	99,04	99,47	99,45	100	100
32.	Rata-rata nilai UN SD/MI/Paket A	Angka	7,18	6,85	9,93	6,97	19,52	65,58
33.	Rata-rata nilai UN SMP/MTs/Paket B	Angka	7,06	NA	6,61	6,96	23,22	52,82
34.	Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK/Paket C	Angka	7,40	7,40	6,92	5,99	53,90	50,91

Sumber: Dinas Pendidikan

2) Kesehatan

Kinerja berkaitan dengan upaya kesehatan antara lain terlihat dari indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita, Persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, Persentase wasting (kurus dan sangat kurus pada anak balita), serta prevalensi/kejadian penyakit menular dan tidak menular.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, tenggelam dan lain-lain. Angka Kematian Ibu dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011 – 2016 fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 121 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 120 per 100.000 kelahiran hidup.

Bila dibandingkan dengan AKI Nasional (346 per 100.000 KH), AKI Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih rendah. Salah satu faktor pendukung kematian ibu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan akibat keadaan geografis. Kematian ibu dikarenakan oleh pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran. Berikut ini distribusi jumlah kematian berdasarkan kabupaten/kota, seperti terlihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.

Jumlah Kasus Kematian Ibu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Karimun	7	7	7	13	5	6
2	Bintan	6	10	5	4	6	4
3	Natuna	2	5	7	2	1	1
4	Lingga	5	7	4	2	1	5
5	Kota Batam	25	22	20	39	43	29
6	Kota Tanjungpinang	8	5	8	11	7	0
7	Kep. Anambas	2	1	2	1	2	4
Jumlah		55	57	53	72	65	49

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup). AKB Provinsi Kepulauan Riau bersumber data penghitungan Survei melalui SDKI dan Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan SDKI Tahun 2012, AKB Provinsi Kepulauan Riau sebesar 35 per 1000 KH, berbeda dengan hasil pelaporan rutin yang berkisar <20 per 1000 KH. AKB yang relatif kecil disebabkan karena pelaporan AKB baru pada tingkat pelayanan kesehatan dan banyak kasus yang tidak

terlaporkan. Sehingga, penghitungan AKB disepakati menggunakan AKB bersumber data BPS melalui SDKI yaitu 35 per 1000 KH. Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congenital, dan Icterus.

Dilihat per kabupaten/kota, jumlah kasus kematian ibu terbanyak di Kota Batam, selanjutnya Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang. Secara rinci jumlah kematian bayi per kabupaten/kota terlihat pada Tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2.33.
Jumlah Kasus Kematian Bayi berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Kabupaten Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Karimun	63	77	76	104	80	57
2	Bintan	50	34	23	7	32	26
3	Natuna	12	9	16	17	24	18
4	Lingga	25	25	25	2	23	25
5	Kota Batam	122	106	44	303	228	138
6	Kota Tanjungpinang	44	36	40	40	38	49
7	Kep. Anambas	25	10	17	17	21	13
	Jumlah	341	297	241	490	446	326

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau

Berdasarkan laporan rutin, persentase balita gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011–2015 mengalami penurunan dari 3,77% menjadi 2,16%. Angka kasus gizi kurang yang dilaporkan jauh lebih rendah dikarenakan data penimbangan balita (D/S) masih dibawah 60%. Oleh karena itu, dimulai akhir tahun 2015, Kementerian Kesehatan RI telah melakukan Survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di 34 Provinsi. Hasil survei menunjukkan angka kasus balita gizi kurang lebih tinggi dari angka pelaporan rutin, hasil PSG Gizi kurang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 sebesar 17,7% lebih rendah berbanding angka nasional sebesar 17,8%. Berdasarkan hasil survei PSG, terlihat bahwa kasus gizi kurang banyak ditemukan di Kabupaten Karimun dan Natuna. Secara rinci dijabarkan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Balita Gizi Kurang per Kota/Kabupaten Tahun 2011-2016 (%)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	*2016 (PSG)
1	Karimun	13,13	8,01	5,93	6,53	5,32	22,1
2	Bintan	1,92	2,37	3,29	2,37	2,58	14,8
3	Natuna	11,25	21,77	12,59	5,58	7,43	18,8
4	Lingga	8,28	4,12	4,92	4,32	4,32	17,6
5	Kota Batam	2,84	2,50	1,30	1,73	1,59	17,8
6	Kota Tanjungpinang	5,03	0,76	0,30	3,49	4,06	16,7
7	Kep. Anambas	6,71	10,04	10,04	7,72	3,53	16,2

Sumber: Profil Kesehatan Kepulauan Riau (2011-2015) dan Survei PSG 2016

Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah. Dilihat persebarannya, persentase gizi kurang tertinggi berada di Kabupaten Natuna, kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti terlihat pada Tabel 2.28.

Prevalensi HIV AIDs pada penduduk dalam kurun waktu tahun 2011-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 0,19% menjadi 0,35%. Persentase ODHA yang mengakses ART (Anti Retroviral Treatment) selama 2011-2016 mengalami peningkatan yaitu dari 29% menjadi 57,3%. Angka Kejadian DBD Per 100.000 penduduk masih cukup tinggi, yaitu sebesar 102 per 100.000 penduduk, cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Sementara itu Angka Kejadian Malaria dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan yang signifikan (dari 1,99/1.000 penduduk menjadi 0,37/1.000 penduduk). Pengendalian penyakit malaria dilakukan untuk mencapai target tujuan 6 MDG's 2015 dan pada tahun 2017, Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam daerah target eliminasi malaria. Adapun untuk Angka Kejadian Kusta pada tahun 2016 sebesar 1,83 per 100.000 penduduk, dan Angka Kejadian Filariasis sebesar 5 per 100.000 penduduk. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di tahun 2011 - 2016, capaiannya meningkat dari 17% menjadi sebesar 72,5%.

Faktor yang sangat mempengaruhi kinerja layanan kesehatan adalah sumberdaya tenaga kesehatan. Keadaan geografis Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) mengakibatkan Pemerintah Kepulauan Riau kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kepulauan Riau maka Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang ada.

Pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK tidak dapat menggunakan standard nasional yang berdasarkan rasio, karena meskipun dengan jumlah penduduk yang kecil, namun penyebaran tempat tinggal penduduk mengakibatkan jauhnya rentang kendali pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan strategi penguatan kuantitas tenaga kesehatan melalui sistem kontrak dokter/dokter gigi, PTT, dan bidan PTT, selain perekrutan melalui CPNS dan PTT dari Pusat. Dokter/dokter gigi PTT ditempatkan di setiap puskesmas/puskesmas pembantu dan Bidan desa ditempatkan di puskesmas pembantu/polindes.

Meningkatnya profesionalisme dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kepulauan Riau ditargetkan melalui indikator sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatkan persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan dan Meningkatkan persentase RS pemerintah Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang.

Berdasarkan data Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Profil Kabupaten/Kota, diketahui bahwa jumlah dokter yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 adalah sebanyak 947 orang dengan

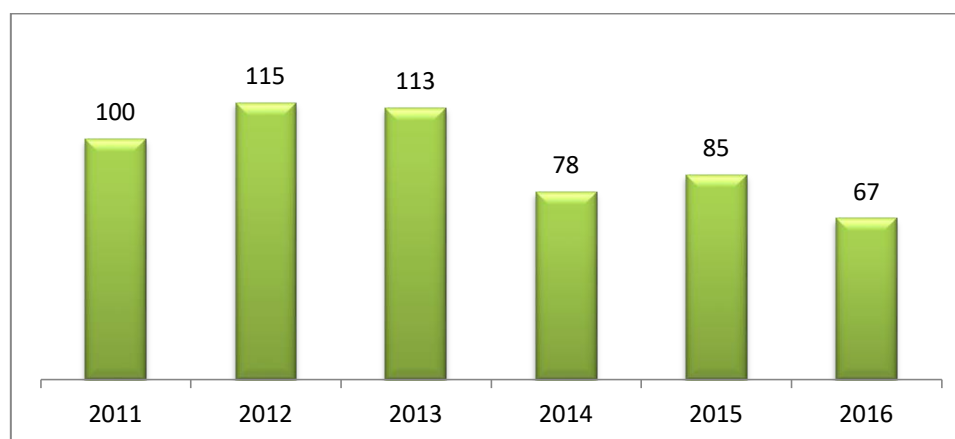
rincian 790 dokter tetap, 57 dokter PTT dan 100 dokter internship. Distribusi dokter menurut Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel 2.35 berikut ini.

Tabel 2.35.
Tenaga Medis di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

Kab/Kota	dr spesialis	dokter umum	dokter gigi
Karimun	39	66	15
Bintan	13	96	25
Natuna	8	24	8
Lingga	4	23	11
Batam	199	392	62
Tanjungpinang	72	147	40
Kep. Anambas	2	42	6
Total	337	790	167

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Dokter/dokter gigi PTT merupakan salah satu kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2011 yang ditujukan guna meningkatkan sebaran tenaga kesehatan di Kepulauan Riau dengan menempatkannya di daerah terpencil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2016 ditempatkan 67 orang dokter PTT dan 102 Bidan PTT. Perkembangan jumlah dokter PTT tercantum pada gambar 2.17 berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Gambar 2.17 Jumlah Dokter/Dokter Gigi PTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

Jumlah dokter/dokter gigi PTT semakin lama dikurangi, hal ini dikarenakan beberapa daerah terpencil sudah mampu memenuhi kebutuhan dokternya. Tujuan kegiatan pengembangan dokter/dokter gigi PTT adalah tersebarnya tenaga medis di daerah sangat terpencil, terpencil dan prioritas pelayanan kesehatan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Terpenuhinya kebutuhan keluarga akan pelayanan kedokteran yang lebih efektif dan efisien melalui kegiatan home visite dengan mengedepankan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri melalui pengembangan desa siaga aktif.

Selanjutnya distribusi tenaga paramedis dan kesehatan masyarakat diuraikan pada Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36.
Tenaga Paramedis dan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2016

Kab/Kota	Bidan	Perawat	Kemas	Kesling
Karimun	256	442	56	10
Bintan	197	299	39	20
Natuna	191	349	41	23
Lingga	179	219	16	11
Batam	718	1.778	57	29
Tanjungpinang	220	635	26	29
Kep. Anambas	140	228	7	17
Total	1.901	3.950	242	139

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2016

Jumlah tenaga kefarmasian sebanyak 538 orang dengan jumlah apoteker 213 orang dan tenaga teknis kefarmasian 325 orang. Tenaga Gizi yang ada di Kepulauan Riau sebanyak 141 orang dengan nutrisisionis sebanyak 136 orang dan dietisien sebanyak 5 orang.

Kinerja urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37.
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	121	112	97	137	144	120
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	43*	35*	35*	35*	35*	35*
3.	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	3,77	2,67	3,71	3,72	12,6	17,7
4.	Prevalensi HIV pada penduduk	%	0,19	0,23	0,26	0,33	0,38	0,35
5.	Persentase ODHA yang mengakses ART (Anti Retroviral Treatment)	%	29	60	54	51,3	65,4	57,3
6.	Angka Kejadian DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	56,31	80	74,02	95,7	41	102
7.	Angka Kejadian Kusta per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	0,75	0,91	2,11	0,66	0,53	1,83
8.	Angka Kejadian Malaria per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	1,99	1,24	1,13	0,65	0,18	0,37
9.	Angka Kejadian Filariasis	per 100.000 penduduk	1	6	4	5	4	5

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	17	24	36	54	71	72,5

Keterangan: *) Data SDKI Tahun 2007 dan 2012

Sumber: Dinas Kesehatan

3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Kondisi jalan baik di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 69,44% menjadi 71,97% sementara pada tahun 2016 kondisi jalan baik meningkat menjadi 73,50%. Dilihat dari panjangnya, terjadi peningkatan panjang jalan dari 679,49 km pada tahun 2011 menjadi 890,1 km pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 ruas jalan berstatus provinsi mengalami perubahan yang semula (SK Gubernur No 530 Tahun 2010) sepanjang 679,49 km berubah menjadi 896,45 km (SK Gubernur No 1.863 Tahun 2016). Secara rinci terlihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2016

No	Kab/ Kota	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)
1.	TanjungPinang	58,05	70,23	57,93	70,23
2.	Bintan	100,89	162,77	107,44	139,10
3.	Batam	101,45	112,35	101,45	112,35
4.	Karimun	131,60	143,72	133,10	143,72
5.	Lingga	130,83	206,72	133,83	236,72
6.	Natuna	88,39	143,32	96,97	143,33
7.	Anambas	25,90	51,00	28,16	51,00
Total		635,31	890,11	658,88	896,45
Persen Kondisi Baik		71,37%		73,50%	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

Sesuai dengan status jalan provinsi yang baru jumlah jembatan yang akan ditangani oleh Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 161 unit dengan total panjang 4.145,70 meter, sedangkan kondisi baik jembatan ditahun 2016 sepanjang 3.261,23 meter atau 78,67%. Secara rinci terlihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Jumlah Jembatan dan Kondisi Jembatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

NO	KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH	SAT	PANJANG (Meter)	KONDISI BAIK		KONDISI SEDANG & BURUK (%)		
					Panjang (m)	%	PERLU PEMELIHARAAN (Cat, Pembersihan)	PERGANTIAN ELEMEN (Pergantian Elemen)	PERGANTIAN JEMBATAN (Kondisi Kritis/ Pergantian)
1	Kota Batam	33	Unit	325,40	365,67	94,8	5,12	0,00	0,00
	Jembatan baru	1	Unit	60,00					
2	Kota Tanjungpinang	5	Unit	725,30	1.597,61	82,9	17,02	0,00	0,00
	Jembatan baru	1	Unit	1.200,00					
3	Kota Bintan	9	Unit	105,10	35,03	33,3	44,44	22,22	0,00
4	Kabupaten Karimun	24	Unit	396,20	346,68	87,5	12,50	0,00	0,00
5	Kabupaten Lingga	53	Unit	660,70	498,63	75,4	13,21	7,55	3,77
6	Kabupaten Natuna	26	Unit	445,00	290,94	65,3	11,54	7,69	15,38
7	Kabupaten Anambas	9	Unit	228,00	126,68	55,5	22,22	22,22	0,00
TOTAL		161	Unit	4.145,70	3.261,23	78,6	9,38	8,18	3,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

b) Irigasi

Jaringan irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan. Kebutuhan luas area tanam potensial sebesar 4.673 Ha dan Luas realisasi tanam (Ha) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebesar 1.432 Ha, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 78 Ha. Irigasi sangat bermanfaat bagi pertanian, terutama di pedesaan. Dengan irigasi pertanian dapat memproduksi setiap tahunnya serta dapat juga dipergunakan untuk peternakan, dan keperluan lain yang bermanfaat. Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada menunjukkan peningkatan dari sebesar 25,91% pada tahun 2011 menjadi 30,64% pada tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Luas Daerah Irigasi dan Luas Realisasi Tanam Pada Daerah Irigasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Potensi Luas Daerah Irigasi (HA)	Luas Realisasi Tanam (Ha)
1	DI Tapau (Natuna)	1.505	327
2	DI Kelarik (Natuna)	1.250	120
3	DI Jemaja (Anambas)	1.200	150
4	DI Kundur (Karimun)	428	324
5	DI Bintan	80	62
6	DI Lingga	210	210
	Jumlah	4.673	1.432
	Persentase Capaian	30,64 Persen	

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

Kondisi jaringan irigasi sebagian besar masih kondisi saluran tanah, dan belum permanen, sehingga perlu peningkatan pembangunan jaringan daerah

irigasi. Kondisi penyediaan jaringan irigasi di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2015 sebesar 30,64%.

c) Air Baku

Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk menunjukkan peningkatan dari sebesar 36,09% pada tahun 2011 menjadi 60,60% pada tahun 2015. Adapun rincian debit andalan dan ketersediaan sumber air baku di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Debit Andalan, Ketersediaan Sumber Air Baku, dan Kebutuhan Sumber Air Baku di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016

No	Kab/Kota	Debit Andalan (l/dtk)	Ketersediaan Sumber Air Baku (M3/Tahun)	Kebutuhan Sumber Air Baku (M3/Tahun)	Persen
1	Tanjungpinang - Sei Pulai (Tanjungpinang) - Sei Gesek (Bintan)	330,00	1.769.170	6.166.997	35,27%
2	Batam - Waduk Nongsa - Waduk Sei Baloi - Waduk Sei Harapan - Waduk Sei Ladi - Waduk Muka Kuning - DAM Duri Angkang - Waduk Rempang	106,00	29.435.702	34.270.163	20,76%
3	Bintan - Waduk Sei Jago (Bintan Utara) - Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram (Bintan Utara) - Waduk Kolong Enam (Bintan Timur) - Waduk Lagoi (Teluk Sebing)	3.590,00	969.417	4.668.609	85,89%
4	Karimun - Waduk Sei bati (Pulau Karimun) - Waduk Sentani (Pulau Karimun) - Waduk Tempan (Pulau Kundur) - Waduk Sidomoro (Pulau Moro) - Waduk Sidodadi (Pulau Moro)	144,00	1.316.943	6.915.314	19,04%
5	Lingga - Tampungan air baku Dabo (Bukit Timah dan Kampung Boyan) - Tampungan air baku Daik (Bukit Cengkeh dan Bukit Sempot) - Tampungan air baku Penuba (Tanah Tinggi)	70,00	927.253	2.750.916	23,83%
6	Natuna - Tampungan air baku Gunung Ranai	64,00	605.491	2.270.656	26,67%
7	Kepulauan Anambas - Tampungan air baku Gunung Siantan	20,00	291.708	1.232.711	12,79%
	Jumlah	4.324	35.315.684	58.275.367	60,60%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

d) Penataan Ruang

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 telah ditetapkan. Tahun 2013-2033. RTRW Provinsi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017.

Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 6 kota dan kabupaten telah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW, sedangkan Kota Batam sampai saat ini belum ditetapkan dengan Perda.

- a. Kab. Karimun, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031
- b. Kab. Anambas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031
- c. Kab. Bintan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031
- d. Kab. Karimun, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031
- e. Kab. Natuna, ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.
- f. Kota Tanjungpinang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2011-2031.

Dalam rangka implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kabupaten/Kota yang telah memiliki RTRW wajib menyusun rencana teknis yang dimuat dalam RDTRK.

Berkaitan dengan di wilayah laut, pemerintah daerah diharapkan memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Laut yang merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut.

Secara rinci kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.42 dibawah ini.

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	%	25,91	22,59	30,64	30,64	30,64	36,64
2.	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	%	36,09	51,21	54,02	55,94	60,60	64,90
3.	Jumlah titik rawan banjir yang diatasi (titik)	%	10,00	16,00	22,00	28,00	34,00	12,50

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.	Persentase jalan berkondisi baik (%)	%	69,44	68,90	71,27	71,57	71,97	73,50
5.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		0,0010	0,0010	0,0009	0,0008	0,0008	72,01
A	Panjang Jalan Provinsi (km)							
	Tanjungpinang		58,15	61,17	63,43	65,13	70,23	70,23
	Bintan		162,77	162,77	162,77	162,77	162,77	139,10
	Batam		78,79	87,18	93,47	98,19	112,35	112,35
	Karimun		117,42	123,99	128,92	132,62	143,72	143,72
	Lingga		163,62	174,39	182,47	188,54	206,72	236,72
	Natuna		104,91	114,51	121,71	127,11	143,32	143,33
	Kepulauan Anambas		46,50	47,63	48,47	49,10	51,00	51,00
	Total		732,15	771,64	801,25	823,47	890,11	896,45
b	Jumlah kendaraan (unit)							
	Tanjungpinang		102.364	113.738	126.375	140.417	156.019	Na
	Bintan		71.737	79.707	88.564	98.404	109.338	Na
	Batam		441.141	490.157	544.619	605.132	672.369	Na
	Karimun		63.157	70.175	77.972	86.636	96.262	Na
	Lingga		21.069	23.410	26.011	28.901	32.112	Na
	Natuna		13.113	14.571	16.189	17.988	19.987	Na
	Kepulauan Anambas		0	0	0	0	0	0
	Total		712.582	791.757	879.730	977.478	1.086.087	Na
6.	Cakupan layanan Prima Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan Laboratorium	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	68,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa); Peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman serta penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh. Pada Tabel 2.43 disajikan luas kawasan kumuh per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.43.
Luas Kawasan Kumuh per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2014 dan Tahun 2015

No	Kab/kota	Luas Kawasan Kumuh
1	Karimun	49,76
2	Bintan	98,01
3	Lingga	242,16
4	Natuna	60,12
5	Anambas	45,26
6	Tanjungpinang	150,14
7	Batam	177,99
	Total	823,44

Sumber : SK Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Riau

Perincian Lokasi Kawasan Kumuh per Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2.44 berikut ini.

Tabel 2.44.
Perincian Lokasi Kawasan Kumuh per Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kota/ Kab.	No. SK (Bupati/Walikota)	Kecamatan Kumuh	Kelurahan	Kawasan	Luas (Ha)
1	Tanjungpinang	377 Tahun 2014	Tanjungpinang Barat	Kampungbaru	Pantai Impian	12,60
2	Tanjungpinang	377 Tahun 2014	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	Lembah Purnama	5,99
3	Tanjungpinang	377 Tahun 2014	Bukit Bestari	Tanjungpinang Timur	Jl. Akasia (Sei Nibung Angus)	14,60
4	Tanjungpinang	377 Tahun 2014	Bukit Bestari	Tanjung Unggat	Tanjung Unggat	31,64
5	Tanjungpinang	377 Tahun 2014	Tanjungpinang Barat	Kamboja	Pelantar Sulawesi	51,58
6	Tanjungpinang	377 Tahun 2014	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	Kampung Bugis	18,92
7	Tanjungpinang	377 Tahun 2014	Tanjungpinang Kota	Senggarang	Senggarang	14,81
8	Batam	68/HK/I/2015	Sei. Beduk	Tanjung Piayu	Sei Daun, Kampung Bagan, dan Tj Piayu Laut	10,15
9	Batam	68/HK/I/2015	Sei Beduk	Mangsang	Mangsang Permai, dan Bukit Widuri	34,00
10	Batam	68/HK/I/2015	Sei Beduk	Duriangkang	Nusa Jaya-Bukit Berbunga	5,37
11	Batam	68/HK/I/2015	Sagulung	Sei Lekop	KSB Sei Lekop	11,00
12	Batam	68/HK/I/2015	Sagulung	Sei Pelunggut	KSB Sei Pelunggut	56,47
13	Batam	68/HK/I/2015	Nongsa	Kabil	KSB Kabil	28,00
14	Batam	68/HK/I/2015	Sekupang	Tiban Lama	Tiban Kampung	10,00
15	Batam	68/HK/I/2015	Bengkong	Tanjung Buntung	Bengkong Palapa	6,50
16	Batam	68/HK/I/2015	Bengkong	Sadai	Bengkong Sadai, dan Bengkong Kolam	10,00
17	Batam	68/HK/I/2015	Batu Ampar	Tg. Sengkuang	Tanjung Sengkuang	6,50
18	Karimun	188.B Tahun 2014	Karimun	Sei Lakam Barat	Pulau Kambing	7,40
19	Karimun	188.B Tahun 2014	Karimun	Sei Lakam Barat	Telaga Tujuh	16,12
20	Karimun	188.B Tahun 2014	Karimun	Sei Lakam Timur	Kampung Orari	9,80
21	Karimun	188.B Tahun 2014	Meral	Baran Barat	Barat Barat	2,10

No	Kota/ Kab.	No. SK (Bupati/Walikota)	Kecamatan Kumuh	Kelurahan	Kawasan	Luas (Ha)
22	Karimun	188.B Tahun 2014	Meral	Baran Barat	Gg. Asoka	4,67
23	Karimun	188.B Tahun 2014	Meral	Baran Timur	Kuda Laut	9,67
24	Bintan	435/IX/2014	Bintan Timur	Kijang Kota	Kampung Keke	58,41
25	Bintan	435/IX/2014	Bintan Utara	Tanjung Uban Kota	Belakang Pasar	13,60
26	Bintan	435/IX/2014	Teluk Bintan	Bintan Buyu	Kws Bandar Seri Bentan, Tembeling, dan Penaga	26,00
27	Bintan	435/IX/2014	Teluk Bintan	Tembeling	Tembeling Tanjung	0,00
28	Bintan	435/IX/2014	Teluk Bintan	Penaga	Penaga	0,00
29	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga Timur	Keton	Keton	6,70
30	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga Utara	Limbung	Senempok	8,23
31	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga Utara	Duara	Kukang	31,92
32	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga	Merawang	Budus	4,67
33	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga	Panggak Laut	Panggak Laut	11,69
34	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga	Nerekeh	Nerekeh	4,87
35	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga Timur	Kudung	Kudung	10,40
36	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga Utara	Teluk	Teluk	11,59
37	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga	Mentunda	Mentuda	9,02
38	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Selayar	Penuba	Penuba	66,78
39	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Singkep Barat	Marok Tua	Marok Tua	11,84
40	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Singkep	Dabo	Dabo	13,44
41	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Singkep	Dabo Lama	Dabo Lama	12,12
42	Lingga	238/KPTS/VIII/2014	Lingga	Daik	Melukap Laut	38,89
43	Anambas	204 Tahun 2014	Siantan	Tarempa	Tarempa	7,58
44	Anambas	204 Tahun 2014	Siantan	Tarempa Timur	Antang	37,68
45	Natuna	318 Tahun 2014	Bunguran Timur	Ranai Kota dan Jemengan	Bunguran Timur	60,12

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

Meskipun telah banyak dilakukan kegiatan peningkatan kualitas hunian dan penyediaan rumah namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2011-2015. Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani dari sebesar 39,72% pada tahun 2011 menjadi sebesar 52,71% pada tahun 2016. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2011-2016 menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,96% menjadi 89,23%. Cakupan air minum tentunya perlu ditingkatkan, karena air minum merupakan kebutuhan pokok bagi penduduk.

Sanitasi mencakup air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak bagi penduduk perlu ada peningkatan. Cakupan pelayanan sanitasi layak sebesar 73,01% pada tahun 2015, menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar 71,80%.

Secara rinci kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentasi luas kawasan kumuh/lingkungan permukiman/perumahan yang ditangani	%	39,72	42,76	45,79	49,19	52,71	52,71
2.	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%	63,96	64,78	65,50	67,10	88,50	89,23
3.	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah domestik, drainase, persampahan) (%)	%	71,80	69,20	71,35	71,50	63,48	65,21

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mencakup penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota; penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur; pembinaan PPNS provinsi; penanggulangan bencana provinsi; dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat capaiannya perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi sebanyak 4.892 kasus pada tahun 2015 dan sebanyak 4.885 kasus pada tahun 2016. Dengan banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi, maka peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan perlu ditingkatkan, termasuk dengan melakukan pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang bertugas sebagai Linmas. Kinerja angka gangguan trantib yang tertangani capaiannya sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Berkaitan dengan penanggulangan bencana, persentase Kabupaten/Kota yang tanggap bencana mengalami peningkatan dari 14,24% pada tahun 2011 menjadi 57,14% pada tahun 2016. Selama kurun waktu 2011-2016 Persentase kejadian bencana kab/ kota yang tertangani dengan baik sebesar 100%.

Secara rinci kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut ini.

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Urusan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kriminalitas	Kasus	NA	NA	NA	NA	4.892	4.885
2.	Angka gangguan trantib yang tertangani	%	70	70	75	75	78	100
3.	Jumlah Forum yang terbentuk dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau	Forum	2	3	3	3	3	3

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	1	2	2	2	2
5.	Persentase konflik sosial tertangani	%	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Kelompok	24	24	24	24	24	24
7.	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILGUB, PILEG, PILPRES)	%	-	-	-	Pileg: 71,65; Pilpres: 59,43	Pilgub: 55,25	-
8.	Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Kegiatan	1	2	3	1	1	1
9.	Indeks demokrasi Indonesia Prov. Kepulauan Riau	Indeks	70,78	65,61	66,5	68,39	70,26	NA
10.	Persentase Kabupaten/Kota yang tangguh bencana di Provinsi Kepulauan Riau	%	14,29	28,57	28,57	42,86	57,14	57,14
11.	Persentase kejadian bencana kab/ kota yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD

6) Sosial

Kewenangan provinsi pada urusan sosial mencakup Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Berkaitan dengan pemberdayaan sosial, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemberdayaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi untuk dapat berperan aktif dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan penanganan bencana, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.

Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 memiliki jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 141.052 orang. Jenis PMKS yang menonjol adalah anak terlantar sejumlah 16.917 jiwa, balita terlantar sejumlah 16.454 jiwa dan penduduk miskin sejumlah 129.560 jiwa. Tingginya anak terlantar dan Balita Terlantar ini signifikan dengan jumlah pekerja migran. Akses yang mudah menuju Singapura dan Malaysia menjadi penyebab dari banyaknya jumlah pekerja migran, sehingga anak-anak ditiptkan kepada orang tua. Faktor kualitas tenaga kerja dan pendidikan yang rendah juga mempengaruhi. Jumlah pekerja migran terlantar juga banyak terjadi. Keterlantaran ini akibat dokumen yang tidak lengkap, *trafficking* dan penelantaran. Kota Batam menjadi pusat penelantaran pekerja Migran. Menurut LSM Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seks Anak (Kompak), maupun Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, Batam menjadi daerah darurat *human trafficking*.

Kinerja dalam penanganan PMKS cenderung meningkat, namun masih perlu ditingkatkan karena capaiannya masih rendah. Hal ini terlihat dari capaian persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dan Program Penanganan Kemiskinan lainnya (KUBE dan PKH) untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2015 hanya sebesar 19,15%. Persentase Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial juga baru mencapai 51,88%. Beberapa faktor ketidaktercapaian target ini adalah kondisi geografis wilayah yang menyulitkan dalam penanganan PMKS. Ketidaktercapaian ini tentunya perlu menjadi perhatian serius mengingat persoalan PMKS merupakan persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian, kekuatan jaringan, serta penegakan hukum.

Sementara itu untuk indikator Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti capaiannya telah mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai, namun perlu ditingkatkan cakupan dan kualitas pelayanannya dalam penanganan PMKS.

Secara rinci kinerja berkaitan dengan pelaksanaan urusan sosial dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kepulauan Riau Tahun 2011–2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dan Program Penanganan Kemiskinan lainnya (KUBE & PKH) Untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	2,89	3,48	13,39	13,9	19,15
2.	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	%	0	25	26,25	38,75	51,88
3.	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	0	1,25	91,25	91,88	100
4.	Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang Menyediakan sarana prasarana Pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	%	100	100	100	100	100

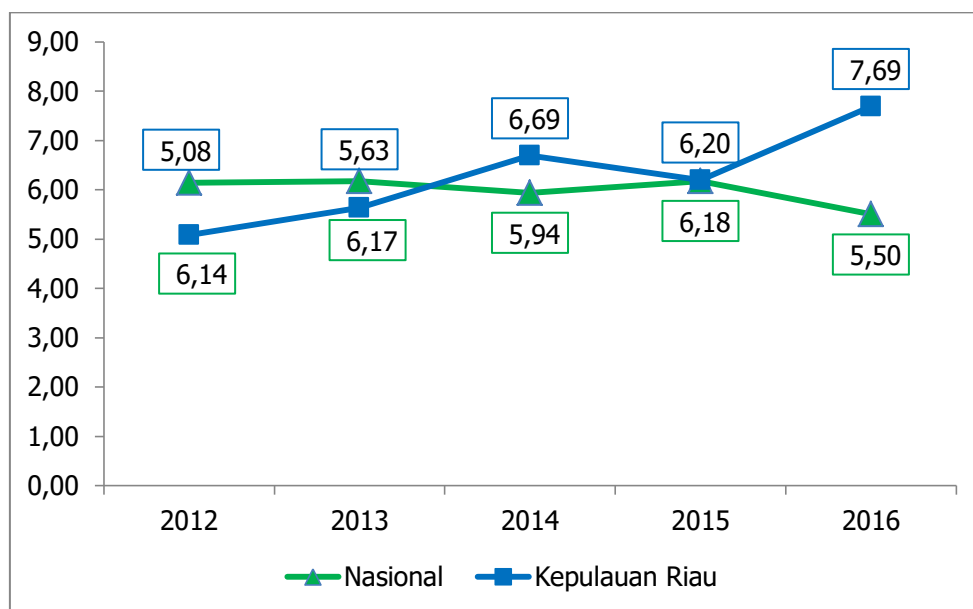
Sumber: Dinas Sosial

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

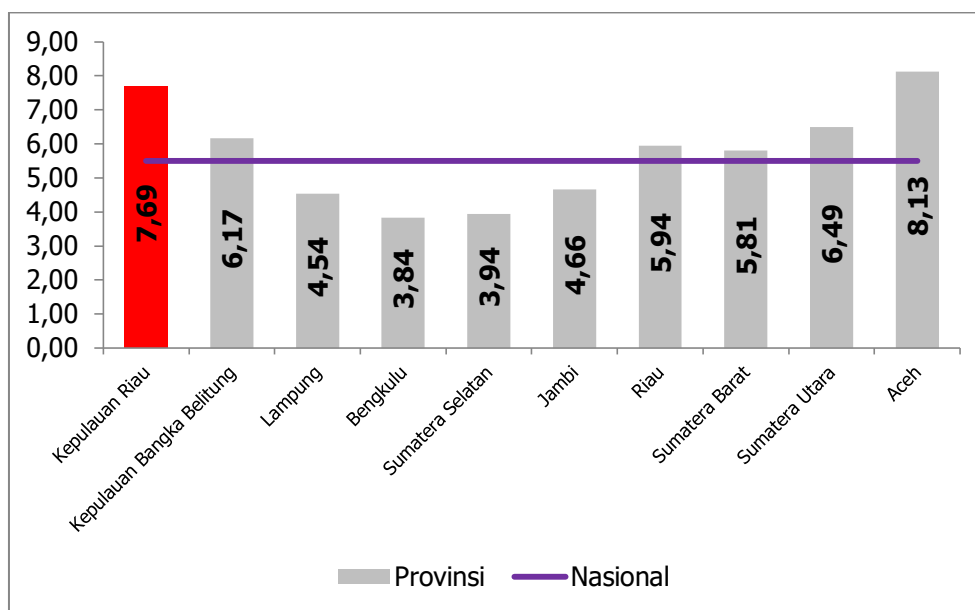
Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau sangat penting karena awal keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peningkatan kualitas calon tenaga kerja. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memiliki kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 mencapai 931.435 orang, meningkat 39.447 orang dari tahun 2015 sebanyak 836.670 orang. Dari angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja pada tahun 2016 sebanyak 859.813 orang dan penganggur sebanyak 71.622 orang. Tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 6,14% menjadi 7,69%. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,50%



Gambar 2.18 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2016

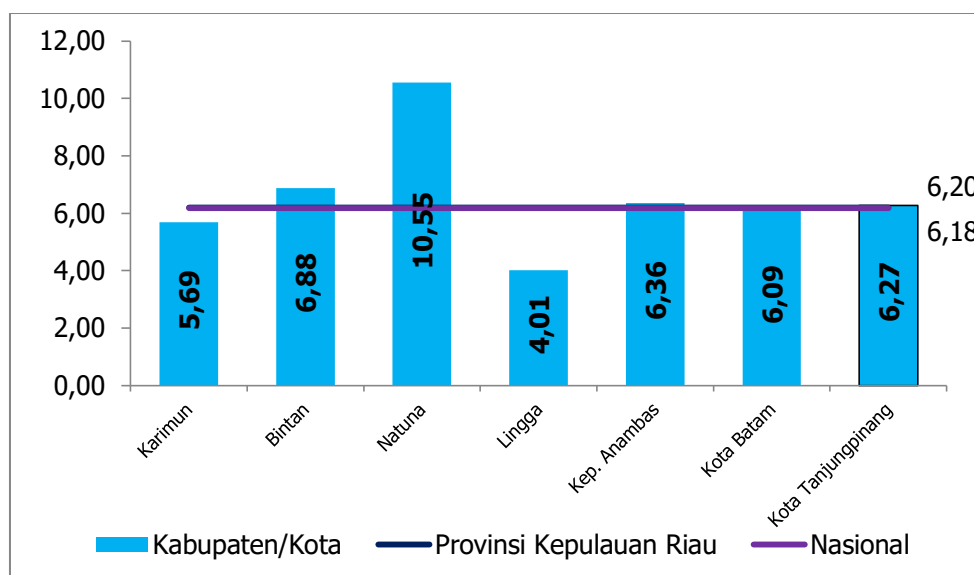
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 mencapai 9,03%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,14%. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi, seperti terlihat pada Gambar 2.19.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016 (%).

Dilihat per kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 tertinggi di Kabupaten Natuna, sedangkan terendah di Kabupaten Lingga, seperti terlihat pada Gambar 2.20.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Gambar 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Dalam rangka menurunkan pengangguran, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pelatihan kewirausahaan dan penempatan tenaga kerja. Berkaitan dengan kompetensi, Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau lebih menitikberatkan pada lulusan pelatihan yang diterima bekerja, bukan sekedar jumlah siswa yang telah mengikuti pelatihan, mengingat tujuan akhir dari pelatihan kerja itu sendiri adalah agar siswa yang telah memiliki skill dan kompetensi dapat bersaing di pasar kerja dan tertampung di dunia kerja. Meski demikian, capaian indikator SPM persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2015 telah mencapai sebesar 95%, namun pada tahun 2016 turun menjadi 47,63%.

Berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja, Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau lebih menitikberatkan pada pertumbuhan produktivitas tenaga kerja UKM, bukan sekedar jumlah siswa yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, mengingat tujuan akhir dari pembinaan produktivitas itu sendiri adalah agar tingkat produktivitas tenaga kerja semakin meningkat sehingga berpengaruh positif terhadap perkembangan UKM. Meski demikian, capaian indikator SPM pelayanan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2015 telah mencapai sebesar 85%, namun pada tahun 2016 turun menjadi 42,63%.

Kegiatan penempatan tenaga kerja dilakukan melalui mekanisme Antar Kerja. Antar Kerja merupakan suatu proses kegiatan penempatan tenaga kerja yang meliputi Informasi Pasar Kerja (IPK), pendaftaran lowongan, pendaftaran pencari kerja, bimbingan dan penempatan. Jenis Antar Kerja meliputi: (1) AKL (Antar Kerja Lokal) atau kegiatan yang membantu proses penempatan tenaga kerja antar kab/kota dalam satu provinsi; (2) AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) atau kegiatan yang membantu proses penempatan tenaga kerja antar provinsi di dalam wilayah RI; dan (3) AKAN (Antar Kerja Antar Negara) atau kegiatan yang membantu proses penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran mengenai perbandingan antara Angkatan Kerja dengan jumlah Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2016 capaian TPAK sebesar 66,67%. Hal ini dikarenakan berdasarkan data statistik jumlah Bukan Angkatan Kerja cukup tinggi yang didominasi oleh Ibu-ibu Rumah Tangga yang Mengurus Rumah Tangga. Sementara itu Tingkat Pengangguran pada tahun 2016 sebesar 9,03% meningkat dari tahun 2015 sebesar 6,20%. Tingkat pengangguran terbuka dikarenakan beberapa faktor antara lain: (1) pada saat pendataan bersamaan dengan kelulusan sekolah yang sebagian besar belum melanjutkan ke Universitas/Perguruan Tinggi; (2) Tingginya angka deportasi TKI dari Malaysia yang sebagian besar tidak kembali ke daerah asal sehingga menambah angka pencari kerja/penganggur di Kepulauan Riau, dan (3) pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

Kepesertaan Jamsostek/ BPJS ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Program jamsostek memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi

resiko sosial ekonomi dan wajib diikuti oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau membayar seluruh upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- atau lebih per bulan. Capaian Persentase Kepesertaan BPJS pada tahun 2016 sebesar 70%.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan ini menjadi hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan karena K3 bertujuan mencegah, melindungi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaannya, K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong pembudayaan K3 di tempat kerja adalah melalui pemberian penghargaan di bidang K3, yang terdiri dari penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penghargaan Kecelakaan Nihil diberikan kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program K3 sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja, juga yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. Sedangkan penghargaan SMK3 diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan manajemen K3 di perusahaannya. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan K3 untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Capaian persentase perusahaan yang menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen K3) pada tahun 2016 sebesar 1%.

Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mencapai mufakat melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan yang terakhir melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial selama enam tahun terakhir terjadi fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Persentase kasus yang diselesaikan sebesar 23% pada tahun 2016. Idealnya, persentase kasus perselisihan hubungan industrial menurun secara bertahap yang mencerminkan semakin kondusifnya iklim hubungan industrial. Namun adanya kondisi yang tidak terduga seperti krisis moneter global berimbas pada sulitnya dunia usaha di sektor formal untuk bertahan, antara lain menyebabkan naiknya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial. Dari jenis

kasus perselisihan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan PHK selalu mendominasi kasus.

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut ini.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011 -2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	96,00	96,00	95,00	96,00	95,00	47,63
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	75,00	77,00	78,00	80,00	85,00	42,63
3.	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	41,00	47,00	45,00	50,00	52,00	54,00
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,78	66,25	65,58	65,95	65,07	66,67
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,50	5,37	6,25	6,69	6,20	7,69
6.	Pekerja Formal	Orang	565.512	578.252	574.760	566.564	601.589	569.175
7.	Pekerja Informal	Orang	216.312	246.315	231.313	253.092	235.081	290.638
8.	Persentase Kepesertaan BPJS	%	43,94	44,26	44,84	41,70	42,75	70,00
9.	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70	1,0
10.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Kerja yang diselesaikan	%	25,50	21,15	19,44	30,86	20,00	23,00

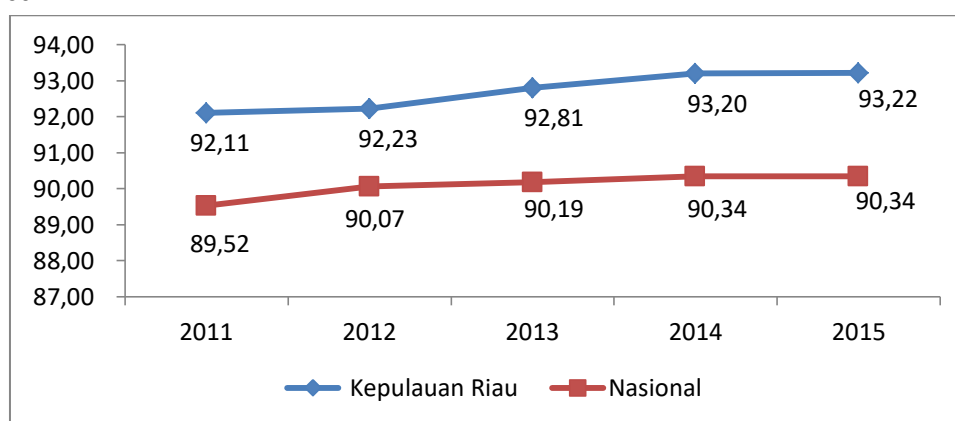
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, namun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pembangunan

seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya dan agama.

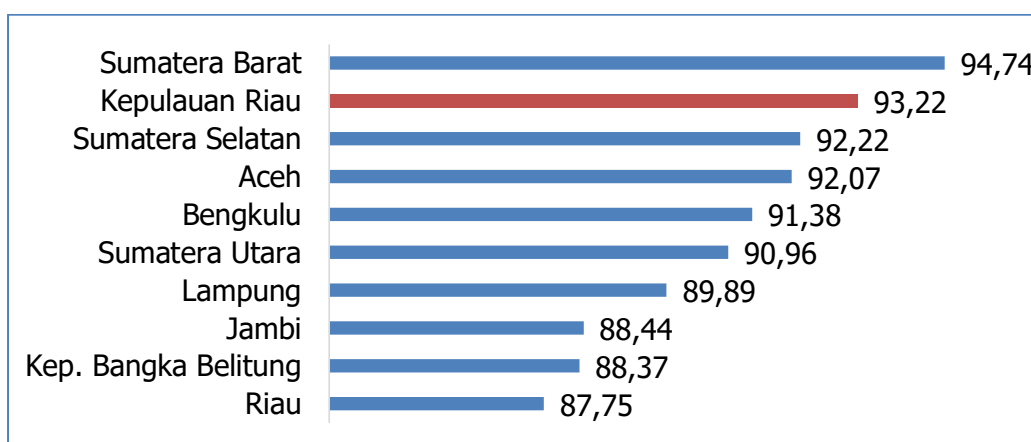
Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 93,22. Hal ini menandakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100. Perkembangan IPG dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

Gambar 2.21 Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2011-2015

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 93,22 diantara provinsi lain di wilayah Sumatera merupakan tertinggi kedua setelah Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 2.22 berikut ini.



Sumber : BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

Gambar 2.22 Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2015

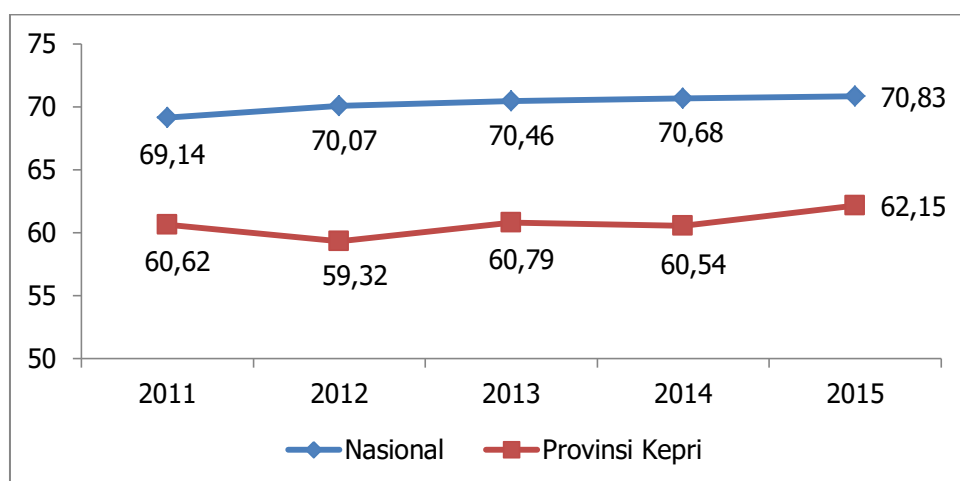
Dilihat per kabupaten/kota, pada tahun 2015 IPG tertinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 96,58, sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 89,11. Dilihat pencapaian masing-masing indikator pembentuk IPG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup laki-laki sebesar 67,28 tahun lebih rendah daripada perempuan 71,13 tahun. Rata-rata Lama Sekolah laki-laki sebesar 9,78 tahun lebih tinggi daripada perempuan 9,34 tahun. Begitu pula dengan pengeluaran pendapatan yang masih didominasi laki-laki sebesar 18.679, sedangkan perempuan hanya 11.625. Secara rinci kinerja IPG dan indikator pembentuk IPG per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49.
Capaian IPG Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dan 2015

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup 2014		Harapan Lama Sekolah 2014		Rata-rata Lama Sekolah 2014		Pengeluaran 2014		IPG 2014	IPG 2015
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Karimun	67,12	70,82	11,62	12,44	8,11	7,35	17.224	9.252	91,16	91,18
2	Bintan	67,98	71,74	11,78	12,24	8,83	8,15	19.803	11.414	92,15	92,41
3	Natuna	61,51	64,88	13,67	13,94	8,46	7,65	19.458	10.824	90,84	90,85
4	Lingga	57,84	60,99	11,88	11,56	6,32	5,37	16.475	9.105	88,59	89,11
5	Kepulauan Anambas	64,61	67,95	11,41	11,88	6,91	5,92	16.280	8.293	89,11	89,25
6	Kota Batam	70,78	74,71	12,55	12,79	10,99	10,63	24.577	16.032	94,45	94,62
7	Kota Tanjungpinang	69,55	73,42	13,63	14,25	10,19	9,70	17.141	14.022	96,54	96,58
	Provinsi Kepulauan Riau	67,28	71,13	12,38	12,66	9,78	9,34	18.679	11.625	93,20	93,22

Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

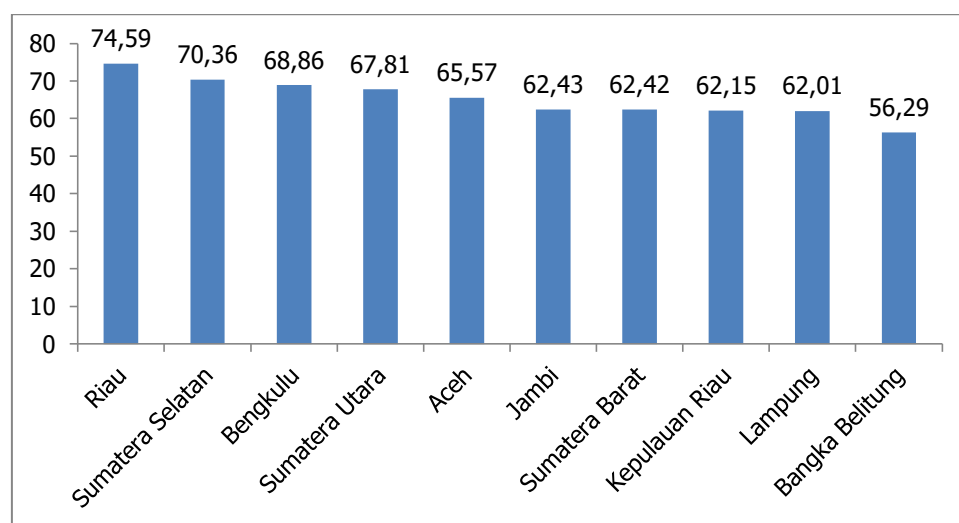
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sebesar 60,62 pada tahun 2011 menjadi 62,15 pada tahun 2015, seperti terlihat pada Gambar 2.23 berikut ini.



Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

Gambar 2.23 Perbandingan IDG di Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2011–2015

Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 62,15 apabila dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera lebih rendah dari Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, dan Sumatera Barat. Data perbandingan IPG Kepulauan Riau lebih dengan provinsi lain dapat dilihat pada Gambar 2.24 berikut.



Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

Gambar 2.24 Perbandingan IDG Provinsi Kepulauan Riau Dengan Provinsi Lain Di Wilayah Sumatera Tahun 2015

Dilihat capaian IDG per kabupaten/kota, terlihat bahwa Kota Tanjungpinang memiliki nilai IDG tertinggi sebesar 70,33, sedangkan capaian IDG terendah di Kabupaten Lingga sebesar 40,75. Peringkat selanjutnya setelah Kota Tanjungpinang yaitu Kabupaten Bintan. Perincian capaian indikator pembentuk IDG tercantum pada Tabel 2.50 berikut ini.

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Pembentuk IDG Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Indeks Pemberdayaan Gender
1	Karimun	10,00	43,19	24,64	55,55
2	Bintan	20,00	46,02	23,63	65,44
3	Natuna	10,00	39,39	23,53	52,85
4	Lingga	0,01	48,00	22,32	40,75
5	Kepulauan Anambas	10,00	49,47	25,67	56,96
6	Kota Batam	8,00	47,86	28,19	57,83
7	Kota Tanjungpinang	26,67	42,82	26,02	70,33
	Provinsi Kepulauan Riau	13,33	46,41	27,12	62,15

Sumber: BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2016

Bila dilihat dari dukungan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat perkembangan dari Tahun ke Tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2016 pencapaian persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,68%. Angka ini meningkat sebesar 2,41%, dimana pada Tahun 2016 angka ini mencapai sebesar 4,68%. Dukungan dari perangkat daerah yaitu perangkat daerah menyusun sebanyak 2 program 4 kegiatan ARG. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Adapun data tersebut diatas beserta perangkat daerah yang menyusun ARG dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut ini.

Tabel 2.51.
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap Belanja
Langsung APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

Tahun	Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase Terhadap Belanja Langsung	Belanja Langsung APBD Provinsi Kepri
2011	28.691.726.000	1,44	1.995.000.000.000
2012	55.593.461.125	2,47	2.250.000.000.000
2013	87.029.187.755	3,42	2.547.000.000.000
2014	94.979.507.825	2,72	3.495.000.000.000
2015	81.301.097.300	2,21	3.685.455.273.330
2016	75.846.996.543	4,68	1.620.000.000.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bila dilihat dari data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Kasus yang paling banyak terjadi pada anak laki-laki sebesar 248 orang pada tahun 2016. Bila dilihat pada Kabupaten/Kota, di Kota Batam Anak yang Berhadapan dengan Hukum banyak terjadi sebesar 115 orang. Data ABH dapat dilihat pada Tabel 2.52 dibawah ini.

Tabel 2.52.
Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tanjungpinang	41	2	29	0	22	1	54	-
2	Batam	65	2	112	2	138	4	115	2
3	Bintan	19	1	12	0	14	0	25	-
4	Natuna	10	0	2	0	12	0	4	1
5	Anambas	2	0	3	0	1	0	-	-
6	Lingga	0	0	1	0	0	0	-	-
7	Karimun	0	0	0	0	0	0	50	0
Jumlah		137	5	159	2	187	5	248	3
		142		161		192		251	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Kota Layak Anak (KLA) sampai dengan Tahun 2016 baru terdapat di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Batam, inipun masih berada dalam kategori Pratama. Sementara untuk Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang belum dapat dikatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Data KLA dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53.
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Kab/Kota	KLA Kab/Kota	KLA Kecamatan	KLA Kelurahan/Desa
1	Bintan	1	10	2
2	Karimun	0	12	0
3	Tanjungpinang	0	1	0
4	Lingga	0	9	0
5	Batam	1	2	0
6	Natuna	0	1	0
7	Anambas	0	0	0
Jumlah		2	35	2

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk kasus-kasus kekerasan dan perdagangan orang (*trafficking*) setiap Tahun terjadi penurunan. Kecuali di Tahun 2012, angka ini semakin meningkat selama kurun waktu tahun 2011-2016, dikarenakan semakin gencarnya penyampaian informasi tentang Undang-undang PKDRT kepada masyarakat, sehingga setiap orang menyadari bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan hukum atas setiap ketidakadilan dan kekerasan yang mereka alami. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.54 dibawah ini.

Tabel 2.54.
Jumlah Kasus Kekerasan dan Perdagangan Orang
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Kasus	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	<i>Trafficking</i> Dewasa	30	81	12	39	18	0
2	KDRT Dewasa	19	36	43	70	47	33
3	Perlindungan Perempuan	35	0	0	0	0	0
4	Perlindungan Anak	8	0	0	0	0	0
5	Titipan Sementara	0	0	0	0	0	0
6	Terlantar Dewasa	0	23	1	3	1	1
7	Kekerasan Dalam Pacaran/Dewasa	0	0	1	5	0	2
8	Penceraian	0	12	5	5	3	0
9	Pelecehan Seksual Dewasa	0	0	5	1	0	0
10	Non KTPA	0	0	0	0	18	4
11	<i>Trafficking</i> Anak	0	0	0	0	1	2
12	Kekerasan Terhadap Anak	0	0	0	0	16	19
13	Pelecehan Sexual Anak	0	0	11	25	11	2
14	Hak Anak	0	14	7	19	13	9
15	Anak Bermasalah Hukum	0	0	7	9	3	5
16	Anak Perlindungan Khusus	0	0	4	4	12	14
17	Anak Terlantar	0	0	0	0	2	0
18	Kekerasan Dalam Pacaran/Anak	0	0	0	0	0	4
Total		92	166	96	180	145	95

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan disetiap Kabupaten/Kota terdapat indikasi semakin menurun sebesar 23 %, penurunan terbesar terjadi di Kota Batam. Sementara di Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas terjadi peningkatan antara Tahun 2014 ke Tahun 2015 dan memerlukan perhatian yang dari setiap pemangku kepentingan. Data korban kekerasan per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut ini.

Tabel 2.55.
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban			
		2013	2014	2015	2016
1	Tanjungpinang	72	75	58	143
2	Batam	84	490	349	96
3	Bintan	-	7	6	22
4	Karimun	21	43	75	13
5	Lingga	9	6	6	12
6	Natuna	-	32	24	8
7	Kep. Anambas	-	4	6	3
8	Provinsi Kepri	88	109	66	33
	Jumlah	274	766	590	330

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, persentase perempuan dan anak korban perdagangan orang yang ditangani sebesar 100%. Begitu pula dengan persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan capaiannya juga mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

Secara rinci kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 2.56 dibawah ini.

Tabel 2.56.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	% Anggaran Responsif Gender dlm belanja langsung APBD Provinsi	%	6,9	8,1	4,9	6	7	4,68
2.	% Keterwakilan perempuan dalam jabatan Politis (parlemen)	%	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	15,6
3.	% KDRT	%	0,95	2	2	2	2	0,045
4.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani		100	100	100	100	100	100
5.	Persentase perempuan dan anak korban perdagangan orang yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase SKPD yang memiliki data terpilah terkait gender dan anak	%	25	32,5	37,5	45	62,5	70
7.	Tersedianya dokumen penyajian analisis data dan gender	dokumen	0	0	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota.

Untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan melaksanakan Kerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama ini terkait pengadaan, penyimpanan, perawatan dan penyaluran beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah kekurangan pangan, kerawanan pangan baik transien maupun kronis, pasca bencana, terjadinya gejolak harga dan/atau keadaan darurat sebanyak 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah provinsi juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Riau pada tingkat rumah tangga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011-2016, khususnya ketersediaan energi per kapita. Ketersediaan energi perkapita meningkat dari sebesar 2.234 Kkal/Kap/Hr pada tahun 2011 menjadi sebesar 2.427 Kkal/Kap/Hr pada tahun 2016. Ketersediaan protein perkapita juga cenderung meningkat dari sebesar 75,52 Gram/Kap/Hr pada tahun 2011 menjadi sebesar 114.36 Gram/Kap/Hr pada tahun 2016. Angka ketersediaan energi dan protein telah melebihi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke VIII tahun 2004, yaitu untuk ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hr, dan ketersediaan protein sebesar 57 gram/kap/hr.

Tingkat kerawanan pangan berdasarkan konsumsi kalori sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain penyediaan pangan, harga pangan, pendapatan keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan, serta pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Tingkat pendapatan yang rendah di bawah harga pangan, akan mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mengakses kebutuhan pangan, sehingga asupan pangan pada tingkat perseorangan di keluarga akan berkurang dan secara bertahap akan mengarah pada timbulnya kasus gizi buruk, yang akan menciptakan kualitas sumberdaya yang lemah (*lost generation*).

Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Jumlah penduduk yang rawan pangan masih cukup tinggi, terutama pada daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering dan musim ombak besar. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota, dari sebanyak 43 kecamatan dibagi kedalam enam kelompok Prioritas yang hasilnya tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2. Ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98%), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26%), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 persen) dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84%).

Kecamatan-kecamatan di Prioritas 3 merupakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang dengan karakteristik sebagai berikut: defisit produksi sereal dibandingkan kebutuhan konsumsinya dan tingginya angka stunting pada balita, angka kemiskinan pada tingkat rendah, meningkatnya akses penghubung, akses listrik dan fasilitas kesehatan dibandingkan dengan kabupaten pada Prioritas 1 dan 2. Karakteristik utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 3 berturut-turut adalah : i) tingginya rasio konsumsi terhadap produksi; ii) tingginya angka stunting pada balita. Sebanyak 3 (tiga) kecamatan pada Prioritas 3 tersebar di Kabupaten Karimun (1 kecamatan), Natuna (1 kecamatan) dan Kepulauan Anambas (1 kecamatan).

Kecamatan-kecamatan di Prioritas 4 memiliki karakteristik yang mirip dengan Prioritas 3 dalam hal tingkat keparahan terhadap ketahanan pangan dan gizi, akan tetapi memiliki faktor penyebab yang agak berbeda. Faktor penyebab utama yang membedakan Prioritas 4 dengan Prioritas 3 adalah menurunnya angka rasio konsumsi terhadap produksi, yaitu 68,7% di Prioritas 4 dan 95,1% di Prioritas 3; menurunnya angka balita stunting, yaitu 32,6% di Prioritas 4 dan 34,9% di Prioritas 3; menurunnya keterbatasan akses listrik, air bersih, fasilitas kesehatan berturut-turut yaitu 5,6%, 23,7% dan 8,9% di Prioritas 4 dibandingkan 6,7%, 24,7% dan 19,4% di Prioritas 3. Terdapat angka kemiskinan, akses infrastruktur dasar jalan, angka harapan, angka perempuan buta huruf yang pencapaian kecamatan-kecamatan di Prioritas 4 lebih buruk dibandingkan Prioritas 3. Kecamatan pada Prioritas 4 tersebar di Kabupaten Karimun (tiga kecamatan), Bintan (1 kecamatan), Natuna (2 kecamatan), Lingga (3 kecamatan) dan Kepulauan Anambas (1 kecamatan).

Kelompok Prioritas 5 dan 6 merupakan kecamatan-kecamatan paling tahan pangan dan gizi. Pencapaian pada semua indikator lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional memiliki akses ke infrastruktur dan layanan dasar yang baik, angka kemiskinan rendah, angka harapan hidup yang tinggi dan rendahnya angka perempuan buta huruf – dengan pengecualian pada stunting balita di Prioritas 5 (yaitu sebesar 48%) yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (37%) Rasio konsumsi terhadap produksi dan rasio produksi pangan pokok dibandingkan kebutuhan konsumsi Prioritas 6 lebih tinggi (defisit) dibandingkan rasio rata-rata di Prioritas 3, 4 dan 5.

Pada aspek distribusi dan harga pangan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan harga pangan di pasar-pasar yang dapat menjadi acuan atau indikator pendistribusian dan harga pangan pada masing-masing kabupaten/kota, yaitu sebanyak 7 pasar di kabupaten/kota. Secara umum stabilitas harga pangan baik pangan nabati maupun pangan hewani tergolong baik dan penyediaannya cukup. Stabilitas harga pangan pokok strategis di pasar tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam merespon kenaikan harga, krisis ekonomi dan krisis pangan dunia.

Angka kecukupan gizi yang harus dicapai penduduk Indonesia umumnya dan penduduk Provinsi Kepulauan Riau khususnya adalah yang sesuai dengan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPg) ke VIII (2004). Angka kebutuhan energi

(kalori) rata-rata yang harus dicapai penduduk Indonesia pada tingkat konsumsi sebesar 2.000 kkal/orang/hari, sedangkan angka kecukupan protein rata-rata sebesar 52 gram/orang/hari. Rata-rata konsumsi kalori perkapita di Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 2212,5 kkal/kapita/hari, berada di atas standar WNPG ke VIII tahun 2004. Rata-rata konsumsi protein perkapita perhari juga sudah memenuhi syarat yang ditetapkan WNPG yaitu sebesar 70,6 per gram/kapita/hari. Dilihat dari keragaman Konsumsi pangan, skor PPH provinsi kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari 89,6 pada tahun 2011 menjadi 85,5 pada tahun 2016. Tentunya penganeekaragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman perlu terus ditingkatkan.

Capaian kinerja urusan ketahanan pangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini.

Tabel 2.57.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penguatan Cadangan Pangan	%	0	0	0	20	30	30
2.	Pengembangan Lumbung Pangan	%	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	40,00
3.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%		33,33	33,33	33,33	33,33	32,27
4.	Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	-	9,2	6,84	4,15	1,2	6,93
5.	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/Kap/Hr	2234	2418	2433	2464	2479	2427
6.	Ketersediaan protein perkapita	Gram/Kap/Hr	75,52	72,7	82,07	102,9	112,84	114,36
7.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	0,00	100,00	0,00	0,00	70	80
8.	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persentase Penduduk Rawan Pangan)	%	21,57	23,05	20,02	21,22	18,58	17,58
9.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	89,6	85,7	90,6	90,8	83,8	84,5
10.	Konsumsi energi perkapita	Kkal/Kap/Hr	2270	2186	2302	2253,1	2153,7	2212,5
11.	Konsumsi protein perkapita	Gram/Kap/Hr	70,7	69,3	86	73,9	68,6	70,6

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

4) Pertanahan

Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian

dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan sengketa lahan terlihat dari persentase rekomendasi dalam penyelesaian kasus sengketa lahan, dengan capaian sampai dengan tahun 2016 mencapai 50%, menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pemenuhan pengadaan lahan untuk kepentingan umum di atas 5 hektar mendapat penetapan lokasi juga sudah mencapai 100%. Kinerja urusan pertanahan tercantum pada Tabel 2.58 berikut ini.

Tabel 2.58.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase rekomendasi dalam penyelesaian kasus sengketa lahan	%	40	40	40	50	50	50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

5) Lingkungan hidup

Percepatan perluasan pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah mendorong terjadinya peningkatan dampak terhadap lingkungan. Masalah lingkungan yang paling rentan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah pembuangan limbah industri, tumpahan minyak dari aktivitas transportasi, pengeboran minyak lepas pantai dan pengilangan minyak, serta penambangan pasir dan bauksit. Pelayaran kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura pertahun mencapai 12.600 kapal. Tingginya angka pelayaran kapal tersebut berkorelasi dengan terjadinya pencemaran laut dan pantai di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Batam dan Bintan oleh *slop oil* dan *sludge oil* yang terjadi sepanjang tahun (bulan Oktober s/d Februari) musim utara. Limbah *slop oil* dan *sludge oil* tersebut diperkirakan berasal dari limbah pembersihan tanki kapal (*tank cleaning*) dan dibuang sengaja di tengah laut dan lalu terbawa arus ke perairan pulau Bintan dan Batam Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata jumlah limbah *slop oil* dan *sludge oil* yang terdampar dan mencemari pantai bagian utara Pulau Bintan setiap tahunnya mencapai 50 ton.

Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2011 tercapai sebesar 63% dan pada akhir tahun 2015 sudah mencapai 100%. Namun demikian capaian pada tahun 2016 hanya 0,52% karena ada pengurangan anggaran. Kinerja dalam pengendalian pencemaran udara

ditunjukkan dengan cakupan pemantauan pencemaran udara yang dalam lima tahun terakhir sudah dilakukan dengan baik dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 capaiannya nol karena kegiatan tidak dilaksanakan akibat pengurangan anggaran.

Dilihat kondisinya, hasil pengukuran nilai COD perairan seluruh kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berkisar antara 3,3–17,1 dan kisaran angka ini mengindikasikan kondisi perairan belum tercemar. Nilai BOD perairan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi dalam keadaan baik dan tidak tercemar. secara umum seluruh parameter kualitas air bersih yang dipantau memenuhi baku mutu kualitas air kelas I (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air) sehingga layak untuk dikonsumsi dan status mutu air di setiap waduk tergolong Baik. Sebagian waduk di wilayah Kepulauan Riau memiliki status air tercemar sedang. Parameter yang menunjukkan tercemar sedang tersebut adalah DO, dan Fe. Lima kabupaten/kota yang memiliki parameter melebihi baku mutu yaitu Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. Sedangkan Kabupaten Karimun dan Bintan seluruh parameter yang diukur tidak ada menunjukkan melebihi baku mutu kualitas air.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki lahan sangat kritis (melebihi 30%) dan kritis (melebihi 50%). Meskipun sudah melalui beberapa tahun lahan bekas penambangan belum dilakukan pemulihan/reklamasi, demikian pula meluasnya lahan kritis disebabkan terjadinya perluasan lahan yang dijadikan kawasan pengembangan industri dan perumahan.

Dilihat dari sisi tingkat pengaduan masyarakat, layanan yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup juga sudah mencapai 100% dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup. Kinerja Pada proses pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup juga dilihat dapat dilihat dari capaian indikator pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) /dokumen lingkungan, dengan capaian mencapai 100%.Persentase komisi AMDAL Daerah Kab/Kota yang diawasi dan dibina juga telah mencapai 100%. Kinerja berkaitan dengan ketersediaan data lingkungan, dapat dilihat dari ketersediaan dokumen status lingkungan hidup daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, jumlah laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) dokumen dan jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) dokumen.

Perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase sumber air yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan serta diinformasikan status mutu airnya	%	63	88	100	100	100	0,52
2.	Persentase kab/kota yang diinformasikan status mutu udara ambiennya	%	29	29	71	100	100	0
3.	Persentase komisi AMDAL Daerah Kab/Kota yang diawasi dan dibina	Kab/kota	7	7	7	7	7	7
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/dokumen lingkungan.	%	57	60	93	100	100	100
5.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
6.	Ketersediaan dokumen status lingkungan hidup daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1
7.	jumlah laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Provinsi Kep. Riau	dokumen	1	1	1	1	1	1
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota	dokumen	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio pasangan berakte menikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Capaian indikator rasio penduduk ber KTP menunjukkan perkembangan yang sangat baik meskipun pada tahun 2016, penduduk yang ber KTP baru sebesar 89,68%. Capaian ini harus dimaksimalkan pada tahun-tahun berikutnya supaya administrasi kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tertib dan baik. Untuk dapat memaksimalkan capaian tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target capaian.

Sementara itu pada indikator rasio bayi berakte kelahiran, capaian pada tahun 2015 sebesar 73,64%. Capaian ini meningkat dari tahun 2014 yakni sebesar 59,29%. Pada tahun 2014 Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran sebesar 60,01%, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 75,00%. Capaian ini masih perlu dioptimalkan mengingat hampir semua dokumen administrasi kependudukan membutuhkan akta kelahiran sebagai salah satu syarat. Kesadaran masyarakat masih belum optimal dalam melaporkan dan mengurus akta kelahiran. Adapun alasannya karena masih belum dibutuhkan. Namun apabila dibutuhkan/mendesak diperlukan, maka mereka baru akan mengurusnya. Selain itu masih adanya opini masyarakat bahwa dalam mengurus akta kelahiran akan melalui birokrasi yang berbelit-belit sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya capaian indikator bayi berakte kelahiran.

Pada indikator rasio pasangan berakte nikah, capaiannya pada tahun 2015 baru mencapai 51,67%. Hal ini disebabkan karena masih ada penduduk yang telah kawin secara agama khususnya non muslim tapi belum melaporkan atau mencatatkan status perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Padahal akte nikah tersebut sangat penting dalam pengurusan akte kelahiran anak, menentukan status keluarga dan penentuan ahli waris. Sementara itu, pada indikator kepemilikan kartu keluarga, capaiannya sudah 100% sampai pada tahun 2016.

Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 2.60 di bawah ini.

Tabel 2.60.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Riau Tahun 2011- 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio penduduk ber KTP	%	63,1	67,9	75,5	79,5	85,4	89,68
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	%	75,34	75,36	70,56	59,29	73,64	
3	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	%	NA	NA	NA	60,01	64,00	75,00
4	Rasio pasangan berakte nikah	%	56,05	55,13	44,08	49,34	51,67	
5	Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat; fasilitasi kerja sama antar-desa dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi; pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di

bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Provinsi Kepulauan Riau yang sudah sangat baik yaitu pada indikator: PKK Aktif; Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memperoleh pembinaan pengembangan usaha; Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif; Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); Fasilitasi Koordinasi (TMMD); TTG dihasilkan; dan TTG Unggulan. Untuk indikator Persentase Desa memiliki dokumen perencanaan (RPJMDes, dan RKPDes) capaiannya baru mencapai 90,91%, tentunya capaian ini perlu ditingkatkan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang Desa.

Sementara itu beberapa indikator yang capaian target belum sesuai harapan yaitu : Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memenuhi syarat kelembagaan sebesar 66,67%; Persentase kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang memperoleh pembinaan pengembangan Usaha sebesar 23,55%; Persentase Posyantek aktif sebesar 70%; Persentase Posyandu Aktif sebesar 22%; Persentase desa yang berhasil menyusun profil desa/kelurahan sebesar 43,27%. Tentunya diperlukan peningkatan kinerja pada indikator yang capaiannya masih kurang tersebut.

Secara lengkap penyajian data indikator capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau dapat disajikan dalam Tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memenuhi syarat kelembagaan	%	0	83,33	100	66,67	66,67
3.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memperoleh pembinaan pengembangan usaha	%	0	0	100	100	100
4.	Persentase kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang memperoleh pembinaan pengembangan Usaha	%	5,35	10,86	17,13	17,13	23,55
5.	Persentase Posyantek aktif	%	10	20	30	50	70
6.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase Posyandu Aktif	%	17	19	19	20	22
8.	Persentase desa yang berhasil menyusun profil desa/kelurahan	%	0	0	14,42	28,85	43,27
9.	Persentase Desa memiliki dokumen perencanaan (RPJMDes, dan RKPDes)	%	25,45	36,36	54,55	72,73	90,91

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
10.	TTG dihasilkan	%	22,50	25,00	50,00	75,00	100,00
11.	TTG Unggulan	%	25,00	37,50	62,50	75,00	100,00

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil.

8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah provinsi pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup: pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera. Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama ini belum ada perangkat daerah yang menanganinya. Penanganan dilakukan oleh instansi pusat yaitu BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan dukungan dalam pelaksanaan program KB.

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Peserta KB Aktif di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebanyak 283.702 orang, sedangkan peserta KB baru sebanyak 48.829 orang. Sementara itu Unmet Need KB pada tahun 2015 capaiannya sebesar 11,91%, menunjukkan bahwa ada pasangan usia subur yang tidak dapat memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi. Dalam rangka mengurangi unmetneed tentunya perlu ada peningkatan pelayanan KB guna pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pencapaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2013-2015

No	Indikator Kinerja Program KB	Satuan	2013	2014	2015
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru		6.138	NA	48.829
	- IUD	orang	251	NA	3.120
	- MOW	orang	51	NA	860
	- Implant	orang	174	NA	2.127
	- MOP	orang	14	NA	9
	- Kondom	orang	267	NA	3.397
	- Suntik	orang	3.295	NA	19.955
	- Pil	orang	2.086	NA	19.361
2	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif		236.074	NA	283.702
	- IUD	orang	23.739	NA	19.996
	- MOW	orang	4.811	NA	6.817
	- Implant	orang	17.541	NA	19.014
	- MOP	orang	897	NA	1.038
	- Kondom	orang	15.161	NA	19.138
	- Suntik	orang	96.886	NA	114.643
	- Pil	orang	77.039	NA	103.056
3	Unmet Need	%	5,91	NA	24,05
4	Persentase PUS Anggota BKB yang ber-KB	%	NA	NA	87,38
5	Persentase PUS Anggota BKR yang ber-KB	%	NA	NA	93,02
6	Persentase PUS Anggota BKL yang ber-KB	%	NA	NA	91,11
7	Persentase PUS Anggota UPPKS yang ber-KB	%	NA	NA	77,90

Sumber: BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

PUS Peserta KB semua cara di tahun 2015 sebesar 47,05 %, sedangkan yang tidak menggunakan KB sebesar 52,21%. Jumlah PUS yang tidak ber KB di Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi. Paling tinggi di Kota Batam sebesar 60,06% dan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 26,84%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut ini.

Tabel 2.63.
Persentase Peserta KB dan Bukan Peserta KB Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	CPR		Tidak Pakai Alat/cara KB	Total
		Semua Cara	Cara Modern		
1	Karimun	60,83	60,12	39,17	100,00
2	Bintan	54,44	53,70	45,56	100,00
3	Natuna	66,69	66,03	33,31	100,00
4	Lingga	73,16	72,84	26,84	100,00
5	Kepulauan Anambas	69,43	68,35	30,57	100,00
6	Batam	39,94	39,02	60,06	100,00
7	Tanjung Pinang	49,79	47,89	50,21	100,00
	Kepulauan Riau	47,05	46,11	52,95	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

Unmetneed KB tahun 2015 sebesar 24,05%, ini diterbagi atas unmetneed spacing sebesar 7,36% dan unmetneed limiting sebesar 16,69%. Sementara itu total permintaan berKB sebesar 70,16%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut ini.

Tabel 2.64.
Persentase Unmetneed, Peserta KB Aktif (CPR) dan Total Permintaan ber-KB Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Unmetneed			CPR		Total Permintaan ber-KB (Total Demand)	Permintaan ber-KB yang Terpenuhi (Demand Satisfaction)
		Penjarangan (spacing)	Pembatasan (limiting)	Total Unmetneed	Semua Cara	Cara Modern		
1	Karimun	2,38	18,97	21,35	60,83	60,12	81,47	73,79
2	Bintan	5,80	16,52	22,32	54,44	53,70	76,02	70,65
3	Natuna	1,78	9,53	11,31	66,69	66,03	77,34	85,37
4	Lingga	2,83	6,48	9,31	73,16	72,84	82,15	88,67
5	Kepulauan Anambas	1,34	4,51	5,85	69,43	68,35	74,20	92,12
6	Batam	9,38	17,12	26,50	39,94	39,02	65,52	59,56
7	Tanjung Pinang	5,99	21,59	27,58	49,79	47,89	75,47	63,45
	Kepulauan Riau	7,36	16,69	24,05	47,05	46,11	70,16	65,72

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

Pemakaian alat kontrasepsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, penggunaan metode kontrasepsi suntikan adalah yang paling diminati. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya persentase PUS berKB yang menggunakan alat kontrasepsi suntikan yaitu sebesar 56,18%, sedangkan yang terendah adalah metode menyusui alami yaitu sebanyak 0,11%. Sementara itu PUS berKB yang menggunakan metode MKJP sebanyak 15,90%. Persentase pemakaian kontrasepsi

tahun 2015 sebesar 46,11%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut ini.

Tabel 2.65.
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Berdasarkan Metode Tertentu Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	CPR		MKJP	MOW	MOP	IUD	Alat/cara KB yang sedang digunakan							
		Semua Cara	Cara Modern					Suntikan	Susuk	Pil	Kondom	Intravag/kondom wanita/diafragma	Metode menyusui alami	Pantang berkala/kalender	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (6)+(7)+(8)+(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Karimun	60.83	60.12	7.34	1.58	0.38	2.36	61.70	3.03	28.66	0.83	0.32	-	1.16	-
2	Bintan	54.44	53.70	16.29	1.40	1.32	4.56	52.42	9.01	26.47	3.48	-	0.61	0.18	0.55
3	Natuna	66.69	66.03	9.40	2.72	-	2.56	54.65	4.13	34.96	-	-	0.99	-	-
4	Lingga	73.16	72.84	12.65	1.69	-	2.36	57.24	8.61	29.15	0.53	-	-	0.43	-
5	Kepulauan Anambas	69.43	68.35	8.91	1.86	-	1.40	49.57	5.65	38.99	0.97	-	-	1.55	-
71	B A T A M	39.94	39.02	18.83	2.75	1.60	9.86	57.43	4.63	17.41	3.75	0.28	-	2.06	0.25
72	Tanjung Pinang	49.79	47.89	18.76	2.13	0.43	11.62	47.50	4.59	29.03	0.88	-	-	3.21	0.61
	Kepulauan Riau	47.05	46.11	15.90	2.31	1.06	7.45	56.18	5.07	23.15	2.58	0.19	0.11	1.65	0.24

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu. Sedangkan Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah ASFR, dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahunan. ASFR tertinggi terjadi pada kelompok usia 25-39 tahun sedangkan TFR di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 2,312. Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau TFR tertinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. TFR pada masing-masing kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Angka ASFR, TFR dan Rata-rata UKP Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	ASFR							TFR	Rata-rata UKP
		15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 -49		
1	Kab. Karimun	24,43	77,39	183,43	126,91	75,43	17,65	8,36	2,568	21,77
2	Kab. Bintan	45,52	114,08	152,08	89,75	38,71	17,37	3,62	2,306	21,76
3	Kab. Natuna	56,49	200,46	134,80	80,69	68,87	14,72	0,36	2,782	20,84
4	Kab. Lingga	44,89	130,55	129,46	105,57	83,92	20,95	0,46	2,579	21,18
5	Kab. Kepulauan Anambas	40,53	192,92	156,69	125,76	44,94	27,74	19,47	3,040	20,81
6	Kota. Batam	15,35	95,67	152,36	86,29	71,23	23,23	5,54	2,248	23,41
7	Kota. Tanjung Pinang	6,85	82,99	146,70	105,59	79,13	9,54	8,28	2,195	22,28
	Kep. Riau	21,76	98,73	153,62	92,40	70,16	19,97	5,86	2,312	22,72

Sumber: Diolah dari Hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional, 2015

9) Perhubungan

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Singapura, Vietnam, Malaysia dan Tiongkok. Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjungpinang terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis pada tingkat internasional. Disamping itu Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk urusan perhubungan mencakup sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); pelayaran dan perkeretaapian. Untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana transportasi baik udara, laut dan darat merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan wilayah di Kepulauan Riau dimana kondisi wilayahnya merupakan kepulauan. Ketersediaan fasilitas jasa pelayanan di bidang transportasi udara di Provinsi Kepulauan Riau menjadi sangat penting mengingat wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau disamping kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat seiring perkembangan daerah, terutama untuk kepentingan-kepentingan yang membutuhkan efisiensi waktu.

Untuk mendukung lalulintas perhubungan udara, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 6 bandar udara. Bandar Udara Hang Nadim di Kota Batam sebagai Bandar Udara Pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan sekunder. Penggunaannya sebagai Bandar Udara Internasional. Ukuran landasan pacu (*run way*) Bandar Udara Hang Nadim yang ada saat ini adalah 4.025 x 45 meter dan dapat didarati pesawat berbadan lebar sedang jenis Boeing 737-900 atau sekelasnya. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang sebagai Bandar Udara Pengumpan (*spoke*). Penggunaannya sebagai bandar udara Internasional. Bandar Udara Ranai di Natuna sebagai Bandar Udara Pengumpan (*spoke*). Penggunaannya sebagai bandar udara Domestik. Ukuran landasan pacu (*run way*) Bandar Udara Ranai yang ada saat ini adalah 2.550 x 30 meter yang dapat didarati pesawat jenis Boeing 737-200 atau sekelasnya. Bandar udara Raja Haji Abdullah di Tanjung Balai Karimun sebagai bandar udara pengumpan (*spoke*). Penggunaannya sebagai bandar udara Domestik. Ukuran landasan pacu (*run way*) Bandar Udara Raja Haji Abdullah yang ada saat ini adalah 1.300 x 30 meter yang dapat didarati pesawat jenis ATR 50 atau sekelasnya. Untuk peningkatan fasilitas sisi udara jangka panjang ukuran landasan akan dikembangkan menjadi 1600 x 30 meter yang akan didarati pesawat jenis ATR 72 atau sekelasnya. Bandar Udara Dabo di Kabupaten Lingga sebagai Bandar Udara Pengumpan (*spoke*). Penggunaannya sebagai bandar udara Domestik. Ukuran landasan pacu (*run way*) Bandar Udara Dabo yang ada saat ini adalah 1.300 x 30 meter yang dapat didarati pesawat jenis ATR 50 atau sekelasnya. Untuk peningkatan fasilitas sisi udara jangka panjang ukuran landasan akan dikembangkan menjadi 1800 x 45 meter yang akan didarati pesawat jenis ATR 72 atau sekelasnya. Adapun Bandara Matak Kepulauan Anambas difungsikan sebagai Pengumpan (P), dengan penggunaannya sebagai bandara Domestik/Khusus.

Tabel 2.67.
Data Bandar Udara Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Nama Bandar Udara	Kabupaten/Kota	Penggunaan Bandara	Hirarki
1.	Hang Nadim	Batam	Internasional	Pengumpul Sekunder (PS)
2.	Raja Haji Fisabilillah	Tanjungpinang	Internasional	Pengumpan (P)
3.	Dabo	Lingga (Singkep)	Domestik	Pengumpan (P)
4.	Ranai	Natuna	Domestik	Pengumpul Tersier (PT)
5.	Raja Haji Abdullah	Tanjung Balai Karimun	Domestik	Pengumpan (P)
6.	Matak	Kepulauan Anambas	Domestik/ Khusus	Pengumpan (P)

Jumlah pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. Kp 414 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebanyak 132 unit, dengan perincian sebanyak 15 pelabuhan terdapat di Kota Batam, 36 pelabuhan di Kabupaten Bintan, 12 pelabuhan di Kabupaten Karimun, 4 pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 11 pelabuhan di Kabupaten Lingga, 18 pelabuhan di Kabupaten Natuna dan 28 pelabuhan di Kota Tanjungpinang. Perincian jumlah pelabuhan di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Data Pelabuhan Di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. Kp 414 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Kabupaten/Kota	Nama Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan
Batam	1. Batu Ampar	Pelabuhan Utama
	2. Sekupang	Pelabuhan Utama
	3. Kabil	Pelabuhan Utama
	4. Nongsa	Pelabuhan Pengumpan Regional
	5. Pulau Bulan	Pelabuhan Pengumpan Regional
	6. Pulau Sambu	Pelabuhan Pengumpan Regional
	7. Batam Center	Pelabuhan Pengumpan Regional
	8. Batu Besar	Pelabuhan Pengumpan Regional
	9. Belakang Padang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	10. Harbour Bay	Pelabuhan Pengumpul
	11. Sagulung	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	12. Sijantung	Pelabuhan Pengumpan Regional
	13. Tanjung Riau	Pelabuhan Pengumpan Regional
	14. Telaga Punggur	Pelabuhan Pengumpan Regional
	15. Teluk Senimba	Pelabuhan Pengumpan Regional
Bintan	16. Berek Motor	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	17. Batu	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	18. Batu Licin	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	19. Busung	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	20. Galang Batang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	21. Gentong Pasri Batu	Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kabupaten/Kota	Nama Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan
	22. Jembatan Kawal	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	23. Keke Baru	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	24. Lagoi	Pelabuhan Pengumpul
	25. Lobam	Pelabuhan Pengumpul
	26. Malang Rapat	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	27. P. Buton	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	28. P. Gobin	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	29. P. Hantu	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	30. P. Kelong	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	31. P. Kelong	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	32. P. Koyan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	33. P. Matang	Pelabuhan Pengumpan Regional
	34. P. Mapur	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	35. P. Numbing	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	36. P. Pangkil Besar	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	37. P. Pangkil	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	38. P. Pangkil Kecil	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	39. P. Poto	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	40. P. Pulau	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	41. P. Sirai	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	42. P. Telang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	43. Pelantar Korindo	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	44. Sei Kolak Kijang	Pelabuhan Pengumpul
	45. Semen Tekojo	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	46. Sungai Enam	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	47. Sungai Kecil	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	48. Tambelan	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	49. Tanjung Berakit	Pelabuhan Pengumpul
	50. Tanjung Uban	Pelabuhan Pengumpul
	51. Trikora	Pelabuhan Pengumpan Lokal
Karimun	52. Malarko	Pelabuhan Pengumpul
	53. Moro	Pelabuhan Pengumpul
	54. Pasir Panjang	Pelabuhan Pengumpan Regional
	55. Tanjung Batu	Pelabuhan Pengumpul
	56. Urung/Tg. Berlian	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	57. Bom Panjang/KPK	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	58. Buru	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	59. Durai Kota	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	60. Paret Rempak	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Lokal, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional, dan tahun 2020 menjadi Pelabuhan Pengumpul
	61. Selat Beliah	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	62. Tanjung Berlian	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	63. Tg. Balai	Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan

Kabupaten/Kota	Nama Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan
		Pengumpul Pelabuhan Utama
Kep. Anambas	64. Letung	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	65. Tarempa	Pelabuhan Pengumpul
	66. Kuala Maras	Pelabuhan Pengumpul
	67. Matak	Pelabuhan Pengumpan Lokal
Lingga	68. Benan	Pelabuhan Pengumpan Regional
	69. Berhala	Pelabuhan Pengumpan Regional
	70. Cempa	Pelabuhan Pengumpan Regional
	71. Dabo singkep	Pelabuhan Pengumpan Regional
	72. Daik	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	73. Jagoh	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	74. Marok Tua	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	75. Medang	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	76. P. Mas	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	77. Pancur	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	78. Pekajang	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	79. Penuba	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	80. Rejai	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	81. Sei Buluh	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	82. Sei Tenam	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	83. Senayang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	84. Tajur Biru	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
85. Tanjung Buton	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul	
86. Tanjung Kelit	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul	
Natuna	87. Binjai	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	88. Kelarik	Pelabuhan Pengumpan Regional
	89. Maro Silit	Pelabuhan Pengumpan Regional

Kabupaten/Kota	Nama Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan
	90. Midai	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	91. Penagi	Pelabuhan Pengumpan Regional
	92. Pulau Laut	Pelabuhan Pengumpan Regional
	93. Pulau Seluan	Pelabuhan Pengumpan Regional
	94. Pulau Tiga	Pelabuhan Pengumpan Regional
	95. Ranai	Pelabuhan Pengumpan Regional
	96. Sabang Mawang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	97. Sedanau	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	98. Sededap	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	99. Selat Lampa	Pelabuhan Pengumpan Regional
	100. Semedang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	101. Serasan	Pelabuhan Pengumpan Regional
	102. Subi	Pelabuhan Pengumpan Regional
	103. Tanjung Kumbik	Pelabuhan Pengumpan Lokal
104. Teluk Buton	Pelabuhan Pengumpan Regional	
Tanjungpinang	105. Batu Anam	Pelabuhan Pengumpan Regional
	106. Tanjungpinang	Pelabuhan Pengumpul
	107. Tg. Moco	Pada tahun 2011 Pelabuhan Pengumpan Regional, pada tahun 2015 berubah menjadi Pelabuhan Pengumpul
	108. Balai Adat Indra sakti	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	109. Daeng Celak	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	110. Daeng Marewa	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	111. Dompok	Pelabuhan Pengumpul
	112. Dompok Sebrang	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	113. Kampung Bugis	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	114. Kampung Lama Dompok	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	115. Kelam Pagi	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	116. Madong	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	117. P. Penyengat	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	118. Pelantar Asam	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	119. Pelantar I	Pelabuhan Pengumpan Lokal
	120. Pelantar II	Pelabuhan Pengumpan Regional
	121. Sei Jang	Pelabuhan Pengumpan Regional
	122. Sei Ladi	Pelabuhan Pengumpan Lokal
123. Sekatap Darat	Pelabuhan Pengumpan Lokal	
124. Senggarang	Pelabuhan Pengumpan Lokal	
125. Tanjung Ayun	Pelabuhan Pengumpan Lokal	
126. Tanjung Duku	Pelabuhan Pengumpan Lokal	
127. Tanjung Geliga	Pelabuhan Pengumpan Regional	
128. Tanjung Lanjut	Pelabuhan Pengumpan Lokal	
129. Tanjung Sebauk	Pelabuhan Pengumpan Lokal	
130. Tanjung Siambang	Pelabuhan Pengumpan Lokal	
131. Tanjung Unggat	Pelabuhan Pengumpan Regional	
132. Wisata Penyengat	Pelabuhan Pengumpan Lokal	

Keberadaan lalulintas penyeberangan juga tidak kalah pentingnya di Provinsi Kepulauan Riau. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 6 lintasan penyeberangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan menteri perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989, KM 25 Tahun 1991 dan SK 3027 Tahun 2011, yaitu lintas penyeberangan Telaga Punggur-Tanjung Uban (PP), Karimun-Mengkapan (PP), Tanjungpinang-Karimun (PP), Tanjungpinang – Dabo (PP), Dabo-Telaga Pungkur (PP) dan Telaga Punggur-Karimun (PP). Untuk Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 6 Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Telaga Punggur, Tanjung Uban, Parit Rempak, Dompok, Jagoh dan Selat Belia dengan status beroperasi. Penyelenggaraannya dilakukan oleh PT. ASDP untuk Telaga Punggur dan Tanjung Uban, sedangkan untuk Parit Rempak, Dompok, Jagoh, Penarik dan Selat Belia dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten.

Untuk memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta angkutan komoditas/barang dari daerah terpencil dan terisoir ke daerah lain atau sebaliknya, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan 3 (tiga) unit kapal Perintis KM. Gunung Bintang dengan ukuran GRT 990, kapasitas penumpang 350 orang dan barang 300 ton, dan KM. Sabuk Nusantara 30 dan 39 dengan ukuran GRT 1.200, kapasitas penumpang 400 orang dan barang 50 ton yang berpangkalan di Tanjungpinang dan Kijang, untuk melayani wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan rute yang dilayani :

1. KM. Gunung Bintang : Tanjungpinang-78-Senayang-51-Dabo-24-Pulau Berhala-24-Dabo-60-Pulau Pekajang-37-Bliny-37-Pulau Pekajang-60-Dabo-51-Senayang-78-Tanjungpinang-226-Tambelan-135-Pontianak-135-Tambelan-226-Tanjungpinang, selama 12 hari 1 voyage, pangkalan Tanjungpinang;
2. KM. Sabuk Nusantara 30: Tanjungpinang-226-Tambelan-135-Pontianak-175-Serasan-50-Subi-65-Ranai-60-Pulau Laut-38-Kelarik-30-Sedanau-20-PulauTiga-52-Midai-112-Tarempa-37-Kuala Maras-175-Tanjungpinang, selama 11 hari 1 voyage, pangkalan Tanjungpinang;
3. KM. Sabuk Nusantara 39 : Kijang-175-Kuala Maras-37-Tarempa-112-Midai-52-Pulau Tiga-20-Sedanau-30-Klarik-38-Pulau Laut-60- Ranai - 65 - Subi - 50 - Serasan- 175- Pontianak-135-Tambelan-226-Kijang, selama 12 hari 1 voyage, pangkalan Kijang.

Berkaitan dengan perhubungan darat, jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi menunjukkan peningkatan dari sebanyak 1.985 unit pada tahun 2011 menjadi 2.412 unit pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan ada perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, terjadi peningkatan sarana seperti rambu-rambu lalu lintas, Marka jalan, APILL, *Guard rail*, Paku marka jalan, *Delineator*, RPPJ, *Warning light*, ZOSS, Cermin tikungan dan ATCS. Tentunya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan perlu ditingkatkan dengan memperhitungkan kebutuhan prioritas guna pemerataan pembangunan wilayah.

Secara rinci kinerja urusan perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kepulauan Riau
Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pelabuhan angkutan penyeberangan yang sudah beroperasi	unit	4	5	5	6	6
2	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik :						
	Rambu-rambu lalu lintas	Unit	665	756	876	985	1.078
	Guardrail	Meter	2.416	2.712	2.818	3.119	3.325
	Delineator	Buah	1.084	1.226	1.397	1.561	1.750
	RPPJ	Unit	24	26	29.4	29.4	35
	Cermin Tikungan	Unit	5	5	6	7	8
3.	Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi	unit	1.985	2.084	2.188	2.297	2.412
4.	Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan	unit	4	5	6	6	7
5.	Jumlah lintas penyeberangan yang terlayani	Trayek (lintas)	4	5	6	6	6
6.	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan	Orang	2	2	3	3	3
7.	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai perencana, pengawas pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan serta pengelola pelabuhan ASDP	Orang	0	0	0	1	4
8.	Jumlah awak angkutan yang memiliki prestasi sebagai awak teladan	Orang	50	75	100	125	125
9.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	Unit	950	1.080	1.251	1.407	1.540
10.	Marka jalan	Meter	143.965	145.320	148.250	152.320	167.397
11.	APILL	Unit	29	31	34	37	40
12.	Guard rail	Meter	3.452	3.874	4.025	4.456	4.750

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
13.	Paku marka jalan	Buah					225
14.	Delineator	Buah	1.548	1.752	1.995	2.230	2.500
15.	RPPJ	Unit	34	37	42	42	50
16.	Warning light	Unit	38	41	43	47	49
17.	ZOSS	Unit	5	5	5	5	6
18.	Cermin tikungan	Unit	7	7	8	10	12
19.	ATCS	Unit	15	16	18	20	23
20.	Jumlah bandar udara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar	Bandara	3	3	3	3	3
21.	Jumlah angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar provinsi	Pesawat	0	3	4	4	5
22.	Jumlah trayek perintis	Trayek	2	2	3	3	3
23.	Jumlah armada angkutan laut antar kabupaten/kota.	Unit	2	2	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan

10) Komunikasi dan Informatika

Jaringan komunikasi dan informatika sangatlah penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Adanya jaringan komunikasi yang baik dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting. Dengan adanya akses informasi yang baik, transparansi pemerintah dan partisipasi secara aktif dari masyarakat, diharapkan akan terbentuk *good governance*. Untuk mendukung jaringan komunikasi yang baik, jumlah unit jaringan komunikasi juga harus mencukupi. Capaian indikator persentase SKPD memiliki akses layanan internet (terhubung jaringan LAN-WLAN) pada tahun 2015 baru mencapai 86%, tentunya kedepan perlu ada peningkatan penyediaan jaringan komunikasi dan informatika di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, dikembangkan *e-Government* yang akan mempermudah aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berkaitan dengan *e-Government*, jumlah aplikasi *e-Government* di lingkup pemerintah provinsi sampai pada tahun 2015 hanya 8 aplikasi. Terkait dengan jumlah aparatur SKPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus berupa pengetahuan TIK dan *e-Government* di lingkup pemerintah provinsi masih perlu ditingkatkan karena jumlahnya yang masih sedikit. Peningkatan jumlah aparatur dapat dilakukan dengan melakukan perekrutan baru atau dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Hal ini perlu dilakukan supaya kualitas SDM meningkat sehingga dapat mengelola dan menyediakan informasi yang terkini yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, capaian indikator persentase jumlah nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat dan sub domain yang dikelola dengan baik dengan informasi yang terkini capaian pada tahun 2015 sudah mencapai 100%. Sementara itu persentase website SKPD telah memiliki sub domain resmi capaiannya masih rendah yaitu 29% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum seluruh SKPD memiliki sub domain resmi sebagai media penyebarluasan informasi publik.

Berkaitan penyebarluasan informasi, jumlah media massa (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) milik swasta yang berbadan hukum/terdaftar di lingkup provinsi, baru 100 media yang terdaftar sampai pada tahun 2015. Jumlah saluran komunikasi/media milik Pemda Provinsi (media cetak, elektronik, website, media sosial dan lain-lain) yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi publik baru 4 saluran sampai pada tahun 2015.

Dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi adalah pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah provinsi serta pengelolaan e-government di lingkup pemerintah provinsi. Capaian nilai keterbukaan informasi dan komunikasi pemerintah provinsi kepri mencapai 59,5%, masih rendah. Untuk itu perlu adanya usaha perbaikan ke depan melalui pengelolaan data dan pelayanan informasi serta meningkatkan peran dan fungsi PPID pada setiap OPD.

Secara rinci kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut ini.

Tabel 2.70.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kepulauan Riau Tahun 2011–2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase website SKPD telah memiliki sub domain resmi	%	4	14	18	27	29
2	Persentase SKPD memiliki Akses layanan Internet (terhubung Jaringan LAN-WAN)	%	45	49	61	65	86
3	Jumlah Aplikasi e-Government lingkup Pemerintah Provinsi	aplikasi	2	3	6	7	8
4	Persentase Jumlah nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain yang dikelola dengan baik dengan informasi yang update	%	50	71	78	85	100
5	Jumlah aparatur SKPD memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK dan E-government	orang	15	20	20	30	40

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
6	Jumlah media massa (media cetak, elektronik, website, media sosial, dll) milik swasta yang berbadan hukum/terdaftar di lingkup provinsi	media	68	75	87	92	100
7	Jumlah saluran komunikasi/media milik Pemda Provinsi (media cetak, elektronik, website, media sosial, dll) yang dimanfaatkan untuk mendiseminasikan informasi publik)	Saluran	3	3	3	4	4
8	Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi public	Skala nilai	NA	NA	NA	59,5	59,5
9	Nilai e-government	Skala nilai	NA	1,85	1,85	1,85	1,85

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memiliki posisi yang cukup penting dalam perekonomian daerah. Kewenangan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, mencakup: Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberian Izin KSP/USP, Penilaian Kesehatan KSP/USP, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pengembangan UKM.

Kinerja berkaitan dengan Pembinaan dan Pemberdayaan koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dapat dilihat dari persentase koperasi aktif. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3(tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat (menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI nomor:23/per/M.KUKM/IX/2015). Capaian persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi dari sebesar 74,26% pada tahun 2011 menjadi 49,00% pada tahun 2015, dan jumlah koperasi yang dibina pada kisaran 410 hingga 470 koperasi.

Ketidaktifan koperasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, pembentukan koperasi yang bukan sepenuhnya dari kebutuhan dari masyarakat, tetapi berasal dari dorongan/inisiasi pemerintah; tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah yang terlihat dari partisipasi anggota koperasi masih berupa partisipasi pasif (hanya berperan sebagai anggota) dan menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada pengurus; manajemen koperasi belum profesional yang banyak terjadi pada koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Persebaran jumlah koperasi berdasarkan tingkat keaktifan per Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel 2.71 berikut ini.

Tabel 2.71.
Persebaran jumlah Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Batam	429	514	943
2.	Bintan	169	130	299
3.	Karimun	52	304	356
4.	Tanjungpinang	276	58	346
5.	Natuna	44	117	161
6.	Lingga	75	17	92
7.	Kepulauan Anambas	31	43	74
8.	Provinsi Kepri	49	-	49
	Jumlah	1125	1183	2308

Kinerja terkait Pemberian Izin KSP/USP, terlihat dari pelaksanaan pemberian izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sudah berjalan dengan baik. Berkaitan dengan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, capaian persentase koperasi sehat di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 7,6% pada tahun 2016. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus meningkatkan jumlah koperasi sehat dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi SDM koperasi mengenai mekanisme pengelolaan koperasi untuk menuju 3 Sehat, yaitu: sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental.

Kinerja berkaitan dengan Pemberdayaan dan Pengembangan UKM dapat dilihat dari jumlah UKM dan jumlah UKM yang dibina. Jumlah Usaha kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dari sebanyak 61.771 unit pada tahun 2011 menjadi sejumlah 70.738 unit pada tahun 2013 kemudian menurun menjadi 58.379 unit pada tahun 2016. Peningkatan paling pesat terutama pada kelompok usaha skala mikro dan kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha kecil cukup berperan penting dalam perekonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kendala utama yang paling dirasakan oleh pengelola Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak berkisar pada bidang permodalan, manajerial usaha, jejaring pemasaran dan inovasi pengembangan produk. Jumlah UKM yang dibina menunjukkan peningkatan dari sebesar 500 orang pada tahun 2011 menjadi 1.276 orang pada tahun 2016.

Secara rinci pencapaian kinerja indicator urusan koperasi dan UKM dapat dilihat pada Tabel 2.72 dibawah ini.

Tabel 2.72.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	1.946	2.069	2.228	2.302	2.308	2.355
2	Persentase Koperasi Aktif	%	74,26	69,16	71,59	65,46	49,00	49,00
3	Jumlah koperasi yang dibina	Unit	470	410	438	470	425	120
4	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	unit	NA	66.090	70.738	58.379	58.379	58.379
5	Jumlah Usaha kecil menengah (UKM) yang dibina	unit	500	725	1.148	592	9.990	1.276

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

12) Penanaman modal

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Secara umum capaian kinerja pada urusan penanaman modal tergolong baik. Dalam kurun waktu tahun 2011-2016 terdapat kecenderungan peningkatan nilai investasi. Nilai investasi di Provinsi Kepulauan Riau tergolong besar dengan realisasi PMDN pada tahun 2016 sebesar Rp. 492,5 milyar dan PMA sebesar US\$ 5.328 juta. Jumlah investor berskala nasional untuk PMA pada tahun 2016 sebanyak 175 investor, dan PMDN sebanyak 191 investor. Namun demikian distribusi investasi di Provinsi Kepulauan Riau belum merata, dengan kecenderungan investasi terbesar di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Beberapa upaya peningkatan investasi terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan promosi investasi. Jumlah promosi penanaman modal provinsi setiap tahunnya berkisar antara 5-9 *event*, dengan jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sebanyak 6 sektor/bidang usaha.

Iklim investasi di Provinsi Kepulauan Riau didukung dengan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, serta keamanan dan ketertiban (kondusifitas) wilayah yang tergolong baik. Iklim investasi masih terkendala beberapa hal, seperti regulasi tidak memihak terhadap investasi, keterbatasan lahan investasi, dan nilai UMR yang tinggi, sehingga menurunkan minat investor dan jumlah investasi. Dalam rangka mengatasi hal tersebut tentunya diperlukan penataan kembali peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga lebih mendukung investasi melalui koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pelayanan Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau semakin baik namun belum semua jenis perizinan ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Jumlah izin dan nonperizinan yang dilayani oleh Pelayanan terpadu satu pintu sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.264 jenis izin, namun jumlah jenis izin dan non izin yang diterbitkan BPMPTSP hanya sebanyak

110 jenis. Masih ada beberapa jenis perizinan yang ditangani oleh perangkat daerah. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2016 sebesar 81,25.

Berkaitan dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, capaian Persentase PMA menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2016 sudah mencapai 44%, sedangkan Persentase PMDN menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baru mencapai sebesar 44%.

Secara rinci kinerja urusan penanaman modal selama kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor/ Bidang Usaha	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah promosi penanaman modal provinsi	Event	6	9	6	7	5	1
3	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Investor	115	104	146	216	226	175
4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	69	295	384	78	160	191
5	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	juta US \$	219,49	1.060,89	1.085,1	2.427,2	520,0	5.328
6	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar Rupiah	280,03	928,82	3.584,4	4.541,1	1.384	492,5
7	Jumlah izin dan nonperizinan yang dilayani oleh Pelayanan terpadu satu pintu	izin	-	-	-	114	450	1264
8	Jumlah jenis izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP	jenis	-	-	-	104	104	110
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	Nilai	-	-	-	70	80	81,25
10	Jumlah permohonan izin yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Permohonan izin	-	-	-	45	8	Na

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	Persentase PMA menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	-	-	-	-	100	41
12	Persentase PMDN menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	-	-	-	-	55	41

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

13) Kepemudaan dan olah raga

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk : penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi; dan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Kinerja terkait dengan kepemudaan terlihat dari jumlah organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina capaiannya sampai dengan tahun 2016 sebesar 56%; jumlah Prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional sebanyak 2 piala/medali; jumlah sarjana penggerak pembangunan pendesaan sebanyak 18 orang, jumlah pemuda pelopor provinsi sebanyak 80 orang, jumlah pemuda yang mengikuti PPAN (pertukaran pemuda antar negara) antara 3-17 orang per tahun. Minimnya prestasi pemuda dan jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina menunjukkan bahwa perlu ada upaya peningkatan pembinaan organisasi pemuda dan peningkatan kualitas pemuda agar mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan peningkatan kemampuan kewirausahaan dengan capaian jumlah pemuda yang dilatih agar mandiri dan berdaya saing sebanyak antara 50-80 orang per tahun.

Kinerja terkait dengan olahraga prestasi terlihat dari indikator jumlah prestasi olahraga tingkat nasional, dengan capaian pada tahun 2016 sebanyak 1 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 5 medali emas, 4 medali perak, dan 8 medali perunggu. Dalam rangka memacu prestasi olahraga, jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi antara 3-10 *event* per tahun, dan pembinaan/pemberdayaan organisasi olahraga sejumlah 45 organisasi. Sementara itu untuk olahraga rekreasi, terlihat dari frekuensi *event* olahraga rekreasi rata-rata setiap tahunnya sebanyak 2 *event*. Sementara itu terkait dengan kepramukaan,

pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat provinsi yaitu Kwartir Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci kinerja urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut ini.

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina	%	53	51	55	55	56	56
2	Jumlah prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional	Piala/ Medali	1	1	2	2	2	2
3	Jumlah sarjana penggerak pembangunan pendesaan	orang	25	23	18	18	18	18
4	Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN (pertukaran pemuda antar negara)	orang	12	4	17	6	3	3
5	Jumlah pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing	orang	50	50	80	70	50	160
6	Jumlah pemuda pelopor provinsi	orang	-	-	80	85	80	80
7	Jumlah cabang olahraga berprestasi	cabang	4	4	4	5	9	9
8	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	Piala/ Medali Emas	2	12	-	5	5	1
9		Piala/ Medali Perak	-	3	2	4	4	3
10		Piala/ Medali Perunggu	4	15	5	6	8	2
11	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi	event	4	4	5	10	3	3
12	Jumlah organisasi olahraga tingkat daerah provinsi yang dibina dan diberdayakan	organisasi	-	-	33	33	45	45
13	Frekuensi <i>event</i> olahraga rekreasi dalam 1 tahun	event	2	2	2	2	2	3

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
14	Jumlah gelanggang / balai remaja milik Pemprov memenuhi standar	unit	1	2	2	3	3	3
15	Jumlah gedung olahraga milik Pemprov memenuhi standar	unit	10	15	23	25	29	29

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

14) Statistik

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta berbagai sistem yang mengatur keterkaitan antara dua unsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap dan akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik daerah yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan daerah.

Di Kepulauan Riau, capaian kinerja urusan statistik dapat diukur dari beberapa indikator seperti jumlah ketersediaan data dan informasi daerah dengan capaian setiap tahunnya sebanyak 2 dokumen, persentase keterisian data SIPD sebanyak 58,25% dan jumlah sistem informasi daerah sebanyak 2 aplikasi dan jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial sejumlah 2 dokumen.

15) Persandian

Tugas dan fungsi urusan persandian di daerah yaitu melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, dan melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Kewenangan pembangunan pada urusan persandian meliputi: penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi; dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi. Penyelenggaraan persandian di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan secara baik. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait.

16) Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Asimilasi dan perpaduan budaya Melayu di Kepulauan Riau sudah berlangsung sangat lama akibat migrasi penduduk dari berbagai daerah. Setidaknya di Provinsi Kepulauan Riau dihuni setidaknya 17 suku bangsa, antara lain Melayu

Riau, Melayu Sumatera (di luar Riau), Melayu Kalimantan, Minang, Jawa, Bugis, Batak, Sunda, Aceh, Bali, Madura, Nias, Flores, Dayak, Papua, Betawi, Ambon dan Cina. Keanekaragaman suku ini membawa kekayaan khazanah budaya Melayu, terutama dari segi bahasanya. Walaupun terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah bahasa Melayu.

Berbagai dialek bahasa Melayu yang digunakan mengikuti perbedaan lokalitas dari kelompok masyarakat Melayu di masing-masing daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Variasi kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau juga menghasilkan variasi identitas khusus orang Melayu yang penuh dengan keterbukaan, yang dilandasi oleh prinsip hidup bersama dalam perbedaan. Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* yang diterapkan masyarakat Melayu Kepulauan Riau ini menyebabkan terbentuknya tradisi yang majemuk. Ciri-ciri kebudayaan Melayu Provinsi Kepulauan Riau yang bersifat terbuka dan mempunyai kemampuan mengakomodasi perbedaan tersebut menjadikan kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau mampu mengambil alih unsur-unsur kebudayaan non-Melayu menjadi kebudayaan Melayu Kepulauan Riau. Tidak mengherankan bila ada unsur-unsur atau simbol-simbol yang dianggap sebagai simbol Melayu, namun setelah ditelusuri secara mendalam ternyata adalah simbol-simbol yang berasal dari kebudayaan non-Melayu. Contohnya musik Melayu *ghazal* yang berasal dari Semenanjung Arab.

Selain bersifat terbuka, masyarakat Melayu juga tetap memegang teguh identitas kemelayuannya. Dalam tradisi Melayu sendiri, ada semacam ungkapan "*Adat Bersendikan Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah*". Hal ini menyiratkan bahwa, secara langsung atau tidak, tradisi kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Di sisi lain, Raja Ali Haji pernah berujar dalam *Gurindam Dua Belas* (1847), bahwa "*Tak kan Melayu Hilang di Bumi*". Kalimat itu digunakan untuk menunjukkan keyakinan masyarakat Melayu akan adat-istiadat dan budayanya. Begitu pentingnya adat-istiadat bagi orang Melayu, sehingga timbul ungkapan lain, yaitu "*Biar Mati Anak, Jangan Mati Adat*" atau "*Biar Mati Istri, Jangan Mati Adat*". Semua ungkapan itu diucapkan secara turun-temurun dan telah mendarah-daging bagi orang Melayu, baik yang menetap di Kepulauan Riau maupun di perantauan.

Kewenangan provinsi pada urusan kebudayaan mencakup : kebudayaan, kesenian tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman. Kinerja terkait kebudayaan bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti : penetapan karya budaya tak benda (intangible) yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan capaian sampai dengan tahun 2016 sebanyak 11 WBTB; jumlah SDM yang bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional dengan capaian sebanyak 9 orang; dan pemberian penghargaan bidang kebudayaan tingkat regional dan nasional dilaksanakan sebanyak 4 kali. Guna mendukung pengembangan kebudayaan diperlukan penyusunan Peraturan Daerah dalam bidang kebudayaan. Saat ini perda di bidang kebudayaan yang telah disahkan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja terkait dengan cagar budaya, capaian persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2016 mencapai sebesar 18,53%. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, sehingga ke depan perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan. Kinerja terkait kesenian tradisional ditunjukkan dengan jumlah event kebudayaan tingkat regional, nasional dan internasional sebanyak 4 kali pada tahun 2016; persentase sanggar seni yang dibina sebesar 15,27% pada tahun 2014, dan Persentase sanggar Seni yang mengajarkan kesenian dan tradisi local sebesar 3,10% pada tahun 2016. Capaian tersebut tergolong rendah, sehingga perlu ada upaya peningkatan *event* kebudayaan dan pelestarian kesenian dan tradisi lokal di Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian kinerja pada urusan kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut ini.

Tabel 2.75.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0	0	0	0,76	14,97	18,53
2.	Jumlah karya budaya takbenda (intangibile) yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia	WBTB	0	0	0	7	10	11
3.	Cakupan Peraturan daerah bidang kebudayaan	%	0	0	0	0	20	20
4.	Jumlah SDM yang bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional	Orang	0	0	0	1	4	9
5.	Jumlah Event Kebudayaan Tingkat regional, nasional Dan Internasional	Kali	0	0	0	0	2	4
6.	Jumlah Penghargaan bidang Kebudayaan tingkat Regional dan Nasional	Kali	0	0	0	1	2	9
7.	Persentase Sanggar Seni yang dibina.	%	0	0	8,72	15,27	0	0
8.	Persentase Sanggar Seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	0	0	0	0	0	3.10

Sumber: Dinas Kebudayaan

17) Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sarana untuk melestarikan hasil budaya yang dapat dilakukan dengan melakukan aktifitas pemeliharaan koleksi. Perpustakaan sebagai tempat untuk memper oleh informasi sangat penting kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi untuk menyimpan koleksi (informasi), menyediakan informasi bagi masyarakat, menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal mau pun non formal, mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan menjadi tempat untuk rekreasi.

Kewenangan provinsi pada urusan perpustakaan mencakup Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Berkaitan dengan pembinaan perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi dalam

kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2011 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 36.820 pengunjung menjadi 76.000 pengunjung pada tahun 2016. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dipengaruhi oleh meningkatnya minat baca masyarakat, dan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dengan penambahan koleksi-koleksi buku perpustakaan.

Sementara itu untuk jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Provinsi Kepulauan Riau masih kurang. Koleksi buku di tahun 2011 sebesar 13.497 buku, meningkat menjadi 20.554 buku pada tahun 2016. Jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan pendidikan kepustakawanan juga mengalami peningkatan, dari tahun 2014 jumlah pengelola perpustakaan sebanyak 60 orang meningkat menjadi 350 orang pada tahun 2016.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.76 dibawah ini.

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kepulauan Riau
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perpustakaan daerah provinsi	unit	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi	orang	37.420	37.353	38.174	39.705	63.200	76.000
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah provinsi	buku	13.497	14.539	14.539	14.539	14.539	20.554
4.	Jumlah pengelola perpustakaan yang mendapatkan pendidikan kepustakawanan	orang	-	-	-	60	100	350
5.	Jumlah pustakawan tingkat terampil	orang	1	-	-	-	3	0
6.	Jumlah pustakawan tingkat ahli	orang	2	-	-	-	-	0

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

18) Kearsipan

Arsip dapat diartikan sebagai segala kertas naskah, buku, foto, film, microfilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, asli atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijakan, keputusan, prosedur, pekerjaan, atau kegiatan suatu organisasi, atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya. Arsip sangat penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Pengelolaan kearsipan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi

menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Di Provinsi Kepulauan Riau, kinerja pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip terlihat dari indikator jumlah dokumen arsip daerah yang diselamatkan pada tahun 2016 mencapai 10.462 arsip, dan jumlah dokumen/arsip yang telah diduplikat dalam bentuk informatika yang mengalami peningkatan. Pengelolaan arsip SKPD dan BUMD capaiannya masih rendah. Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku baru sebanyak 48,94%, sedangkan persentase pengelola arsip memiliki pengetahuan pengelolaan arsip secara baku sudah mencapai 100%.

Secara rinci kinerja urusan perpustakaan dalam kurun waktu tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.77 dibawah ini.

Tabel 2.77.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	arsip	750	338	17.561	1.355	10.439	10.462
2.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	arsip	100	100	100	100	100	520
3.	Persentase Perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	%	5	5	5	5	42,55	48,94
4.	Jumlah perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dan tokoh masyarakat tingkat daerah provinsi yang terlayani pelayanan arsip statis untuk dikelola dinas perpustakaan dan kearsipan	unit	5	5	5	5	5	0

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan, luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km² dengan panjang garis pantai 2.367,6 km sedangkan luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km². Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari berbagai hasil perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya) wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya.

Sebagai provinsi dengan wilayah kepulauan, potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Potensi yang paling menonjol adalah perikanan tangkap, dengan produksi yang terus meningkat dari tahun 2011

sebanyak 208.756 ton, menjadi sejumlah 375.441,66 ton pada tahun 2015, pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap sejumlah 303.411,28 Ton atau penurunan sekitar 19,18% dari tahun 2015, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium beberapa jenis alat tangkap yang dominan dipergunakan nelayan di Kepulauan Riau.

Tabel 2.78.
Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota		Produksi Tangkap 2016 (Ton)
1	Karimun	73,693.13
2	Bintan	51,870.00
3	Natuna	81,382.51
4	Lingga	33,647.00
6	Kep Anambas	28,788.11
7	Batam	32,670.53
8	Tanjungpinang	1,360
Jumlah/ Total:		
	2016	303,411.28
	2015	380,064.47
	2014	406,395.00
	2013	392,638.90
	2012	360,560.00
	2011	308,355.00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Komoditas unggulan dari hasil tangkapan nelayan di Kepulauan Riau meliputi kelompok pelagis besar (ikan tongkol dan tenggiri), Kelompok pelagis kecil (ikan teri, selar, kembung), kelompok ikan demersal (bawal putih, bawal hitam, kakap putih, belanak dan kurau), kelompok ikan karang (ekor kuning/pisang-pisang, kakap merah, kerapu karang dan ikan baronang), kelompok kustase (udang putih, kepiting dan rajungan) serta kelompok moluska (kerang-kerangan dan cumi-cumi).

Aktivitas perikanan tangkap secara umum untuk tiap komoditas- tersebut terbagi dalam beberapa kriteria yaitu optimalisasi pemanfaatan untuk mencapai produksi optimal, pengembangan dengan hati-hati terhadap stok yang ada, dan moratorium. Hasil analisis untuk tiap kabupaten/kota berdasarkan pendekatan data produksi aktual dengan potensi stok menurut DKP RI 2010, maka pemanfaatan perikanan tangkap untuk kabupaten/kota yang perlu dilakukan moratorium penangkapan adalah di Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Hal ini disebabkan tingkat pemanfaatan perikanan telah melebihi potensi lestarnya. Sementara itu di kabupaten lainnya, yaitu di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga masih berpotensi dikembangkan (dioptimalkan) dengan prinsip kehati-hatian.

Beberapa kendala masih dihadapi berkaitan dengan perikanan tangkap, diantaranya masih rendahnya persentase kapal penangkap ikan bermotor berbanding armada perikanan tangkap yang ada termasuk kapal tanpa motor (perahu nelayan tradisional), terdata pada tahun 2015 sejumlah 51,85% armada perikanan tangkap berupa kapal motor dan perahu motor tempel. Armada perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perahu tanpa motor, motor tempel, dan kapal motor, dengan perincian pada Tabel 2.79 berikut ini.

Tabel 2.79.
Jumlah Sarana Penangkapan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Jenis Sarana	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kapal Motor	unit	21.891	34.379	34.481	35.368	35.368	19.783
2	Motor tempel	unit	5.586	7.546	5.762	8.614	6.449	5.794
3	Perahu tanpa motor	unit	12.596	11.769	11.460	12.733	11.911	11.612

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Kebutuhan Pelabuhan Perikanan di sentra perikanan sangat mendukung sebagai pusat perekonomian perikanan beberapa lokasi pelabuhan perikanan yang dijadikan *entry point* dalam kegiatan pasca produksi dan pemasaran keluar negeri, kondisi saat ini dan kebutuhan pelabuhan perikanan sesuai kebutuhan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80.
Estimasi Jumlah dan Tipe Pelabuhan Perikanan Yang Diperlukan Untuk Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Provinsi Kepri

Tipe Pelabuhan Perikanan	Natuna	Anambas	Pelabuhan Penyangga					Jumlah (unit)
			Batam	Bintan	Karimun	Lingga	Tanjungpinang	
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	1	-	-	-	-	-	-	1
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	4	1	1	1	-	-	-	7
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	8	1	1	1	3	3	1	18
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	27	5	1	1	1	1	1	37
Total	40	7	3	3	4	4	2	63

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Perikanan budidaya juga merupakan potensi keunggulan di Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari Perikanan budidaya air laut meliputi: Bawal, kerapu, kakap dan napoleon di daerah natuna dan anambas termasuk budidaya rumput laut, budidaya ikan air payau meliputi: udang vanamei, udang windu, Ikan Bandeng, Kakap Putih dan Kerapu Lumpur. Data potensi pengembangan perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81.
Potensi Pengembangan Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (Ha)	Budidaya Laut (Ha)		Budidaya Darat (Ha)	
		Pesisir	Laut Lepas	Air Payau	Air Tawar
Bintan	194.613	6.684,0	37.517,1	250	1430
Batam	211.772	10.709,7	50.422,0	288	1191
Karimun	287.32	10.210,7	47.232,2	190	1106
Natuna	205.845	6.021,3	20.393,1	507	1063
Anambas	59.014	1.992,7	19.005,2	0	1091
Lingga	23.92	19.053,6	226.538,4	828	1124
Tanjungpinang	77.027	0	0	0	1101
Jumlah		54.672,1	401.107,9	2.063	8.111,21

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Adapun jenis ikan air tawar yang dibudidayakan yaitu Ikan Lele, Mujair, Nila, Gurame, dan Ikan Patin. Jumlah produksi perikanan budidaya ikan dan rumput laut menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari sebesar 27.776 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 33.515,48 ton pada tahun 2015 dan tercatat 36.778,35 ton di tahun 2016. Jumlah produksi perikanan budidaya tercantum pada Tabel 2.82 berikut ini.

Tabel 2.82.
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota		LAUT	TAWAR	PAYAU	Produksi Budidaya Rumput Laut
1	Karimun	142,70	232,12	17,00	1.121,90
2	Bintan	449,70	555,19	6,86	-
3	Natuna	217,46	1,75	44,26	56.950,00
4	Lingga	118,78	18,81	0,13	-
6	Kep Anambas	34,05	-	-	44,00
7	Batam	1.592,73	8.167,46	-	7.915,80
8	Tanjungpinang	19,25	96,15	-	-
Jumlah/ Total:					
	2016	2.574.67	9.071,48	68,25	66.031,70
	2015	6.099.24	14.429,92	41,78	20.570,94
	2014	4.783.20	17.334,96	34,82	69.699,86
	2013	4.226.63	13.365,67	90,77	11.700,25
	2012	2.974.35	11.209,57	16,73	11.115,70
	2011	3.908.83	2.611,41	12,62	21.129,50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan yang tinggi perlu didukung dengan usaha pengolahan dan pemasaran yang baik agar dapat meningkatkan nilai tambah produksi hasil kelautan dan perikanan untuk pemasaran dalam dan luar negeri. Jumlah produk olahan hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2015 tercatat sejumlah hanya sebanyak 1.315,67 ton terdiri dari olahan garaman, pindang, asapan, fermentasi, reeduksi, lumatan, olahan segar dan lainnya dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan tercatat sejumlah 1.318,30 ton. Jumlah produksi olahan kelautan dan perikanan tercantum pada Tabel 2.83 berikut ini.

Tabel 2.83.
Produksi Olahan kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

Kabupaten / Kota		Tahun 2015	Tahun 2016
1	Karimun	187,038	223,964
2	Bintan	443,657	265,633
3	Natuna	64,213	54,940
4	Lingga	122,277	65,909
5	Kepulauan Anambas	64,949	335,998
6	Batam	34,185	134,583
7	Tanjung Pinang	399,550	312,730
Jumlah Ton		1,315.67	1,393.76

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Sementara itu ekspor hasil perikanan sejumlah 38.882,41 ton di tahun 2015 dengan nilai ekspor sebesar US \$ 30.789.629.06 dan di tahun 2016 volume ekspor hasil kelautan dan perikanan mengalami penurunan tercatat sejumlah 20.995.32 ton namun nilai ekspor mengalami peningkatan 3,11% tercatat sebesar US \$ 31.766.987.- hal ini menunjukkan beberapa komoditi ekspor hasil perikanan yang dapat diterima pasar ke luar negeri mengalami penambahan nilai setelah dilakukan pembenahan-pembenahan persyaratan ekspor hasil perikanan. Ekspor hasil perikanan tercantum pada Tabel 2.84 berikut ini.

Tabel 2.84.
Ekspor Hasil Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

Pintu Pengeluaran Ekspor (Pencatatan oleh Karantina Ikan)	TOTAL VOLUME EKSPOR (Kg)	NILAI (USD)
Karantina Ikan di Batam	7.216.271	14.082.514
Karantina Ikan di Tanjungpinang	13.779.054	17.684.473

Sumber : Stasiun Karantina Ikan (SKI) Kelas I Batam dan SKI Kelas II Tanjungpinang

Pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Zonasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi prioritas penyelesaian pada tahun 2016-2021 selain itu pengelolaan kawasan konservasi kelautan dan perikanan yaitu peningkatan level pengelolaan kawasan konservasi coremap (natuna, Bintan, Lingga dan Batam), saat ini 4 kawasan tersebut masih pada pengelolaan level II (kawasan konservasi didirikan) dan dalam persiapan ke level III (kawasan dikelola minimum), selanjutnya level IV (kawasan dikelola maksimum) hingga level V (kawasan konservasi mandiri).

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga menjadi prioritas pelaksanaan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari hal illegal, kegiatan perikanan yang merusak sumber daya dan penyelesaian konflik pemanfaatan yang sering terjadi antar nelayan maupun yang bersinggungan dengan sektor lainnya, Kerjasama dengan berbagai pihak dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam konservasi sumberdaya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	208.756	360.560	392.638	406.395	375.441	303.411
2.	Persentase kapal perikanan bermotor	%	28,90	47,39	47,39	48,45	51,85	68,78
3.	Pelabuhan perikanan yang beroperasi dan memenuhi persyaratan pelabuhan perikanan	unit	3	3	4	4	4	4
4.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	27.776	25.316	29.383	91.847	33.515	33.582

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.	Tingkat Cakupan bina kelompok ikan	%	0,26	0,43	0,66	0,68	0,85	0,85
6.	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1.548	1.385	1.414	1.462	1.315	1.319
7.	Konsumsi Ikan Per Kapita	kg/kapita	47,13	47,13	58,48	59,49	59,66	52,34
8.	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan / Jumlah kawasan konservasi yang terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau	%	38	38	40	42	42	42
9.	Jumlah kelompok POKWASMAS yang terbina	klp	38	38	40	41	45	65
10.	Volume Ekspor Hasil Perikanan	ton	100.636	20.938	23.166	38.804	38.882	20.995
11.	Nilai ekspor produk perikanan	USD miliar	201.132	40.846	42.924	64.995	65.001	317.669

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

2) Pariwisata

Provinsi kepulauan Riau memiliki berbagai pesona keindahan alam dan budaya tradisi yang menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan, menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas, keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga, dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari di Provinsi Kepulauan Riau perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisata semakin meningkat.

Arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari : Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus; Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

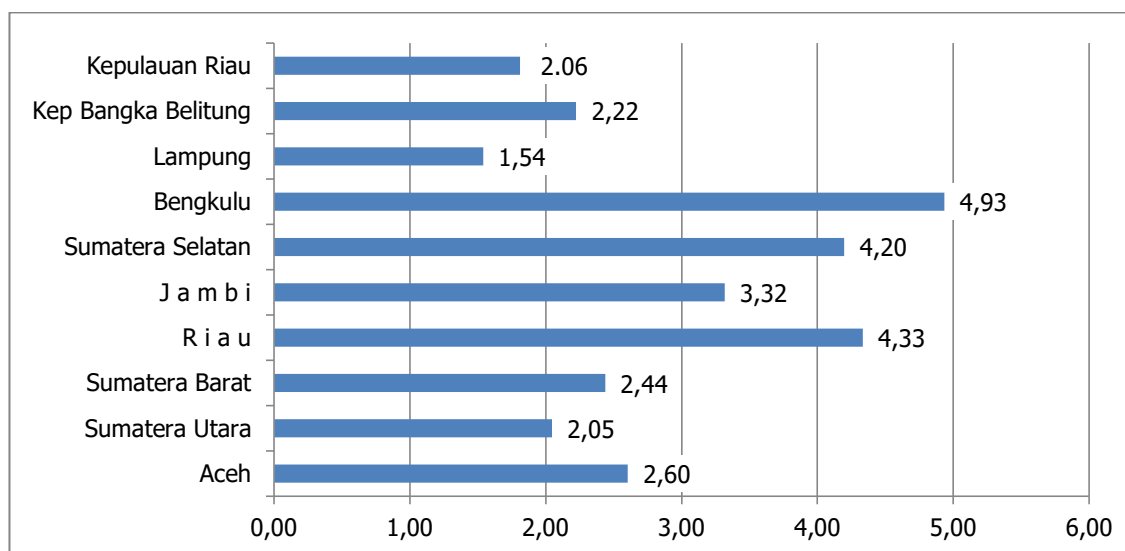
Obyek wisata yang saat ini ada di Kepulauan Riau antara lain : Pulau Penyengat sebagai tempat wisata sejarah dan budaya; Senggarang sebagai lokasi

wisata religi karena adanya klenteng kuno yang dikeramatkan, pulau-pulau kecil dan pantai sebagai tempat wisata bahari, pusat perbelanjaan sebagai wahana wisata belanja dan hotel serta gedung pertemuan sebagai tempat wisata konvensi. Obyek wisata lainnya yaitu Pantai Bintan; Gunung Daik bercabang tiga; wisata pantai sebong; pantai nongsa; pantai trikora; pantai lagoi; air terjun cik latif; pantai ranai; dan dermaga daik lingga. Jumlah obyek wisata unggulan di di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 12 obyek, sedangkan Jumlah Desa Wisata sebanyak 19 obyek.

Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2016 tercatat sebanyak 1.920.232 orang atau mengalami kenaikan sebesar 8,64% dibanding kunjungan wisman selama Tahun 2012 yang mencapai 1.767.439 orang. Kontribusi jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau terhadap jumlah seluruh wisman yang berkunjung ke Indonesia selama Tahun 2016 adalah 16.7 %. Menurunnya jumlah kunjungan wisman selama Tahun 2016 disebabkan turunnya jumlah kunjungan wisman di pintu masuk Kota Batam, yaitu turun sebesar 7,4 % dan Kabupaten Karimun turun sebesar 7,8% Sementara jumlah kunjungan wisman di pintu masuk Kabupaten Bintan naik sebesar 0,5% dan Kota Tanjungpinang naik sebesar 2,2%.

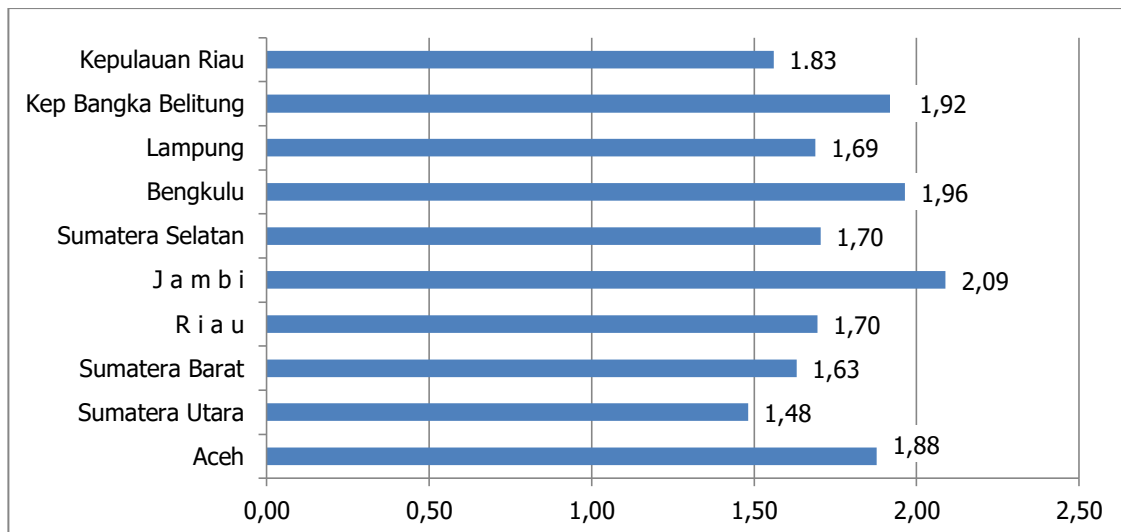
Dilihat dari kebangsaan, wisman berkebangsaan Singapura masih merupakan yang terbanyak berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Selama Tahun 2016 wisman berkebangsaan Singapura tercatat sebesar 52,76% dari jumlah wisman yang berkunjung ke daerah ini. Wisatawan dari Malaysia berkontribusi 13,01%, sedangkan wisatawan dari negara lainnya yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau kontribusinya masih dibawah 5% selama Tahun 2015, seperti Cina, Korea Selatan India, Philipina, Jepang, Inggris, Australia dan Amerika.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada desember tahun 2016 adalah 2,06 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia mencapai 1,83 hari, lebih rendah 0,64 poin dibanding dengan rata-rata lama menginap tamu asing. Rata-rata lama menginap di Hotel berbintang tamu asing di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera, kecuali Provinsi Lampung, seperti terlihat pada Gambar 2.25 berikut.



Gambar 2.25 Perbandingan Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Berbintang (Hari) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2016

Rata-rata lama menginap di hotel berbintang untuk tamu Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau juga lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera, kecuali Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata belum mampu meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Kepulauan Riau secara signifikan.



Gambar 2.26 Perbandingan Rata-rata Lama Menginap Tamu Indonesia pada Hotel berbintang (Hari) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2016

Beberapa upaya peningkatan kinerja pariwisata ditunjukkan peningkatan jumlah deesa wisata dari sebanyak 11 desa pada tahun 2011 menjadi sebanyak 19 desa pada tahun 2016. Pola perjalanan wisata juga meningkat menjadi sebanyak 4 paket wisata. Potensi pariwisata yang ada didukung dengan peningkatan Kapasitas Profesionalisme SDM Pariwisata sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.400 orang.

Capaian kinerja urusan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.86 berikut ini.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kunjungan wisatawan Mancanegara	orang	1.709.511	1.767.439	1.859.066	1.973.425	2.037.673	1.920.232
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan Mancanegara	hari	1,65	1.78	1.84	2.14	1.84	1.94
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1.83	1.83	1.86	1.99	2.23	2.33
4.	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	4	2	5	2	2	2
5.	Jumlah Desa Wisata	Desa	11	13	19	19	19	19
6.	Jumlah Pola Perjalanan	Paket	na	2	4	4	4	4
7.	Jumlah Standar Usaha Pariwisata		0	2	2	2	2	2
8.	Kapasitas Profesionalisme SDM Pariwisata	orang	200	200	250	250	250	200
9.	Jumlah Penelitian pembangunan pariwisata	kali	0	2	2	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata

3) Pertanian

Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Sektor pertanian memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau, yaitu hanya 2,5%. Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik namun belum optimal, ditandai dengan Nilai Tukar petani sebesar 98,24 pada tahun 2016. Kapasitas dan pembinaan serta penerapan teknologi pertanian/perkebunan perlu ditingkatkan, karena capaiannya masih

rendah, yaitu jumlah kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan baru mencapai 4 kelompok.

Potensi pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung dan kedelai. Produksi padi tahun 2016 sebanyak 643 ton (ASEM), cenderung menurun dari tahun 2011 sebesar 1.259 ton. Penurunan produksi lebih disebabkan penurunan pemanfaatan lahan. Produksi jagung cenderung menurun dari sebesar 924 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 161 ton pada tahun 2016. Penurunan produksi jagung lebih disebabkan berkurangnya luas panen, meskipun produktivitasnya mengalami kenaikan. Jumlah Produksi Kedelai juga sangat kecil, yaitu hanya 1 ton pada tahun 2016. Sementara itu Jumlah Produksi Ubi Kayu cenderung meningkat dari 7.807 ton pada tahun 2011 menjadi 12.887 ton pada tahun 2016.

Jenis komoditas tanaman hortikultura yang cukup potensial adalah Sawi, Kacang Panjang, Terong, Ketimun dan cabe besar. Dalam kurun waktu tahun 2011-2016, produksi Sawi dan Kacang Panjang di Kepulauan Riau cenderung mengalami peningkatan, namun produksi Terong, Ketimun dan cabe cenderung menurun. Pada tahun 2016 produksi sawi tercatat sebanyak 4,079 ton, produksi ketimun sebanyak 3.763 ton, produksi kacang panjang sebanyak 4.034 ton, produksi cabe besar sejumlah 1.961 ton.

Di bidang perkebunan, jenis komoditas yang cukup potensial adalah karet, kelapa, cengkeh dan lada. Selama kurun waktu tahun 2011-2016 terjadi peningkatan produksi karet, kelapa dan cengkeh, sedangkan produksi lada mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah produksi Karet tercatat sebanyak 18.204 ton, jumlah produksi Kelapa 11.587 ton, jumlah Produksi Cengkeh sebanyak 2.445 ton, sedangkan produksi Lada hanya 49,5 ton.

Di bidang peternakan, komoditas peternakan yang menjadi potensi Provinsi Kepulauan Riau adalah Sapi potong, kambing, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan Ayam Buras. Pada tahun 2016 jumlah populasi ternak sapi potong mencapai 18.130 ekor, sedangkan populasi ternak kambing sebanyak 18.992 ekor, populasi ternak ayam ras pedaging 10.394.727 ekor, populasi ternak ayam ras petelur sebanyak 544.565 ekor, populasi ternak ayam buras sejumlah 1.121.578 ekor, dan populasi ternak itik sejumlah 36.201 ekor. Tingkat kesehatan hewan ternak masih menjadi kendala, sehingga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kinerja pembangunan urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut ini.

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Pertanian TPH							
1.	Nilai tukar petani (NTP)	%	103.55	104.84	101.52	95.91	98,78	98,24
2.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	1,33	1,29	1,85	2,86	2,50	1,19
3.	Jumlah kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	Kelompok Tani	3	3	3	3	4	4
4.	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	1.259	1.323	1.370	1.403	959	627
5.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	ton	924	849	790	703	473	161 (Asem)
6.	Jumlah Produksi Kedelai (ton)	ton	7	15	18	18	15	1 (Asem)
7.	Jumlah Produksi Ubi Kayu (ton)	ton	7.807	7.666	8.530	8.979	9.157	12.887 (Asem)
8.	Jumlah Produksi Sawi (Ton)	ton	2.864	3.789	4.275	4.493	4785	4,079
9.	Jumlah Produksi Ketimun (ton)	ton	4.987	6.166	7.300	7.650	7925	3,763
10.	Jumlah Produksi Kacang Panjang (ton)	ton	3.276	4.656	4.728	5.450	5875	4,034
11.	Jumlah Produksi cabe besar (ton)	ton	1.427	2.235	1.852	3.434	2.389	1.961
12.	Jumlah Produksi cabe Rawit (ton)	Ton	968	1.102	927	1.119	952	804
	Perkebunan							
13.	Jumlah produksi Karet (Ton)	ton	19.193	17.983	13.793	21.822	21.694	18.204
14.	Jumlah Produksi Kelapa (Ton)	ton	17.104	16.495	11.863	12.360	12.369	11.587
15.	Jumlah Produksi Cengkeh (ton)	ton	3.211	3.246	3.267	3.220	3.290	2.445
16.	Jumlah Produksi Lada (ton)	ton	66	64	34	47	38	49,5
17.	Perluasan/Peremajaan Tanaman Karet	ha	270	400	350	150	580	0
18.	Perluasan/Peremajaan Tanaman Cengkeh	ha	0	0	0	0	0	0
19.	Perluasan/Peremajaan Tanaman Lada	ha	0	0	0	0	0	0
20.	Perluasan/Peremajaan Tanaman Kakao	ha	0	0	0	30	0	0
	Peternakan							
21.	Jumlah ternak sapi yang dilakukan monitoring penyakit hewan	ekor	17.338	17.251	17.471	18.033	18.345	18.489

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
22.	Jumlah ternak kambing/domba yang dilakukan monitoring penyakit hewan	ekor	22.159	22.175	21.558	20.941	21.495	21.224
23.	Jumlah ternak babi yang dilakukan monitoring penyakit hewan menular	ekor	355.258	339.368	323.478	307.588	337.356	370.002
24.	Jumlah ternak unggas (Ayam Buras, Pedaging, Petelur, dan Itik) yang dilakukan monitoring penyakit hewan menular	ekor	7.242.151	8.324.347	9.406.543	10.488.739	11.258.028	12.340.896
25.	Jumlah hewan ekspor yang dilakukan pengawasan kesehatan hewan ekspor	Ekor	305.997	299.998	305.998	299.999	305.999	306.000
26.	Jumlah jenis penyakit yang dilakukan pengujian penyakit hewan menular strategis prioritas	Jenis Penyakit Hewan	≥2	≥2	≥3	≥3	≥3	≥3
27.	Jumlah kelompok peternak yang dibina	kelompok	19	22	25	28	31	33
	Kesehatan Masyarakat Veteriner							
28.	Jumlah tempat usaha pangan asal hewan yang dilakukan monitoring persyaratan higiene dan sanitasi	Unit	≥15	≥10	≥5	≥0	≥5	27 unit
29.	Jumlah unit bersertifikat penjaminan pangan asal hewan dan monitoring di unit usaha bersertifikasi NKV	Unit	≥6	≥7	≥8	≥9	≥10	27 unit
30.	Jumlah pengujian terhadap produk pangan asal hewan	jumlah uji	≥100	≥200	≥300	≥300	≥400	≥400
31.	Jumlah pengawasan pemotongan hewan ruminansia besar/kecil.	ekor	≥500	≥600	≥650	≥650	≥700	≥700
32.	Jumlah importir produk pangan yang dilakukan pengawasan lalulintas produk pangan asal hewan dari luar negeri	unit usaha	6	6	6	6	7	6
33.	Jumlah Inseminasi Buatan pada ternak sapi	Dosis	100	150	150	200	250	770
34.	Populasi Ternak Sapi Potong	ekor	17.338	17.251	17.471	18.033	18.345	18.130
35.	Populasi Ternak Kambing	ekor	22.159	22.175	21.558	20.941	21.495	18.992
36.	Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging	ekor	6.675.518	7.573.940	8.039.400	9.518.800	10.136.140	10.394.727

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
37.	Populasi Ternak Ayam Ras Petelur	ekor	314.626	351.688	418.800	388.750	425.812	544.565
38.	Populasi Ternak Ayam Buras	ekor	824.185	825.715	827.245	500.905	559.334	1.121.578
39.	Populasi Ternak Itik	ekor	65.773	70.610	75.447	80.284	85.121	36.201
40.	Populasi Ternak Babi	ekor	355.258	339.368	323.478	307.588	337.356	331.574
41.	Ketersediaan Lokal Daging Sapi	ton	2.298	2.480	2.662	2.844	3.117	3.321
42.	Ketersediaan Lokal Telur	ton	13.772	16.114	18.456	20.798	23.140	25.482
43.	Ketersediaan Lokal Daging Ayam (Unggas)	ton	5.150	6.136	7.122	8.108	9.094	10.080
44.	Jumlah usaha Pengolahan Produk hasil peternakan	unit	12	12	14	14	16	18
45.	Jumlah Peternak yang memanfaatkan Biogas	KK	38	56	56	56	56	80
46.	Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Ternak	unit	4	6	6	6	6	8
47.	Persentase Pelayanan Rekomendasi pemasukkan/Keluar ternak, hewan kesayangan dan produk hasil peternakan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Keterangan : Asem = Angka Sementara

4) Kehutanan

Luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6/06/1986, Keputusan Menteri No. 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Kotamadya Batam Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan hasil perhitungan dengan menggunakan perangkat GIS seluas 847.255,47 ha. Dari luasan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau terbagi atas hutan konservasi seluas 2.401,56 ha, hutan lindung seluas 35.967,25 ha, hutan produksi terbatas seluas 354.926,73 ha dan hutan produksi yg dpt dikonversi seluas 453.959,93 ha.

Kondisi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau sampai pada tahun 2016 ini tercatat mengalami kerusakan sebesar 0,20% dari luasan yang ada. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan, perambahan hutan dan tidak optimalnya korporasi berbasis tanaman industri dalam pengelolaan hutan. Tingkat kerusakan hutan di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tercatat saat ini sudah mencapai 0,10% dari total luas lahan hutan dan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Riau.

Hutan merupakan sumberdaya yang penting dan memiliki peran dalam perekonomian daerah. Walaupun perannya besar dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, namun kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Riau masih sangat kecil. Kontribusi sektor kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau pada

tahun 2016 sebesar 0,10%. Sektor kehutanan memberikan kontribusi terhadap PDRB yang dihasilkan dari sub-sektor hutan yang menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya dan sub-sektor industri pengolahan hasil hutan.

Perkembangan kondisi kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,05	0,10
2	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,03	0,03

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral merupakan potensi bahan tambang yang terdapat di alam dan mempunyai sifat tidak terbarukan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi hasil tambang cukup berlimpah. Misalnya saja seperti sumber daya alam mineral yang meliputi bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat di Kabupaten Natuna, bahan galian B (vital) seperti timah (di Kab. Karimun dan Lingga), bauksit (di Kab. Bintan, Karimun, Lingga, Tanjungpinang), dan pasir besi (di Kab. Lingga, dan Natuna), bahan galian golongan C seperti granit (Kab. Karimun, Bintan, Natuna, Lingga) , pasir dan kuarsa (Kab. Karimun dan Natuna), serta masih banyak lagi bahan tambang lainnya seperti Granulit, Diorit, Andesit, Kaolin, dan lain sebagainya. Potensi terbesar dari beberapa jenis barang tambang yang teridentifikasi adalah Bauksit dan Timah yang masing-masing diperkirakan mencapai 200.000 ton dan 3.515.000.000 ton. Adapun rencana kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.899 Ha.

Sektor pertambangan dan penggalan, meliputi segala macam kegiatan penambangan baik mineral logam maupun non logam yang ada di Provinsi Kepulauan Riau selain dari Migas. Berdasarkan data dari Provinsi Kepulauan Dalam Angka 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, bahwa sektor ini menyumbang rata-rata sebesar 2,12% dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau dari besaran PDRB atas dasar harga berlaku dengan menghilangkan sektor migas dalam jangka tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tetapi dari capaian indikator kinerja, sektor ini terus menunjukkan penurunan. Hal ini dikarenakan penambangan utamanya bauksit dan timah masih berbasis di daratan, sedangkan luas wilayah darat hanya 2% dari total wilayah Kepulauan Riau. Dari tahun ke tahun terjadi pengurangan areal pertambangan yang berproduksi, hal ini menyebabkan penurunan kontribusi terhadap PDRB.

Sedangkan pada sektor migas, sektor ini menyumbang rata-rata 12,03% dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Namun sektor ini juga menunjukkan penurunan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya migas merupakan *unrenewable resources* (sumberdaya tak terbarukan), rentan terhadap pengaruh eksternal (fluktuasi harga) dan dana perimbangan dari sektor migas persentasenya relatif kecil dibandingkan sumberdaya alam lainnya.

Legalitas sebuah kegiatan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi pemerintah dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di daerah-daerah pertambangan. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksudkan untuk memastikan kegiatan penambangan dapat dilaksanakan secara efektif dan mempermudah pemerintah untuk mengawasi jalannya kegiatan penambangan. Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang berpotensi merusak lingkungan masih ditemui di Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 6 lokasi. Tingginya jumlah PETI disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor penegakan hukum yang masih kurang optimal.

Berkaitan dengan energi, Rasio Elektrifikasi tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 89,14%. Rasio ketersediaan daya listrik yang menunjukkan perbandingan antara daya listrik yang terpasang terhadap jumlah kebutuhan pada tahun 2016 sebesar 74,90%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2011 yang baru mencapai 55,38%. Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam rangka meningkatkan rasio ketersediaan daya listrik menjadi 100%. Produksi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya pembangunan Pembangkit Listrik menggunakan Potensi Energi Terbarukan.

Perkembangan capaian indikator pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut ini:

Tabel 2.89.

**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB*	%	1,19	2,72	2,40	2,20	2,09	2,09
2	Jumlah Pertambangan Tanpa Izin	Lokasi	5	5	5	5	6	6
3	Kontribusi Sektor Migas terhadap PDRB*	%	6,52	14,20	13,88	13,09	12,44	12,44
4	Rasio Elektrifikasi**	%	74	71	79	77	83,72	89,14
5	Rasio Daya**	%	55,38	59,78	63,11	65,38	65,55	74,90

Sumber: *BPS Provinsi Kepri

**Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

6) Perdagangan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekhususan dalam pengembangan sektor perdagangan. Hal tersebut dikarenakan telah berlakunya *Free Trade Zone* (FTZ) sejak di Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. FTZ di Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun dilaksanakan atas dasar amanat dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan dan PP Nomor 48 Tahun 2007 menyangkut Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk Karimun. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Dampak dari berlakunya FTZ di Batam, Bintan dan Karimun diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor perdagangan di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya. Pemberlakuan FTZ berarti akan ada kebebasan dan berbagai kemudahan dalam rangka peningkatan investasi karena tujuan dari FTZ salah satunya adalah untuk menghadapi perdagangan bebas. Salah satu dampak yang telah dirasakan dari diberlakukannya FTZ di Batam, Bintan dan Karimun adalah meningkatnya kinerja sektor perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja sektor perdagangan didukung oleh dua sektor, yakni sektor perdagangan luar negeri dan sektor perdagangan dalam negeri. Dari sektor perdagangan luar negeri dapat dilihat bahwa terdapat berbagai produk asal Provinsi Kepulauan Riau yang dapat diterima dengan baik oleh pasar internasional, dengan jenis produk sejumlah 21 jenis. Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011 sebesar US\$ 965.85 juta menjadi US\$ 1,185.67 pada tahun 2016. Naiknya nilai ekspor lebih disebabkan oleh naiknya ekspor komoditi non-migas.

Perdagangan dalam negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berkembang cukup baik. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup pesat mampu mendukung perkembangan perdagangan. Ketersediaan pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi menjadi salah satu upaya peningkatan kinerja perdagangan dalam negeri. Sampai tahun 2016 di seluruh wilayah Kepulauan Riau terdapat pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi sebanyak 70 unit. Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, dan mutu produk perdagangan, dilakukan pemantauan pada pasar-pasar provinsi, dengan cakupan pasar yang dilakukan Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar

provinsi baru mencapai 60%. Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pada tahun 2016 sebanyak 6.788 alat, menurun dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perpindahan kewenangan UTTP ke Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memberdayakan pelaku usaha dagang, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM). Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan kesempatan kepada pelaku UDKM untuk mengikuti pameran-pameran yang ada. Hanya saja sampai tahun 2015 baru 0,14% dari pelaku UDKM yang mampu difasilitasi oleh pemerintah untuk mengikuti pameran.

Secara rinci pencapaian kinerja indikator urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.90 dibawah ini.

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Unit	18.325	24.242	22.600	16.397	16.397	6.788*)
2	Cakupan pasar yang dilakukan Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi (%)	%	Na	Na	29,17	58,33	58,33	60,00
3	Jumlah pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.	Unit	57	57	59	60	63	70
4	Nilai ekspor produk-produk asal Provinsi Kepulauan Riau	Juta US \$	965.85	1.614,20	1.283,57	1.039,13	1.112,40	1.185,67
5	Data ekspor berdasarkan penerbitan SKA	Unit	3.612	4.940	3.188	10.728	6.879	7.962
6	Jenis-jenis produk ekspor asal Kepulauan Riau yang dapat diterima di pasar internasional (jenis)	Jenis	21	21	21	21	21	22
7	Persentase UDKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,14	0,14	0,2	0,4	0,12	0,14
8	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	7,16	6,86	6,64	7,02	8,03	8,11

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

7) Perindustrian

Perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau merupakan penggerak ekonomi utama. Hal tersebut bisa dilihat dari sumbangan sektor perindustrian terhadap PDRB, yang selama lima tahun terakhir selalu menunjukkan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan Migas atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 menunjukkan kontribusi sektor perindustrian mencapai 47,24%. Besarnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Data tahun 2013 terdapat 320 perusahaan yang terdiri dari 196 perusahaan modal asing (61,25%), 54 perusahaan dalam negeri (16,87%) dan 70 perusahaan non fasilitas (21,88%). Perkembangan perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau memang masih bertumpu di Kota Batam karena 85,94% industri besar dan sedang yang ada terdapat di kota tersebut.

Jumlah industri kecil di Kepulauan Riau mencapai 1.555 unit pada tahun 2015, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2011 yang jumlahnya 1.224 unit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku industri kecil, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menyertakan produk-produk dari pelaku industri kecil ke berbagai kegiatan pameran maupun expo. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya jumlah produk-produk pelaku industri kecil yang bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mengikuti pameran atau expo. Cakupan IKM yang dibina provinsi sebanyak 11,57%, sedangkan Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk sebanyak 0,05%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor industri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama kabupaten/kota mengembangkan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 22 unit pada tahun 2011 menjadi 35 unit pada tahun 2015. Kawasan industri ini akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat memicu pertumbuhan industri.

Secara rinci kinerja urusan perindustrian dalam kurun waktu tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.91 berikut ini.

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	2	2	2	2	2	4
2	Jumlah rencana pembangunan industri provinsi.	dokumen	0	0	0	1	2	2
3	Jumlah kawasan industri	kawasan	24	25	25	25	26	26
4	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	1.224	1.309	1.421	1.481	1.632	1.723

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05
6	Cakupan IKM yang dibina provinsi	%	12,41	12,22	11,82	11,47	11,57	23,11

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

8) Transmigrasi

Kewenangan yang dimiliki daerah provinsi pada urusan transmigrasi meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota; dan Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan. Saat ini di Provinsi Kepulauan Riau tidak dilaksanakan penerimaan transmigrasi, dalam kurun waktu tahun 2011-2015 jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak mengalami perubahan, yaitu sejumlah 3.920 KK, dengan jumlah kawasan permukiman transmigrasi sebanyak 3 kawasan, seperti terlihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepulauan Riau	KK	3920	3920	3920	3920	3920	3920
2	Jumlah kawasan permukiman transmigrasi yang tertata	Kawasan	3	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan baru tentang pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi pemerintahan daerah.

Kebijakan tersebut terkait erat dengan keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau harus sinergis dengan rencana pembangunan dari kabupaten/kota dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan dari provinsi sekitar, agar

keterpaduan pembangunan daerah dapat dicapai. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui konsultasi perencanaan pembangunan daerah kepada Gubernur Kepulauan Riau, agar rencana pembangunan daerah kabupaten/kota sejalan dengan arahan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja urusan wajib perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2015 tercermin dari capaian perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015, Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 berakhir tahun 2015 dan pada tahun 2016 telah ditetapkan RPJMD Tahun 2016-2021. Begitu pula dengan Renstra perangkat daerah juga telah ditetapkan pada tahun 2016. Seiring dengan perubahan organisasi perangkat daerah, pada tahun 2017 dilakukan pula Revisi RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

2) Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Berkaitan dengan keuangan daerah maka penyelenggaraan pemerintah akan berfungsi optimal, efektif dan efisien apabila didukung dengan pendanaan/ sumber-sumber penerimaan yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa struktur penerimaan daerah dalam APBD, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah atau yang biasa disebut Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Meningkatnya kebutuhan pembiayaan daerah sebagai konsekuensi atas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka masing-masing pemerintah daerah dituntut dengan berbagai upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengacu pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi kebijakan fiskal daerah akan tetap diarahkan mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Perimbangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak/SDA yang lebih rasional dan proporsional.

Perkembangan capaian indikator kinerja pendapatan daerah secara rinci terlihat pada Tabel 2.93 berikut ini.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi PAD	Rp (milyar)	620,90	723,05	907,98	1.070,21	1.013,27	1.079,17
2.	Pertumbuhan Pajak Daerah	%	16,00	19,71	24,30	18,06	-5,42	0,08
3.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,16	16,45	25,58	17,87	-5,32	6,51
4.	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	33,08	29,23	31,93	36,66	40,30	37,02
5.	Realisasi penerimaan Dana Perimbangan tahun berjalan	%	100,09	111,40	101,50	83,12	90,93	93,99
6.	Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Daerah (keseluruhan)	%	1,01	31,78	14,97	2,65	13,86	15,92

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengelolaan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Atas upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 - 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian tersebut didukung dengan Ketepatan Waktu Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan ketepatan waktu penetapan APBD. Dalam rangka mendorong kabupaten/kota untuk mencapai WTP, pemerintah provinsi melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah mendukung peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, pemutakhiran data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berawal dari sentralisasi menjadi desentralisasi perlu disikapi dengan meningkatkan kompetensi ASN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing ASN. Salah satu metode untuk meningkatkan kapasitas ASN adalah melalui pelatihan dan pendidikan (Diklat). Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan ASN yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: 1) Diklat Prajabatan; 2) Diklatipim; 3) Diklat Fungsional; dan 4) Diklat Teknis.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait dengan rekrutmen SDM Aparatur adalah dengan menggunakan recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test). CAT dibentuk sebagai langkah dalam upaya mewujudkan tuntutan masyarakat dalam perekrutan PNS yang adil, sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga profesional. Kinerja berkaitan dengan kepegawaian dapat dilihat dari indikator Jumlah Pegawai yang sesuai dengan formasi dan kebutuhan baik melalui jalur CPNS maupun IPDN dalam kurun waktu empat tahun berkisar antara 48-310 orang. Sementara itu capaian Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berkisar antara 45-82 orang, dan Jumlah pegawai mengikuti diklat Pim antara 40-79 orang. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tentunya perlu ditingkatkan diklat bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2012-2016 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah dilakukan dengan transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN karena pada tahun 2014 pelaksanaan penerimaan CPNS sudah menggunakan Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan metode pelaksanaan ujian sebagai langkah dalam upaya mewujudkan tuntutan masyarakat dalam perekrutan CPNS yang adil, sekaligus sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga profesional. Dalam rangka pemetaan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan assessment bagi Pejabat Eselon II, III dan sebagian IV. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan seleksi secara terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Dan pada periode Reformasi Birokrasi ini telah dilaksanakan diklat kepemimpinan sebanyak 360 PNS, diklat prajabatan sebanyak 775 PNS, diklat fungsional sebanyak 37 PNS, dan diklat teknis 554 PNS. Dan terakhir sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai dengan kebutuhan dan dapat diakses oleh pegawai.

4) Sekretariat DPRD

Kinerja sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi SKPD dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti Persentase Ranperda yang dibahas terhadap jumlah Ranperda yang masuk Prolegda dengan capaian cenderung menurun dari tahun 2011 sebesar 57% menjadi 3% pada tahun 2015. Jumlah Perda Inisiatif yang disahkan juga menurun dari sebanyak 1 Perda pada tahun 2011-2013 menjadi nol pada tahun 2014-2015. Jumlah fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD sebanyak 3 kali, jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD sebanyak 3 kali setiap tahunnya dengan jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota DPRD seluruh anggota sebanyak 45 orang setiap tahunnya.

Kinerja sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan terhadap anggota DPRD dapat dilihat dari beberapa indikator, Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP, Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP, indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP.

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2016

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	85	87
2	Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	%	85	87
3	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	-	60
4	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	85	87

Sumber: Sekretariat DPRD

5) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. Berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, kinerja antara lain terlihat dari capaian indikator jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dihasilkan rata-rata sebanyak 1 produk per tahun. Di bidang hukum, banyaknya rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan berkisar antara 6-10 dokumen dalam 1 tahun dan Jumlah produk hukum yang didokumentasikan antara 3-8 dokumen. Hasil lainnya antara lain rekomendasi hasil pengkajian evaluasi produk hukum kab/kota dengan capaian antara 2-17 dokumen per tahun, dan banyaknya kasus hukum yang diselesaikan antara 2-16 kasus per tahun.

Berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD dengan capaian persentase capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD untuk tahun 2016 fisik sebesar 100,00%, dan keuangan sebesar 96,05%. Sementara itu persentase capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sumberdana APBN (DK, TP, DAK) untuk fisik sebesar 76,85% dan keuangan sebesar 71,21%. Disamping itu, Sekretariat Daerah juga menyusun dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban seperti LAKIP/LKJIP dan LPPD. Peringkat LPPD Provinsi tergolong baik, karena sampai dengan tahun 2015 berada pada angka 10 besar, dan pada tahun 2016 kategori tinggi. Nilai Evaluasi Sakip cenderung meningkat dari C pada tahun 2011 menjadi BB pada tahun 2015.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja ditunjukkan dengan capaian indikator persentase perangkat daerah yang telah memiliki dan menerapkan SOP yang menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 80,43% pada tahun 2016, dan persentase perangkat daerah yang telah memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Publik baru mencapai sebesar 65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh unit-unit pelayanan publik pemerintah provinsi belum optimal karena banyak yang belum memiliki standar pelayanan. Kecamatan yang melaksanakan PATEN sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 100%. Berkaitan dengan penyebaran informasi pembangunan daerah, persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif mencapai 100%.

Berkaitan dengan reformasi birokrasi, Nilai reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 baru mencapai angka 60. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, dilakukan penataan organisasi pemerintah daerah. Capaian persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen analisa jabatan sesuai ketentuan sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 76%, begitu pula dengan persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 61%. Dalam rangka mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui layanan *e-procurement*, dengan capaian Persentase kualitas layanan *e-procurement* sampai dengan tahun 2016 sebesar 96%.

Secara rinci capaian beberapa indikator kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD	%	Fisik 93,21 Keu 90,00	Fisik 91,91 Keu 90,22	Fisik 91,81 Keu 91,31	Fisik 93,10 Keu 89,27	Fisik 93,00 Keu 90,00	Fisik 100,00 Keu 99,02
2.	Persentase capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan sumberdana APBN	%	Fisik 80,15 Keu	Fisik 100 Keu	Fisik 80,15 Keu	Fisik 86,85 Keu	Fisik 87,00 Keu	Fisik 76,85 Keu

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(DK, TP)		71,78	96,87	71,78	85,33	85,00	71,21
3.	Persentase kualitas layanan e-procurement	%	60	75	80	90	90	96
4.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen analisa jabatan sesuai ketentuan	%	0	0	0	25	50	58
5.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan sesuai ketentuan	%	0	0	0	0	58	58
6.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki dan menerapkan SOP	%	10	10	15	20	66	71
7.	Persentase Perangkat Daerah pelayan publik yang telah memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan Publik	%	10	10	15	20	40	65
8.	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	0	0	0	0	41,15	60
9.	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	C	CC	B	B	CC	B
10.	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah	Dok	10	7	9	7	6	6
11.	Rekomendasi Hasil pengkajian Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Dok	17	5	6	5	16	17
12.	Banyaknya kasus hukum yang diselesaikan	Kasus	0	12	16	3	2	5
13.	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan	Dok	8	5	7	5	3	7
14.	Peringkat LPPD Provinsi	Peringkat	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar	Tinggi
15.	Kecamatan yang melaksanakan PATEN	%	0	0	0	40	50	100
16.	Persentase pelayanan KDh/WKDh yang sesuai dengan SOP	Persen	95	95	95	95	95	99,74
17.	Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif	Persen	-	-	100	100	100	32,6

Sumber: Sekretariat Daerah

6) Pengawasan

Efektivitas dan efisiensi anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam penciptaan *good governance*. Dukungan yang dapat diberikan dalam rangka menciptakan kondisi tersebut antara lain adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan yang mendukung terhadap perwujudan akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas untuk membina dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat semakin ditingkatkan agar kinerja pembangunan daerah dan pelayanan publik lebih berdaya guna dan berhasil guna. Fokus pengawasan pada pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan (obrik) bagi 30 OPD Provinsi Kepulauan Riau dan 10 Lembaga Teknis/ Perusahaan Daerah melalui pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan. Kinerja Inspektorat sudah cukup baik, terlihat dari capaian hasil opini BPK atas laporan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang sudah mencapai kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang memiliki sertifikat pengawas sebesar 80%, dan peningkatan level kapabilitas inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menjadi level 2 pada tahun 2015 dan 2016.

Indikator yang capaiannya masih rendah yaitu Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penilaian pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih berada pada Zona "Kuning". Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut menggunakan satu variabel penilaian, yaitu kepatuhan dengan menilai unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, meliputi: 1) Standar Pelayanan; 2) Maklumat Pelayanan; 3) Sistem Informasi Pelayanan Publik; 4) SDM; 5) Unit Pengaduan; 6) Sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus; 7) Visi, Misi dan Moto; 8) Sertifikat ISO 9000:2008; 9) Atribut; dan 10) Sistem Pelayanan Terpadu.

Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP yang menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Indikator tingkat kematangan SPIP telah diamanahkan dalam RPJMN 2015 – 2019 yakni minimal Level 3 dalam tahun 2019. Indikator ini dapat memberikan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah di lingkungan pemerintah. Kinerja Indikator Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 adalah level 2 dan terus di tingkatkan untuk dapat mendukung pencapaian indikator RPJMN 2015-2019.

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*; yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Terdapat 5 level kapabilitas dalam konsep IA-CM, yaitu 1) *initial*; 2) *infrastructure*; 3) *Integrated*; 4) *Managed*; dan 5) *Optimizing*. Berdasarkan konsep IA-CM, APIP Provinsi Kepulauan Riau sudah berada pada tingkat kedua (*infrastructure*) pada tahun 2015. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang berada pada kondisi *initial* (level 1). Keberhasilan APIP dalam mencapai level ini antara lain melalui pemenuhan enam unsur penilaian, meliputi : Peran dan layanan APIP berlaku sebagai auditor ketaatan; SDM dikelola dengan menggunakan metode

pengembangan profesi individu dan rekrutmen kepada SDM yang kompeten; Melakukan praktek kerja profesional dan melakukan pengawasan berdasarkan prioritas; Melakukan penyusunan anggaran operasional APIP; termasuk perencanaan kegiatan; Telah dilakukan pengelolaan terhadap organisasi APIP; dan Hubungan pelaporan telah terbangun dengan baik.

Secara rinci kinerja urusan otonomi daerah (inspektorat) dapat dilihat pada Tabel 2.96 berikut ini.

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	Kuning	Kuning
3.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	1	2
4.	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang memiliki sertifikasi	50	50	60	70	80	80
5.	Meningkatnya level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	1	2	2

Sumber: Inspektorat Daerah

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Nilai rata-rata konsumsi penduduk Provinsi Kepulauan Riau selama satu tahun, yang diukur melalui konsumsi rumah tangga per kapita, selama kurun waktu 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Nilai rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita riil pertahun tahun 2011 sebesar 25.008,07 ribu rupiah menjadi 28.922,11 ribu rupiah pada tahun 2015, artinya selama kurun waktu 5 tahun konsumsi rumah tangga per kapita Kepulauan Riau meningkat sebesar 15,65 persen, seperti terlihat pada Tabel 2.97 berikut ini.

Tabel 2.97.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	43.734,37	46.714,29	49.858,73	53.284,03	57.063,33
2.	Persentase Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terhadap PDRB	36,10	34,81	34,77	35,51	36,50

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator produksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya penurunan NTP pada sektor perkebunan karena harga komoditas perkebunan yang mengalami penurunan.

Dari lima subsektor yang menyusun NTP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016, tercatat sektor yang melebihi 100 yaitu Pertanian Hortikultura, Peternakan dan Perikanan, sedangkan sektor pertanian tanaman pangan dan sektor perkebunan NTP nya kurang dari 100, seperti terlihat pada Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98.
Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-P)	69,88	72,48	99,95	99,50	98,57
2.	Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTP-H)	127,05	126,25	99,18	102,68	102,53
3.	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)	120,19	119,41	92,53	85,49	80,15
4.	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTP-Pt)	90,19	90,07	106,33	104,66	104,05
5.	Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi)	107,53	108,15	107,26	107,39	108,98
	Nilai Tukar Petani (NTP) umum	104,66	104,96	100,93	99,45	98,16

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2017

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Di Provinsi Kepulauan Riau terjadi peningkatan panjang jalan Provinsi dari 679,49 km pada tahun 2011 menjadi 890,11 km pada tahun 2016. Sementara itu jumlah kendaraan mencapai sebanyak 1.086.087 unit, terdiri dari sejumlah 124.664 mobil penumpang, 2.310 bus, 30.004 truk, dan 929.109 sepeda motor. Jumlah kendaraan terbanyak di Kota Batam, selanjutnya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Kendaraan				Jumlah
		Mobil Penumpang	Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	
1.	Karimun	6.415	70	2.426	99.736	108.647
2.	Bintan	6.125	314	2.528	105.337	114.304
3.	Natuna	1.157	52	544	19.537	21.290
4.	Lingga	861	75	530	31.566	33.032
5.	Kepulauan Anambas	NA	NA	NA	NA	0
6.	Batam	106.203	1.784	20.962	605.872	734.821
7.	Tanjungpinang	18.212	226	5.448	141.633	165.519
	Provinsi Kepulauan Riau	138.973	2.521	32.438	1.003.681	1.177.613

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2016

b. Jumlah Bank dan Kantor Cabang

Keberadaan lembaga keuangan sangat penting dalam menjaga kelangsungan ketersediaan dana bagi pembangunan disegala bidang. Tidak saja sebagai sarana penyaluran dana tetapi juga berfungsi sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perbankan yang sehat, maka pergerakan finansial untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dapat terpantau dan terkontrol dengan berbagai jasa yang disediakan. Terdapat 418 Bank Umum di Kepulauan Riau pada tahun 2016, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100.
Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Jenisnya Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Jenis	Kantor Pusat	Kantor	Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
1.	Bank Umum Pemerintah	0	12	75	83	170
2.	Bank Pembangunan Daerah	0	7	17	13	37
3.	Bank Swasta Nasional	0	35	75	21	131
4.	Bank Asing dan Campuran	0	4	1	4	9

No	Jenis	Kantor Pusat	Kantor	Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
5.	Bank Perkreditan Rakyat	43	28	0	0	71
	Jumlah	43	86	168	121	418

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2016

c. Jumlah Penginapan/Hotel

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang. Jumlah hotel di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebanyak 429 hotel, meningkat dari tahun 2014 sebanyak 410 unit. Jumlah kamar meningkat dari sebanyak 16.851 kamar pada tahun 2014 menjadi 21.194 unit pada tahun 2016. Secara rinci jumlah hotel dan jumlah kamar hotel dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101.
Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/Kota	Hotel			Kamar		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	Karimun	68	69	72	1.099	1.174	2.355
2.	Bintan	35	36	38	1.308	1.416	2.339
3.	Natuna	41	44	42	283	320	532
4.	Lingga	20	22	20	311	360	451
5.	Kepulauan Anambas	20	21	20	90	100	323
6.	Batam	182	190	191	12.183	13.388	12.983
7.	Tanjungpinang	44	44	46	1.577	1.660	2.211
	Kepulauan Riau	410	426	429	16.851	18.418	21.194

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2016

Keterangan: Data jumlah kamar dan tempat tidur tahun 2016 tidak tersedia.

d. Jumlah restoran

Restoran menjadi salah satu sarana pendukung wisata. Jumlah restoran menunjukkan peningkatan dari sebanyak 350 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 735 unit pada tahun 2016, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102.
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Karimun	39	36	36	36	49
2.	Bintan	81	49	69	69	141
3.	Natuna	29	45	45	45	39
4.	Lingga	63	79	72	72	70
5.	Kepulauan Anambas	11	30	30	47	20
6.	Batam	90	230	495	495	375

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
7.	Tanjungpinang	37	83	158	163	41
	Kepulauan Riau	350	552	905	927	735

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2016

e. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih

Penggunaan air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Kepulauan Riau Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebanyak 3.183.898 m³. Di samping itu, dibangun pula sarana dan prasarana air bersih berbasis masyarakat. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,96% pada tahun 2011 menjadi 89,23% pada tahun 2016 seperti terlihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103.

Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%	63,96	64,78	65,50	67,10	88,50	89,23

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

f. Ketersediaan daya listrik

Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Provinsi Kepulauan Riau tentu membutuhkan sarana pendukung seperti ketersediaan sumber energi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN, di tahun 2016 daya terpasang yang tersedia sebesar 232.912 KWh. Produksi listrik sebesar 761.683.952 KWh dengan listrik terjual sebanyak 706.013.699 KWh. Kebutuhan listrik sangat besar, sehingga perlu ada penambahan daya terpasang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104.

Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Daya Terpasang (KWh)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
1	Karimun	77.560	214.980.715	197.876.534
2	Bintan	24.736	126.347.560	118.595.651
3	Natuna	19.493	32.567.692	30.437.072
4	Lingga	11.235	34.883.411	32.528.145
5	Kepulauan Anambas	9.031	31.768.446	27.598.695
6	Batam	2.740	10.789.394	10.114.972
7	Tanjungpinang	103.117	310.346.734	288.636.277
	Kepulauan Riau	232.912	761.683.952	706.013.699

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2016

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Jumlah Tindak Pidana

Jumlah tindak pidana menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Jumlah tindak pidana menunjukkan jumlah dari sebanyak 5.220 kasus pada tahun 2013 menjadi 5.474 kasus pada tahun 2016, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.105 berikut ini.

Tabel 2.105.
Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2016

No	Kepolisian Resort	2013	2014	2015	2016
1.	Karimun	208	314	535	529
2.	Bintan	318	220	220	166
3.	Natuna	75	116	148	104
4.	Lingga	51	47	74	66
5.	Kepulauan Anambas	-	-	-	-
6.	Batam	3.591	3.885	4.270	3.701
7.	Tanjungpinang	732	559	685	673
	POLDA Kepulauan Riau	245	265	252	235
	Jumlah Total	5.220	5.406	6.184	5.474

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2016

2. Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dipindahkan dari perangkat daerah ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Jumlah Izin dan nonperizinan yang dilayani oleh Pelayanan terpadu satu pintu sampai dengan tahun 2016 sebanyak 928 jenis perizinan/non perizinan, sdangk jumlah jenis izin dan non izin yang diterbitkan BPMPTSP hanya sebanyak 107 jenis. Masih ada beberapa jenis perizinan yang ditangani oleh perangkat daerah. Sementara itu jumlah permohonan izin yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2016 sebesar 80 seperti terlihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106.
Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Izin dan nonperizinan yang dilayani oleh Pelayanan terpadu satu pintu	izin	-	-	-	114	450	1.264
2	Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP	jenis	-	-	-	104	104	110
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	%	-	-	-	70	80	81,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4	Jumlah permohonan izin yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Permohonan izin	-	-	-	1	8	NA

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Sayu Pintu

3. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persentase penduduk usia kerja lulusan universitas pada tahun 2016 hanya sebesar 15,46%, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan perincian pada Tabel 2.107 berikut ini.

Tabel 2.107.
Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar	1,89	1,72	1,56	1,68	10,02
2	Sekolah Dasar	23,63	22,26	20,77	20,61	15,37
3	Sekolah Menengah	62,28	63,54	65,32	62,73	59,13
4	Universitas	12,20	12,48	12,35	14,98	15,49

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

b. Rasio ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 49,56%, seperti terlihat pada Tabel 2.108 berikut ini.

Tabel 2.108.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas)	340.193	329.928	670.121
2	Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)	695.318	662.730	1.358.048
3	Jumlah penduduk	1.035.511	992.658	2.028.169
4	Rasio Ketergantungan	48,93	49,78	49,34

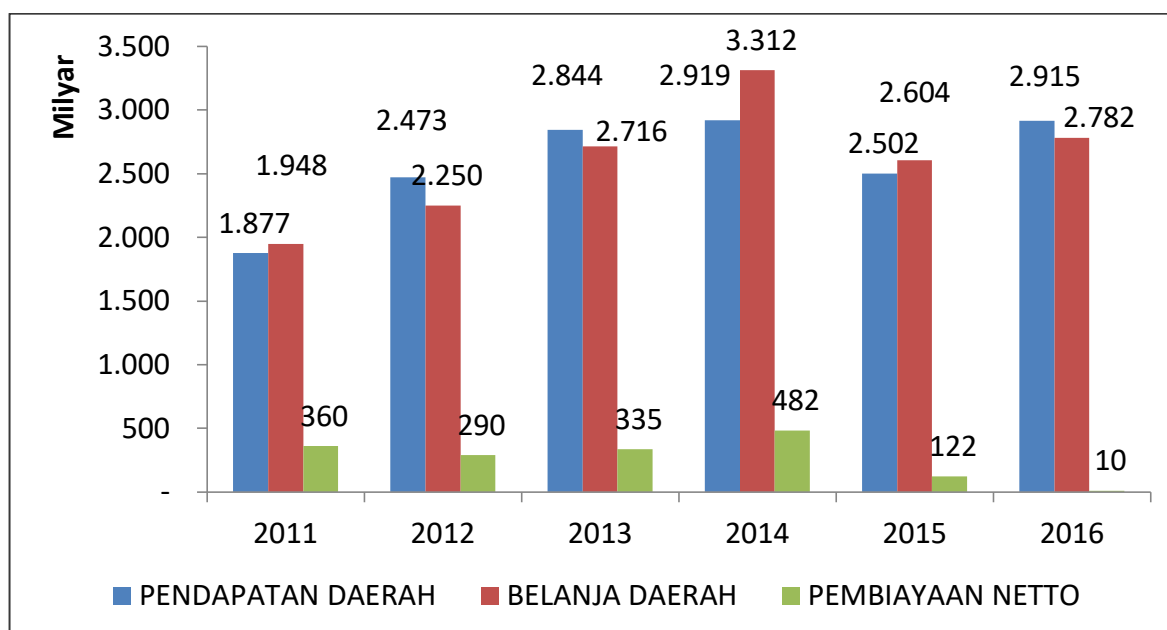
Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2017

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Netto Tahun 2011-2016

Data lengkap perkembangan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam kurun waktu tahun 2011-2016 tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011–2016 (Rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pendapatan Daerah	1.876.879.092.830	2.473.411.609.339	2.843.717.931.680	2.919.185.331.874	2.501.557.017.751	2.914.857.620.563
1	Pendapatan Asli Daerah	620.901.423.131	723.053.960.335	907.982.180.251	1.070.208.288.698	1.013.226.321.364	1.079.309.741.999
a	Pajak Daerah	572.738.969.662	685.601.565.184	852.180.399.414	1.006.068.103.257	951.533.883.720	950.283.609.237
b	Retribusi Daerah	1.655.566.432	5.352.201.858	13.413.198.431	2.713.028.614	2.042.723.660	3.045.922.690
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	2.559.182.974	-	3.740.233.003	2.095.760.839
e	Lain-Lain Pad Yang Sah	46.506.887.036	32.100.193.293	39.829.399.432	61.427.156.827	55.909.480.981	123.884.449.232
2	Dana Perimbangan	1.246.904.169.699	1.594.446.909.004	1.753.710.493.429	1.664.959.883.176	1.246.121.773.175	1.464.904.579.643
a	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	829.255.427.699	1.110.423.502.004	1.060.969.973.429	925.272.475.176	507.640.852.175	521.708.951.643
b	Dana Alokasi Umum	395.745.542.000	460.857.807.000	656.067.610.000	698.009.318.000	695.943.711.000	866.810.696.000
c	Dana Alokasi Khusus	21.903.200.000	23.165.600.000	36.672.910.000	41.678.090.000	42.537.210.000	76.384.932.000
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.073.500.000	155.910.740.000	182.025.258.000	184.017.160.000	255.169.656.350	370.643.298.921
a	Hibah	-	-	-	-	-	22.334.448.921
b	Dana Penyesuaian	9.073.500.000	155.910.740.000	182.025.258.000	184.017.160.000	254.184.276.350	347.184.450.000
c	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	985.380.000	1.124.400.000

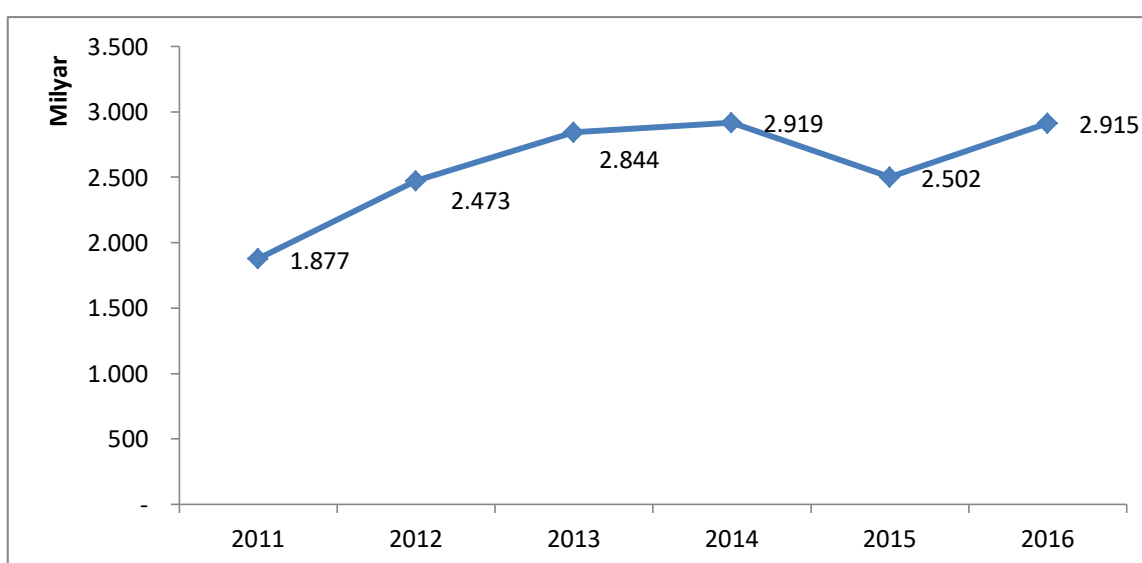
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II	Belanja Daerah	1.947.593.447.664	2.249.826.414.857	2.715.832.508.855	3.312.458.874.127	2.604.403.546.727	2.782.118.460.431
A	Belanja Tidak Langsung	861.648.228.668	1.041.489.314.964	1.195.146.661.670	1.213.820.568.627	1.218.626.376.808	1.493.246.117.501
1	Belanja Pegawai	192.313.328.801	212.470.059.964	220.943.359.701	252.064.813.412	281.351.910.807	304.724.044.507
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Hibah	82.918.650.000	278.411.673.000	365.873.250.000	470.786.269.900	485.780.471.832	419.287.000.000
4	Belanja Bantuan Sosial	188.877.355.500	115.916.315.765	134.215.224.579	40.688.431.068	57.088.645.122	13.576.941.183
5	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota	255.569.137.934	256.226.110.297	283.495.455.367	252.894.343.625	315.613.621.050	742.700.704.179
6	Belanja Bantuan Keuangan	141.969.756.433	178.259.960.938	189.620.350.023	197.356.710.622	78.215.727.997	12.636.713.632
7	Belanja Tidak Terduga	-	205.195.000	999.022.000	30.000.000	576.000.000	320.714.000
II	Belanja Langsung	1.085.945.218.996	1.208.337.099.894	1.520.685.847.185	2.098.638.305.501	1.385.777.169.919	1.288.872.342.930
1	Belanja Pegawai	140.004.975.429	165.484.844.461	189.822.416.013	183.736.096.746	163.651.073.431	158.890.339.250
2	Belanja Barang Dan Jasa	686.032.380.540	780.511.968.759	937.953.665.819	1.196.907.727.476	880.841.202.032	842.466.563.868
3	Belanja Modal	259.907.863.027	262.340.286.674	392.909.765.353	717.994.481.279	341.284.894.457	287.515.439.812
	Surplus/Defisit	(70.714.354.834)	223.585.194.482	127.885.422.825	(393.273.542.253)	(89.885.795.839)	132.739.160.131
III	Pembiayaan						
1	Penerimaan Pembiayaan	375.005.363.546	290.737.799.125	514.289.373.508	538.527.772.257	137.134.367.384	32.248.571.545
a	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	454.990.000	1.834.290.413	-	507.922.872	560.047.549	-
b	Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi	89.883.300	12.500.000	11.191.949	-	-	-

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
c	Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergilir	1.656.214.971	-	905.187.953	-	-	-
d	Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	372.804.275.275	288.891.008.712	513.372.993.606	463.019.849.385	88.836.960.696	32.248.571.546
e	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	75.000.000.000	47.737.359.139	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.400.000.000	950.000.000	179.154.946.947	56.410.805.294	15.000.000.000	22.334.448.921
a	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	32.500.000.000	-	-
b	Penyertaan Modal Pemerintah	13.000.000.000	-	90.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	22.334.448.921
c	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	12.310.805.294	-	-
d	Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah	2.400.000.000	950.000.000	-	1.600.000.000	-	-
e	Tuntutan Ganti Rugi Dan Tuntutan Perbendaharaan	-	-	89.154.946.947	-	-	-
	Pembiayaan Netto	359.605.363.546	289.787.799.125	335.134.426.561	482.116.966.963	122.134.367.384	9.914.122.624
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	288.891.008.712	513.372.993.606	463.019.849.386	88.843.424.709	32.248.571.546	142.653.282.755

Sumber: LPP APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2016

3.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sementara itu Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (BOS dan DID); Pendapatan Hibah; Pendapatan Dana Darurat; Tambahan Penghasilan Guru; dan Pendapatan Lainnya. Perkembangan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 1.877 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 2.915 milyar pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 3.2.



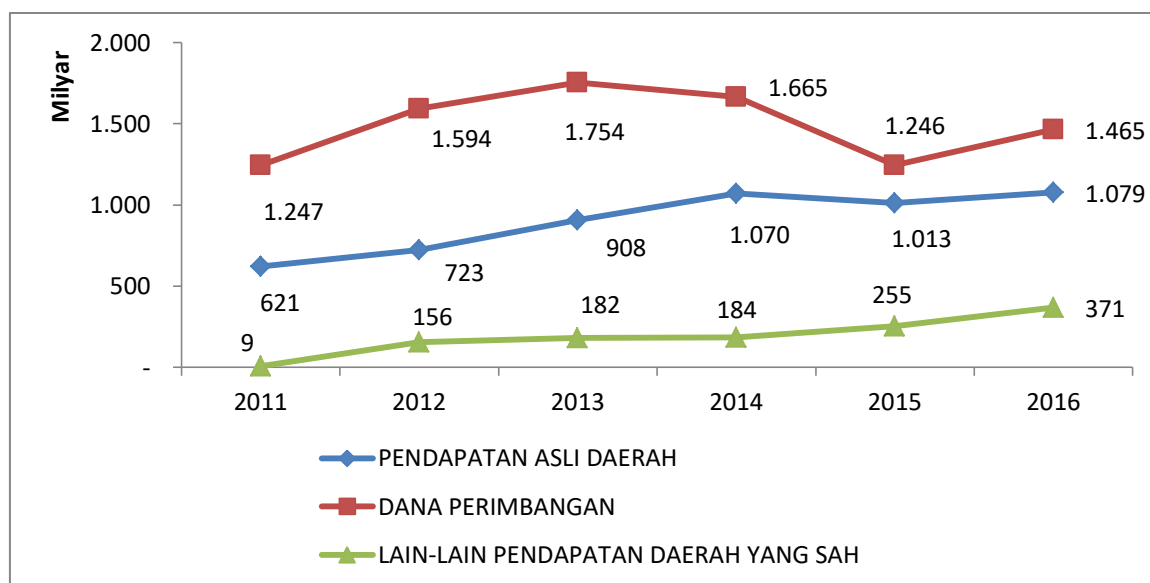
Gambar 3.2. Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2011 – 2016 (Milyar Rupiah)

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,32%. Rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 12,22%, dana perimbangan sebesar 5%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,44%. Perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah secara rinci terlihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011–2016 (%)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
A	Pendapatan Daerah	31,78	14,97	2,65	(14,31)	16,52	10,32
1	Pendapatan Asli Daerah	16,45	25,58	17,87	(5,32)	6,52	12,22
a	Pajak Daerah	19,71	24,30	18,06	(5,42)	(0,13)	11,30
b	Retribusi Daerah	223,29	150,61	(79,77)	(24,71)	49,11	63,71
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					(43,97)	(43,97)
e	Lain-Lain Pad Yang Sah	(30,98)	24,08	54,23	(8,98)	121,58	31,98
2	Dana Perimbangan	27,87	9,99	(5,06)	(25,16)	17,56	5,04
a	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33,91	(4,45)	(12,79)	(45,14)	2,77	(5,14)
b	Dana Alokasi Umum	16,45	42,36	6,39	(0,30)	24,55	17,89
c	Dana Alokasi Khusus	5,76	58,31	13,65	2,06	79,57	31,87
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.618,31	16,75	1,09	38,67	45,25	25,44
a	Hibah						
b	Dana Penyesuaian	1.618,31	16,75	1,09	38,13	36,59	23,14
c	Sumbangan Pihak Ketiga					14,11	14,11

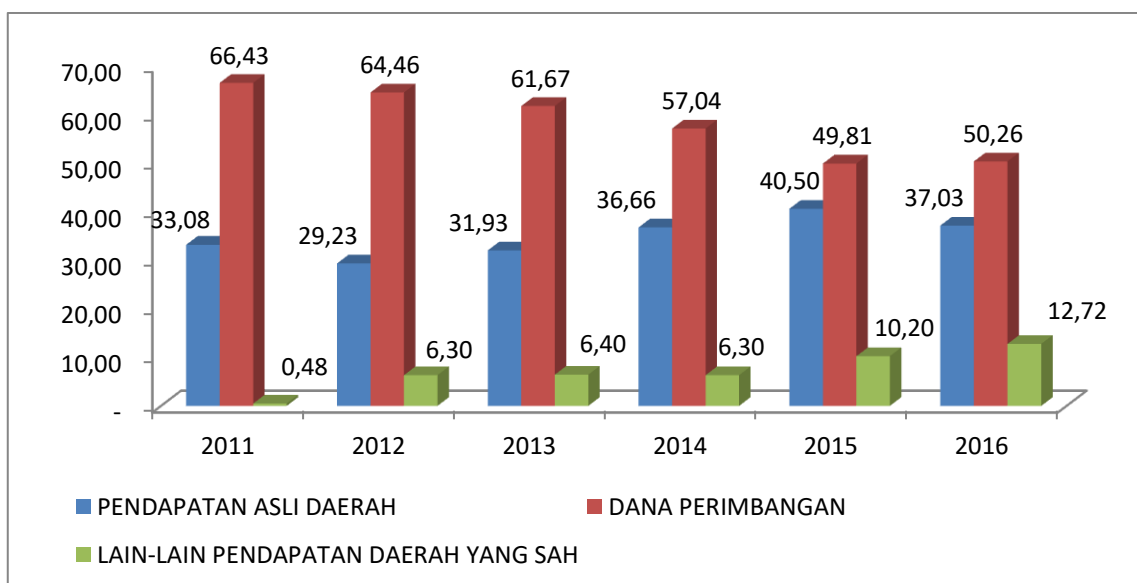
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan secara konsisten. Begitu pula dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga terus meningkat. Sementara itu untuk dana perimbangan perkembangannya fluktuatif walaupun kecenderungannya meningkat, seperti terlihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Besarnya Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2016 (Milyar Rupiah)

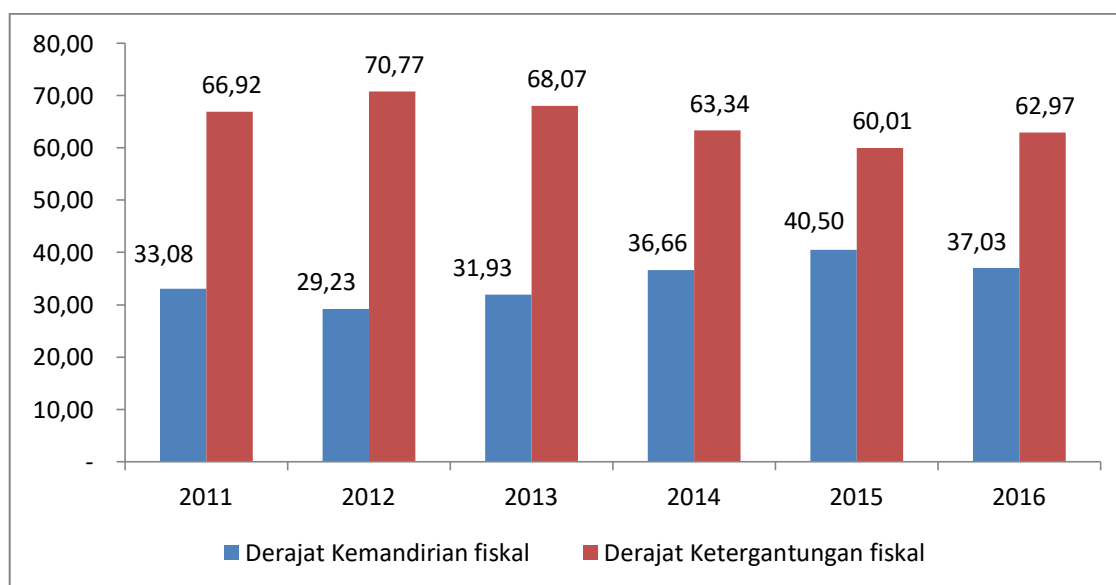
Berdasarkan data Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat dihitung Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD terhadap total pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah.

Gambar 3.4 menunjukkan persentase kontribusi dari ketiga sumber Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2011-2016. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada kurun waktu tersebut dana perimbangan mendominasi sumber Pendapatan Daerah dengan kecenderungan menurun dari 66,43% menjadi 50,26%, sedangkan PAD meningkat dari 33,08% menjadi sebesar 37,03%, dan Pendapatan Lainnya meningkat dari sebesar 0,48% menjadi 12,72%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebagian besar berasal dari pemerintah pusat, yaitu Dana Perimbangan.



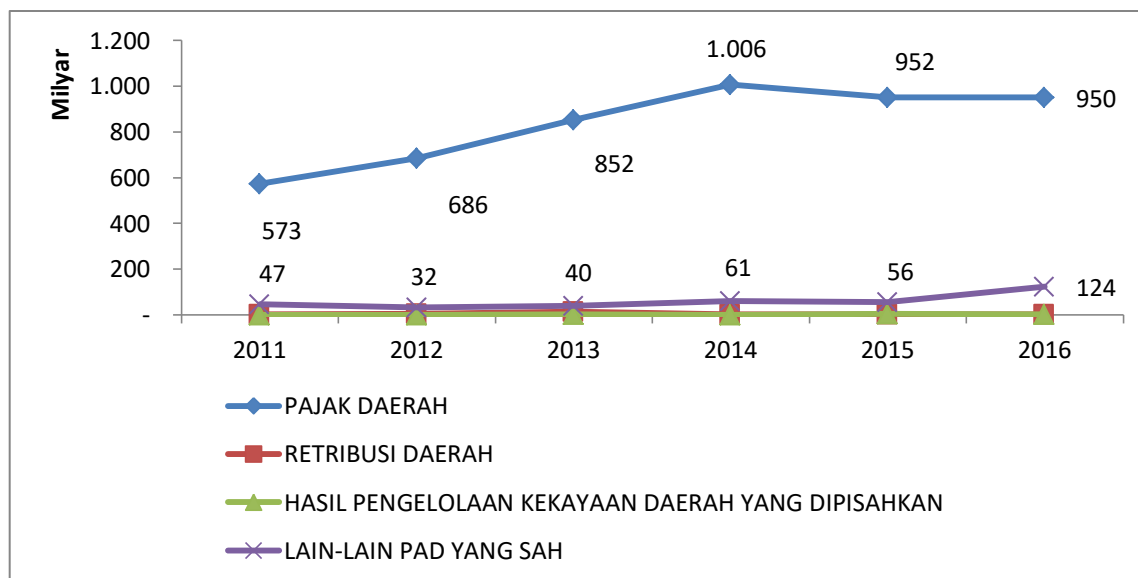
Gambar 3.4. Komposisi Unsur Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016 (%)

Perkembangan derajat kemandirian fiskal daerah dalam kurun waktu 2011-2016 menunjukkan peningkatan dari sebesar 33,08% menjadi sebesar 37,03%, sebaliknya derajat ketergantungan fiskal daerah semakin menurun dari sebesar 66,92% pada tahun 2011 menjadi 62,97% pada tahun 2016. Namun demikian secara umum ketergantungan fiskal daerah Provinsi Kepulauan Riau masih tinggi. Perkembangan derajat kemandirian/ketergantungan fiskal daerah tercantum pada Gambar 3.5.



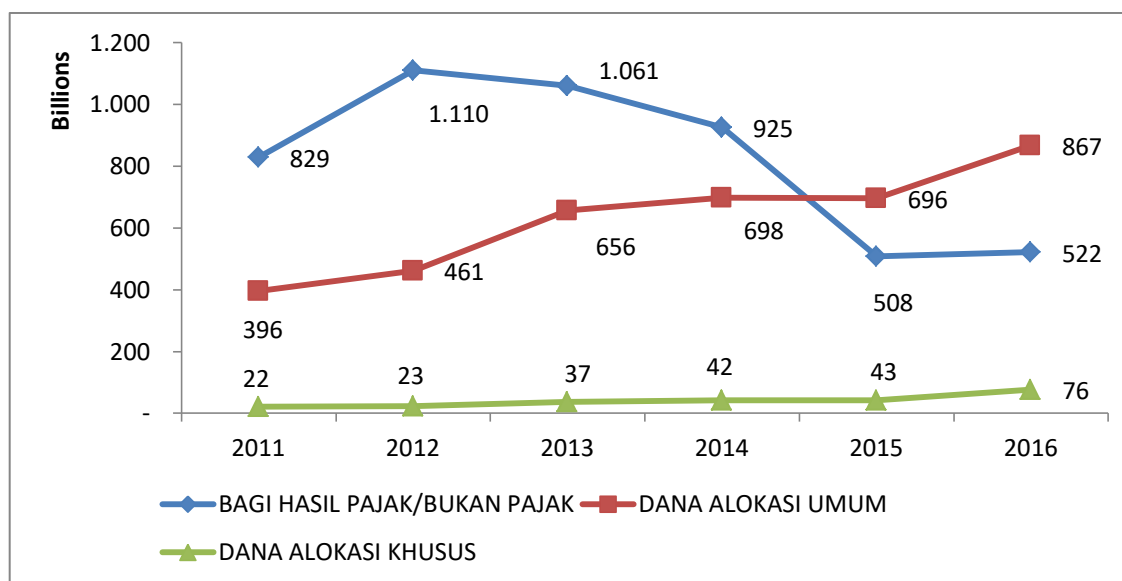
Gambar 3.5. Derajat Kemandirian dan Derajat Ketergantungan Fiskal Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

Perkembangan PAD Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun (2011-2016) menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp 620,90 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 1.079,30 milyar pada tahun 2016. Peningkatan terbesar yaitu pada unsur pendapatan pajak daerah dari sebesar Rp 572,738 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 950,28 milyar pada tahun 2016, sedangkan pendapatan retribusi daerah relatif kecil dengan peningkatan dari 1,65 milyar pada tahun 2011 menjadi 3,04 milyar pada tahun 2016. Lain-lain PAD yang sah naik dari sebesar 46,50 milyar menjadi 123,84 milyar pada tahun 2016. Secara rinci perkembangan nilai unsur-unsur PAD seperti terlihat pada Gambar 3.6.



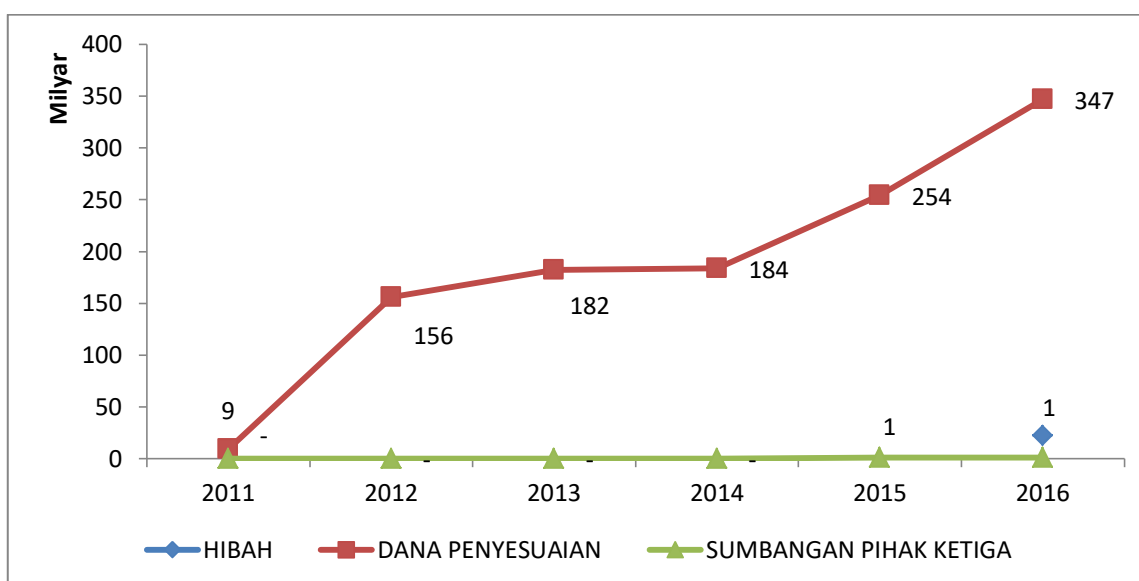
Gambar 3.6. Perkembangan Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016 (Milyar Rupiah)

Pada Dana perimbangan, nilai bagi hasil pajak/bukan pajak yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, sedangkan DAU dan DAK mengalami peningkatan. DAU meningkat dari sebesar Rp 396 milyar pada tahun 2011 menjadi 867 milyar pada tahun 2016, sedangkan DAK meningkat dari 22 milyar pada tahun 2011 menjadi 76 milyar pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7. Perkembangan Unsur Dana Perimbangan Tahun 2011-2016 (Milyar rupiah)

Pada Lain-lain pendapatan yang sah, perkembangan nilai Dana penyesuaian dan otonomi khusus menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 9 milyar rupiah pada tahun 2011 menjadi 347 milyar rupiah pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Perkembangan Unsur-Unsur Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2011-2016 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan analisis perkembangan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan maupun Lain-lain pendapatan yang sah, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif terlihat dari adanya kenaikan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Berbagai

langkah dan upaya terus dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan dan penyempurnaan database kendaraan Samsat, pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Di dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah, masih terdapat permasalahan – permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Akurasi data potensi kendaraan bermotor untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama - Kendaraan Bermotor yang senantiasa perlu di perbaharui, Disadari bahwa perlu adanya pelaksanaan *online system* khususnya terhadap pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
2. Akurasi data kendaraan besar dan alat-alat berat yang perlu diperbaharui sebagai potensi pajak daerah ;
3. Perlu ditingkatkan koordinasi antar dinas terkait dalam rangka menggali potensi retribusi baru dan sumbangan pihak ketiga;
4. Perlu adanya peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM personil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan SKPD Penghasil dalam menggali penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat khususnya yang berkenaan dengan teknis setoran penerimaan Dana Perimbangan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa: Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang Pajak Daerah, Piutang retribusi daerah, Piutang Lainnya dan Persediaan. Perkembangan aset Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dari sebesar Rp 3.380,92 milyar menjadi Rp 3.865,36 milyar. Kewajiban merupakan kewajiban yang harus dipenuhi /diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kewajiban mencakup kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi /diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dan kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi/diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Terjadi peningkatan kewajiban dari sebesar Rp 74.665,88 menjadi sebesar Rp 638,03 milyar. Sementara itu Ekuitas Dana Investasi mencerminkan ekuitas Pemerintah Provinsi yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. Perkembangan ekuitas dana investasi menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 3.003,86 milyar menjadi sebesar 3.227,33 milyar.

Analisis neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dihitung dengan rasio likuiditas (rasio lancar dan *quick ratio*) dan rasio solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset) dan rasio hutang terhadap modal. Rasio lancar dalam kurun waktu tahun 2011-2016 cenderung menurun dari sebesar 5,60 menjadi 1,51. Hal ini menunjukkan bahwa hutang jangka pendek masih lebih kecil

dibandingkan dengan aset lancarnya sehingga aset lancar yang dimiliki cukup memadai untuk membayar hutang jangka pendeknya. Dengan kata lain Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya mampu membayar 45% utang jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Begitu pula dengan rasio quick, dengan angka capaian juga menurun dari sebesar 4,18 menjadi 1,37 pada tahun 2016.

Dilihat dari Rasio total hutang terhadap total aset dalam kurun waktu tahun 2011-2016 menunjukkan angka dibawah 1 dan sedikit meningkat dari sebesar 0,02 menjadi 0,07. Capaian ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki pemerintah daerah dapat ditutup dengan aset yang dimiliki. Dilihat dari rasio hutang terhadap modal, capaiannya dibawah angka 1 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 0,02 menjadi 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau dapat ditutupi dengan investasi yang ditanamkan. Hasil perhitungan data analisis neraca daerah secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio lancar (current ratio)	5,60	12,67	4,67	0,65	0,45	1,51
2.	Rasio quick (quick ratio)	4,18	9,24	3,36	0,33	0,05	1,37
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,02	0,01	0,03	0,07	0,16	0,07
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,02	0,02	0,03	0,08	0,20	0,08

Perkembangan neraca daerah secara rinci Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.4
Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	ASET						
1	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	285.735.870.047	510.488.048.087	461.221.016.180	73.119.471.778	12.495.698.533	37.784.312.296
	Kas di BLUD	542.084.255	1.697.027.499	1.399.825.797	15.498.926.845	17.975.060.301	2.061.832.295
	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.078.328.182	1.710.104.537	1.020.568.520	417.257.880	299.872.590	0
	Kas di Bendahara Penerimaan	0	62.596.977	375.230.575	0	1.959.945.754	19.583.802.574
	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	2.597.828.819
	Putang Pajak	20.194.444.720	35.513.651.968	46.547.306.479	48.602.491.262	49.126.564.624	0
	Penyisihan Putang Pajak	0	0	0	0	(28.451.472.939)	57.583.415.426
	<i>Putang Pajak Netto</i>	0	0	0	0	20.675.091.686	(35.886.700.349)
	Putang Retribusi	0	1.086.142.189	2.888.302.104	0	212.211.840	21.696.715.077
	Penyisihan Putang retribusi	0	0	0	0	(106.105.920)	0
	<i>Putang Retribusi Netto</i>	0	0	0	0	106.105.920	0
	Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0	549.069.150	0
	Putang Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
	Putang Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0	0	0
	Putang Diragukan Tertagih	0	0	-26.914.353.781	-27.148.633.958	0	0
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0	0	0
	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	616.784.899	616.784.899	605.592.950	605.592.950	605.592.950	0
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0	(605.592.950)	0
	<i>Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto</i>	0	0	0	0	0	0
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	150.000.000	287.500.000	287.500.000	0	0	0
	Putang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Putang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Putang Lain-lain - Lainnya	1.523.408.830	1.523.991.274	1.534.927.886	442.911.000	5.774.373.630	136.365.346
	Putang BLUD	0	0	0	5.722.417.017	99.321.352	5.907.166.142
	Penyisihan Putang Lainnya	0	0	0	0	(3.915.815.509)	(2.951.258.333)
	<i>Putang Lainnya Netto</i>	0	0	0	0	2.715.391.991	3.092.273.155
	Putang Lain-lain Diragukan Tertagih	0	0	-1.882.012.393	-3.915.815.509	0	324.291.749.137
	Persediaan	106.088.645.745	205.645.642.967	188.715.459.148	106.759.775.566	232.857.371.586	37.784.312.296
	Jumlah Aset Lancar	417.929.566.677	758.631.490.397	675.799.363.465	220.104.394.830	289.633.607.509	411.108.513.355
2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						
	Investasi Non Permanen Lainnya	36.640.212.667	36.083.635.198	35.178.447.245	36.270.524.373	35.710.476.824	35.340.292.363
	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-11.733.880.568	-15.692.711.642	-18.359.035.341	-25.754.561.241	(28.372.849.338)	(30.832.625.163)
	Jumlah Investasi Nonpermanen	24.906.332.099	20.390.923.556	16.819.411.903	10.515.963.132	7.337.627.486	4.507.667.200
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.164.550.746	17.384.100.610	20.515.125.250	27.105.538.121	43.647.331.326	63.427.015.358
	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Investasi Permanen	15.164.550.746	17.384.100.610	20.515.125.250	27.105.538.121	43.647.331.326	63.427.015.358
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	40.070.882.844	37.775.024.166	37.334.537.153	37.621.501.252	50.984.958.811	67.934.682.558
3	ASET TETAP						
	Tanah	174.896.192.639	174.920.172.639	222.408.880.716	272.435.672.116	272.606.799.116	272.900.563.116
	Peralatan dan Mesin	416.531.550.889	505.827.111.107	572.813.575.638	699.190.520.972	816.178.682.093	889.898.861.409
	Gedung dan Bangunan	878.872.952.230	903.617.289.244	1.034.382.109.069	1.135.158.290.059	1.216.423.301.731	1.275.836.982.467

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	970.912.858.287	1.150.046.926.862	1.304.332.699.589	1.894.294.061.373	1.961.284.426.328	2.165.018.455.299
	Aset Tetap Lainnya	18.957.553.829	19.766.751.929	20.915.627.331	20.163.847.145	113.119.784.111	118.267.532.261
	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.340.171.920	89.083.940.241	53.631.200.426	110.972.260.138	159.614.583.103	92.322.835.466
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0	(1.251.052.825.631)	(1.664.415.160.411)
	Jumlah Aset Tetap	2.519.511.279.794	2.843.262.192.022	3.208.484.092.768	4.132.214.651.803	3.288.174.750.851	3.149.830.069.608
4	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0	0	90.260.521.530	47.737.359.139	360.290	0
	Jumlah Dana Cadangan	0	0	90.260.521.530	47.737.359.139	360.290	0
5	ASET LAINNYA						
	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0	0	0	0
	Tuntutan Ganti rugi	150.000.000	0	0	0	0	1.048.503.950
	Kas yang dibatasi penggunaannya						4.334.959.664
	Aset yang tidak berwujud	786.390.000	786.390.000	12.229.645.746	13.594.802.673	8.983.784.720	9.421.425.720
	Aset Lain-lain	402.472.012.724	402.472.012.724	430.737.001.134	214.611.824.482	227.584.569.994	232.764.105.769
	Akumulasi Penyusutan - Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	(3.501.942.671)
	Jumlah Aset Lainnya	403.408.402.724	403.258.402.724	442.966.646.880	228.206.627.155	236.568.354.714	244.067.052.431
	JUMLAH ASET	3.380.920.132.040	4.042.927.109.309	4.454.845.161.797	4.665.884.534.180	3.865.362.032.175	3.872.940.317.953
B	KEWAJIBAN						
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	465.273.265	514.472.838	609.578.677	190.006.860	394.005.632	2.595.026.050
	Utang Beban	0	0	0	0	518.004.486.634	214.292.831.574
	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	1.470.921.250	0
	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.189.030.391	59.343.747.408	144.192.667.098	339.264.241.890	118.161.616.222	54.996.262.969

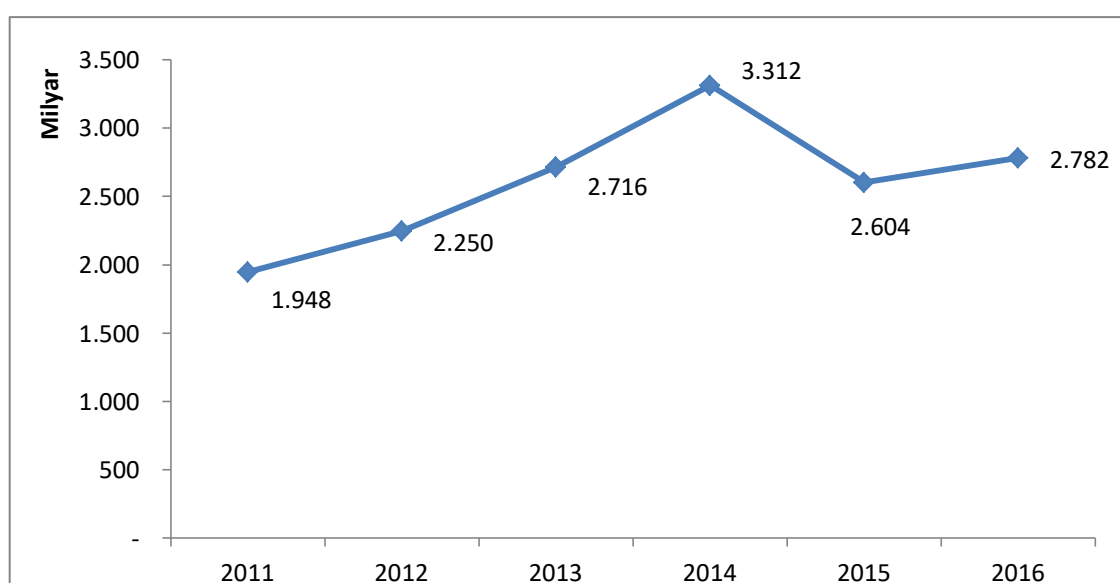
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	74.654.303.656	59.858.220.246	144.802.245.775	339.454.248.750	638.031.029.737	271.884.120.594
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0	0
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0	0
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0	0
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	74.654.303.656	59.858.220.246	144.802.245.775	339.454.248.750	638.031.029.737	4.334.959.664
	JUMLAH KEWAJIBAN	74.654.303.656	59.858.220.246	144.802.245.775	339.454.248.750	638.031.029.737	276.219.080.258
C	EKUITAS DANA						
1	EKUITAS DANA LANCAR						
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	288.891.008.712	513.372.993.606	463.019.849.385	88.840.165.010		
	Pendapatan yang Ditangguhkan	507	70.310.656	387.213.010	5.484.632		
	Cadangan Piutang	22.484.638.449	39.028.070.330	23.067.263.246	24.308.962.763		
	Cadangan Persediaan	106.088.645.745	205.645.642.967	188.715.459.148	106.759.775.566		
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-74.189.030.391	-59.343.747.408	-144.192.667.098	-339.264.241.890		
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	343.275.263.021	698.773.270.151	530.997.117.691	-119.349.853.920		
2	EKUITAS DANA INVESTASI						
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	40.070.882.844	37.775.024.166	37.334.537.153	37.621.501.252		

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.519.511.279.794	2.843.262.192.022	3.208.484.092.768	4.132.214.651.803		
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	403.408.402.724	403.258.402.724	442.966.646.880	228.206.627.155		
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0	0	0	0		
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.962.990.565.363	3.284.295.618.912	3.688.785.276.802	4.398.042.780.211		
3	EKUITAS DANA CADANGAN						
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0	0	90.260.521.530	47.737.359.139		
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0	0	90.260.521.530	47.737.359.139		
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.306.265.828.384	3.983.068.889.063	4.310.042.916.022	4.326.430.285.430	3.227.331.002.438	3.596.721.237.695
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.380.920.132.040	4.042.927.109.309	4.454.845.161.797	4.665.884.534.180	3.865.362.032.175	3.872.940.317.953

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

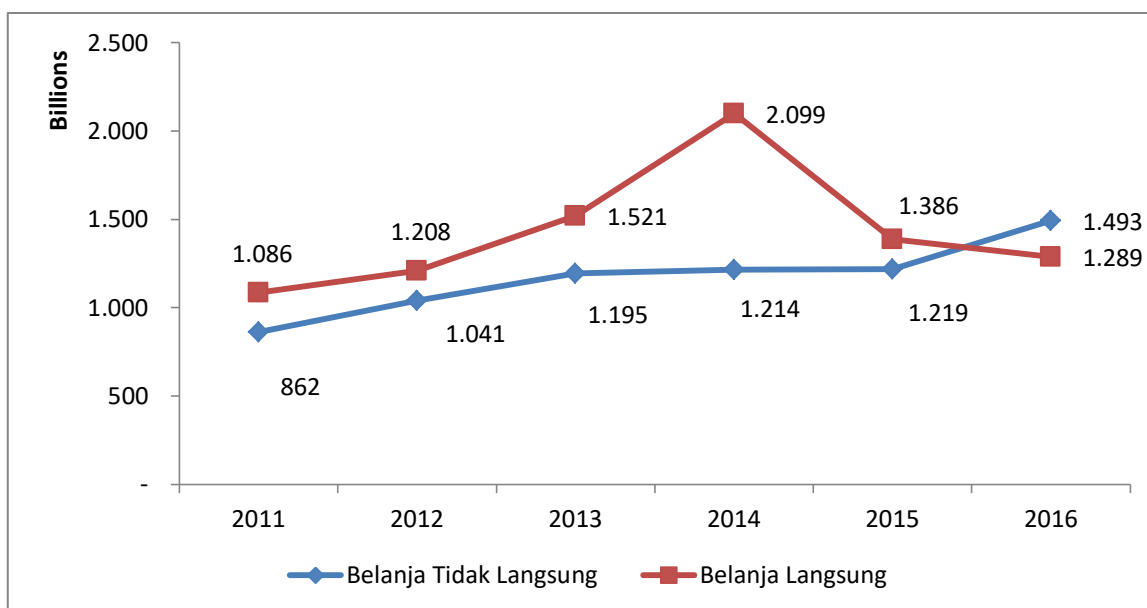
3.2.1 Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Perkembangan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 1.948 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 2.782 milyar pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 3.9.



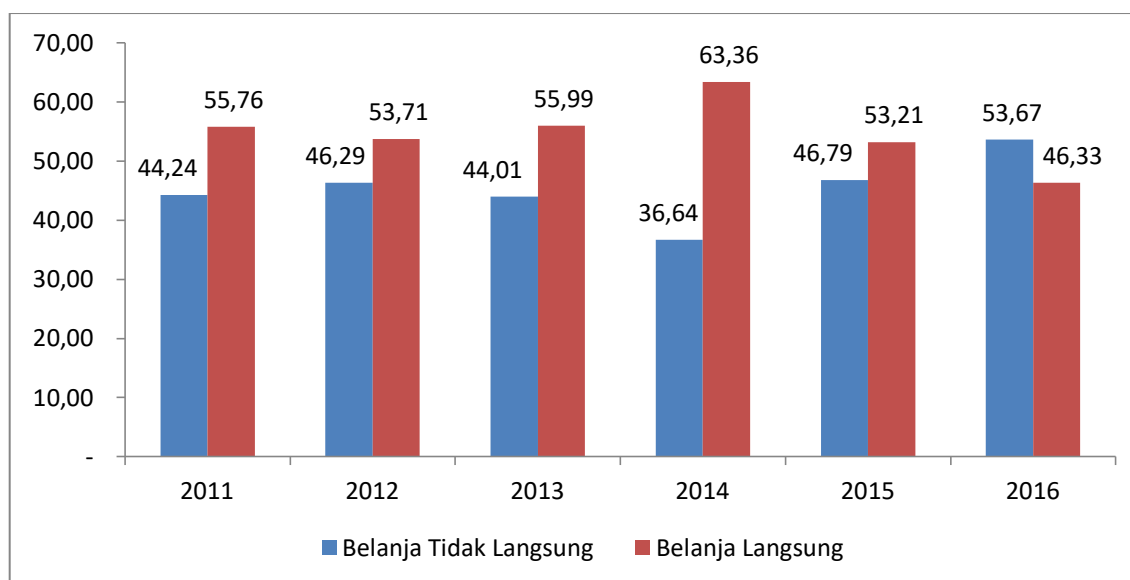
Gambar 3.9. Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2011-2016 (Milyar rupiah)

Realisasi belanja langsung Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 1.086 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 1.298 milyar pada tahun 2016. Belanja tidak langsung juga menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 862 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 1.493 milyar pada tahun 2016. Perincian realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2016 terlihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10. Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2011 – 2016 (Rupiah)

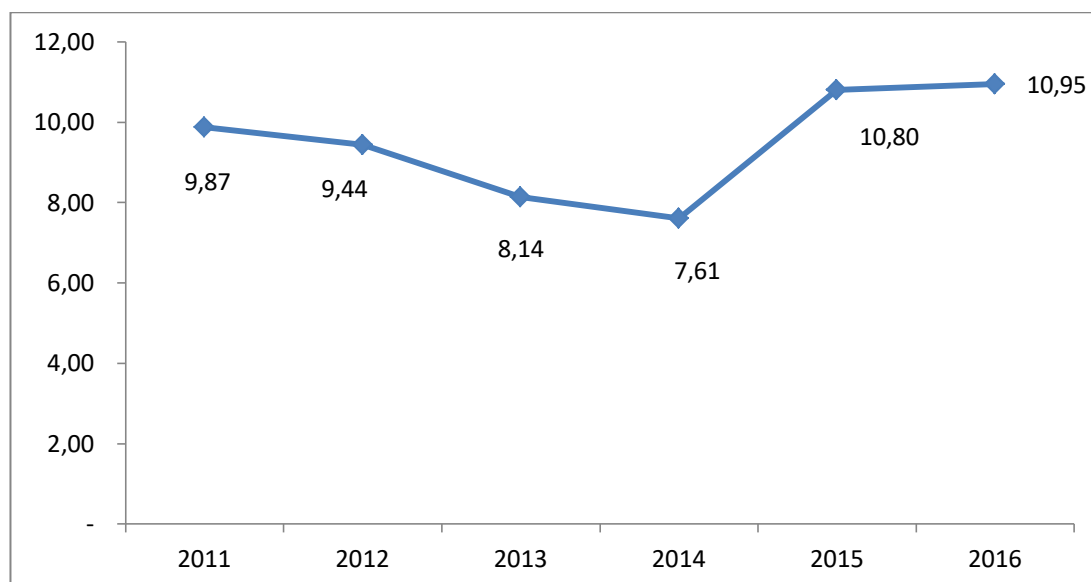
Belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau penggunaan terbesar pada belanja langsung namun dilihat dari proporsinya cenderung menurun dari sebesar 55,76% pada tahun 2011 menjadi sebesar 53,67% pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11. Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%)

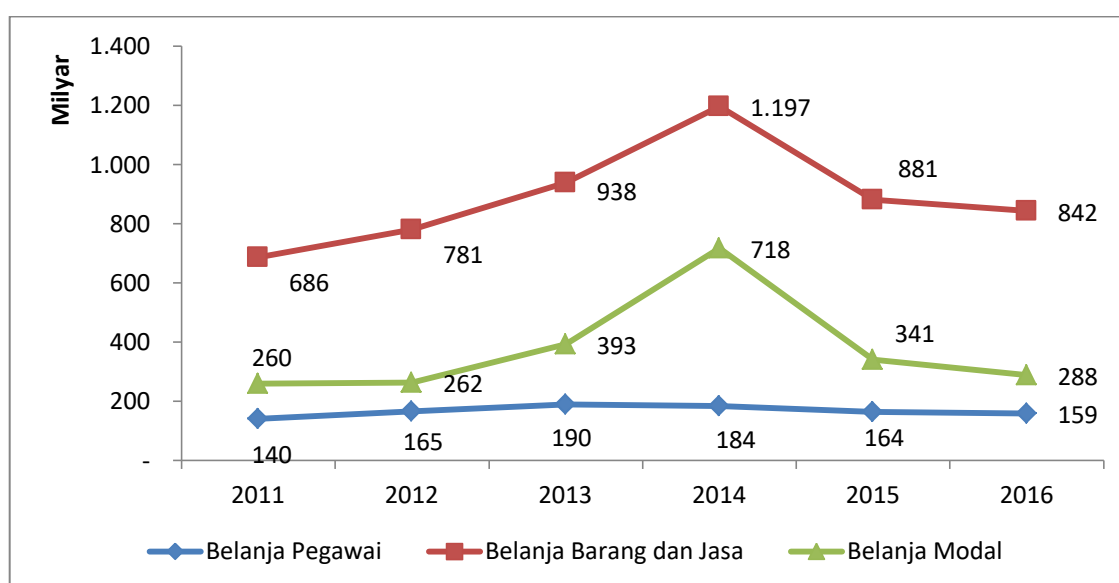
Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat dari rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah yang semakin tinggi menggambarkan bahwa semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin

kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD. Rasio Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung terhadap total Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau relatif kecil hanya 9,87% pada tahun 2011, menurun hingga tahun 2014 kemudian meningkat kembali menjadi 10,80% pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 3.12 berikut ini.



Gambar 3.12. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 – 2016 (%)

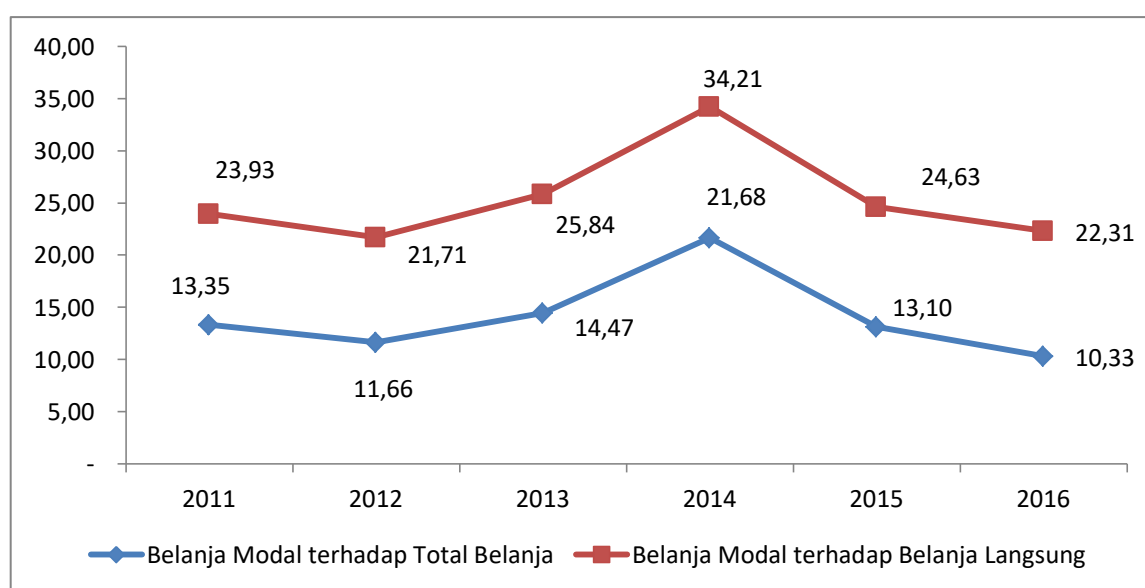
Pada belanja langsung, terlihat Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sangat signifikan dari sebesar Rp 686 milyar pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 842 milyar pada tahun 2016. Perkembangan unsur-unsur belanja langsung terlihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13. Perkembangan Unsur-Unsur Belanja Langsung Tahun 2011-2016 (milyar Rp)

Salah satu indikator yang sangat penting untuk diukur adalah Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah. Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angka rasionya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

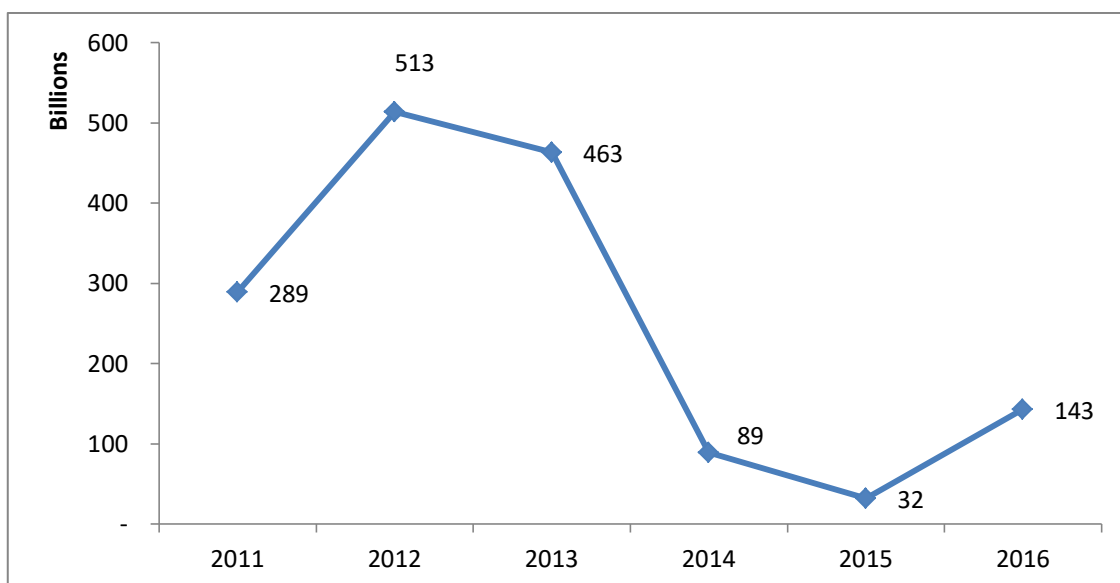
Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari dalam kurun waktu tahun 2011-2016 mengalami penurunan dari sebesar 113,55% pada tahun 2011 menjadi 10,33% pada tahun 2016. Hal ini merupakan indikasi positif terhadap perbaikan kualitas struktur belanja daerah. Untuk itu Provinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan porsi Belanja Modal untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.



Gambar 3.14. Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung dan Terhadap Total Belanja Tahun 2011 – 2016 (%)

3.2.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dan Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan. Dalam kurun waktu tahun 2011-2016 pembiayaan netto di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar Rp 359,60 milyar pada tahun 2011, menjadi sebesar Rp 9,914 milyar pada tahun 2016. SiLPA mengalami perkembangan yang fluktuatif dari sebesar Rp 289 milyar pada tahun 2011, menjadi sebesar Rp 143 milyar pada tahun 2016, seperti terlihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2011-2015

Sumber penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran sebelumnya. Khusus tahun 2014 dan 2015, penerimaan pembiayaan selain dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya juga diperoleh dari pencairan dana cadangan.

Defisit riil keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau terjadi tahun 2011 dan 2013-2016. Sebagai penutup defisit riil anggaran mengandalkan pada Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Defisit riil keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.876.879.092.830	2.473.411.609.339	2.843.717.931.680	2.919.185.331.874	2.514.517.750.889	2.501.557.017.751
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	1.947.593.447.664	2.249.826.414.857	2.715.832.508.855	3.312.458.874.127	2.604.403.546.727	2.604.403.546.727
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.400.000.000	950.000.000	179.154.946.947	56.410.805.294	15.000.000.000	15.000.000.000
	Surplus/ Defisit riil	(86.114.354.834)	222.635.194.482	(51.269.524.122)	(449.684.347.548)	(104.885.795.839)	(117.846.528.976)

Terkait dengan defisit riil anggaran ini mengakibatkan beberapa kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah ditanda-tangani belum bisa dipenuhi pada tahun anggaran yang bersangkutan sehingga dilakukan tunda bayar. Antisipasi yang dilakukan adalah memberikan penjelasan kepada pihak ketiga yang haknya belum bisa dipenuhi, untuk selanjutnya dilakukan pelunasan pembayaran dalam waktu secepatnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Perkembangan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.6
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Belanja Tidaklangsung						
1	Belanja Pegawai	192.313.328.801	212.470.059.964	220.943.359.701	252.064.813.412	281.351.910.807	304.724.044.507
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	255.569.137.934	256.226.110.297	283.495.455.367	252.894.343.625	315.613.621.050	742.700.704.179
B	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	32.500.000.000	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	12.310.805.294	-	-
	Total Belanja dan Pengeluaran Pembayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	447.882.466.735	468.696.170.261	504.438.815.068	549.769.962.331	596.965.531.857	1.047.424.748.686

Kemampuan pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilihat dari Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah atau ruang fiskal (*fiscal space*). Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan daerah menggambarkan fleksibilitas dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar kapasitas riil keuangan daerah yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dihitung dengan cara mengurangi total pendapatan daerah dengan pendapatan belanja dan pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat dan prioritas utama, dengan perkembangan di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6.

Tabel 3.7
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Total Pendapatan dan Penerimaan	2.251.884.456.375	2.764.149.408.463	3.358.007.305.188	3.457.713.104.131	2.638.691.385.135	2.947.106.192.108
1.	Pendapatan	1.876.879.092.830	2.473.411.609.339	2.843.717.931.680	2.919.185.331.874	2.501.557.017.751	2.914.857.620.563
2.	Penerimaan Pembayaan	375.005.363.546	290.737.799.125	514.289.373.508	538.527.772.257	137.134.367.384	32.248.571.545
	Dikurangi:						
B	Belanja dan Pengeluaran Pembayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	447.882.466.735	468.696.170.261	504.438.815.068	549.769.962.331	596.965.531.857	1.047.424.748.686
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)	1.804.001.989.640	2.295.453.238.202	2.853.568.490.120	2.907.943.141.800	2.041.725.853.278	1.899.681.443.422

3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2011-2016 pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Sebagai upaya tindak lanjut perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain sebagai berikut :

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau merupakan perkiraan yang terukur secara realistis dan memiliki landasan hukum penerimaan serta dihitung berdasarkan potensi dari masing-masing sumber pendapatan daerah dan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan daerah khususnya yang berasal dari dana transfer pusat (dana perimbangan) terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perimbangan Keuangan.

Landasan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan dirinci menurut jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyeknya.

Pertumbuhan Pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2018 – 2021 diperkirakan rata-rata tumbuh 5-8% tiap tahunnya. Untuk pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata tumbuh 7-10% mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan adanya optimisme penggalan potensi retribusi daerah khususnya yang berasal dari retribusi jasa usaha pemanfaatan ruang laut (retribusi labuh jangkar kapal).

Untuk pertumbuhan target dana perimbangan (dana transfer pusat ke daerah) disusun sangat moderat dikisaran tumbuh 5-10% per tahun. Target Dana Perimbangan sangat tergantung dengan kondisi ekonomi dan kebijakan APBN pemerintah. Diakui hingga saat ini perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian dan masih terdapatnya perlambatan perekonomian global yang berdampak nyata pada pendapatan negara. Namun pada akhir desember 2017 perkembangan harga minyak dunia terlihat sudah mulai membaik. Beberapa pertimbangan asumsi dasar makro ekonomi tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara terutama pada penerimaan perpajakan dan PNBPN serta mempunyai dampak turunan terhadap besaran kenaikan anggaran Transfer Pusat ke Daerah berupa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA. Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menghitung wilayah kepulauan dan pengalihan kewenangan pembayaran gaji guru PNS SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi juga mempengaruhi kenaikan DAU secara signifikan. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diharapkan akan meningkat tiap tahunnya seiring dengan kebutuhan belanja DAK fisik (penugasan dan afirmasi).

Hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tercantum pada Tabel 3.7, sedangkan proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama tercantum pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pendapatan Daerah	3.436.939.612.293	3.494.771.742.620	3.524.822.111.112	3.763.708.865.241	4.067.088.636.088
1	Pendapatan Asli Daerah	1.213.610.561.052	1.223.732.043.960	1.330.934.087.038	1.457.807.050.027	1.624.054.466.154
a	Pajak Daerah	1.010.684.761.682	1.063.247.043.960	1.137.274.337.038	1.233.244.612.527	1.361.940.073.779
b	Retribusi Daerah	63.160.000.000	73.405.000.000	100.359.250.000	121.649.162.500	148.365.290.625
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.107.652.171	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750
e	Lain-Lain PAD Yang Sah	136.658.147.199	83.930.000.000	89.993.000.000	99.440.400.000	110.102.583.000
2	Dana Perimbangan	2.222.149.091.241	2.264.839.698.660	2.187.676.024.074	2.299.677.695.215	2.436.797.808.733
a	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	575.087.704.241	427.801.584.810	373.831.670.044	406.265.528.398	452.941.832.015
b	Dana Alokasi Umum	1.059.822.693.000	1.257.386.100.000	1.185.032.299.880	1.220.583.268.876	1.257.200.766.943
c	Dana Alokasi Khusus	587.238.694.000	579.652.013.850	628.812.054.150	672.828.897.941	726.655.209.776
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.179.960.000	6.200.000.000	6.212.000.000	6.224.120.000	6.236.361.200
a	Hibah	1.179.960.000	1.200.000.000	1.212.000.000	1.224.120.000	1.236.361.200
b	Dana Penyesuaian	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
c	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
B	Belanja Daerah	3.496.355.277.049	3.594.771.742.620	3.577.558.809.948	3.809.237.353.418	4.100.730.388.651
1	Belanja Tidak Langsung	1.531.730.457.152	1.541.500.483.956	1.634.140.542.086	1.713.525.272.935	1.882.646.163.705
a	Belanja Pegawai	624.083.062.586	643.452.493.660	684.378.517.502	709.951.563.255	739.890.122.569
b	Belanja Bunga	0	0	-	-	-
c	Belanja Hibah	392.445.700.000	421.250.990.850	421.601.323.134	422.444.525.781	495.970.500.000
d	Belanja Bantuan Sosial	6.172.000.000	2.485.000.000	13.658.565.862	13.685.882.994	13.713.254.760
e	Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	487.555.320.934	472.311.999.446	499.840.148.529	552.781.313.847	618.410.299.317
f	Belanja Bantuan Keuangan	20.974.373.632	0	12.661.987.059	12.661.987.059	12.661.987.059
g	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Belanja Langsung	1.964.624.819.897	2.053.271.258.664	1.943.418.267.862	2.095.712.080.483	2.218.084.224.946
a	Belanja Pegawai	232.588.299.601	459.556.645.756	252.644.374.822	272.442.570.463	288.350.949.243
b	Belanja Barang dan Jasa	1.156.236.397.079	910.640.367.669	1.232.127.181.825	1.404.127.093.924	1.486.116.430.714
c	Belanja Modal	575.800.123.217	683.074.245.239	458.646.711.215	419.142.416.097	443.616.844.989
	Surplus/Defisit	(59.415.664.756)	(100.000.000.000)	(52.736.698.837)	(45.528.488.177)	(33.641.752.563)
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan Pembiayaan	59.415.664.756	100.000.000.000	52.736.698.837	45.528.488.177	33.641.752.563
a	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
b	Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0	0

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
c	Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir	0	0	0	0	0
d	Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	59.415.664.756	100.000.000.000	52.736.698.837	45.528.488.177	33.641.752.563
e	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2	Pengeluaran Pembayaan	0	0	0	0	0
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
b	Penyertaan Modal Pemerintah	0	0	0	0	0
c	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
d	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	0	0
e	Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0	0	0
	Pembayaan Netto	59.415.664.756	100.000.000.000	52.736.698.837	45.528.488.177	33.641.752.563
	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran	0	0	0	0	0

Tabel 3.9
Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Pegawai	417.715.636.379	669.004.105.609	684.378.517.502	709.951.563.255	739.890.122.569
2	Belanja Bunga	0	0	-	-	-
3	Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	381.892.481.471	472.311.999.446	499.840.148.529	552.781.313.847	618.410.299.317
B	Pengeluaran Pembiayaan					
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	0	0	-	-	-
	Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	799.608.117.850	1.141.316.105.055	1.184.218.666.031	1.262.732.877.102	1.358.300.421.886

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Hasil perhitungan kapasitas keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 3.9. Setelah kapasitas keuangan daerah diketahui, selanjutnya akan ditentukan belanja prioritas I, prioritas II dan prioritas III sebagaimana tercantum pada Tabel 3.10. Penjelasan ketiga kategori belanja yaitu sebagai berikut:

- a. Prioritas I merupakan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, baik belanja tidak langsung, belanja langsung maupun pengeluaran pembiayaan.
- b. Belanja Prioritas II merupakan Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala Daerah dan Program Prioritas seluruh perangkat daerah. Belanja ini selain digunakan untuk membiayai program unggulan (dedicated) Kepala Daerah, juga diperuntukkan bagi program prioritas ditingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan.
- c. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta belanja tidak terduga.

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	3.496.355.277.049	3.594.771.742.620	3.577.558.809.948	3.809.237.353.418	4.100.730.388.651
1.	Pendapatan	3.436.939.612.293	3.494.771.742.620	3.524.822.111.112	3.763.708.865.241	4.067.088.636.088
2.	Penerimaan Pembiayaan	59.415.664.756	100.000.000.000	52.736.698.837	45.528.488.177	33.641.752.563
	Dikurangi:					
B	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.111.638.383.520	1.115.764.493.106	1.184.218.666.031	1.262.732.877.102	1.358.300.421.886
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)	2.384.716.893.529	2.479.007.249.514	2.393.340.143.918	2.546.504.476.317	2.742.429.966.765

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	3.496.355.277.049	3.594.771.742.620	3.577.558.809.948	3.809.237.353.418	4.100.730.388.651
1.	Pendapatan	3.436.939.612.293	3.494.771.742.620	3.524.822.111.112	3.763.708.865.241	4.067.088.636.088
2.	Penerimaan Pembiayaan	59.415.664.756	100.000.000.000	52.736.698.837	45.528.488.177	33.641.752.563
B	Prioritas I (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama)	1.111.638.383.520	1.115.764.493.106	1.184.218.666.031	1.262.732.877.102	1.358.300.421.886
1	Belanja Tidak Langsung	1.111.638.383.520	1.115.764.493.106	1.184.218.666.031	1.262.732.877.102	1.358.300.421.886
	Belanja Pegawai	624.083.062.586	643.452.493.660	684.378.517.502	709.951.563.255	739.890.122.569
	Belanja Bunga	0	0	-	-	-
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	487.555.320.934	472.311.999.446	499.840.148.529	552.781.313.847	618.410.299.317
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-	-	-
	Pembayaran pokok utang	0	0	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)	2.385.292.820.645	2.479.007.249.514	2.393.340.143.918	2.546.504.476.317	2.742.429.966.765
C	Prioritas II (Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas)	1.964.624.819.897	2.053.271.258.664	1.943.418.267.862	2.095.712.080.483	2.218.084.224.946
	Belanja Langsung	1.964.624.819.897	2.053.271.258.664	1.943.418.267.862	2.095.712.080.483	2.218.084.224.946

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
D	Prioritas III	420.092.073.632	425.735.990.850	449.921.876.056	450.792.395.834	524.345.741.819
a	Belanja Tidak Langsung	420.092.073.632	425.735.990.850	449.921.876.056	450.792.395.834	524.345.741.819
	Belanja Hibah	392.445.700.000	421.250.990.850	421.601.323.134	422.444.525.781	495.970.500.000
	Belanja Bantuan Sosial	6.172.000.000	2.485.000.000	13.658.565.862	13.685.882.994	13.713.254.760
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kab/ Kota	20.974.373.632	0	12.661.987.059	12.661.987.059	12.661.987.059
	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
b	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
	Penyertaan Modal (Investasi)	0	0	0	0	0
	Pemerintah Daerah					
	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	0	0
	Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0	0	0
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0	0	0	0	0

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun ini adalah proyeksi penerimaan pendapatan terutama dari dana transfer yang tidak sesuai dengan rencana awal yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan, akibatnya beberapa kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah ditanda-tangani belum bisa dipenuhi pada tahun anggaran yang bersangkutan atau dilakukan tunda bayar. Antisipasi yang dilakukan adalah memberikan penjelasan kepada pihak ketiga yang haknya belum bisa kita penuhi, dan selanjutnya dilakukan pelunasan pembayaran dalam waktu secepatnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Sebelum dirumuskan permasalahan pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan strategi dan kebijakan.

a. Kekuatan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sangat besar. Selain itu, potensi pulau yang sangat banyak dengan keindahan alam pantai yang menakjubkan menjadi potensi pengembangan wisata. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto, tiga sektor utama penyumbang PDRB yaitu: sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian. Kekuatan lainnya adalah potensi SDM aparatur Pemerintah Provinsi Kepri tergolong potensial, dengan komposisi sebagian besar sarjana serta keunggulan budaya daerah, nilai adat istiadat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

b. Kelemahan

Selain kekuatan, terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, antara lain: jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi (meskipun dilihat persentasenya rendah namun jika dilihat kinerja penurunannya melambat) dan jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Disamping itu, kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan cukup tinggi, khususnya antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain. Kelemahan lainnya adalah lahan dan SDM di bidang pertanian terbatas, sehingga produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

Di bidang infrastruktur, ketersediaan pelabuhan dan dermaga serta kapal pengangkut untuk mendukung konektivitas antar pulau juga sangat kurang. Di sisi yang lain kapasitas listrik yang kurang memadai di beberapa kabupaten/kota, sehingga seringkali terjadi pemadaman bergilir. Ketersediaan air bersih di beberapa kabupaten/kota juga kurang memadai. Begitu pula dengan jaringan telekomunikasi di beberapa pulau berpenghuni juga masih kurang.

c. Peluang

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dalam pengembangan Provinsi Kepulauan Riau antara lain adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan pengembangan wilayah terdepan/perbatasan semakin meningkat, sebagaimana

tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Penetapan wilayah *Free Trade Zone* menjadi peluang bagi peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Disisi yang lain potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan sumberdaya perikanan yang sangat besar menjadi peluang bagi pengembangan industri pengolahan produk perikanan yang berdaya saing tinggi, termasuk dalam pengembangan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil.

d. Ancaman

Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 22 Pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jarak tempuh antar kabupaten/kota dan jarak tempuh antar kecamatan yang cukup lama juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut untuk mempercepat waktu tempuh. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadikan persaingan produk dengan negara lain semakin besar, menjadi tantangan dalam peningkatan standarisasi, mutu produk-produk daerah dan menjadi ancaman pula terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

2. Rumusan Permasalahan Pembangunan

1) Pendidikan

- a. Angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana SMA/MA/SMK, dan sekolah layanan khusus.
- c. Masih adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dan sekolah layanan khusus, terutama di wilayah hinterland.
- d. Belum optimalnya prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik, dan belum optimalnya pembentukan karakter siswa.
- e. Belum sebandingnya jumlah SMK dengan SMA dan sedikitnya SMK kemaritiman dan politeknik kelautan/perikanan yang mampu menyediakan tenaga terampil di bidang kemaritiman.
- f. Kualitas tenaga guru dan tenaga kependidikan yang kurang memadai.
- g. Masih rendahnya lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan dunia industri.

2) Kesehatan

- a. Belum optimalnya pelacakan kasus kematian ibu dan bayi serta kasus gizi buruk dan gizi kurang.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif dan promotif pada pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Belum optimalnya pengembangan lingkungan yang sehat.
- d. Belum maksimalnya penanggulangan kasus penyakit menular dan tidak menular.

- e. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar akreditasi.
- f. Belum optimalnya penyebaran tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota.
- g. Belum tercapainya *universal health coverage* jaminan kesehatan nasional dan belum sepenuhnya terintegrasi antara jaminan kesehatan daerah ke JKN/KIS.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kondisi infrastruktur cukup memadai di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun, namun masih belum memadai pada Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas.
- b. Masih terdapat jalan/jembatan Provinsi dalam kondisi rusak.
- c. Belum optimalnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- d. Belum optimalnya penanganan banjir, ditandai masih adanya titik-titik genangan banjir.
- e. Belum disusunnya Rencana Detail Tata Ruang sebagai tindaklanjut dari ditetapkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

4) Pertanahan

- a. Belum optimalnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan, terutama masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah provinsi.

5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih luasnya kawasan kumuh di perkotaan.
- b. Belum layak kualitas permukiman penduduk, khususnya permukiman di wilayah pantai dan suku terasing.
- c. Persoalan ketersediaan dan pasokan air bersih dan belum optimalnya pelayanan sanitasi.
- d. Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan di kawasan strategis Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.

6) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Belum tercukupinya kuantitas personil (PNS dan PPNSD) dalam menunjang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- b. Rendahnya kualitas sumberdaya aparat Satpol PP.
- c. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- d. Masih rendahnya gangguan trantib yang tertangani.
- e. Belum tersedianya pemetaan rawan kebakaran.
- f. Belum optimalnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam bidang Ipoeksosbudhankam.
- g. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
- h. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.

- i. Belum terpenuhi tata kelola dan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana.
- j. Kurangnya efektifitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

7) Sosial

- a. Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah.
- b. Belum adanya panti sosial pemerintah yang memberikan pelayanan (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (organisasi/yayasan/lembaga sosial) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

8) Tenaga kerja

- a. Masih banyaknya pengangguran dan belum optimal partisipasi angkatan kerja.
- b. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, pelatihan berbasis kompetensi (sertifikasi)
- c. Terjadinya kasus sengketa perusahaan dan tenaga kerja yang memerlukan penanganan.
- d. Belum optimalnya upaya keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
- e. Posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang lintas migrasi antar negara, sehingga diperlukannya kerjasama untuk penanganan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, penanganan keimigrasian, serta pengiriman dan pemulangan TKI.

9) Transmigrasi

- a. Tidak tersedianya areal penempatan transmigrasi sehingga tidak dapat menempatkan transmigran.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan bagi transmigran yang telah ditempatkan dalam program transmigrasi.

10) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Belum optimalnya program dan kegiatan responsif gender, belum tersedianya data pilah gender pada semua perangkat daerah, dan belum optimalnya kelembagaan PUG dan Anak.
- b. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja.
- c. Rendahnya jabatan publik yang diemban oleh perempuan, ditandai rendahnya pejabat perempuan eselon II, III, IV dan rendahnya jumlah anggota DPRD perempuan.
- d. Meningkatnya kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan rendahnya penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan

putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- e. Tingginya kasus *trafficking* (perdagangan) perempuan dan anak sebagai akibat dari luasnya wilayah posisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah tujuan dan transit perdagangan orang.
- f. Belum optimalnya pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

11) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih tingginya pertumbuhan penduduk.
- b. Kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk mengikuti KB dan pelayanan KB yang belum optimal.
- c. Tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*).

12) Pangan

- a. Rendahnya produksi pangan dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan dari luar daerah/luar negeri.
- b. Belum optimalnya pemantauan harga dan pasokan pangan dalam menjaga stabilitas harga pangan.
- c. Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman secara merata di kabupaten/kota.

13) Pertanian

- a. Belum adanya *roadmap* pengembangan pertanian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Sektor pertanian belum berkembang ditandai kebutuhan pangan, buah-buahan dan sayuran didatangkan dari Provinsi lain bahkan impor, akibat ketersediaan lahan terbatas, kondisi tanah kurang subur, daya dukung sumberdaya air yang kurang, kuantitas dan minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah (masih konvensional), jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan.
- c. Kurangnya jumlah tenaga teknis dokter hewan, paramedis dan sarjana peternakan dalam upaya mempertahankan Kepulauan Riau bebas penyakit zoonosis dan penyakit hewan menular strategis serta optimalisasi produksi ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan ternak dan produk pangan asal hewan.
- d. Belum optimalnya produksi bibit bersertifikasi untuk pemenuhan kebutuhan bibit di Provinsi Kepulauan Riau dan tingginya resiko Kepulauan Riau terkena virus/penyakit tanaman akibat dari banyaknya bibit/benih atau produk pertanian yang masuk Kepulauan Riau dari luar negeri.
- e. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian.

14) Lingkungan Hidup

- a. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup terutama berkaitan dengan pembuangan limbah industri, tumpahan minyak dari aktivitas transportasi, pengeboran minyak lepas pantai, pengilangan minyak dan penambangan.
- b. Potensi pencemaran air dan udara semakin tinggi dengan meningkatnya arus masuk dan keluar barang melalui sarana transportasi laut, meningkatnya jumlah industri dan kendaraan bermotor.
- c. Tata ruang dan implementasinya belum ditaati dengan baik, sehingga pada daerah tertentu kawasan lindung dikonversi menjadi kawasan pembangunan tanpa dipikirkan upaya mitigasi dampaknya.
- d. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan AMDAL, UKL, UPL dan pemantauan status kualitas lingkungan di area industri.
- e. Belum optimalnya konservasi pada wilayah tangkapan air dan sumber-sumber air.

15) Kehutanan

- a. Masih adanya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) diluar kawasan hutan negara yang harus segera ditangani.
- b. Masih tingginya kerusakan kawasan hutan akibat *illegal logging*, aktifitas pertambangan, kebakaran dan usaha pertanian/peternakan serta aktifitas non prosedural lainnya.
- c. Belum beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat tapak.
- d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

16) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran dan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan oleh perangkat daerah Provinsi.

17) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berkembang, dan belum optimalnya peran Posyantek dalam penyebaran dan penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa, ditandai dengan rendahnya capaian persentase LPM aktif, Posyandu aktif, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa oleh aparatur pemerintah desa.

18) Perhubungan

- a. Terbatasnya jumlah prasarana perhubungan darat, laut dan udara, sehingga keterhubungan (*connectivity*) antar wilayah menjadi terganggu.
- b. Terbatasnya armada/alat transportasi yang menghubungkan antar pulau di Kepulauan Riau maupun dengan daerah lainnya.
- c. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana keselamatan lalu lintas.
- d. Belum optimalnya pengaturan, pengawasan dan pemanfaatan wilayah laut Kepulauan Riau untuk peningkatan pendapatan daerah disamping penegakan kedaulatan negara.
- e. Masih rendahnya sarana dan prasarana untuk menyiapkan SDM Pelayaran.

19) Komunikasi & informatika

- a. Adanya beberapa wilayah yang belum dapat mengakses teknologi informasi (*blank spot*).
- b. Kurangnya dukungan kebijakan, kelembagaan, SDM, infrastruktur dan aplikasi *e-government* guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
- c. Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi *e-government* pemerintahan dan publik.
- d. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pada berbagai aplikasi dan website pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta penyebaran informasi hasil pembangunan daerah melalui media massa.

20) Statistik

- a. Belum optimalnya penyediaan data statistik yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan, khususnya statistik sektoral.
- b. masih rendahnya kapasitas SDM bidang statistik sektoral.

21) Persandian

- a. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM SanTel (Sandi-Telekomunikasi) dalam menjaga keamanan informasi.
- b. Masih rendahnya kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya pengamanan jaringan komunikasi dan pengamanan jiwa.
- c. Masih kurangnya sarana prasarana persandian

22) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih rendahnya kemampuan SDM perkoperasian dalam pengembangan koperasi.
- b. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan akses pemasaran sehingga omset pemasaran produk UMKM rendah.
- c. Daya saing UKM yang masih terbatas di tingkat domestik
- d. Kurangnya komitmen pengelola lembaga koperasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi.

23) Penanaman modal

- a. Belum meratanya investasi dan kurangnya minat investor untuk berinvestasi, disebabkan keterbatasan infrastruktur dasar yang dapat menunjang investasi, dan Kurangnya kepastian hukum dalam berinvestasi.
- b. Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi.
- c. Kualitas perizinan yang masih rendah ditandai dengan panjangnya rantai birokrasi perizinan.
- d. Belum optimalnya pengelolaan data investasi dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

24) Kepemudaan dan olah raga

- a. Masih kurangnya kualitas dan prestasi pemuda di berbagai bidang.
- b. Masih rendahnya minat dan kemampuan pemuda untuk berwirausaha.
- c. Rendahnya prestasi berbagai cabang olahraga di tingkat nasional.
- d. Terbatasnya SDM pelatih secara kuantitas dan kualitas untuk menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan.
- e. Rendahnya budaya berolahraga pada masyarakat.
- f. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dan berstandar nasional.
- g. Kurangnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

25) Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kekayaan budaya, karya bahasa/sastra Melayu dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
- b. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan Melayu dan kurangnya promosi budaya melayu.
- c. Kurangnya penyelenggaraan *event* seni budaya Melayu berskala regional, nasional dan internasional.

26) Perpustakaan

- a. Terbatasnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Kurangnya minat baca masyarakat, ditandai jumlah pengunjung perpustakaan provinsi yang masih kurang.
- c. Khasanah kepustakaan klasik Melayu masih tersebar di masyarakat dan belum terdokumentasikan dengan baik.
- d. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan.

27) Kearsipan

- a. Masih kurangnya pengelolaan arsip/dokumen, ditandai dengan persentase perangkat daerah dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.
- b. Kurangnya SDM pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan arsip/dokumen.
- c. Belum tersedianya gedung arsip daerah.

28) Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan terbatasnya sarana budidaya perikanan.
- c. Industri hilir perikanan (pengolahan ikan) masih minim dan jumlah produk olahan hasil perikanan yang masih terbatas.
- d. Belum adanya zonasi/tata ruang wilayah pesisir dan laut yang menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- e. Masih adanya *IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)* berupa transaksi ikan di tengah laut.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (Pelabuhan Perikanan, *cold storage* dan pabrik es), terbatasnya BBM subsidi khusus untuk operasional nelayan, serta terbatasnya jaringan pemasaran.
- g. Struktur armada kapal perikanan yang masih didominasi armada dan alat tangkap tradisional.
- h. Kurangnya infrastruktur pendukung pada pusat pembangunan perikanan terpadu.
- i. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.

29) Pariwisata

- a. Belum dimilikinya *grand desain* pengembangan pariwisata provinsi.
- b. Belum maksimalnya fungsi *calender of event* wisata guna menarik wisatawan berkunjung di Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata bahari untuk menunjang daya tarik wisata di Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Rendahnya kompetensi SDM pariwisata bahari berkaitan dengan manajemen pengelolaan obyek wisata dan kerjasama dengan pelaku usaha pendukung wisata.
- e. Kurangnya promosi pariwisata baik di tingkat nasional dan internasional.
- f. Belum optimalnya pengembangan Kepariwisata Bahari yang menjadi andalan Provinsi Kepulauan Riau dari sisi *demand*, termasuk pembinaan terhadap semua komponen kepariwisataannya.
- g. Belum optimalnya jaminan keamanan bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
- h. Budaya sadar pariwisata belum melekat pada sikap dan perilaku masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

30) Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih rendahnya pemenuhan daya listrik dan masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan listrik.
- b. Rendahnya kesadaran perusahaan pertambangan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Masih adanya Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- d. Masih minimnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
- e. Belum adanya penetapan cekungan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau.

31) Perdagangan

- a. Terdapat dua sistem perdagangan di provinsi Kepulauan Riau antara kawasan FTZ (Batam, Bintan, Karimun dan sebagian Tanjung Pinang) dan bukan kawasan FTZ (kawasan pabean dan non pabean) yang menyebabkan efektivitas perdagangan antara kabupaten/kota terhambat.
- b. Menurunnya nilai bersih ekspor dan terbatasnya jenis produk asal Kepulauan Riau yang dapat diterima pasar internasional.
- c. Belum optimalnya pengawasan terhadap pasar tradisional yang dapat berakibat pada inflasi dan tidak terlindunginya konsumen.
- d. Masih banyaknya pasar yang belum memenuhi standar.

32) Perindustrian

- a. Kurangnya kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk industri kecil dan menengah.
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan sarana prasarana pendukung diseluruh kabupaten/kota kecuali Batam.
- c. Lemahnya sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola (BP) Batam dalam pengelolaan sektor industri.
- d. Kurang memadainya infrastruktur yang menunjang berkembangnya industri.

33) Perencanaan Pembangunan

- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencana pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- c. Belum optimalnya kerjasama antar daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Luar Negeri.

34) Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan daerah.
- b. Belum terimplementasikannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

35) Keuangan

- a. Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan upaya sinergis untuk peningkatan PAD.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Belum optimalnya pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi.
- d. Masih rendahnya penerimaan retribusi daerah dibandingkan potensinya.
- e. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis *accrual*.

36) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih rendahnya pembinaan terhadap aparatur, dan belum diterapkannya manajemen sumberdaya aparatur yang memadai sejak dari rekrutmen, pembinaan sampai dengan pengembangan aparatur.
- b. Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang optimal.
- c. Tingginya angka pelanggaran disiplin oleh aparatur.

37) Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

38) Sekretariat Daerah

- a. Masih kurangnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur dan mendukung visi misi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melaksanakannya secara konsisten.
- c. Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan dan penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD.
- d. Belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
- e. Masih rendahnya kinerja, pembinaan dan belum adanya kontribusi BUMD Provinsi Kepulauan Riau dalam peningkatan PAD.
- f. Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi, asistensi dan fasilitasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah, termasuk peran TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dalam mengendalikan inflasi daerah.
- g. Masih rendahnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi reformasi birokrasi.
- h. Belum optimalnya perencanaan dan koordinasi pengembangan wilayah perbatasan.

- i. Belum optimalnya pengelolaan dan tampilan display anjungan Kepulauan Riau di Taman Mini Indonesia Indah.

39) Pengawasan

- a. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas organisasi inspektorat
- b. Belum optimalnya pengawasan kebijakan Kepala Daerah.
- c. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam upaya pencegahan penyimpangan pada pengelolaan pemerintahan daerah.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan dengan mendasarkan pada hasil identifikasi isu strategis berdasarkan tantangan dan kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019, RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Hasil Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Identifikasi Isu Strategis					
RPJMN 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RTRW 2017-2023	KLHS RPJMD	Rumusan Isu Strategis RPJMD	
Tantangan	Kebijakan Pokok	Isu Strategis	Prioritas Pemanfaatan Ruang	Isu Strategis	
1. Stabilitas Politik dan Keamanan 2. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien 3. Pemberantasan Korupsi	5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.	24. Rasa apatisme dan pesimisme masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung semakin besar, sebagai akibat krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan dan krisis keteladanan	-	10. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	10. Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
4. Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.				
5. Percepatan Pemerataan dan Keadilan	3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah	2. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal 9. Belum sepenuhnya terwujud peran masyarakat dalam pembangunan 10. Belum dimanfaatkannya secara optimal kondisi dan letak geografis bagi pembangunan dan kemajuan daerah 17. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah 18. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial akibat pertumbuhan penduduk yang	1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya. 4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.	2. Keterbatasan ketersediaan dan menurunnya kualitas air baku 6. Ketersediaan dan Pemenuhan Kebutuhan energi belum optimal 7. Minimnya sarana prasarana penunjang perekonomian wilayah perdesaan dan perkotaan	1. Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan 2. Pengangguran Cukup Tinggi 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih Rendah 7. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai 12. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota 8. Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi 13 Kerentanan terhadap

Identifikasi Isu Strategis					
RPJMN 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RTRW 2017-2023	KLHS RPJMD	Rumusan Isu Strategis RPJMD	
		<p>tidak terkendali</p> <p>19. Struktur umur penduduk Kepulauan Riau melebar pada struktur umur produktif</p> <p>20. Tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral dan kepemilikan sumberdaya antar kelompok masyarakat</p> <p>22. Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik, air bersih dan perumahan</p> <p>23. Perkembangan perekonomian di Kepulauan Riau telah terjadi transformasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian dan perikanan) ke sekunder dan tersier (industri dan jasa), namun tidak diiringi dengan transformasi ketenagakerjaan</p>			<p>Kerawanan Pangan yang Tinggi</p> <p>9. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal</p>
6. Keberlanjutan Pembangunan	4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.	<p>3. Masih rendahnya kesadaran pengusaha akan kelestarian alam dan lingkungan</p> <p>4. Lambatnya penanganan masalah pencemaran</p> <p>5. Pemanfaatan dan pengambilan sumber daya alam secara ilegal</p> <p>6. Belum dikelolanya limbah domestik, limbah B3</p> <p>7. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak di Laut maupun akibat tumpahan minyak dari <i>Tank</i></p>	2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.	<p>1. Tingginya ancaman bencana alam dan non alam</p> <p>3. Penurunan Kualitas udara yang diakibatkan industri, kendaraan bermotor, pembakaran sampah rumah tangga dan kebakaran hutan</p> <p>4. Degradasi hutan,</p>	15. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana

Identifikasi Isu Strategis				
RPJMN 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RTRW 2017-2023	KLHS RPJMD	Rumusan Isu Strategis RPJMD
	<p><i>Cleaning</i> Industri Galangan Kapal</p> <p>12. Pada aspek sumberdaya buatan di samping jumlah dan kualitas serta kapasitasnya yang belum memadai, masalah penyebaran, pemanfaatan serta pemeliharannya masih menjadi kendala.</p> <p>13. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan kerusakan ekosistem kawasan hutan, lahan mangrove, pesisir pantai dan laut, konversi penggunaan lahan, krisis air bersih.</p> <p>14. Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air (baik air tanah maupun permukaan), bencana kekeringan pada lahan sawah</p> <p>21. Menurunnya kualitas lingkungan hidup baik lingkungan di darat, di laut maupun di udara.</p> <p>25. Sumber daya hayati alam Kepulauan Riau sangat beragam</p>		<p>lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdapan.</p> <p>5. Meningkatkan volume limbah domestik dan B3 serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan</p>	

Identifikasi Isu Strategis					
RPJMN 2015-2019	RPJPD 2005-2025	RTRW 2017-2023	KLHS RPJMD	Rumusan Isu Strategis RPJMD	
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-teraan Rakyat Yang Berkeadilan.	1. Tingginya tingkat perkembangan penduduk 16. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial;	8. Masih minimnya akses terhadap sarana prasarana kesehatan masyarakat	3. Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal 5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah 6. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal 14. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu	
5. Percepatan Pembangunan Kelautan	2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan	8. Semakin sempitnya daerah penangkapan ikan 11. Belum dikelolanya sumber daya alam terutama sumber daya kelautan dan pertambangan secara baik 15. Di wilayah perairan pantai terjadi kerusakan ekosistem yang cukup parah	3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut.	9. Masih rendahnya pendapatan masyarakat pesisir	11. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata

Keterangan: Nomor urut pada identifikasi isu strategis adalah nomor urut yang tercantum dalam dokumen bersangkutan (RPJMN, RPJPD, RTRW, dan KLHS RPJMD).

Tabel 4.2
Skoring Isu Strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Isu Strategis	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	Total Skor	Ranking
	(Bobot 20)	(Bobot 10)	(Bobot 10)	(Bobot 15)	(Bobot 25)		
1. Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan	10	10	5	4	5	34	10
2. Pengangguran Cukup Tinggi	10	10	5	4	5	34	9
3. Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal	20	10	5	12	15	62	4
4. Kesenjangan dan Keadilan Gender Masih Rendah	10	10	3	4	5	32	13
5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Kurang	20	10	5	12	15	62	5
6. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal	20	10	5	12	15	62	6
7. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai	20	10	10	15	25	80	1
8. Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan	10	10	5	4	5	34	11
9. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal	5	10	3	4	5	27	15
10. Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan belum optimal	10	10	10	8	5	43	8
11. Pengembangan Kemaritiman dan Pariwisata	20	10	10	12	15	67	3
12. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten/Kota	20	10	10	15	25	80	2
13. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi	5	10	3	4	5	27	14
14. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu	10	10	3	12	10	45	7
15. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana	5	10	3	4	10	32	12

Berdasarkan Tabel 4.2 maka Isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan diurutkan sesuai hasil scoring sebagai berikut:

1. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai

Kondisi infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar 73,50%, Luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 832 ha, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 89,23%, Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar 65,21%.

2. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten/Kota

Transportasi udara (penerbangan komersial) belum menjangkau seluruh Kabupaten. Transportasi antar pulau belum memadai dari aspek sarpras (dermaga dan kapal angkutan umum). Hal ini ditandai dengan jumlah pelabuhan sebanyak 132 unit, dengan perincian sebanyak 15 pelabuhan terdapat di Kota Batam, 36 pelabuhan di Kabupaten Bintan, 12 pelabuhan di Kabupaten Karimun, 4 pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 11 pelabuhan di Kabupaten Lingga, 18 pelabuhan di Kabupaten Natuna dan 28 pelabuhan di Kota Tanjungpinang.

3. Pengembangan Kemaritiman dan Pariwisata

Kepulauan Riau memiliki luas wilayah laut seluas 96% dengan potensi maritim dan wisata yang besar, namun saat ini belum dikembangkan secara optimal. Armada perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor dengan jumlah didominasi oleh perahu tanpa motor. Di samping itu, ada dinamika transaksi ikan di tengah laut.

4. Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal

IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun 2012 sebesar 73,99 meningkat menjadi 73,99 pada tahun 2016. Angka IPM perlu terus ditingkatkan agar kualitas SDM semakin baik, sehingga Angka Usia Harapan Hidup, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Sekolah dan Tingkat pengeluaran perkapita (daya beli) semakin tinggi.

5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Kurang

Pemerataan dan kualitas pendidikan masih belum optimal, terkendala pada kondisi geografis masing-masing kabupaten/kota yang dipisahkan oleh laut. APK SMA/SMK/MA baru mencapai 85,17% pada tahun 2016. Pemerataan guru pada wilayah terpencil belum merata.

6. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal

Derajat kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Angka Usia Harapan Hidup tahun 2016 sebesar 69,41 tahun, sedangkan AKI pada tahun 2016 sebesar 120 per 100.000 KH, AKB sebesar 35 per 1.000 KH. Prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular juga ctinggi.

7. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu

Pelestarian nilai-nilai dan seni budaya Melayu perlu ditingkatkan. Persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2016 baru mencapai sebesar 18,53%. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, sehingga kedepan perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan. Jumlah *event* Kebudayaan

Tingkat regional, nasional dan International pada tahun 2016 hanya dilaksanakan sebanyak 4 kali.

8. Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan belum optimal

Kapasitas keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah relatif kecil, pada tahun 2016 total pendapatan daerah hanya sebesar 2.914,8 milyar rupiah.

9. Pengangguran Cukup Tinggi

Tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 6,14% menjadi 9,03%. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,50%, Apabila tidak memperoleh perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat.

10. Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau meskipun cenderung menurun dari tahun 2011 sebesar 6,79% (122.500 jiwa) menjadi 5,84% (119.140 Jiwa) pada tahun 2016, namun lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Bangka Belitung (5,04%).

11. Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan

Ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan penduduk menunjukkan angka yang cukup tinggi sebesar 0,35 pada tahun 2015.

12. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana

Masalah lingkungan yang paling rentan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah pembuangan limbah industri, tumpahan minyak dari aktivitas transportasi, pengeboran minyak lepas pantai dan pengilangan minyak, serta penambangan. Rata-rata jumlah limbah *slop oil* dan *sludge oil* yang terdampar dan mencemari pantai bagian utara Pulau Bintan setiap tahunnya mencapai 50 ton. Selain itu, terdapat pula permasalahan berupa penurunan kualitas udara yang diakibatkan industri, kendaraan bermotor, pembakaran sampah rumah tangga dan kebakaran hutan; degradasi hutan, lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terdepan; dan meningkatnya volume limbah domestik dan B3 serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan, serta tingginya ancaman bencana alam dan non alam.

13. Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih Rendah

IPG Provinsi Kepri pada tahun 2015 baru mencapai 93,22, dan IDG tahun 2015 sebesar 62,15. IPG Provinsi Kepri masih lebih rendah dibandingkan kondisi ideal yaitu menuju angka 100. Dilihat capaian masing-masing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.

14. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi

Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Jumlah penduduk yang rawan pangan masih cukup tinggi, terutama pada daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering dan musim ombak besar. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota, dari sebanyak 43 kecamatan dibagi kedalam enam kelompok Prioritas yang hasilnya tidak ada kecamatan yang

termasuk Prioritas 1 dan 2. Ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98%), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26%), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 persen) dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84%).

15. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal

Kepulauan Riau memiliki 19 Pulau Terdepan (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tingkat pengembangan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga belum optimal. Beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian adalah kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta sarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih, irigasi dan ketenagalistrikan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ***“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”***.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

4. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

5. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

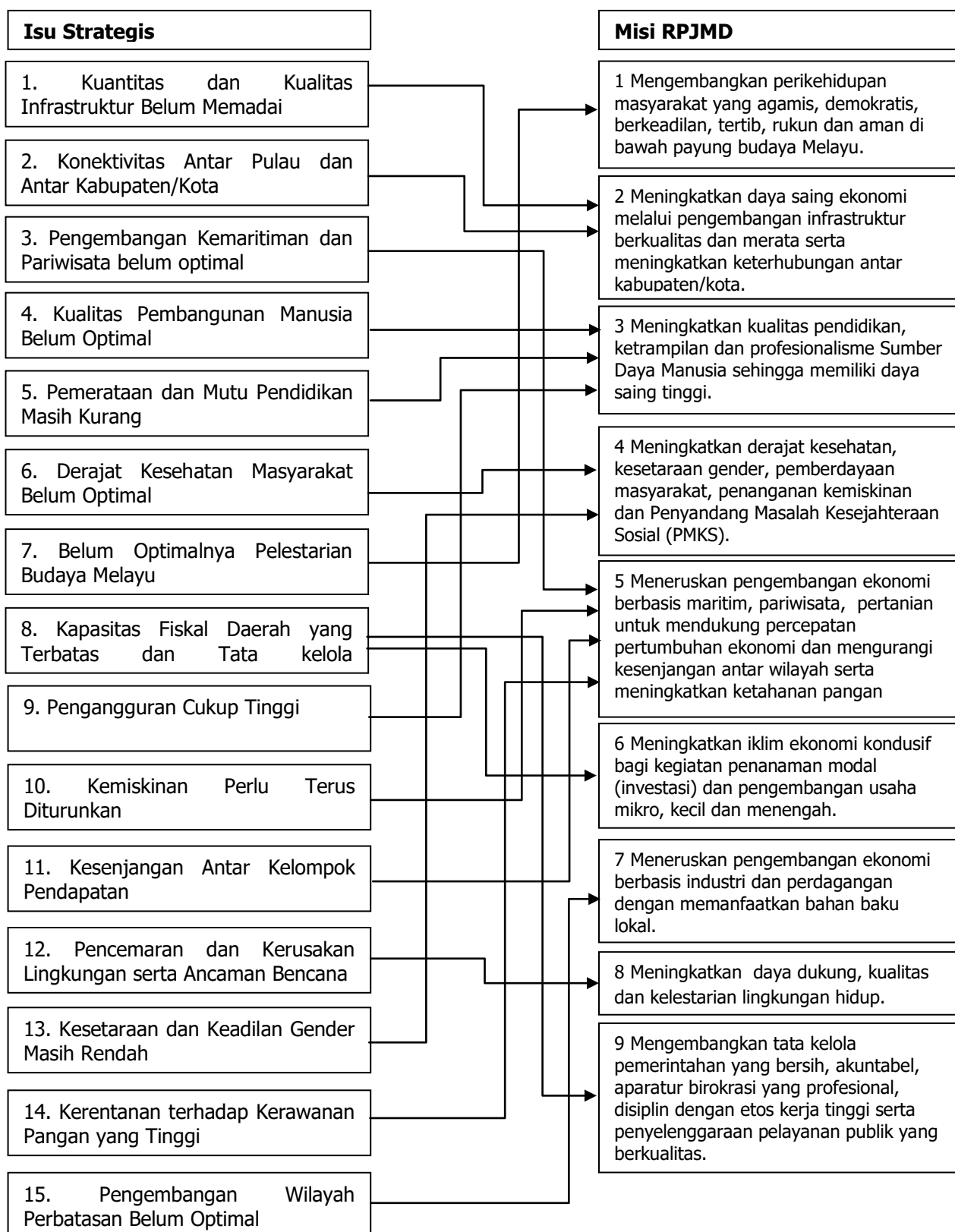
5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

1. Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis

Keterkaitan Misi RPJMD dengan isu strategis pembangunan daerah terlihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Skema Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat diketahui bahwa isu Kemiskinan dijabarkan dalam Misi 4; isu Pengangguran dijabarkan dalam Misi 3, Misi 6 dan Misi 7; isu Kualitas pembangunan SDM dijabarkan dalam Misi 1 dan Misi 3; isu Kesetaraan dan keadilan gender dijabarkan dalam Misi 4; isu Mutu pendidikan dijabarkan dalam Misi 1 dan Misi 3; isu Derajat kesehatan dijabarkan dalam Misi 4; isu Kuantitas dan Kualitas infrastruktur dijabarkan dalam Misi 2, Misi 6 dan Misi 8; isu Kesenjangan daerah dijabarkan dalam Misi 2, Misi 4 dan Misi 5; isu Pengembangan Wilayah perbatasan dijabarkan dalam Misi 5; isu Kapasitas Fiskal dijabarkan dalam Misi 9; isu Pengembangan kemaritiman dan pariwisata dijabarkan dalam Misi 5, Misi 7 dan Misi 8; isu Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten/Kota dijabarkan dalam Misi 2; dan isu Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan dijabarkan dalam Misi 5; isu Pelestarian Budaya Melayu dijabarkan dalam Misi 1; Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dijabarkan dalam Misi 8.

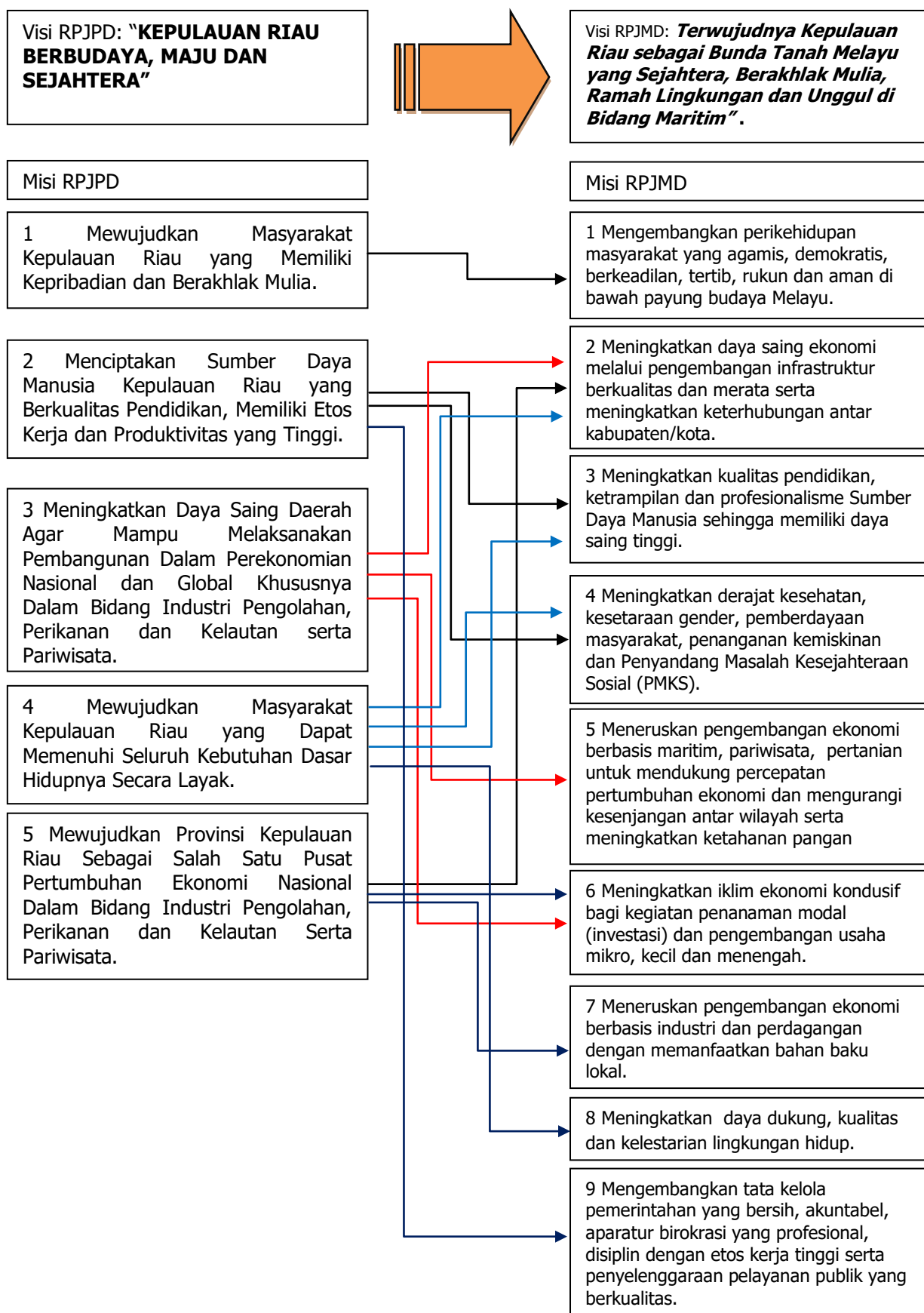
2. Keterkaitan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2021. Tahap pembangunan jangka menengah ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas baik, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Visi Pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 yaitu: **"Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera"**, dengan misi yang ditempuh yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat kepulauan riau yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
2. Menciptakan sumber daya manusia kepulauan riau yang berkualitas pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi.
3. Meningkatkan daya saing daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dalam perekonomian nasional dan global khususnya dalam bidang industri pengolahan, perikanan dan kelautan serta pariwisata.
4. Mewujudkan masyarakat kepulauan riau yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
5. Mewujudkan provinsi kepulauan riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dalam bidang industri pengolahan, perikanan dan kelautan serta pariwisata.

Keterkaitan Visi Misi RPJMD dengan visi dan Misi RPJPD terlihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Skema Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJPD

3. Keterkaitan Misi RPJMD dengan RPJMN tahun 2015-2019

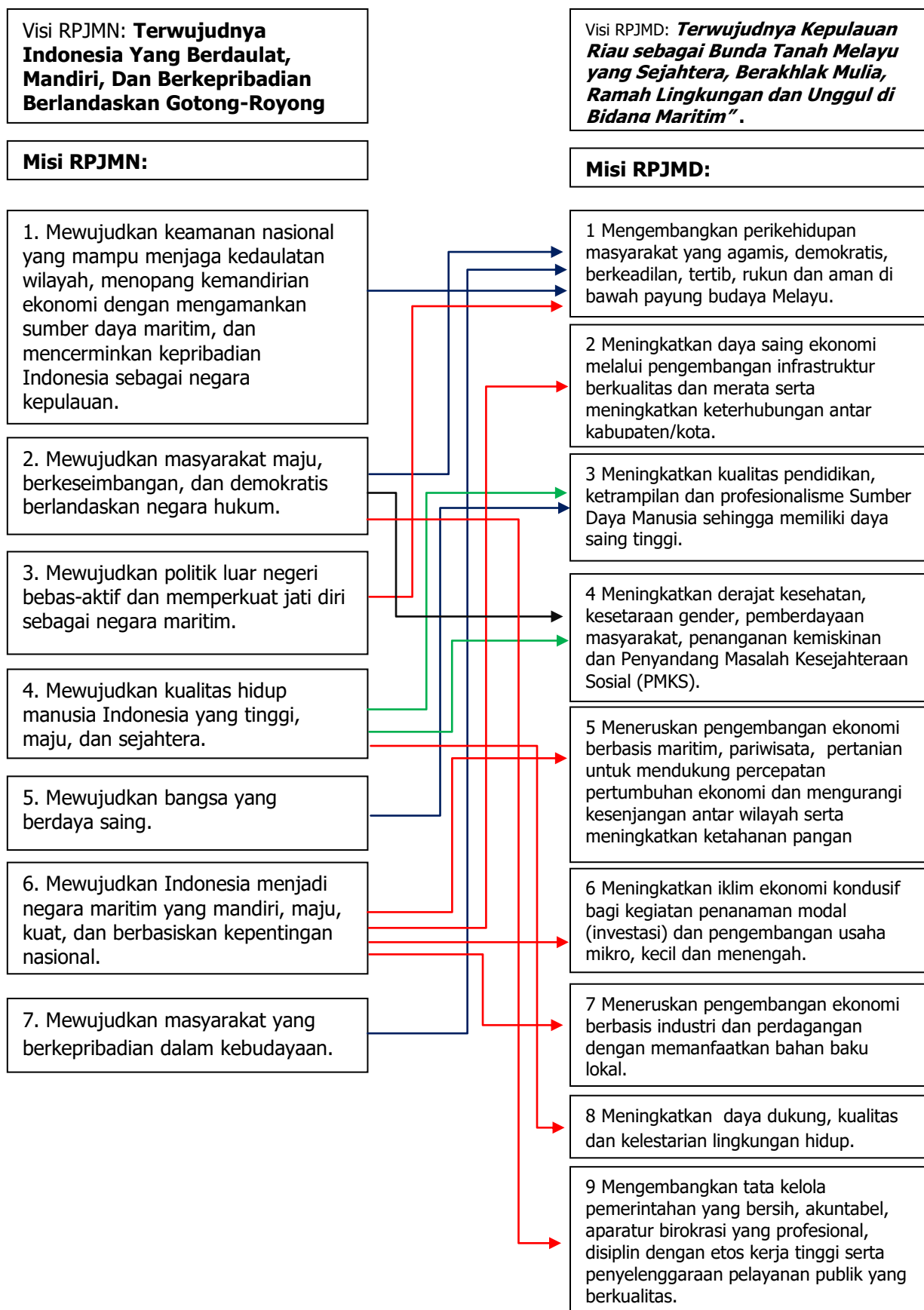
Visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu: **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**, yang ditempuh dengan sebanyak 7 misi yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau juga memperhatikan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN, yaitu:

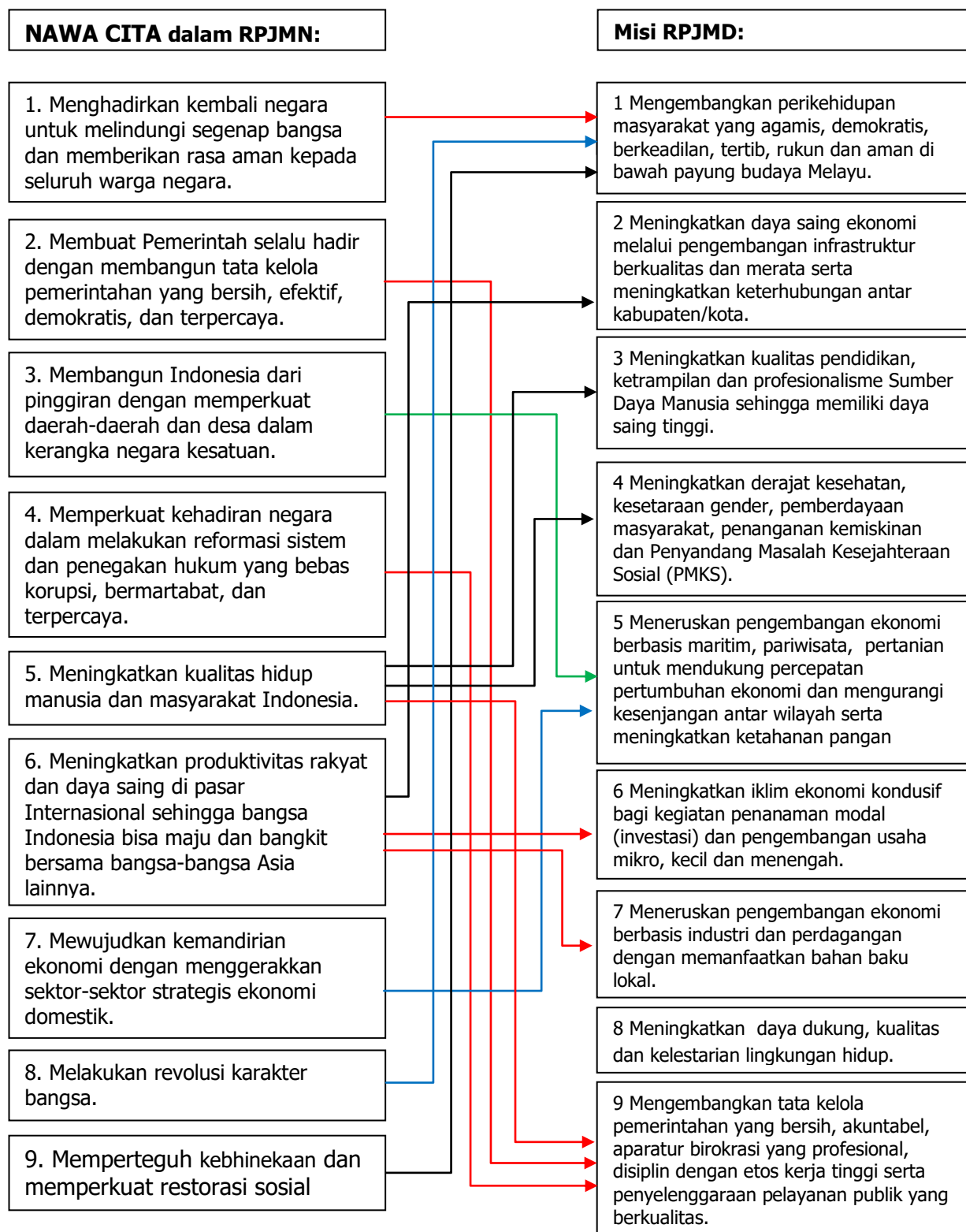
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keterkaitan Visi Misi RPJMD dengan visi dan Misi RPJMN terlihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Skema Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMN

Keterkaitan Misi RPJMD dengan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN terlihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.4 Skema Keterkaitan Misi RPJMD dengan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2021 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut.

Misi 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

1. Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai – nilai Agama, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.
 - b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama.
2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

1. Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik
 - b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi
 - b. Meningkatnya akses pelayanan air bersih.
 - c. Berkurangnya kawasan kumuh.
 - d. Meningkatnya rasio elektrifikasi.

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
 - b. Angka kemiskinan menurun.
2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

1. Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan
 - b. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
2. Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi pertanian
 - b. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

1. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM.

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

1. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal
 - b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan

Misi 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

1. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran:
 - a. Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan.

Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
 - b. Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Secara rinci keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja						Target Akhir RPJMD																																										
											2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021																																									
1	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.	Melestarikan Budaya Melayu dan nilai-nilai agama	Tingkat Kelestarian Budaya Melayu	%	11,16	48,41	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	1. Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	0	5,28	6,02	16,54	32,33	49,70	70,75	70,75																																									
																			2. Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	14,97	18,53	19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	22,38																														
																														3. Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	N/A	N/A	N/A	25	50	80	100																				
																																								4. Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	N/A	N/A	20	40	60	80	100										
																																																		5. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	NA	272	250	230	200	185	150
Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	%	72,84	75,00	Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal 2015	Kondisi Awal 2016	Kondisi Awal 2017	Kondisi Awal 2018	Kondisi Awal 2019	Kondisi Awal 2020	Kondisi Awal 2021	Target Akhir RPJMD																																											
																	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	%	72,84	75,00	Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal 2015	Kondisi Awal 2016	Kondisi Awal 2017	Kondisi Awal 2018	Kondisi Awal 2019	Kondisi Awal 2020	Kondisi Awal 2021	Target Akhir RPJMD																										

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja						Target Akhir RPJMD	
											2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
2	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.	Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota	Tingkat Konektivitas antar kab/kota	%	60,88	95	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	7. Persentase jalan provinsi berkategori baik	Panjang jalan provinsi berkategori baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	71,37	66,22	67,97	69,73	71,49	73,24	75,00	75,00
							Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	8. Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	92,86	100,00	100
								9. Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	100	100	100
								10. Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	58,82	58,82	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
								11. Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	44,44	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD		
											Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	%	65,21	88,49	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	12. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	63,48	65,21	68,48	73,48	78,48	83,48	88,48	88,49
							Meningkatnya akses pelayanan air bersih	13. Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	72,01	72,01	89,44	92,19	96,79	97,59	100	100
							Berkurangnya kawasan kumuh	14. Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	823,44	823,44	752,99	627,69	549,53	379,57	255,09	255,09
							Meningkatnya rasio elektrifikasi	15. Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	83,72	89,14	89,15	90,50	91,50	92,50	93,50	93,50
							Meningkatnya kualitas pendidikan	16. Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	9,65	9,69	9,83	10,00	10,20	10,40	10,60	10,60
3	Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia	Indeks Pendidikan dalam IPM	Indeks	0,62	0,68		17. Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	75,00	75,80	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD																							
											2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021																					
4	Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,99	75,19	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	65,07	66	66,3	66,68	67,05	67,43	67,8	67,8																					
																			19. Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali 100	%	52	54	56	58	60	62	64	64										
																														20. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	144	120	132 (rata-rata 2015-2016)	131	130	129	128
22. Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita)	Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan status gizi kurus (<i>underweight</i>) dibagi jumlah Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	17,07	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	16,2																													
23. Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,82	5,84	6,13	5,98	5,83	5,68	5,53	5,53																													
24. Indeks	Indeks	Indeks	93,20	93,50	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	94,75																													

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD		
											Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
		kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Pembangunan Gender (1PG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	60,79	62,5	keaktifan dan peningkatan peran perempuan dan anak	25. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,79	61,2	61,5	61,8	62,0	62,25	62,5	62,5
5	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.	Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemartiman	Nilai Tukar Nelayan	%	109,36	110,57	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	26. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.412	303.411	304.019	304.628	305.239	305.850	306.463	306.463
								27. Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515	33.582	33.649	33.717	33.785	33.852	33.920	33.920
								28. Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.315	1.318	1.320	1.323	1.326	1.328	1.331	1.331
								29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,03	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,5
								30. Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	14.000	38.338	39.936	41.692	43.239	44.644	45.822	45.822
		Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	98,16	100	Meningkatnya produksi pertanian	31. Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	12.367	12.679	12.679	12.742	12.742	12.742
			Skor pola	skor	83,8	93,5	Meningkatnya	32. Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	959	627	792	850	1.020	1.020	1.020	1.020
								33. Persentase	Persentase	%	15,20	12,60	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD				
											2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021		
			pangan harapan				ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	skor										
								34. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan			87,76	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	
								35. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar		10.065	7.108	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	45.608	
								36. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar		1.384	492.5	500	600	700	800	900	3.993	
								37. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima atau dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	NA	17,8	18,5	19,2	20,19	21,22	22,25	22,25		
6	Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5±1	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM													
7	Menruskan	Meningkatkan	Pertumbuhan	%	5,03	5±1	Meningkatnya	38. Jumlah industri	Jumlah industri	unit	1.251	1.276	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja						Target Akhir RPJMD		
											2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
	pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.	ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal	Ekonomi				kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	berbahan baku lokal	berbahan baku lokal	Juta US \$									
							Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	40. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%		8,03	8,11	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,52
8	Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	66,97	69,8	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	41. Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	Jumlah waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dibagi jumlah waduk yang dilakukan pengujian dikali 100	%		63,64	63,64	72,73	72,73	81,82	90,91	100	100
							42. Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan		Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luaswilayah dikali 100	%		10,05	10,21	10,37	10,52	10,68	10,84	10,99	10,99
9	Mengembangkan	Meningkatkan	Indeks	Angka	41,15	75	Meningkatnya	43. Indeks	Nilai Perhitungan	Nilai		NA	NA	70	72	75	78	80	80

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD				
											2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021		
	an tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparaturnya birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.	kuualitas reformasi birokrasi	reformasi birokrasi				kuualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintahan daerah	44. Nilai hasil evaluasi SAKIP	JPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Kategori										
								45. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E		B	B	B	B	B	B	B	B	B
								46. Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100		59,5	59,5	62	63,5	65	65	67,5	67,5	67,5
								47. Nilai e-government	Nilai e-government	Skala nilai 1-4		1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
								48. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah		1,013	1,079	1,104	1,224	1,330	1,457	1,624	1,624	1,624
								49. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
								50. Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level		1	2	3	3	3	3	3	3	3

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan strategi dan arah kebijakan Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan kebijakan yang tercantum dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Nasional

Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 menggariskan hal-hal sebagai berikut :

a. Norma Pembangunan :

- 1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- 2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

b. Tiga Dimensi Pembangunan :

1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

2) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- a. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara dan tenaga air) dalam negeri.

- c. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- d. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian dan SDM yang unggul.

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- b. Wilayah pinggiran;
- c. Luar Jawa;
- d. Kawasan Timur.

c. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas

Kondisi tersebut antara lain :

- 1) Kepastian dan penegakan hukum;
- 2) Keamanan dan ketertiban;
- 3) Politik dan demokrasi; dan
- 4) Tatakelola dan reformasi birokrasi.

d. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya)

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan

peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antar wilayah dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien, meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan

perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

6.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Sebelum merumuskan strategi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Oportunities* (Peluang) dan *Threath* (Ancaman) atau yang lebih dikenal dengan nama *SWOT Analysis*. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau lima tahun kedepan berdasarkan hasil diskusi yang melibatkan segenap *stakeholder* dapat digambarkan secara ringkas dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 6.1
Identifikasi SWOT Provinsi Kepulauan Riau

Kekuatan (Faktor Internal)		Kelemahan (Faktor Internal)	
1.	Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar	1.	Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dengan kinerja penurunan yang melambat dari tahun ke tahun
2.	Potensi pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat prospektif	2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi
3.	Potensi industri pengolahan, konstruksi serta pertambangan dan penggalian yang sangat besar	3.	Kesenjangan antar kelompok wilayah kabupaten/kota yang tinggi yaitu antara Batam-Tanjung Pinang-Bintan-Karimun dengan Natuna-Anambas-Lingga.
4.	Potensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang cukup memadai dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat	4.	Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan baik darat, laut maupun udara, sehingga konektivitas antarwilayah rendah.
5.	Keunggulan budaya daerah, nilai adat istiadat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.	5.	Masih rendahnya kualitas infrastruktur listrik, jaringan komunikasi dan pelayanan air bersih
		6.	SDM bidang pertanian sangat terbatas sehingga produksi pertanian belum mampu menutup kebutuhan pangan daerah
		7.	Kondisi lingkungan hidup yang terdegradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam terutama pertambangan
Peluang (Faktor Eksternal)		Ancaman (Faktor Eksternal)	
1.	Dukungan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah terluar Negara Indonesia	1.	Ancaman gangguan keamanan dan kedaulatan pada wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.
2.	Besarnya potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di Provinsi Kepulauan Riau dalam memanfaatkan potensi kelautan dan sumberdaya alam lainnya yang cukup tinggi, termasuk dalam pengembangan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil.	2.	Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi ancaman terhadap pemasaran produk –produk lokal.
3.	Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Batam, Bintan Karimun dan sebagian Tanjungpinang sebagai area FTZ, diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa pelayanan lainnya.	3.	Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi ancaman terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
4.	Komitmen regional MEA disisi lain adalah peluang apabila produk-produk industri UMKM provinsi Kepulauan Riau bisa bersaing dari sisi kualitas dan kompetitif dari segi harga.	4.	Pesatnya kemajuan teknologi informasi, yang dapat mengancam kelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan moralitas masyarakat
		5.	Dualisme kelembagaan pengelolaan Kota Batam antara Pemko Batam dan BP Batam).
		6.	Terdapat dua sistem perdagangan di Provinsi Kepri yaitu daerah pabean (Batam, Bintan, Karimun, dan sebagian Tanjung Pinang) dan non pabean (Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas) menyebabkan efektivitas perdagangan antara kabupaten/kota terhambat.

Dari tabel tersebut selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh rumusan alternatif strategi, yaitu upaya memanfaatkan faktor internal positif berupa kekuatan untuk memanfaatkan faktor eksternal positif (peluang) dan memanfaatkan faktor internal positif (kekuatan) menghadapi faktor eksternal negatif (ancaman). Selanjutnya dilakukan analisis pemanfaatan peluang untuk mengurangi atau mengatasi kelemahan yang ada. Hasil analisis tersebut dapat digambarkan dalam bentuk matrik seperti diperlihatkan pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Matrik Identifikasi Alternatif Strategi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

	Peluang (Faktor Eksternal)	Ancaman (Faktor Eksternal)
<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>1. Dukungan kebijakan Pemerintah (pusat) terkait dengan pembangunan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah terluar Negara Indonesia</p>	<p>1. Ancaman gangguan keamanan dan kedaualatan pada wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.</p>
	<p>2. Besarnya potensi pemodal yang berpeluang menamakan investasinya di Provinsi Kepulauan Riau dalam memanfaatkan potensi kelautan dan sumberdaya alam lainnya yang cukup tinggi, termasuk dalam pengembangan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>2. Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi acaman terhadap pemasaran produk – produk lokal.</p>
	<p>3. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Batam, Bintan Karimun dan sebagian Tanjungpinang, sebagai area FTZ, diharapkan dapat menjadi akselerator pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa pelayanan lainnya.</p>	<p>3. Pelaksanaan komitmen regional MEA, menjadi acaman terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.</p>
	<p>4. Komitmen regional MEA diisi lain adalah peluang apabila produk-produk industri UMKM Provinsi Kepulauan Riau bisa bersaing dari sisi kualitas dan kompetitif dari segi harga.</p>	<p>4. Pesatnya kemajuan teknologi informasi, yang dapat mengancam kelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan moralitas masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>		<p>5. Dualisme kelembagaan pengelolaan Kota Batam antara Pemko Batam dan BP Batam.</p>
		<p>6. Terdapat dua sistem perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu daerah pabean (Batam, Bintan, Karimun, dan sebagian Tanjung Pinang) dan non pabean (Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas) menyebabkan efektivitas perdagangan antara kabupaten/kota terhambat.</p>

Kekuatan (Faktor Internal)	Alternatif Strategi (Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang)	Alternatif Strategi (Kekuatan Untuk Meminimalisir Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar 2. Potensi pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat prospektif 3. Potensi industri pengolahan, konstruksi serta pertambangan dan penggalian yang sangat besar 4. Potensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang cukup memadai dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat 5. Keunggulan budaya daerah nilai adat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensitas kerjasama dengan pemerintah pusat dalam rangka pembiayaan pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain dalam pemanfaatan DAK dan sumber dana Kementerian/Lembaga dan lainnya 2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan penanaman modal bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kepulauan Riau terutama terkait dengan pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil 3. Pengembangan industri, perdagangan dan konstruksi terutama pada wilayah FTZ dalam rangka lebih memicu pertumbuhan perekonomian daerah 4. Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, lebih kreatif untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah pusat di bidang pembangunan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah terluar Negara Indonesia 5. Peningkatan kualitas industri pengolahan terutama produk-produk perikanan sehingga mampu bersaing di pasar MEA baik dari segi kualitas maupun dari segi harga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan daerah perbatasan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, terutama terkait dengan pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia daerah dalam memanfaatkan potensi perkembangannya usaha pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil serta pengembangan usaha perikanan kelautan pada umumnya 3. Pengembangan potensi industri pengolahan, konstruksi serta pertambangan yang kompetitif dan sesuai standar untuk menghadang ancaman persaingan perdagangan bebas ASEAN. 4. Memperkuat perkembangan budaya daerah nilai adat dan seni budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengurangi dampak negatif pesatnya kemajuan teknologi informasi 4. Pemanfaatan pesatnya kemajuan teknologi informasi, untuk mengembangkan budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keasiannya. 5. Minimalisasi dampak negatif FTZ dalam pengembangan perdagangan antar kabupaten/kota melalui pemberian saran dan masukan penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat terkait dampak FTZ tersebut.

Kelemahan (Faktor Internal)	Alternatif Strategi (Pemanfaatan Peluang Untuk Mengatasi Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dengan kinerja penurunan yang melambat dari tahun ke tahun 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT) yang cukup tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan pengembangan potensi perikanan kelautan, industri pengolahan konstruksi dan pertambangan dalam penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran 2. Pengembangan potensi perikanan kelautan, industri pengolahan konstruksi dan pertambangan dengan tetap memberikan kesempatan berkembang kelompok usaha mikro, kecil dan menengah guna peningkatan pendapatan masyarakat miskin
<ol style="list-style-type: none"> 3. Kesenjangan antar kelompok wilayah kabupaten/kota yang tinggi yaitu antara Batam-Tanjungpinang-Bintan-Karimun dengan Natuna-Anambas-Lingga. 4. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan baik darat, laut maupun udara, sehingga konektivitas antar wilayah rendah. 5. Masih rendahnya kualitas infrastruktur listrik, jaringan komunikasi dan pelayanan air bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Akselerasi pengembangan potensi perikanan dan pariwisata berbasis kelautan terutama pada wilayah Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga untuk mengurangi kesenjangan antar daerah 4. Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan dengan memanfaatkan potensi pendanaan dari Pemerintah dan mendorong tumbuhnya investasi swasta 5. Peningkatan kualitas infrastruktur listrik, jaringan komunikasi dan pelayanan air bersih dengan memanfaatkan potensi pendanaan dari Pemerintah dan mendorong tumbuhnya investasi swasta.
<ol style="list-style-type: none"> 6. SDM bidang pertanian sangat terbatas sehingga produksi pertanian belum mampu menutup kebutuhan pangan daerah 7. Kondisi lingkungan hidup yang terdegradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam terutama pertambangan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM bidang pertanian dalam arti luas untuk memanfaatkan potensi dan meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja 7. Peningkatan penegakan peraturan dan penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan lingkungan

Dari matrik identifikasi alternatif strategi tersebut kemudian dilakukan analisis dan dikembangkan untuk memperoleh formula strategi jangka menengah pada masing-masing rumusan misi, sejak misi 1 sampai dengan misi 9. **Rumusan strategi jangka menengah** Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan misi sebagai berikut.

Misi 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu

1. Memberdayakan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga adat melayu di Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama dan kerukunan antar umat beragama bekerjasama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan
3. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan linmas, aparat kepolisian dan TNI.

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota

1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
4. Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih
5. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman
6. Melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi

1. Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi, Peningkatan ketersediaan SMA/SMK di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengembangkan SMK kemaritiman.

2. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK), dan pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit
3. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa
4. Meningkatkan kemandirian fakir miskin, fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan dan jaminan sosial, serta peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
5. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar dan pembenihan, mengembangkan sarana prasarana pengolahan, konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal.
3. Meningkatkan promosi potensi wisata Kepulauan Riau dengan memperbanyak ragam event dan destinasi wisata dan pemanfaatan media dan teknologi informasi.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas KUMKM

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal

1. Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar, serta meningkatkan kualitas industri pengolahan terutama produk-produk perikanan dan industri semikonduktor sehingga mampu bersaing di pasar MEA baik dari segi kualitas maupun dari segi harga.
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan
3. Meminimalisasi dampak negatif FTZ dalam pengembangan perdagangan antar kabupaten/kota melalui pemberian saran dan masukan penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat terkait dampak FTZ tersebut.

Misi 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong kabupaten/kota dan swasta dalam pengembangan RTH, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

1. Melaksanakan penataan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui berbagai diklat dan pelatihan, serta melakukan evaluasi kinerja pegawai.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi.
3. Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD

5. Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah.
6. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota.
7. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah, dan meningkatkan pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepri.

Keterkaitan strategi dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.	Melestarikan Budaya Melayu	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Memberdayakan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga adat melayu di Provinsi Kepri untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama dan kerukunan antar umat beragama bekerjasama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan
			Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan melibatkan limmas, aparat kepolisian dan TNI.
2	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.	Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia
			Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.
			Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	Meningkatkan ketersediaan sarana drainase, sanitasi, dan persampahan melalui pembangunan dan rehabilitasi.
			Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih
			Berkurangnya kawasan kumuh	Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan permukiman
		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
3	Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian dukungan pembiayaan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi, • Peningkatan ketersediaan SMA/SWK di kecamatan- kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, • penguatan peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang berkualitas, dan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengembangkan SMK kemaritiman
4	Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.	<p>Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK), dan pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, didukung pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas. • Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan, dan perbaikan manajemen rumah sakit
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<p>Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pendampingan, dan fasilitasi akses modal usaha, serta pengembangan BUMDesa</p> <p>Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif.</p>
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	<p>Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
5	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.	Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	<p>Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan, konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan prasarana dan sarana wisata bahari dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal. • Meningkatkan promosi potensi wisata Kepulauan Riau dengan memperbanyak ragam event dan destinasi wisata dan pemanfaatan media dan teknologi informasi.
			Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	<p>Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan</p>
			Meningkatnya produksi pertanian	<p>Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi. • Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dan Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas KUMKM
6	Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.	Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif	Meningkatnya realisasi investasi	
7	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan	Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	<p>Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar, serta meningkatkan kualitas industri pengolahan terutama produk-produk perikanan dan industri semikonduktor sehingga mampu bersaing di pasar MEA baik dari segi kualitas maupun dari segi harga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan
			Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	bahan baku lokal.			<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisasi dampak negatif FTZ dalam pengembangan perdagangan antar kabupaten/kota melalui pemberian saran dan masukan penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat terkait dampak FTZ tersebut.
8	Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan, dan berkurangnya lahan kritis.	<p>Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, penanganan lahan kritis, mendorong kabupaten/kota dan swasta dalam pengembangan RTH, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penataan dan mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui berbagai diklat dan pelatihan, serta melakukan evaluasi kinerja pegawai. • Meningkatkan kapasitas aparatur SKPD dalam pelayanan publik, pengelolaan jaringan, dan pemanfaatan aplikasi e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi. • Meningkatkan prestasi dengan menyusun pelaporan pemerintah daerah berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD
9	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	<p>Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, meningkatkan koordinasi dana perimbangan pusat dan daerah. • Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota. • Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah, dan meningkatkan pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepri

6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran RPJMD Kepulauan Riau.

1. Arah Kebijakan Tahun 2016

Pembangunan daerah pada Tahun 2016 diarahkan pada: "**Pengembangan Sektor Maritim, Energi, Air Dan Ketersediaan Pangan Serta Sumberdaya Manusia Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau**".

Prioritas pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata secara berkelanjutan guna mendukung sektor Kemaritiman**, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor perindustrian, peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, peningkatan kinerja sektor pariwisata, peningkatan nilai ekspor, peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA, dan peningkatan kinerja sektor Koperasi dan UKM.
2. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor Pertanian, dan peningkatan kinerja sektor Pangan.
3. **Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar pulau serta sarana dan prasarana dasar masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Masyarakat Agar Dapat Hidup Secara Layak, dan peningkatan pembangunan konektivitas.
4. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**, dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
5. **Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang Berkeadilan dan Berbudaya**, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan budaya.
6. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**, dengan fokus pada: peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Arah Kebijakan Tahun 2017

Pembangunan daerah pada Tahun 2017 diarahkan pada "**Peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**"

Prioritas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan pelayanan dasar**, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan menengah atas; peningkatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
2. **Peningkatan infrastruktur dasar dan penghubung antar wilayah**, dengan fokus pada peningkatan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan.
3. **Pengembangan kemaritiman**, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; dan peningkatan pembangunan pariwisata bahari.
4. **Peningkatan ekonomi produktif**, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); dan pengembangan perdagangan.
5. **Revitalisasi budaya melayu**, dengan fokus pada pelestarian nilai-nilai adat dan seni budaya melayu, dan penciptaan icon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu.
6. **Perbaikan tatakelola pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan; peningkatan kapasitas fiskal daerah; dan peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2018

Pembangunan daerah pada Tahun 2018 diarahkan pada "**Pengembangan ekonomi kemaritiman berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran didukung Infrastruktur yang berkualitas.**"

Prioritas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. **Pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan**, dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari; pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar).
- b. **Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran** dengan fokus pada pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan; peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan; dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; peningkatan kualitas ketrampilan dan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi.
- c. **Peningkatan kualitas pelayanan dasar** dengan fokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menengah atas;

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas SDM, serta Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

- d. **Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan**, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.
- e. **Pengembangan budaya melayu**, dengan fokus pada pengembangan brand Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan pelestarian nilai-nilai adat dan seni budaya melayu.
- f. **Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; peningkatan kapasitas fiskal daerah; dan peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2019

Pembangunan daerah pada Tahun 2019 diarahkan pada "**Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri**". Prioritas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. **Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan**, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- b. **Pengembangan ekonomi kerakyatan**, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar); pengembangan perdagangan; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi; peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan; pengembangan pariwisata bahari.
- c. **Pengembangan pusat kebudayaan melayu**, dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.
- d. **Pengembangan infrastruktur wilayah**, dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi; peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); peningkatan sarana prasarana air bersih; peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau.
- e. **Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel**, dengan fokus pada Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan

kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pembangunan daerah pada Tahun 2020 diarahkan pada "**Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, dan Pemerataan Infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya**". Prioritas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. **Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.
- b. **Peningkatan Iklim investasi yang kondusif**, dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; peningkatan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur mengenai ketenteraman, ketertiban, serta antisipasi potensi gangguan keamanan.
- c. **Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; peningkatan kualitas SDM kesehatan; Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- d. **Peningkatan daya saing ekonomi**, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.
- e. **Pengembangan pusat kebudayaan melayu**, dengan fokus pada promosi potensi budaya melayu Kepri, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

6. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 yang merupakan periode terakhir perencanaan Pembangunan daerah diarahkan pada "**Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim**".

- a. **Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu**, dengan fokus pada optimalisasi pengembangan pusat kebudayaan melayu dan pelestarian adat dan seni budaya melayu; peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.
- b. **Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga

kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pemerataan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; pemerataan kualitas SDM kesehatan; optimalisasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketersediaan, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi konsumsi pangan.

- c. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas**, dengan fokus pada pemerataan pembangunan jalan provinsi; pemerataan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); dan pemerataan sarana prasarana air bersih; pemerataan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; dan Peningkatan ratio elektrifikasi rumah tangga; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau, dan Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- d. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dengan fokus pada:** optimalisasi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, optimalisasi pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan**, dengan fokus pada: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, Peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

6.4 Arah Pengembangan Wilayah

6.4.1 Arah Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau meliputi sebagai berikut:

1. Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan;
3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
5. Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
6. Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
7. Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
8. Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.

6.4.2 Kerangka Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada tema pengembangan wilayah Sumatera dalam RPJMN tahun 2015-2019, yang sangat terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau yaitu : Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional, dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, industri pertambangan. Selain itu arah pengembangan wilayah Provinsi Kepri juga berbasis kepada industri perdagangan, industri alih kapal, industri IT dan perbankan. Hal ini juga sejalan dengan misi ke-5 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan antar kabupaten/kota, terutama Kota Batam dengan kabupaten/kota lain. Dalam kurun waktu tahun tahun 2016-2021, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten/kota yang tertinggal. Akselerasi

pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.

Kerangka pengembangan wilayah untuk mempercepat pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu : Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

3. Pengembangan Kawasan Tertinggal

Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

4. Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.

2. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.
3. Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
4. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
5. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di Kabupaten Lingga.
6. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Batam.
7. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di Kabupaten Natuna.

6.4.3 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota

Dalam RPJMN tahun 2015-2019 terdapat tiga indikator yang menjadi target pengembangan wilayah bagi Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan perkembangan capaian kinerja sampai dengan 2016, dapat dipastikan target pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka yang ditetapkan dalam RPJMN untuk Provinsi Kepulauan Riau sulit untuk dicapai, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target berdasarkan data kondisi terkini di Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan dunia.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 adalah sebesar 2,41%, berbeda jauh dengan target RPJMN sebesar 7,4%. Persentase penduduk miskin tahun 2016 sebesar 5,84%, sedangkan target RPJMN sebesar 4,6%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 sebesar 7.69%, sedangkan target RPJMN sebesar 4,8%.

Berikut ini disajikan persandingan antara target pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan target RPJMD tahun 2016-2021.

Tabel 6.4
Persandingan Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMD
dengan RPJMN Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015		2016		2017		2018		2019	
			RPJMD	RPJMN	RPJMD	RPJMN	RPJMD	RPJMN	RPJMD	RPJMN	RPJMD	RPJMN
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,02	6,7	5,03	7,4	2,2-2,6	7,0	4,2-4,6	7,5	4±1	7,5
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,78	5,1	5,84	4,6	6,13	4,3	5,98	3,8	5,83	3,4
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,20	5,1	7,69	4,8	7,16	4,6	7,02	4,3	6,88	4,1

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target sebagai berikut :

Tabel 6.5
Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Karimun	6,58	6,18	6,65	6,69	6,72	6,78	6,85	6,85
2	Bintan	6,48	5,96	7,40	7,40	7,50	7,50	7,50	7,50
3	Natuna	3,30	3,01	3,75	3,95	4,20	4,50	4,50	5,32
4	Lingga	3,12	4,07	4,98	5,87	6,25	6,78	6,93	6,93
5	Kepulauan Anambas	2,29	2,91	2,50	2,70	2,80	2,9	3,00	3,00
6	Kota Batam	6,75	5,45	4,30	4,35	4,40	4,55	4,60	4,60
7	Kota Tanjungpinang	5,99	5,08	5,10	5,14	5,18	5,22	5,26	5,26
	Provinsi Kepulauan Riau	6,02	5,03	2,2-2,6	4,2-4,6	4±1	5±1	5±1	5±1

Tabel 6.6
Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Karimun	6,60	6,77	6,48	6,40	6,31	6,20	6,10	6,10
2	Bintan	6,00	6,43	5,3	4,80	4,00	3,40	3,40	3,40
3	Natuna	3,56	4,33	4,00	3,95	3,85	3,80	3,75	3,75
4	Lingga	14,63	14,36	13,59	13,07	12,53	12,01	11,49	11,49
5	Kepulauan Anambas	4,21	6,73	4,30	4,22	4,13	4,05	4,01	4,01
6	Kota Batam	4,91	4,68	4,29	3,99	3,69	3,39	3,09	3,09
7	Kota Tanjungpinang	9,81	9,34	9,29	9,24	9,19	9,14	9,10	9,10
	Provinsi Kepulauan Riau	5,82	5,84	6,13	5,98	5,83	5,66	5,53	5,53

Tabel 6.7
Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Karimun	5,69	5,45	5,36	5,33	5,28	5,25	5,20	5,20
2	Bintan	6,88	6,70	6,65	6,60	6,55	6,50	6,40	6,40
3	Natuna	10,55	6,75	6,25	5,75	5,25	4,90	4,50	4,50
4	Lingga	4,01	4,12	4,07	4,02	4,00	3,95	3,91	3,91
5	Kepulauan Anambas	6,36	6,25	6,13	6,00	5,88	5,77	5,66	5,66
6	Kota Batam	6,09	5,72	5,63	5,55	5,46	5,38	5,29	5,29
7	Kota Tanjungpinang	6,27	6,30	6,13	5,96	5,79	5,62	5,45	5,45
	Provinsi Kepulauan Riau	6,20	7,69	7,16	7,02	6,88	6,74	6,60	6,60

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Karimun

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain : belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan (untuk ciri khas oleh-oleh dari Tanjung Balai Karimun misalnya kerupuk ikan tenggiri).

Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu : masih luasnya lahan di kawasan Tanjung Balai Karimun namun peruntukan pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan RTRW Kabupaten sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan kawasan FTZ BBK; masih luasnya lahan pertanian terutama di pulau Kundur; masih rendahnya pengolahan hasil produksi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; masih terbatasnya pengetahuan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan pertanian yang relatif kecil di kawasan perkotaan.

Berdasarkan analisis *shift share* pada sektor ekonomi dan dari survei lapangan, diperoleh hasil bahwa produk unggulan yang terdapat di Kabupaten Karimun adalah: [1] Olahan rumput laut, [2] Olahan buah, [3] Kerupuk ikan, dan [4] Anyaman. Kawasan Industri Berpusat pada kawasan FTZ, hal ini diupayakan agar hasil olahan tersebut dapat langsung dipasarkan, dengan target pasar internasional.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan meliputi komoditas pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, didukung dengan industri pengolahan yang berorientasi ekspor, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan :
 - a) Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar.
 - b) Peningkatan intensifikasi produk hortikultura dan agribisnis peternakan dengan pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan.
 - c) Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan intensifikasi dan diversifikasi pola tanam.
- 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk perikanan dengan arah kebijakan:
 - a) Peningkatan pemanfaatan lahan non produktif sebagai lahan budidaya perikanan darat (ikan lele, gurame dan nila).
 - b) Pengembangan budidaya perikanan laut dengan sistem jaring apung atau keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontiniu.
 - c) Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di kawasan minapolitan.
- 3) Mengembangkan industri campuran dan industri strategis padat karya dan berorientasi ekspor (manufaktur).

- 4) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat.
- 5) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas terutama kawasan pergudangan.
- 6) Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan bebas, terutama wisata alam, wisata minat khusus dan wisata agro.

2. Kabupaten Bintan

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, dan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun internasional, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan meliputi komoditas budidaya laut, pertanian hortikultura, dan produk olahan makanan, kerajinan, mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan, serta pengembangan pusat perdagangan dan jasa.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan kerapu dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.
- 2) Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor dan industri pengolahan dengan penataan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri, pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil, pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan pengembangan industri hasil pertanian dan perkebunan.
- 3) Mengembangkan kawasan wisata terpadu, eksklusif, kawasan wisata terbuka umum dan wisata minat khusus, dengan prioritas pada rehabilitasi jalan Provinsi yang digunakan sebagai track event internasional di Kabupaten Bintan.
- 4) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat, dan menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas.
- 5) Meningkatkan konektivitas antar pulau berupa sarana dan prasarana angkutan laut bagi penumpang dan barang khususnya di kecamatan Tambelan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar juga menjaga stabilitas harga barang serta ketahanan pangan.
- 6) Meningkatkan prasarana air bersih bagi masyarakat pesisir menggunakan teknik pipa bawah laut dari sumber air bersih di pulau besar ke pulau-pulau kecil disekitarnya.
- 7) Meningkatkan ketersediaan listrik di pulau-pulau kecil dengan jaringan kabel udara dan kabel bawah laut agar dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan ketersediaan listrik 24 jam.

3. Kabupaten Natuna

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur

pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Kabupaten Natuna memiliki potensi 1.143.341 ton/tahun dengan eksisting 48,698,05 ton/tahun. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperoleh masih rendah disebabkan: nelayan masih banyak menggunakan kapal ≤ 5 GT, infrastruktur TPI belum ada, dan belum adanya Bea cukai dan karantina ikan.

Potensi Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha dengan eksisting 377,85 ton/tahun dari potensi 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar. Potensi budidaya air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha dengan eksisting 227,57 ton/tahun dari potensi 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Potensi budidaya ikan air payau seluas 507 Ha dengan eksisting 6,61 ton/tahun dari potensi 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Adapun potensi rumput laut seluas 4000Ha dengan eksisting 142,79 ton/tahun dari potensi 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha, yang digunakan baru seluas 470 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan perikanan

tangkap, pusat industri nasional, simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, dan kawasan perindustrian terpadu untuk menjadi pusat pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kawasan sesuai dengan *Masterplan* Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna;
- 2) Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global;
- 3) Mengembangkan pelabuhan transit pelayaran internasional dan pusat pelayanan akses pasar global;
- 4) Mengembangkan fasilitas pada alur pelayaran internasional yang melewati Kabupaten Natuna meliputi tempat Bunkering BBM dan STS Oil.
- 5) Mengembangkan industri migas, industri perkapalan, industri petrokimia, dan industri berbasis perikanan, dengan arah kebijakan pada Pembangunan sarana dan prasarana pendukung; Pengembangan fasilitas pada alur pelayaran internasional; dan Pembangunan infrastruktur penunjang.
- 6) Mengembangkan destinasi dan pemasaran wisata bahari, ekowisata dan minat khusus di Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur, dengan mendatangkan investor dan membangun kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat, dan Peningkatan kualitas SDM pariwisata.
- 7) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan arah kebijakan :
 - a) Pengembangan perikanan budidaya air laut, air tawar, air payau, dan rumput laut dengan penyediaan jaring apung atau keramba didukung Pemenuhan obat, bibit dan pakan ikan secara kontinyu, Pengembangan industri maupun sarana dan prasarana pengolahan perikanan, Bantuan modal bagi nelayan melalui koperasi, dan Pelatihan SDM Perikanan.
 - b) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan dengan pembangunan Techno Park, BBIP SMK Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Bunguran Timur; Budidaya Kerapu dan Napoleon di Kecamatan Bunguran Barat; Sentra Rumput Laut di Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga; Sentra Bisnis Perikanan Tangkap Terintegrasi di Kecamatan Pulau Tiga; serta penyediaan sarana prasarana serta sentra bisnis perikanan tangkap di Kecamatan Pulau Tiga.
 - c) Pengembangan Perikanan Tangkap dengan fokus pada Penguatan kelembagaan kelompok dengan kemitraan; Pengembangan armada penangkapan ikan; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang

- pelabuhan perikanan; Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap; dan Pembinaan kelompok nelayan.
- 8) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan:
- a) Penyediaan sarana dan prasarana produksi hasil pertanian dan peternakan yang berkelanjutan.
 - b) Peningkatan Pelatihan SDM Pertanian, perkebunan dan peternakan, dan pengembangan teknologi hasil pertanian.
 - c) Pengembangan industri perkebunan
 - d) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan

4. Kabupaten Lingga

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam / taman nasional / taman wisata alam / taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, Perkebunan, Pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lingga ditujukan sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) Bunda Tanah Melayu yang berfungsi sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kepulauan Riau, yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan pada zona kawasan pertanian Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga, didukung dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan perikanan, dan pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian.
- 2) Meningkatkan produksi perikanan dengan mengoptimalkan eksploitasi pada zona Kawasan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan pengembangan budidaya pada zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan. Peningkatan produksi dengan dukungan prasarana pelabuhan dan dermaga perikanan, penyediaan alat tangkap, dan pemberdayaan nelayan.
- 3) Mengembangkan budidaya perikanan dan garam dengan penyediaan sarana dan prasarana budidaya, pelaksanaan pemetaan potensi dan kelayakan lahan tambak.
- 4) Mengembangkan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran wisata untuk mendukung pengembangan kawasan wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari dengan prioritas pada:
 - a. KPP Senayang, meliputi: Kawasan Pulau Benan dan Sekitarnya; Tajur Biru, Pulau Sebangka dan Sekitarnya; Pulau Pena'ah, Batu Berlubang dan Sekitarnya.
 - b. KPP Lingga, meliputi: Pembangunan dan pengembangan Kawasan Damnah, Mepar, Kawasan Tugu Khatulistiwa, Air Terjun Resun, Pantai Pasir Panjang.
 - c. KPP Singkep, meliputi: pembangunan dan pengembangan Kawasan Pemandian Air Panas, Batu Ampar, Sergang dan Pulau Berhala.
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga.

5. Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Obyek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk mewujudkan Sentra Perikanan, Kelautan dan Pariwisata Bahari, yang didukung dengan Pelabuhan Check Point, dan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan dan pariwisata bahari, yang diarahkan pada beberapa zona pemanfaatan dan perlindungan meliputi :

- 1) Zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nonse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkait, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan (Tarempa), Pulau Mangkai dan pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi;
- 2) Zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kepulauan Anambas;
- 3) Zona perikanan tangkap terdapat hampir di seluruh perairan Kepulauan Anambas;
- 4) Zona Perikanan Budidaya, terbagi atas : Kawasan budidaya perikanan keramba jaring tancap yang terletak di Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah, Desa Air Bini

Kecamatan Siantan Selatan, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak; Kawasan budidaya rumput laut berlokasi di Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah, Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur, Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak, Letung Kecamatan Jemaja dan Desa Genting Pulus dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.

- 5) Kawasan perikanan terpadu di Teluk Rambut dan Kecamatan Siantan Selatan.
- 6) Industri Pengolahan Hasil Perikanan terletak di Letung Kecamatan Jemaja, Desa Bayat Kecamatan Palmatak dan Dusun Antang Kecamatan Siantan.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Anambas diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal ferry dan terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak.
- 2) Mengembangkan sumber daya energi alternatif yang bersumber dari energi arus pasang surut air laut, terutama di alur celah antar pulau yang mempunyai kecepatan arus yang cukup besar, serta sumber energi alternatif dari sumber angin dan tenaga surya.
- 3) Mengembangkan Pelabuhan Check Point di Kabupaten Kepulauan Anambas (Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata di Kepulauan Anambas.
- 4) Mengembangkan perikanan tangkap dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti Alat Pengangkapan Ikan, pelabuhan perikanan, pabrik es, fasilitasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar terapung (Solar Packed Dealer Nelayan [SPDN]), meningkatkan kuota ketersediaan BBM untuk nelayan, Pemberdayaan nelayan, dan meningkatkan koordinasi penanganan illegal fishing.
- 5) Mengembangkan perikanan budidaya dengan pembangunan BBI, Keramba Jaring Apung/keramba, Fasilitas pendukung paska panen, kapal nelayan, dan Pemberdayaan pembudidaya ikan; serta Menyiapkan rumput laut dan kerang mutiara sebagai produk unggulan baru.
- 6) Mengembangkan produk perikanan hasil olahan.
- 7) Mengembangkan pulau Matak sebagai pusat/ sentra pengembangan industri dan ketenagakerjaan, dan pulau Jemaja sebagai pusat/ sentra pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian.
- 8) Mengembangkan industri pendukung pertambangan migas lepas pantai, Industri Ship Service, industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung

- pariwisata, industri pembuatan kapal kecil, dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
- 9) Membangun titik labuh untuk jalur pelayaran wisata, infrastruktur penunjang pariwisata, mengembangkan tiga destinasi wisata utama, dan melakukan promosi paket wisata bahari, meliputi:
- a. Kluster Pulau Jemaja Wisata pantai pelestarian penyu, snorkling, diving, sunset, sunrise, gua burung wallet, Rock Climbing, wiata budaya, air terjun, tracking mangrov, kayaking, kuliner, wisata sepeda wisata hutan.
 - b. Kluster Pulau Penjalin Wisata pantai snorkling, diving, sunrise, swimming, fishing dan tracking
 - c. Kluster Pulau Temuruk Wisata pantai, snorkling, diving, sunset, sunrise, tracking swiming, fishing dan wisata kancil.
- 10) Melakukan revitalisasi lahan sawah dan mengembangkan pertanian holtikultura dengan memanfaatkan potensi sawah dan lahan dipulau jemaja dan lahan cadangan di kecamatan palmatak dengan prioritas pada penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan, sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan, pengembangan pertanian areal tanam padi sawah (cetak sawah), pelatihan/ magang petani untuk peningkatan mutu beras, peremajaan tanaman cengkeh, dan penetapan blok penghasil tinggi tanaman cengkeh.

6. Kota Batam

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Ugang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,5 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti P. Lengkana, P. Air Asam, Air Manis, P. Leroy, P. Sekila (Kec. Belakang Padang), P. Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota

Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan P. Abang dan P. Petong.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk menjadikan Kota Batam sebagai pusat pelayanan perkotaan bagi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, mencakup pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional, sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain), serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
2. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.
3. Pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi "pelabuhan internasional hub" (hub international port).
4. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang.

5. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.
6. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.
7. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
8. Mengembangkan wisata kota, wisata bahari dan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), wisata minat khusus, wisata terpadu, eksklusif, wisata agro dan wisata alam. Pengembangan kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya pada Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam seperti P. Lengkana, P. Air Asam, Air Manis, P. Leroy, P. Sekila (Kec. Belakang Padang), P. Puteri (Kec. Nongsa), dan Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam sebagai tempat Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan P. Abang dan P. Petong
9. Pengembangan Zona peruntukan industri yaitu Tanjung sauh-Ngenang, Sembulang, Tanjung Gundap, P. Kepala Jeri dan P. Janda Berhias, dan Pengembangan industri Shipyard, Ship repair, Ship building, dan industri pendukung pengeboran lepas pantai, serta industri maritim lainnya di Kawasan Tanjung Gundap dan Pengembangan Kawasan Kabil-Tanjung Sauh.
10. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan.

7. Kota Tanjungpinang

a. Potensi dan Keunggulan Wilayah

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggir kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian

hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompok yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, dan sentra usaha mikro kecil dan menengah, yang didukung sistem transportasi darat, laut dan udara yang terintegrasi.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang menjadi salah satu kawasan strategis Provinsi berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang Penetapan Lokasi Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan MoU antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MoU/I/2007 tanggal 6 Januari 2007. Secara keseluruhan pengelolaan Istana Kota Piring menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, baik penggunaan lahan, bentuk fisik dan fungsi kegiatan yang ada di pulau tersebut, sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan dengan ditetapkannya Pulau Dompok sebagai Kawasan Strategis Provinsi akan dapat mendukung fungsi Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menggerakkan pertumbuhan kawasan-kawasan sekitarnya.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Pulau Dompok sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) Istana Kota Piring yang dibagi menjadi beberapa zona antara lain:
 - a. Zona Perkantoran Pemerintah;
 - b. Zona Perdagangan (Bisnis) dan Jasa;
 - c. Zona Pariwisata, Rekreasi dan Olahraga dan Budaya;
 - d. Zona Pemukiman (Pendopo, Rumah Jabatan, Perumahan 1, 2 dan 3);

- e. Zona Pelayanan Umum (Mesjid, Medical Centre, Kampus, Terminal Ferry);
 - f. Zona Revitalisasi Kawasan Penduduk Asli/Nelayan;
 - g. Zona Pelestarian Lingkungan dan Ruang Terbuka (Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalan, Plaza Utama).
2. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan secara terintegrasi dan terhubung dengan jaringan transportasi laut dan udara.
 3. Mengembangkan Industri automotif, Industri elektronik, Industri konveksi, Industri makanan, Industri pengolahan hasil laut, dan Industri perkapalan.
 4. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM).
 5. Mengembangkan kawasan wisata sejarah, wisata budaya dan wisata kreatif.

6.5 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas bersifat strategis yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain, program yang tercantum dalam Bab VI ini merupakan program unggulan (dari masing-masing misi yang terkait secara langsung dengan pencapaian sasaran RPJMD. Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis sasaran, strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Berikut ini adalah daftar program pembangunan daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi dan misi RPJMD.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi :

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya.
- c. Program pengelolaan keragaman budaya
- d. Program pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
- e. Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM
- f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- g. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- h. Program pendidikan politik masyarakat

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi :

- a. Program Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan
- b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
- e. Program Pembangunan Transportasi Laut
- f. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
- g. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
- h. Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan
- i. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi :

- a. Program pendidikan menengah dan khusus
- b. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi :

- a. Program Kesehatan Masyarakat
- b. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Program pelayanan kesehatan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- e. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- g. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- h. Program Penanggulangan Kemiskinan
- i. Program Rehabilitasi Sosial
- j. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- k. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- l. Program Perlindungan Anak

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi:

- a. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap
- b. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya
- c. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
- d. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- e. Program Pengembangan Destinasi pariwisata
- f. Program Pengembangan Industri Pariwisata
- g. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- h. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- i. Program peningkatan kesejahteraan Petani
- j. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- k. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- l. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
- m. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi:

- a. Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- c. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- e. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
- f. Program Peningkatan Daya Saing UKM dan koperasi

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi:

- a. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- b. Program pengembangan Industri Unggulan
- c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi:

- a. Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Program unggulan (program pembangunan daerah) pada misi ini meliputi:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik
- d. Program e-government
- e. Program Pembentukan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah
- j. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- k. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi pada setiap misi. Perincian program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD secara rinci tercantum pada Tabel 6.8.

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Pro gram Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Pangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD						
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	Mengembangkan perkembangan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.																
1.1	Melestarikan Budaya Melayu																
1.1.1	Memihgklaktya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai keayaan budaya daerah																
a	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase bangunan yang berchi khas melayu	%	NA	5,28	6,02	16,54	4.590.425.500	32,23	6.703.727.402	49,70	5.521.874.059	70,75	6.792.986.138	70,75	24.434.103.359	Dinas Kebudayaan
		Persentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan ewalikasi	%	NA	4,87	8,87	16,48		32,78		49,08		71,91		71,91		Dinas Kebudayaan
b	Program pengabdian Kelayakan budaya	Persentase warisan budaya tangible yang lesari	%	14,97	18,53	19,58		1.684.905.772	1.525.000.000	20,28	20,98	9.799.285.931	22,38	10.411.405.931	22,38	29.670.597.534	Dinas Kebudayaan
c	Program pengabdian keragaman budaya	Persentase Organisasi Budaya Berkegiatan Maju	%	NA	0,00	14,49	28,99	1.612.706.073	2.816.889.137	7.460.792.598	43,48	7.948.560.000	72,46	11.000.125.931	72,46	30.839.072.239	Dinas Kebudayaan
		Persentase Sangkar seni yang aktif mengangkan kesenian dan tradisi lokal	%	NA	3,10	6,49	21,06		35,62		52,61		72,03		72,03		Dinas Kebudayaan
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama																
a	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	0	0	5		21.338.065.000	13.882.000.000	5	5	6.785.000.000	5	8.360.000.000	25	56.950.065.000	Biro Kesegitleraan Rakyat
		Persentase Mubaligh yang berkehidupan	%														
1.2	Tujuan	Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat															
1.2.1	Sasaran	Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat															
a	Program Penerimaan dan Penegakan Hukum serta HAM	Jumlah Pelanggaran Perbuatan Daerah Dan Perbuatan Gubemur	kasus	NA	272	250	230		400.000.000	200	185	150	3.000.000.000	150	9.072.686.925	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	
		Jumlah PRKS di lingkungan Pemerintah Kepr	Orang	NA	16,0	18,00	27,0	764.686.925	1.400.000.000	36,0	45,0	51,0	2.540.000.000	51,0	6.143.904.500	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	
b	Program Pemeliharaan Kantantunus dan Kelecegan Tindak Kriminal	Persentase demo yang berjalan aman	%	90	91	92	93	943.904.500	400.000.000	94	97	100	2.540.000.000	100	6.143.904.500	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	
c	Program pengembangan wewasan kebangsaan	Persentase konflik sosial terangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.893.050.900	3.854.000.000	100,00	100,00	100,00	9.300.000.000	100,00	24.266.050.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
d	Program pendidikan politik masyarakat							349.533.700	1.395.667.000	1.255.000.000	100,00	1.045.000.000	1.465.000.000	100,00	5.510.400.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah								
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja akhir RPJMD										
						Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
a	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi	%																							
				Air Limbah	81,81	81,81	85,45	89,09	92,72	96,36	100	100														
				Desambahan	54	54	58	61	64	66	66	66														
				Drainase	27,24	27,24	32,24	37,24	42,4	47,24	52,24	52,24														
2.2.1	Meningkatnya akses pelayanan air bersih																									
a	Program pengembalian konsep pengelolaan air bersih/ air minum	Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	72,01	72,01	89,44	92,19	96,79	97,99	100	100															
2.2.2	Berkurangnya kawasan kumuh																									
a	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Perumahan dan Pemukiman																									
2.2.3	Meningkatnya rasio elektrifikasi																									
a	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	83,72	89,14	89,15	90,50	91,50	92,50	92,50	93,50	93,50	100,00	100,00												
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	-	74,60	81,50	88,50	95,45	97,85	97,85	100,00	100,00														
3	Meningkatkan kualitas pendidikan, ketramplilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.																									
3.1	Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia																									
3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan																									
a	Program Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,65	9,69	9,83	10,00	10,20	10,40	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60												
		Persentase Angka Partisipasi Keser (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	82,23	85,17	86,00	87,00	86,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00												
		Persentase Angka Partisipasi Keser (APK) SLB	%	NA	NA	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00												
		Persentase Angka Partisipasi Tunj (APN) SMA/MA/SMK/MAK	%	71,58	74,59	75,50	76,00	76,50	77,00	77,00	77,50	77,50	77,50	77,50												
		Angka Pulus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,95	0,50	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38												
		Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	86,49	86,68	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00												
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik	%	NA	NA	85,00	86,00	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00												
		Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	NA	18	90	50	50	50	50	50	50	50													
		Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	NA	01:40	01:36	01:36	01:36	01:36	01:36	01:36	01:36	01:36	01:36												
b	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	80,00	84,00	90,00	93,00	94,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00												
		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja																								
c	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja																									

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024				
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
		Beasran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	95	47,63	47,75	47,88	48	48,13	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
		Beasran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	85	42,63	42,74	42,88	43	43,13	43,25	43,25	43,25	43,25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
		Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	80	80	85	86	87	88	89	89	89	89	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
		Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kesehatan	orang	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
d	Program Pemertabatan dan perlisasan Kesempatan Kerja					450.000.000		2.750.000.000		2.860.000.000		3.016.000.000	9.076.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
		Beasran kerja terdaftar yang ditempatkan	%	52	54	56	58	60	62	64	64	64	64	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,07	66	66,3	66,68	67,05	67,43	67,8	67,8	67,8	67,8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
		Tingkat Pengangguran Terbuka (PTT)	%	6,2	7,69	7,16	7,02	6,88	6,74	6,6	6,6	6,6	6,6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi			
4	Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).																
4.1	Memingkatkan kualitas hidup masyarakat																
4.1.1	Memingkatkan kualitas kesehatan masyarakat																
a	Program Kesehatan Masyarakat				4.476.545.426		6.772.047.000		4.061.351.444		4.598.482.293		4.670.162.161	24.578.588.324	Dinas Kesehatan		
		Dukes			4.476.545.426		6.772.047.000		4.061.351.444		4.598.482.293		4.670.162.161	24.578.588.324	Dinas Kesehatan		
		RSJUD Prov Kepri Tanjungpinang			-		-		-		-		-	24.578.588.324	RSJUD Provinsi Tanjungpinang		
		RSJUD Prov Kepri Tanjung Uban			-		-		-		-		-	-	RSJUD Prov Kepri Tanjung Uban		
		Angka Kemalian Ibu (AKI) per 100.000 KH		144	120	132	131,00	130,00	129,00	128,00	128,00	128,00	128,00	Dinas Kesehatan			
		Angka Kemalian Bayi (AKB) per 1.000 KH		35*	35	34	33,00	32,00	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Dinas Kesehatan			
		Persentase keurangan gra (underweight) pada anak balla) Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	17,07	17,7	17,4	17,10	16,80	16,50	16,20	16,20	16,20	16,20	Dinas Kesehatan			
			%	14,3	43	43	57,00	57,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Dinas Kesehatan			
b	Program pencegahan dan pengendalian penyakit						3.098.342.076		2.532.728.906		2.635.189.608		2.915.768.354	11.182.038.944	Dinas Kesehatan		
		Dukes				2.641.249.595		3.098.342.076		2.532.728.906		2.635.189.608		2.915.768.354	13.823.288.539	Dinas Kesehatan	
		RSJUD Prov Kepri Tanjungpinang				-		-		-		-		-	RSJUD Provinsi Tanjungpinang		
		RSJUD Prov Kepri Tanjung Uban				-		-		-		-		-	RSJUD Provinsi Tanjung Uban		
		Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	Dinas Kesehatan		
		Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk		139	171	155	160,00	165,00	170,00	175,00	175,00	175,00	175,00	Dinas Kesehatan			
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	41	76,6	80	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00	Dinas Kesehatan			
		Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk		98	102	100	97,00	94,00	91,00	88,00	88,00	88,00	88,00	Dinas Kesehatan			
		AP1 (Annual Paratide Incidence) Per 1.000 penduduk		0,41 (rata-rata 2011-2015)	0,37	0,35	0,33	0,31	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	Dinas Kesehatan			
		Persentase Ubat 0-11 bulan yang mendapat inuisasi dasar lejangap	%	74,5	88,7	90	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00	94,00	94,00	Dinas Kesehatan			
		Prenatal takanan darah tinggi	%	35	22,4	28,7	28,50	28,30	28,10	27,90	27,90	27,90	27,90	Dinas Kesehatan			
c	Program pelayanan kesehatan					96.633.433.231		70.479.866.000		44.707.525.560		45.114.835.922	46.046.248.347	302.981.929.060	Dinas Kesehatan		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program-Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD					
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Dukas RSUD Prov Kepri Tanjungpinang				19.521.432.526	15.295.886.000	13.662.525.460	21.522.585.922	22.004.385.682	98.082.220.855					Dinas Kesehatan RSUD Provinsi Tanjungpinang
		RSUD Prov Kepri Tanjung Uban	%	9,109	28,6	6.160.692.254	8.100.000.000,00	8.950.000.000	7.950.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	71,40	71,40	38.460.692.254	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban	Dinas Kesehatan
		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang terakreditasi akreditasi	%	0	6,49	12	25,00	38,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00		Dinas Kesehatan	
		Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	61	63	65	70,00	72,00	78,00	85,00	85,00	85,00	85,00		Dinas Kesehatan	
		Status Areditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KANS)	Status	-	Madya	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna		RSUD Prov Kepri Tanjungpinang	
		Status Areditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KANS)	Status	-	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna	Partipurna		RSUD Prov Kepri Tanjung Uban	
d	Program peningkatan kualitas pelayanan keehatan	Dukas RSUD Prov Kepri Tanjungpinang RSUD Prov Kepri Tanjung Uban				17.200.000.000	60.500.000.000	72.500.000.000	78.000.000.000	83.500.000.000	311.700.000.000					
		Dukas RSUD Prov Kepri Tanjungpinang				0	0	0	0	0	0					
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	75	77,9	78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		RSUD Provinsi Tanjungpinang	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	67	71,7	75	76,00	77,00	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00		RSUD Prov Kepri Tanjung Uban	
e	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Dukas RSUD Prov Kepri Tanjungpinang RSUD Prov Kepri Tanjung Uban				4.243.828.200	15.518.651.750	16.464.950.536	16.991.063.831	17.444.111.517	70.652.605.834					
		Dukas RSUD Prov Kepri Tanjungpinang				3.294.428.200	13.868.651.250	14.904.950.536	15.041.063.831	15.384.111.517	62.503.205.834					Dinas Kesehatan RSUD Provinsi Tanjungpinang
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	%	58	53	56	58,0	60,0	63,0	67,0	67,0	67,0	67,0		Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis Perulang	%	59	54,5	58	60,0	63,0	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0		Dinas Kesehatan	
		Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang terakreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	55	61	63	65,0	67,0	69,0	70,0	70,0	70,0	70,0		RSUD Prov Tanjungpinang	
		Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	0	0	20	45,0	65,0	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0		RSUD Prov Kepri Tanjung Uban	
4.1.2	Angka kemiskinan															
a	Membantu Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	0	36,62	40,22	44,23	48,64	53,45	58,65	58,65	58,65	58,65		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
b	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	Unit	NA	NA	35	40	45	50	55	55	55	55		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Keperduaan dan Perencanaan Sipil	
c	Program Penguatlingkaran Kemiskinan					2.854.916.000	1.072.330.000	4.398.630.600	4.398.630.600	4.398.630.600	4.398.630.600	17.123.137.800	17.123.137.800		Dinas Sosial	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah					
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja akhir RPJMD				
						TARGET	TARGET	Rp	Rp	TARGET	TARGET	Rp	Rp	TARGET	TARGET	Rp	Rp	TARGET	TARGET	Rp	Rp
a	Program peningkatan kesejahteraan Petani		%	99,45	98,16	97,50	98,00	9.273.094.917	160.000.000	98,70	99,30	100	100	1.650.000.000	1.650.000.000	100	100	12.583.094.917	12.583.094.917	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	%																	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
		Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,21	1,16	1,16	1,18		3.390.056.000	1,21	1,24	1,28	1,28	13.470.000.000	13.470.000.000	1,28	1,28	46.675.203.285	46.675.203.285	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
b	Program Peningkatan produksi/perkebunan		ton	959	627	792	850			1.020	1.020	1.020	1.020			1.020	1.020			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
		Jumlah Produksi Padli (ton)	ton																	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
		Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	12.367	12.679			12.679	12.742	12.742	12.742			12.742	12.742			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
		Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	14.000	38.338	39.936	41.692			43.239	44.644	45.822	45.822			45.822	45.822			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
		Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	21694	21694	31.338	31.590			31.796	32.103	32.480	32.480			32.480	32.480			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
c	Program Peningkatan Produkasi Hasil Perikanan		%	5,98	5,98	6,00	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%																	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan	
5.2.2	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan		skor	87,76	88,00	89,00	90,00			91,00	92,00	93,00	93,00			93,00	93,00			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
a	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,		%	15,20	12,60	CV < 10	CV < 10			CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10			CV < 10	CV < 10			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor																	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (Owars) di tingkat konsumen	%																	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
b	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan		skor	83,8	84,5	86	87			88	89	90	90			90	90			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor																	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
6	Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.																			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
6.1	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif																			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
6.1.1	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM																			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
a	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Sektorsas-Investasi		Rp Miliar	10,065	7,108	7,300	7,500			7,700	7,900	8,100	8,100			8,100	8,100			Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Miliar																	Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Miliar	1,384	492,5	500	600			700	800	900	900			900	900			Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
b	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Investor	160	191	135	140			145	150	155	155			155	155			Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
		Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor																	Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
		Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	226	175	100	102			104	106	108	108			108	108			Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
c	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan		nilai	NA	81	81	84			86	88	90	90			90	90			Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Perijinan Satu Beras (KIPAS)	nilai																	Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	
		Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	80	100	80	81			82	83	84	84			84	84			Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Masyarakat	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021
d	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (2018-2023) / Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi (2017)	Persentase Koperasi Aktif	%	49	49,04	51,2	53,3	55,8	58,8	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	19.548.724.650	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase KSP/USP sehat	%	NA	7,6	15,3	23	30,6	38,3	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan koperasi	%	NA	NA	1	1,5	2	2,5	3	3	3	3	3	3		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
e	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Jumlah UKM yang naik kelas/sakit	%	0	0,21	0,27	0,34	0,48	0,62	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	16.691.774.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
f	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk Utama Spesifik Modern dan Inovatif	%	NA	17,8	18,5	19,2	20,19	21,22	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	24.753.140.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Memastikan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.																Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7.1	Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal																
7.1.1	Meminimalisir kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal																
a	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri unggulan/infrastruktur baru	Sentra	2	4	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	3.630.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
b	Program Pengembangan Industri Unmanned	Kontribusi sektor industri pengolahan/bahan baku di sektor industri/utama/mbas	%	38,6	38,60	36,50	37	37,50	38	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	9.675.373.250	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
c	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan menengah	unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.400	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.800.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Jumlah industri menengah	unit	1.251	1.276	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Peningkatan omset industri pengolahan berbasis baku lokal	%	11,57	11,60	11,60	11,95	12,10	12,28	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
7.1.2	Meminimalisir kinerja sektor perdagangan																
a	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor produk-produk kerajinan baku lokal asal Kend.	Juta US \$	1.112,40	1.185,67	1.258,94	1.332,21	1.405,48	1.478,75	1.550,2	1.550,2	1.550,2	1.550,2	1.550,2	1.550,2	7.672.500.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Nilai ekspor Non Migas Produk Keluaran Rata-pertemuan SKA	Ribu US \$	8.657.953	8.019,7	8.557.950	8.657.950	9.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	10.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar kecamatan	Jenis	21	22	23	23	23	24	25	25	25	25	25	25		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	0	0	0	0	8,35	8,44	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD					
				Target	Target	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Target	Target	Rp	Rp	Rp	
9	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, apatrat birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.															
9.1	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi															
9.1.1	Memingkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah															
a	Program Pembiayaan dan Pengembangan Aparatur					6.868.447.016	5.239.874.000	7.610.000.000	7.540.000.000	8.440.000.000	35.698.321.016					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan	%	50	52	54	58	60	65	75	75					
		Ketepatan Pejabat Pimpinan Tinggi Admistrasi dan Menduduki Jabatan sesuai dengan Surat dan Komptensi Jabatan	%	NA	NA	78	80	82	84	85	85					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Peranan Kasus Indikator Pegawai Tingkat Setara dan Bakti	Kasus	13 Kasus	8 Kasus	16 Kasus	14 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	8 Kasus	8 Kasus					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	62	70	90	92	93	94	95	95					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	Indeks	B	B	B	B	B	B	B	B					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					2.354.066.050	2.605.300.000	3.980.000.000	6.432.224.000	9.170.000.000	24.541.590.050					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	5,3	8,5	14,07	19,64	25,21	30,78	36,35	36,35					Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
c	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik					6.849.560.129	6.386.000.000	4.830.000.000	5.605.000.000	6.288.000.000	29.955.560.129					Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Nilai Keterbukaan Informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	59,5	59,5	62	63,5	65	65	67,5	67,5					Dinas Komunikasi Dan Informatika
d	Program e-government					2.354.620.437	7.974.420.000	6.286.800.000	7.141.800.000	9.100.000.000	32.857.640.437					Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Nilai e-government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5					Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Domian dan Sub Domian di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang telah Dimanfaatkan	%	-	-	25,00	35,00	45,00	55,00	60,00	60,00					Dinas Komunikasi Dan Informatika
e	Program pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih (2018-2021) / Program Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Sebagai Upaya Pencegahan KKN (2017)					99.402.500	660.000.000	200.000.000	490.000.000	1.000.000.000	2.449.402.500					Biro Organisasi dan Kepri
		Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	41,15	60	63	67	70	72	75	75					Biro Organisasi dan Kepri
f	Program perencanaan Pembangunan Daerah					9.429.584.950	4.918.380.000	3.863.560.000	5.638.700.000	6.380.700.000	20.801.340.000					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keseluruhan Program RKPD dengan RPJMD	%	84	90	95	96	100	100	100	100					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Konsistensi KUA PPKS dengan RKPD	%	91	92	95	96	100	100	100	100					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keseluruhan RKPD dengan Kega	%	60	60	60	65	70	75	80	80					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase usulan mas/strat di dan Misenbang yang diakomodir	%	25	28	>30	>31	>33	>34	>36	>36					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase pelaksanaan program RPJMD dengan Renstra OPD	%	71	73	76	96	100	100	100	100					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD												Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja akhir RPJMD										
				Realisasi	Target	Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp								
9.1.2	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Persentase keabsahan kegiatan pada Rencana OPD dengan Kema OPD	%	71	73	76	78	80	82	84	84	84	84	84	84	84	84	84	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan									
a	Program Intensifikasi dan Efisiensi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Tribun Rubin	1.013	1.079	1.104	1.224	1.330	1.457	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	32.882.585.000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi									
		Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	%	40,30	37,03	34,49	36,85	37,76	38,73	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93	58.248.438.000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi									
		Persentase Luangkan Pajak Daerah yang tertagih	%	NA	9	12	15	18	22	25	25	25	25	25	25	25	25	58.248.438.000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi									
b	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	80	82	87	90	94	97	100	100	100	100	100	100	100	100	58.248.438.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
		Persentase Kepuasan pelayanan	%	80	80	80	85	90	95	97	97	97	97	97	97	97	97	28.152.412.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
c	Program Peningkatan dan Pengembangan Peratusan Aset Daerah	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	3,54	46,50	68,93	68,93	74,07	79,22	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	28.152.412.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
		Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengalihan (pagor/patok/papan nama)	%	17,78	24,44	40,00	55,56	71,11	86,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.333.900.000	Inspektorat daerah									
d	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemelihara dan Aparatur Penawasan.	Persentase Tenaga Pemelihara dan Aparatur Penawasan yang memiliki sertifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6.333.900.000	Inspektorat daerah									
		Level Kapabilitas APSP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10.525.000.000	Inspektorat daerah									
		Persentase Kadipaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan komitmen bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APSP Penda Se- Provinsi Kepulauan Riau	%	100	85,71	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	35.757.391.092	Inspektorat daerah									
e	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	35.757.391.092	Inspektorat daerah									
		Level Mutuas SPJ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35.757.391.092	Inspektorat daerah									

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah		
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD							
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
		Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Kuning	Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Inspektoraat daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun tercantum pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
I	Kapasitas Rill Daerah	3.261.550.417.871	3.378.291.250.510	3.577.558.809.948	3.809.237.353.418	4.100.730.388.651
II	Belanja Daerah	3.496.355.277.049	3.594.771.742.620	3.577.558.809.948	3.809.237.353.418	4.100.730.388.651
A	Belanja Tidak Langsung	1.531.730.457.152	1.541.500.483.956	1.634.140.542.086	1.713.525.272.935	1.882.646.163.705
1	Belanja Pegawai	624.083.062.586	643.452.493.660	684.378.517.502	709.951.563.255	739.890.122.569
2	Belanja Bunga	0	0	-	-	-
3	Belanja Hibah	392.445.700.000	421.250.990.850	421.601.323.134	422.444.525.781	495.970.500.000
4	Belanja Bantuan Sosial	6.172.000.000	2.485.000.000	13.658.565.862	13.685.882.994	13.713.254.760
5	Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	487.555.320.934	472.311.999.446	499.840.148.529	552.781.313.847	618.410.299.317
6	Belanja Bantuan Keuangan	20.974.373.632	0	12.661.987.059	12.661.987.059	12.661.987.059
7	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
II	Belanja Langsung	1.964.624.819.897	2.053.271.258.664	1.943.418.267.862	2.095.712.080.483	2.218.084.224.946
1	Belanja Pegawai	232.588.299.601	459.556.645.756	252.644.374.822	272.442.570.463	288.350.949.243
2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.236.397.079	910.640.367.669	1.232.127.181.825	1.404.127.093.924	1.486.116.430.714
3	Belanja Modal	575.800.123.217	683.074.245.239	458.646.711.215	419.142.416.097	443.616.844.989

7.2 Program Pembangunan

Pada bab ini akan disajikan seluruh program baik program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut.

1) Pendidikan

- a. Program Pendidikan Menengah dan Khusus
- b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

2) Kesehatan

- a. Program Kesehatan Masyarakat
- b. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Program pelayanan kesehatan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- e. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
- f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- g. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
- d. Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
- e. Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- f. Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi
- g. Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4) Pertanahan

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan
- b. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
- c. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
- d. Program penataan bangunan dan lingkungan

6) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Program Penanggulangan Kebakaran
- e. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- f. Program pendidikan politik masyarakat
- g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- h. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- i. Program Pemulihan Pasca Bencana

7) Sosial

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- f. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

8) Tenaga kerja

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan tenaga kerja
- d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

9) Transmigrasi

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

10) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- c. Program Perlindungan Anak
- d. Program Kualitas Keluarga

11) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program keluarga berencana

12) Pangan

- a. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
- b. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- e. Program Pengembangan SDM dan Penyuluh Pertanian

13) Pertanian

- a. Program peningkatan kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan

14) Lingkungan hidup

- a. Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

15) Kehutanan

- a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

16) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program penataan Administrasi Kependudukan

17) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- c. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- d. Program Peningkatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa

18) Perhubungan

- a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat
- b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara
- e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
- f. Program Pembangunan Transportasi Laut
- g. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

19) Komunikasi & Informatika

- a. Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik
- b. Program e-government

20) Statistik

- a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral

21) Persandian

- a. Program Persandian Untuk pengamanan informasi

22) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
- b. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
- c. Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

23) Penanaman Modal

- a. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- b. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- c. Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan

24) Kepemudaan dan olah raga

- a. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
- c. Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
- e. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

25) Kebudayaan

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program pengelolaan keragaman budaya

26) Perpustakaan

- a. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan

27) Kearsipan

- a. Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip
- b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan

28) Kelautan dan Perikanan

- a. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap
- b. Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
- d. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- e. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- f. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
- g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

29) Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Program Pengembangan Industri Pariwisata
- c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- d. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

30) Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah
- b. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- d. Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan
- e. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi

31) Perdagangan

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

32) Perindustrian

- a. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- b. Program Penataan Struktur Industri
- c. Program Pengembangan Industri Unggulan
- d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- e. Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

33) Fungsi Perencanaan Pembangunan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program perencanaan Perekonomian
- c. Program Perencanaan sosial budaya
- d. Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup
- e. Program Perencanaan Pemerintahan
- f. Program Kerjasama Pembangunan
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- h. Program Pengendalian dan Evaluasi

34) Fungsi Penelitian dan Pengembangan

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
- b. Program Pengembangan Inovasi Daerah

35) Fungsi Keuangan Daerah

- a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- b. Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah
- c. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- d. Program peningkatan Kualitas pelayanan dan informasi Publik
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah
- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

36) Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

37) Sekretariat DPRD

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi

38) Sekretariat Daerah

a. Biro Pemerintahan dan Perbatasan

- 1) Program Peyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
- 2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

b. Biro Hukum

- 1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
- 3) Program Pembinaan Hukum
- 4) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum

c. Biro Administrasi Pembangunan

- 1) Program e-Government
- 2) Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- 3) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan
- 4) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

d. Biro Administrasi Layanan Pengadaan

- 1) Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2) Program e-procurement
- 3) Program e-Government
- 4) Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

e. Biro Umum

- 1) Program Pelayanan KDH/WKDH yang difasilitasi
- 2) Program Dukungan Pelayanan Umum
- 3) Program Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah

f. Biro Kesejahteraan Rakyat

- 1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
- 2) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama

g. Biro Administrasi Perekonomian

- 1) Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan

- 2) Program peningkatan kinerja BUMD

h. Biro Organisasi dan Korpri

- 1) Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah
- 2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- 3) Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik
- 4) Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
- 5) Program Kesejahteraan Anggota Korpri

i. Biro Humas, Protokol dan Penghubung

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
- 2) Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan informasi
- 3) Program Fasilitasi dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak

39) Fungsi Pengawasan

- a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
- c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
- d. Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

40) Program Rutin Pada Tiap Perangkat Daerah

Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa program penunjang sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program pengembangan data/informasi
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan

7.3 Perincian Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Berdasarkan program yang telah dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan diatas, dirinci indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan tercantum pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1.	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	0	5,28	6,02	16,54	32,33	49,70	70,75	70,75	
2.	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	14,97	18,53	19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	22,38	
3.	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	N/A	N/A	N/A	25	50	80	100	100	
4.	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100	
5.	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	NA	272	250	230	200	185	150	150	
6.	Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	4.892	4.885	4.880	4.875	4.870	4.865	4.860	4.860	
7.	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	71,37	66,22	67,97	69,73	71,49	73,24	75,00	75,00	

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
8.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	92,86	100,00	100,00	100
9.	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	100	100	100	100
10.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	58,82	58,82	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00	100,00
11.	Persentase ketersediaan Kapal Angkatan Laut	Jumlah Kapal Angkatan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkatan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	44,44	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00	100,00
12.	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	63,48	65,21	68,48	73,48	78,48	83,48	88,48	88,48	88,49
13.	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	72,01	72,01	89,44	92,19	96,79	97,59	100	100	100
14.	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	823,44	823,44	752,99	627,69	549,53	379,57	255,09	255,09	255,09
15.	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	83,72	89,14	89,15	90,50	91,50	92,50	93,50	93,50	93,50

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	9,65	9,69	9,83	10,00	10,20	10,40	10,60	10,60	10,60
17.	Persentase SMA/SMK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	75,00	75,80	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00	84,00
18.	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali 100	%	52	54	56	58	60	62	64	64	64
19.	Persentase calon tenaga kerja yang terserap/diterima di perusahaan	Jumlah calon tenaga kerja yg diterima di perusahaan dibagi jumlah tenaga kerja yang terdaftar di disnaker dengan 100	%	52	54	56	58	60	62	64	64	64
20.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	144	120	132 (rata-rata 2015-2016)	131	130	129	128	128	128
21.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	JumlahKematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	35*	35	34	33	32	31	30	30	30
22.	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan statis gizi kurus (underweight) dibagi jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	17,07	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	16,2	16,2
23.	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,82	5,84	6,13	5,98	5,83	5,68	5,53	5,53	5,53

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
24.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	93,50	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	94,75	
25.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,79	61,2	61,5	61,8	62,0	62,25	62,5	62,5	
26.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.412,66	303.411,28	304.019,32	304.628,57	305.239,05	305.850,75	306.463,67	306.463,67	
27.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515,48	33.582,65	33.649,95	33.717,38	33.785,95	33.852,66	33.920,50	33.920,50	
28.	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.315,67	1.318,30	1.320,94	1.323,58	1.326,23	1.328,88	1.331,54	1.331,54	
29.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,03	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,5	
30.	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Hortikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Hortikultura	Ton	14.000	38.338	39.936	41.692	43.239	44.644	45.822	45.822	
31.	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	12.367	12.679	12.679	12.742	12.742	12.742	
32.	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	959	627	792	850	1.020	1.020	1.020	1.020	
33.	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	15,20	12,60	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
34.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	87,76	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	93,00
35.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	8.100	45.608
36.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492.5	500	600	700	800	900	900	3.993
37.	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	NA	17,8	18,5	19,2	20,19	21,22	22,25	22,25	22,25
38.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.251	1.276	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200	2.200
39.	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.112,40	1.185,67	1.258,94	1.332,21	1.405,48	1.478,75	1.550,20	1.550,20	1.550,20
40.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,03	8,11	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,52	8,52
41.	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	Jumlah waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dibagi Jumlah waduk yang dilakukan pengujian dikali 100	%	63,64	63,64	72,73	72,73	81,82	90,91	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
42.	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luaswilayah dikali 100	%	10,05	10,21	10,37	10,52	10,68	10,84	10,99	10,99	
43.	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	NA	NA	70	72	75	78	80	80	
44.	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
45.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B	B	B	B	B	B	B	B	
46.	Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	59,5	59,5	62	63,5	65	65	67,5	67,5	
47.	Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	
48.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,013	1,079	1,104	1,224	1,330	1,457	1,624	1,624	
49.	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
50.	Level Kapabilitas APJP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APJP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3	

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD							Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah		
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat													
1)	Pertumbuhan Ekonomi	(Jumlah PDRB tahun n dikurangi PDRB tahun sebelumnya) dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali 100	%	6,02	5,03	2,2-2,6	4,2-4,6	4±1	5±1	5±1	5±1	5±1	Seluruh PD	
2)	Laju Inflasi	Laju Inflasi	%	4,40	3,53	4,02	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	Seluruh PD	
3)	Indeks Gini	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,35	0,36	0,35±0.01	0,35±0.01	0,35±0.01	0,34±0.01	0,34±0.01	0,34±0.01	Seluruh PD	
4)	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,82	5,84	6,13	5,98	5,83	5,68	5,53	5,53	5,53	Seluruh PD	
5)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,75	73,99	74,23	74,47	74,71	74,95	75,19	75,19	75,19	Seluruh PD	
B	Aspek Pelayanan Umum													
1.	Pendidikan													
1)	Persentase SMA/SMK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang terakreditasi B dibagi jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	75,00	75,80	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00	84,00	84,00	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
2.	Kesehatan													
2)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	144	120	132 (rata-rata 2015-2016)	131	130	129	128	128	128	Dinas Kesehatan	
3)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	35*	35	34	33	32	31	30	30	30	Dinas Kesehatan	
4)	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan status gizi kurus (<i>underweight</i>) dibagi Jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	17,07	17,7	17,4	17,1	16,8	16,5	16,2	16,2	16,2	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
5)	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	71,37	66,22	67,97	69,73	71,49	73,24	75,00	75,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan	
4.	Pertanahan													
6)	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	Jumlah permintaan penetapan lokasi pengadaaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi dibagi Jumlah permintaan	%	0	0	0	9,09	18,18	24,24	30,30	30,30	30,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
		penetapan lokasi pengadaaan tanah untuk kepentingan umum dikali 100												
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman													
7)	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	63,48	65,21	68,48	73,48	78,48	83,48	88,48	88,49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
8)	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	72,01	72,01	89,44	92,19	96,79	97,59	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
9)	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	%	823,44	823,44	752,99	627,69	549,53	379,57	255,09	255,09	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
10)	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,05	10,21	10,37	10,52	10,68	10,84	10,99	10,99	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
5)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Jumlah Pengangguran Terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	6,20	7,69	7,16	7,02	6,88	6,74	6,60	6,60	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
6)	Persentase calon tenaga kerja yang terserap/diterima di perusahaan	Jumlah calon tenaga kerja yang diterima di perusahaan dibagi jumlah tenaga kerja yang terdaftar di disnaker dengan 100	%	52	54	56	58	60	62	64	64	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
9.	Transmigrasi												
7)	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	KK	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	2.730	2.730	2.730	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
8)	10. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak												
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	93,50	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	94,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,79	61,2	61,5	61,8	62,0	62,25	62,5	62,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
11.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
10)	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dibagi Jumlah PUS dikali 100	%	46,20	46,50	46,73	47,73	48,73	49,73	50,73	50,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
12.	Pangan													
11)	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	15,2	12,6	CV<10	CV<10	CV<10	CV<10	CV<10	CV<10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
12)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	87,76	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
13.	Pertanian													
13)	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Hortikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Hortikultura	Ton	14.000	38.338	39.936	41.692	43.239	44.644	45.822	45.822	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan		
14)	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	12.367	12.679	12.679	12.742	12.742	12.742	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan		
15)	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	959	627	792	850	1.020	1.020	1.020	1.020	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan		

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja RPJMD							Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah		
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
14.	Lingkungan hidup													
16)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,97	66,97	67,70	68,10	68,90	69,20	69,80	69,80		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
15.	Kehutanan													
17)	Luas lahan kritis terhabilitasi	Luas lahan kritis terhabilitasi	ha	200	313	243	220	225	230	230	1.661		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
16.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
18)	Rasio penduduk ber-KTP	Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah mencetak KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100	%	85,4	89,68	90	92	95	98	98	98		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
19)	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	Jumlah anak (0-18 tahun) berakte kelahiran dibagi Jumlah anak (0-18 tahun) dikali 100	%	64	75	76	77	79	80	82	82		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
17.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
20)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	NA	NA	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD						Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020
18.	Perhubungan																	
21)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	92,86	100,00	100,00	100	Dinas Perhubungan					
22)	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan					
23)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	58,82	58,82	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan					
24)	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	44,44	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan					
19.	Komunikasi dan Informatika																	
25)	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Skala nilai 0-100	59,5	59,5	62	63,5	65	65	67,5	67,5	67,5	Dinas Komunikasi dan Informatika					
26)	Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	Dinas Komunikasi dan Informatika					

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
20.	Statistik												
27)	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral Provinsi Kepri	Jumlah data/statistik sektoral Provinsi Kepri yang disusun dibagi jumlah sektor dikali 100	%	0	0	0	20	25	30	35	35	35	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian												
28)	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100	%	NA	NA	10	20	30	40	50	50	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Koperasi dan UKM												
29)	Persentase KSP/USP sehat	Jumlah KSP/USP sehat dibagi jumlah KSP/USP dikali 100	%	7,6	7,6	15,3	23	30,6	38,3	45,9	45,9	45,9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
30)	Persentase UKM yang naik kelas/aktif	Jumlah UKM yang naik kelas/aktif dibagi jumlah UKM dikali 100	%	0	0,21	0,27	0,34	0,48	0,62	0,75	0,75	0,75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23.	Penanaman Modal												
31)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	45.608	45.608	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
32)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492.5	500	600	700	800	900	3.993	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	Kepercayaan dan olah raga												
33)	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Penghargaan	6	5	15	5	17	18	19	74	Dinas Kepercayaan dan olah raga	
25.	Kebudayaan												
34)	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	0	3,80	6,02	16,54	32,33	53,39	74,44	74,44	Dinas Kebudayaan	
35)	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	14,97	18,53	19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	22,38	Dinas Kebudayaan	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD						Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020
26.	Perpustakaan																	
36)	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	(Jumlah Pengunjung Perpustakaan Yang tahun sekarang dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015) dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 dikali 100	%	63.200 pengunjung 9	20,25	21,84	25,00	26,58	29,75	32,91	32,91							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Kearsipan																	
37)	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	(Jumlah arsip tahun sekarang dikurangi jumlah arsip tahun 2015) dibagi jumlah arsip tahun 2015 dikali 100	%	10.439 arsip	0,22	0,70	1,18	1,66	2,14	2,62	2,62							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	Kelautan dan Perikanan																	
38)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.412,66	303.411,28	304.019,32	304.628,57	305.239,05	305.850,75	306.463,67	306.463,67							Dinas Kelautan dan Perikanan
39)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515,48	33.582,65	33.649,95	33.717,38	33.785,95	33.852,66	33.920,50	33.920,50							Dinas Kelautan dan Perikanan
40)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.315,67	1.318,30	1.320,94	1.323,58	1.326,23	1.328,88	1.331,54	1.331,54							Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja RPJMD							Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah		
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
29.	Pariwisata													
41)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,03	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,5		Dinas Pariwisata	
30.	Energi dan Sumber Daya Mineral													
42)	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	83,72	89,14	89,15	90,50	91,50	92,50	93,50	93,50		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
31.	Perdagangan													
43)	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.112,40	1.185,67	1.258,94	1.332,21	1.405,48	1.478,75	1.550,20	1.550,20		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
44)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,03	8,11	8,19	8,27	8,35	8,44	8,52	8,52		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
32.	Perindustrian													
45)	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.251	1.276	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
33.	Perencanaan Pembangunan													
46)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	Jumlah program dalam RKPd yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program dalam RKPd dikali 100	%	NA	92	92	92	92	93	93	93	93		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
47)	Persentase Perencanaan yang Partisipatif	Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPd dibagi Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang dikali 100	%	NA	≥36	≥36	≥37	≥37	≥38	≥38	≥38	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
48)	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang tersedia dibagi Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang seharusnya tersedia	%	NA	75	75	75	76	76	76	76	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
34.	Penelitian dan Pengembangan												
49)	Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang terimplementasikan dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah hasil kelitbangan dikali 100	%	NA	20	20	21	21	22	22	22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
35.	Keuangan												
50)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,013	1,079	1,104	1,169	1,258	1,374	1,527	1,527	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi	
51)	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah	

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD							Target Kinerja Program							Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
36.	Sekretariat DPRD																		
52)	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	%	-	60	62	64	66	68	70	70	70	70	70	70	70	70	70	Sekretariat DPRD
37.	Kepegawaian																		
53)	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan TPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	NA	NA	70	72	75	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
38.	Sekretariat Daerah																		
54)	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	N/A	N/A	N/A	25	50	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
55)	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
56)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Biro Organisasi dan Korpri
57)	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	41,15	60	63	67	70	72	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Biro Organisasi dan Korpri

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
39.	Pengawasan													
58)	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Inspektorat, Barentlitbang, Biro Organisasi dan Korpri
59)	Level Kapabilitas APiP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APiP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
60)	Level Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau	Level Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
C	Aspek Daya Saing													
61)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	NA-	81	81	84	86	88	90	90	90	90	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2016-2021. RPJMD memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu diatur pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

9.1. Pedoman Transisi

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2016-2021 berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2021. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur Kepulauan Riau berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD;
- c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada perubahan RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- d. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota harus memperhatikan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.